

**BUNGA RAMPAI**

Karya Tulis Seperempat Abad  
Program Doktor Ekonomi Unhas



# PROBLEMATIKA EKONOMI DAN PANDEMI COVID-19

“PROBLEMATIKA EKONOMI DAN PANDEMI COVID-19”

# **PROBLEMATIKA EKONOMI DAN PANDEMI COVID-19**

**Anas Iswanto Anwar (Editor)**

**BUNGA RAMPAI  
KARYA TULIS SEPEREMPAT ABAD  
PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI FEB-UNHAS**

**PENERBIT**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI FEB-UNHAS**

**2020**

## **Problematika Ekonomi dan Pandemi Covid-19**

Tim Editor : Anas Iswanto Anwar

Muh. Akil Rahman

Saor Hutabarat

Mukhtar Galib

Mustakim Muchlis

xiv + 169 hlm.; 15,5 × 23 cm

ISBN : 978-623-95416-0-6

Sanksi Pelanggaran Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Penerbit : Program Doktor Ilmu Ekonomi-FEB Unhas

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, makassar 90245 Sul-

Sel Telepon / Fax. (0411) 587-218

Website: [www.feb.unhas.ac.id](http://www.feb.unhas.ac.id)

Email: psdiefebunhas@gmail.com

Cetakan pertama, November 2020

# Kata Pengantar

Puja dan juga puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan semua nikmatnya sehingga kami berhasil menyelesaikan buku yang berjudul “Problematika Ekonomi dan *Covid-19*” ini dengan tepat waktu tanpa adanya kendala yang berarti.

Penulisan buku ini berawal dari keinginan kami, khususnya Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin untuk berbuat “sesuatu” pada perayaan Seperempat Abad Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (10 Oktober 1995 – 10 Oktober 2020), sehingga terbersitlah keinginan untuk membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam bentuk Buku sebagai sumbangsih pemikiran Mahasiswa dan Alumni Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020 ini, *Covid-19* menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization (WHO)* pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster *pneumonia* dengan *etiologi* yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China.

Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab *Covid-19* pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi *Covid-19* di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi *Covid-19*. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.

Hal inilah yang akhirnya kami memilih topik pembahasan pada buku ini tentang problematika ekonomi dihadapkan dengan *pandemic Covid-19* dengan harapan sumbangan pemikiran mahasiswa dan alumni Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini dapat memberikan solusi jalan keluar sehingga masalah *pandemic Covid-19* ini dapat segera berakhir dan Perekonomian Indonesia Kembali dapat berjalan normal.

Keberhasilan penyusunan buku ini tentunya bukan atas usaha penulis saja namun ada banyak pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan untuk suksesnya penulisan buku ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril ataupun material sehingga buku ini berhasil disusun.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini tentu tidak luput dari kekurangan. Selalu ada celah untuk perbaikan. Sehingga, kritik, saran serta masukan dari pembaca sangat kami harapkan dan kami sangat terbuka untuk itu supaya buku ini semakin sempurna dan lengkap.

Makassar, 10 Oktober 2020

Editor

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	v
Sambutan Rektor Universitas Hasanuddin .....	vii
Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin .....	viii
Pendahuluan .....	ix
<b>BAGIAN I. EKONOMI PEMBANGUNAN .....</b>	<b>1</b>
<b><i>Overview</i> Skenario Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional: Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal .....</b>	<b>2</b>
Harry Yulianto	
<b><i>Next Normal</i> Ekonomi Indonesia .....</b>	<b>10</b>
Sawidji Widodoatmodjo	
<b>Kebijakan Keuangan Negara dalam Perekonomian Nasional dan Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 .....</b>	<b>18</b>
Saor Silitonga	
<b>Sinergitas Pusat-Daerah Untuk Penguatan Ekonomi Domestik .....</b>	<b>25</b>
Anas Iswanto Anwar	
<b>Pergeseran Struktur Ekonomi Indonesia: Analisa dan Antisipasi di Masa Pandemi .....</b>	<b>29</b>
Nur Imam Saifuloh	
<b>Peran Sektor Telekomunikasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi .....</b>	<b>36</b>
Syaiful	
<b>Peran Akuntan Pemerintah Pasca Pandemi Covid-19 Menuju Pemulihan Ekonomi Nasional .....</b>	<b>41</b>
Arni Karina	
<b>BAGIAN II. LEMBAGA KEUANGAN .....</b>	<b>46</b>
<b>Perbankan di Tengah Disrupsi Teknologi dan <i>Pandemic Covid-19</i> .....</b>	<b>47</b>
Dian Anggraeni	
<b>Graduasi Penanganan Risiko Perbankan; Implikasi Krisis Covid-19 .....</b>	<b>52</b>
N. Ikawidjaja	
<b>Pandemi Covid-19 &amp; <i>Financial Distress</i> .....</b>	<b>57</b>
Muhani	
<b>Peran Bank Syariah Sebagai Penopang Ekonomi di Masa <i>New Normal</i> ....</b>	<b>61</b>
Mustakim Muchlis	
<b>Penguatan Layanan <i>E-Banking</i> di Indonesia .....</b>	<b>68</b>
Rony	

<b>NEW NORMAL INTERNAL AUDIT .....</b>	<b>71</b>
Andry	
<b>BAGIAN III. DUNIA USAHA (UMKM) .....</b>	<b>75</b>
<b>Efek bagi Pelaku UMKM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 .....</b>	<b>76</b>
Indraswati Tri Abdi Reviane	
<b>Isomorfisma: Pergerakan Milenial Memutus Rantai Krisis di</b>	
<b>Masa Pandemi .....</b>	<b>83</b>
Riza Pradita	
<b>Strategi Untuk Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19</b>	
<b>terhadap Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia .....</b>	<b>89</b>
Dipa Teruna Awaloedin & Tri Waluyo	
<b>Strategi Pemasaran bagi UMKM Terdampak Covid-19 .....</b>	<b>97</b>
Hapsawati Taan	
<b>Digital Marketing: Sebuah Solusi di Tengah Pandemi .....</b>	<b>105</b>
Johannes Baptista Halik	
<b>Strategi UMKM Daerah Dalam Menghadapi Covid-19 .....</b>	<b>112</b>
Murtiadi Awaluddin	
<b>BAGIAN IV. KETENAGAKERJAAN, KETAHANAN PANGAN &amp;</b>	
<b>SOSIAL EKONOMI .....</b>	<b>117</b>
<b>Covid-19 dan Bonus Demografi di Indonesia .....</b>	<b>118</b>
Muh. Akil Rahman	
<b>Corporate Social Responsibility (CSR) Sang Penyelamat PHK</b>	
<b>Pada Masa Covid-19 .....</b>	<b>124</b>
Mukhtar Galib	
<b>Kesiapan Daerah Terhadap Ketahanan Pangan Lokal .....</b>	<b>130</b>
D. William G. M. Louhenapessy	
<b>Peran Kepala Daerah Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah .....</b>	<b>135</b>
Andi Heny Mulawati Nurdin	
<b>Pandemi Covid-19 dan Kerentanan Sosial Ekonomi Masyarakat .....</b>	<b>141</b>
Irawan Itta	
<b>Imbas Sosial Covid-19 .....</b>	<b>152</b>
Syamsul Bakhtiar Ass	
<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>161</b>

## Sambutan

### Rektor Universitas Hasanuddin



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kami menyambut baik penerbitan Buku Bunga Rampai “Problematika Ekonomi dan Pandemi *Covid-19*” ini dalam rangka Hari Ulang Tahun yang ke-25 Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam situasi Pandemi *Covid-19*, Unhas harus makin membuktikan kapasitas sumber daya yang dimiliki dengan melahirkan karya-karya akademik yang bermanfaat. Berbagai pemikiran yang disampaikan pada buku ini adalah bukti nyata dari kemampuan akademik baik itu mahasiswa maupun alumni Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan Selamat kepada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang telah berusia seperempat abad. Usia 25 tahun adalah tahun penting dan bersejarah, yaitu usia matang dan kritikal bagi sebuah program studi. Kita tiba di sebuah zaman yang telah berubah. Zaman yang telah memindahkan pandangan dunia lama ke pandangan dunia baru. Kita memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan ciri-ciri serba internet (*internet of things*), keterhubungan, jaringan, *artificial intelligence*, kecepatan, serba digital, dan matinya tren (*trend break*) yang terjadi dengan cepatnya. Semua itu, menuntut inovasi-inovasi yang berkelanjutan. Juga menuntut kerja sama seluas-luasnya dengan jaringan dunia agar Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi tetap *survive* dan tidak memfosil atau menjadi fosil yang terlupakan oleh sejarah.

Selamat 25 Tahun Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Wassalam

Makassar, 10 Oktober 2020

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.  
Rektor

# Sambutan

## Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Buku Bunga Rampai 25 Tahun Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini adalah karya intelektual kepada masyarakat dalam menghadapi masa pandemic *Covid-19* dan juga masa *new normal life*.

Pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2020, Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin yang kita cintai ini telah memasuki usia yang ke-25 tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 dengan tujuan yang mulia dari yaitu untuk memperluas kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan tinggi dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Seperempat abad atau 25 tahun bukanlah hanya waktu kronologis tanpa makna, tapi juga merupakan waktu historis yang di dalamnya ada proses perjuangan, pengabdian, dan kontribusi Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin kepada bangsa dan negara dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Seperti usia biologis sebuah generasi, usia 25 tahun adalah usia penuh mimpi dan karya yang siap menghadapi tantangan-tantangan, menjemput, dan menciptakan peluang-peluang yang tersedia di masa depan. Oleh karena itu, perjalanan sejarah seperempat abad Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin layak disegarkan kembali agar kontribusi, peran, dan pengabdianya dapat diteruskan dan ditingkatkan lagi.

Akhirnya pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Tim Editor, Penulis, serta semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Makassar, 10 Oktober 2020

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM.  
Dekan

# Pendahuluan

Pandemi *Covid-19* merupakan permasalahan kesehatan *extraordinary* yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran *Covid-19* yang sangat cepat dan meluas lintas negara berdampak terhadap seluruh sendi kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk perekonomian. Sebagian besar negara di dunia sudah masuk kedalam fase resesi ekonomi sebagai akibat dampak pandemi *Covid-19*, baik negara maju maupun negara berkembang.

*Covid-19* telah menjadi pandemi di Indonesia sejak awal Maret 2020. Hingga saat buku ini diterbitkan (oktober 2020), belum ada kepastian kapan pandemi akan berakhir. Fakta saat ini adalah perekonomian Indonesia sedang di ambang resesi. Kondisi ini terjadi karena permintaan dan penawaran yang tidak berjalan normal dikarenakan pembatasan aktivitas untuk mengendalikan penyebaran *Covid-19*.

Belum adanya obat serta vaksin untuk menangani pandemi *Covid-19*, pemerintah harus melakukan upaya *extraordinary*, diantaranya berupa kebijakan pembatasan mobilitas orang dan barang. Upaya tersebut berdampak terhadap perekonomian Indonesia, sehingga mengalami kontraksi. Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat *uncertainty*, sehingga menjadi *disinsentive* bagi pelaku usaha untuk berinvestasi.

Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran dan berdampak bagi keberlanjutan usaha, khususnya pada sektor yang terdampak langsung. Sebagai akibat konsekuensi pembatasan mobilitas manusia, maka sejumlah pelaku usaha harus mengurangi biaya operasional karena pendapatannya yang menurun secara signifikan, dimana salah satu opsi yang dilakukan dengan melakukan PHK. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran serta berkurangnya penghasilan masyarakat, sehingga menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan bertambahnya jumlah orang miskin, kemudian meningkatnya kesenjangan sosial.

Kami memberikan kebebasan kepada para penulis untuk menulis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Kami menerima tulisan dengan beragam topik bahasan dari mahasiswa dan alumni Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Tulisan-tulisan tersebut dikelompokkan berdasarkan kedekatan bahasannya menjadi empat bagian. Bagian pertama – tentang ekonomi pembangunan yang terdiri dari tujuh tulisan yang ditulis oleh Harry Yulianto, Sawidji Widoatmodjo, Saor Silitonga, Anas Iswanto Anwar, Nur Imam Saifuloh, Syaiful dan Arni Karina. Bagian kedua – Lembaga keuangan yang terdiri dari enam tulisan oleh Dian Anggraeni, N. Ikawidjaja, Muhani, Mustakim Muchlis, Rony, dan Andry. Bagian ketiga – Dunia usaha yang ditulis oleh enam penulis, yaitu Indraswati Tri Abdi Reviane, Riza Pradita, Dipa Teruna Awaloedin & Tri Waluyo, Hapsawati Taan, Johannes

Baptista Halik, dan Murtiadi Awaluddin. Terakhir bagian keempat– Ketenagakerjaan, Ketahanan pangan & Sosial ekonomi, terdiri dari enam tulisan oleh Muh. Akil Rahman, Mukhtar Galib, D. William G M. Louhenapessy, Andi Heny Mulawati Nurdin, Irawan Itta, dan Syamsul Bakhtiar Ass.

## **Bagian pertama – Ekonomi Pembangunan**

Bagian pertama diawali dengan tulisan dari Harry Yulianto berjudul “*Overview Skenario Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional: Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal*”. Tulisan ini membahas tentang pilihan skenario kebijakan pemerintah pada fase pemulihan ekonomi yaitu dengan menggunakan pendekatan *countercyclical*. Pada masa ini, skenario kebijakan dimaksudkan untuk menjaga kestabilan ekonomi yang mengalami stagnasi dan kontraksi. Sedangkan, pada masa *new normal*, skenario kebijakan ditujukan untuk akselerasi pemulihan sosial-ekonomi serta menciptakan *rebound* untuk memperbaiki indikator kesejahteraan.

Tulisan kedua oleh Sawidji Widoatmodjo dengan judul “*Next Normal: Ekonomi Indonesia*”, dengan wajah baru next normal ekonomi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dengan pilihan pada agro bisnis dan agro industry yang fokus pada pasar dalam negeri yang selanjutnya bergerak kepada menjadi lumbung pangan dunia. Pilihan industri lainnya yang memenuhi strategi yang didukung oleh keunggulan komparatif adalah industri energi, pariwisata, dan seni budaya.

Tulisan ketiga disiapkan oleh Saor Silitonga “*Kebijakan Keuangan Negara Dalam Perekonomian Nasional dan Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19*”. Tulisan ini menunjukkan bahwa kondisi sekarang ini adalah ujian sejarah yang menghantar kita pada pemahaman cara baru mengelola anggaran khususnya menjaga momentum untuk segera bergegas menempatkan keuangan negara sebagai sistem yang penting dalam menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya tulisan keempat oleh Anas Iswanto Anwar berjudul “*Sinergitas Pusat-Daerah Untuk Penguatan Ekonomi Domestik*”, yang membahas hal-hal yang harus diperhatikan dalam masa *pandemic Covid-19* ini khususnya sinergitas antara pusat dan daerah serta semua pihak terkait, harus sungguh-sungguh dan cerdas menangkap tantangan sekaligus peluang yang kita miliki. Dengan prioritas untuk kesejahteraan rakyat, maka semuanya harus difokuskan pada penajaman target dan sinergi antara pusat dan daerah di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan,

Tulisan kelima oleh Nur Imam Saifuloh dengan tulisan “*Pergeseran Struktur Ekonomi Indonesia: Analisa dan Antisipasi Pada Masa Pandemi*”. Tulisan ini membahas tentang Pertumbuhan ekonomi yang menurun mengindikasikan bahwa akan terjadi fenomena baru dalam perekonomian, khususnya perubahan struktur ekonomi dan masalah ketenagakerjaan. Sektor

lapangan usaha yang perlu diwaspadai peralihannya adalah kelompok sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan kelompok sektor informasi dan komunikasi.

Tulisan terakhir dari bagian pertama ini ditulis oleh Syaiful yang berjudul “Peran Sektor Telekomunikasi Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi”. Tulisan ini menunjukkan perkembangan yang pesat pada ekonomi digital Indonesia yang berkontribusi cukup besar pada total PDB dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Untuk itu dalam upaya mengoptimalkan ekonomi nasional di tengah pandemik *Covid-19* ini setidaknya perlu perhatian khusus terkait dengan transformasi digital Indonesia, yaitu: perkembangan dan potensi ekonomi digital, pembangunan infrastruktur, dan ekosistem pembangunan digital.

## **Bagian kedua – Lembaga Keuangan**

Tulisan pertama pada bagian ini oleh Dian Anggraeni dengan judul “Perbankan di Tengah Disrupsi Teknologi dan *Pandemic Covid-19*”, tulisan ini membahas bagaimana perbankan dapat mempertahankan pangsa pasar dalam mengembangkan bisnisnya. Dengan demikian bank perlu mempelajari apa yang menjadi kebutuhan dan ekspektasi nasabah, dimana dalam kondisi kehidupan yang semakin sulit dan kompleks, maka bank perlu menyediakan *support* layanan keuangan yang mudah, murah, praktis, aman dan cepat.

Selanjutnya tulisan tentang “Graduasi Penanganan Risiko Perbankan; Implikasi Krisis *Covid-19*” oleh N. Ikawidjaja. Tulisan ini membahas masalah graduasi risiko perbankan nasional implikasi dari krisis *Covid-19* bergerak simultan dengan tiga risiko kebijakan, yaitu: a) risiko inheren bank keterkaitan pada risiko kredit terhadap risiko lainnya; b) ketentuan penerapan PSAK 71 instrumen keuangan dan c) ketentuan konsolidasi bank umum dalam pemenuhan modal inti minimum. Perbankan nasional harus memperkuat penguatan pengukuran risiko disebabkan implikasi krisis *Covid-19* dengan pendekatan *forecasting* untuk menjamin terhindar dari faktor *illiquidity* dan *insolvency*, fluktuasi instrumen keuangan yang tajam dan pemenuhan modal inti minimum.

Tulisan ketiga ditulis oleh: Muhani dengan judul “Pandemi *Covid-19* dan *Financial Distress*”. Beratnya dampak *Covid-19* terhadap kondisi keuangan perusahaan yang berada pada posisi *grey area* dan *distress*, melakukan evaluasi dan analisis pada faktor-faktor yang memengaruhi kinerja perusahaan, sehingga dapat meminimalkan kesulitan keuangan yang akan dapat berdampak pada kebangkrutan perusahaan. Perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai pengelolaan keuangan untuk menjalankan usahanya perlu memperhatikan likuiditas perusahaan, proporsi hutang dan efisiensi penggunaan modal kerja.

Kemudian “Peran Bank Syariah Sebagai Penopang Ekonomi di Masa *New Normal*”, ditulis oleh: Mustakim Muchlis yang berisi tentang bagaimana peran Bank syariah sebagai lembaga

intermediasi yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip Islam diharapkan dapat menjadi penopang ekonomi di masa new normal dengan memberikan kontribusi pada aspek ekonomi dan sosial melalui akad *tabarru* dan *tijarah* yang ditawarkan. Pemerintah dalam hal ini regulator memberikan payung hukum dalam aspek teknis pelaksanaan kegiatan bank yang sesuai Syariat Islam

Selanjutnya Rony dengan judul: “Penguatan Layanan *E-Banking* di Indonesia”. Pada tulisan ini mengeksplorasi aspek-aspek penguatan layanan *e-banking*, antara lain: keamanan, kemudahan, kecepatan, keandalan, kualitas informasi, dan keterampilan serta kompetensi karyawan bank dalam layanan *e-banking*. Parameter-parameter penguatan layanan *e-banking* ini yang seharusnya terus menerus ditingkatkan dan selalu memperoleh input dari nasabah untuk perbaikan atau peningkatan layanan *e-banking* bank yang lebih baik lagi.

Tulisan dari Andry yang berjudul “*New Normal Internal Audit*” sebagai tulisan terakhir pada bagian kedua ini menjelaskan bahwa kondisi Pandemi *Covid-19* memberikan kesempatan bagi audit internal untuk menampilkan keterampilan dan perspektif uniknya, serta membentuk kembali pandangan tentang nilainya kepada manajemen dan organisasi. Auditor internal dapat menjadi juara manajemen krisis dan harus menahan diri dari mengatakan mereka tidak dapat melakukan sesuatu karena dapat menimbulkan konflik kepentingan.

### **Bagian ketiga – Dunia Usaha (UMKM)**

Bagian ketiga ini diawali dengan tulisan dari Indraswati Tri Abdi Reviane berjudul “*Overview Efek bagi Pelaku UMKM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*”. Tulisan ini membahas tentang perlunya dukungan pemerintah kepada UMKM yang mana diharapkan dapat dilakukan melalui penempatan dana pemerintah di perbankan, sehingga sektor ini memiliki cukup likuiditas. Demikian pula dengan perlunya bantuan untuk UMKM ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa persyaratan bagi nasabah UMKM yang dibantu, seperti: bereputasi baik, taat membayar pajak, dan tidak/minimum melakukan PHK.

Tulisan kedua oleh Riza Pradita yang berjudul “*Isomorfisma: Pergerakan Milenial Memutus Rantai Krisis di Masa Pandemi*” mengemukakan tentang perilaku *Isomorfisma* atau tindakan meniru, dimana perilaku meniru tindakan ataupun kegiatan finansial generasi milenial yang menguntungkan merupakan suatu hal yang dapat berdampak positif baik bagi diri pribadi maupun negara dalam hal perbaikan perekonomian. Kesuksesan generasi milenial sebagai *creativepreneur* maupun sebagai investor muda dapat dijadikan *role model* guna memotivasi orang lain dalam bertindak kreatif dan inovatif dalam mencari sumber keuntungan.

Tulisan ketiga dengan judul “Strategi Untuk Menghadapi Dampak Pandemi *Covid-19* terhadap Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia” oleh Dipa Teruna Awaloedin & Tri Waluyo. Tulisan

ini memberikan pemikiran bagaimana meminimalisir dampak *Covid-19* bagi pelaku UMKM. Selain bantuan dari pemerintah, maka dengan penggunaan teknologi yang baik dan benar akan menjadi solusi terbaik untuk membantu roda perekonomian UMKM tetap berjalan. Selain bantuan modal, pemasaran melalui media sosial dan automasi pembukuan akan memudahkan UMKM untuk menyusun strategi yang sekiranya tepat guna kelangsungan usaha saat ini dan ke depannya.

Selanjutnya, tulisan keempat ditulis oleh Hapsawati Taan dengan judul: “Strategi Pemasaran bagi UMKM Terdampak *Covid-19*”. Pentingnya pelaku UMKM memanfaatkan teknologi/pemasaran *online* dengan optimal serta media sosial sebagai saluran (*channel*) utama pemasaran. Selain itu memanfaatkan transaksi jual beli melalui pemasaran secara *online*. Untuk menanggapi persaingan bisnis aplikasi *e-commerce* yang semakin kompetitif, ditengah merebaknya virus *Covid-19* strategi komunikasi merupakan salah satu yang perlu diperhatikan.

Tulisan berjudul “*Digital Marketing: Sebuah Solusi di Tengah Pandemi?*” dengan penulis Johannes Baptista Halik, adalah tulisan ke lima dari bagian ini. Tulisan ini menganalisis bagaimana sebaiknya perusahaan-perusahaan yang ingin bertahan harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di dalam masyarakat di era pandemi ini. Untuk menyusun kebijakan-kebijakan strategisnya, maka perusahaan memerlukan fleksibilitas dan mampu untuk menjadi responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan dari konsumennya pada saat ini.

Tulisan keenam “Strategi UMKM Daerah Dalam Menghadapi *Covid-19*” dengan penulis Murtiadi Awaluddin. Tulisan ini menjelaskan bagaimana UMKM merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi dampak pandemi *Covid-19* perlu dilakukan *screening* mendalam, dikarenakan UMKM secara karakteristik adalah *heterogen*. Jika ditinjau dari aspek *scope* bisnisnya dapat dibagi menjadi pebisnis lokal, nasional, internasional, regional dan global. Dari skala bisnis dibagi menjadi mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan jika ditinjau dari aspek industri usahanya dibagi menjadi *extractive /upstream*, *manufacturing (midstream)* dan *service (downstream)*.

## **Bagian keempat – Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, dan Sosial Ekonomi**

Muh. Akil Rahman dengan tulisan “*Covid-19* dan Bonus Demografi di Indonesia” sebagai tulisan pertama pada bagian keempat ini, membahas penggunaan teknologi informasi menjadi alternatif dalam menggerakkan usia produktif agar tetap bisa optimal. Masyarakat perlu diedukasi untuk menjadikan sarana teknologi informasi dapat menjadi daya ungkit meningkatkan perekonomian terutama pada usia produktif. Sementara itu pada saat yang bersamaan, dana penanganan pandemi *Covid-19* yang ditujukan untuk jaring pengaman sosial dipastikan dapat menjangkau seluruh warga yang terdampak, tersalurkan secara baik, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya dengan judul tulisan “*Corporate Social Responsibility (CSR) Sang Penyelamat PHK Pada Masa Covid-19*” oleh Mukhtar Galib. Tulisan ini menjelaskan bagaimana keterlibatan semua pihak harus bersinergi dalam mengatasi masalah pandemi *Covid-19*. Kerjasama pemerintah dan swasta (khususnya penggunaan dana CSR) harus terus ditingkatkan. Kebijakan dari pemerintah harus saling melengkapi baik di pusat maupun di daerah. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama akan keberhasilan dalam mengatasi Pandemi *Covid-19*.

Tulisan dengan judul “Kesiapan Daerah Terhadap Ketahanan Pangan Lokal” ditulis oleh D. William G. M. Louhenapessy menjadi tulisan selanjutnya pada bagian ini. Tulisan ini mengemukakan tentang ketergantungan konsumsi masyarakat Indonesia pada beras harus segera diatasi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Oleh karena itu, sumber pangan alternatif, dalam hal ini pangan lokal dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan pangan Indonesia yang memiliki keragaman jenis pangan seperti sagu, jagung dan berbagai jenis umbi-umbian lainnya yang dapat menjadi sumber bahan makanan bagi masyarakat.

Kemudian oleh Andi Heny Mulawati Nurdin dengan judul “Peran Kepala Daerah Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah”. Tulisan ini membahas pentingnya dalam menghadapi krisis yang disebabkan pandemi *Covid-19* para pemimpin daerah harus mengambil tindakan cepat dan tegas berdasarkan data yang tersedia dan akurat. Dalam merespon kondisi tersebut para pemimpin harus berkomunikasi dengan jelas, konsisten, dan terus-menerus, karena masyarakat akan lebih kooperatif ketika mengerti dan memahami tentang pentingnya peningkatan ketahanan pangan di daerah.

“Pandemi *Covid-19* dan Kerentanan Sosial Ekonomi Masyarakat” yang ditulis oleh Irawan Itta sebagai tulisan berikutnya yang membahas dampak terhadap berbagai sektor perekonomian dan sosial di Indonesia. Berkurangnya aktivitas, bahkan ditutupnya beberapa tempat rekreasi telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Bermula mulai dari maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau merumahkan pekerja untuk sementara waktu, hingga meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak selama pandemi *Covid-19* adalah sebuah kenyataan betapa telah terjadi kerawanan sosial di masyarakat.

Tulisan terakhir dari bagian ini ditulis oleh Syamsul Bakhtiar Ass berjudul “Imbas Sosial *Covid-19*”. Tulisan ini membahas tentang dampak dari pandemi *Covid-19* yang akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga, dimana kesejahteraan keluarga merupakan suatu kondisi dinamis dimana terpenuhi semua kebutuhan yaitu fisik materil, mental spiritual serta sosial yang memungkinkan seorang anak untuk tumbuh berkembang dalam membentuk sikap mental serta kepribadian sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

# Bagian 1

## EKONOMI PEMBANGUNAN

# **OVERVIEW SKENARIO KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL: MASA PANDEMI *COVID-19* DAN *NEW NORMAL***

**Harry Yulianto**

## **Pendahuluan**

Pandemi *Covid-19* merupakan permasalahan kesehatan extraordinary yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran *Covid-19* yang sangat cepat dan meluas lintas negara berdampak terhadap seluruh sendi kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk perekonomian. Sebagian besar negara di dunia sudah masuk kedalam fase resesi ekonomi sebagai akibat dampak pandemi *Covid-19*, baik negara maju maupun negara berkembang. Resesi merupakan kondisi pertumbuhan ekonomi dalam dua kuartal secara berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif, atau dengan kata lain adanya penurunan *Product Domestic Bruto* (PDB) yang terjadi selama dua kuartal secara berurutan. Resesi terjadi karena adanya penurunan secara signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama beberapa bulan atau bahkan tahunan, dimana pada kondisi saat ini disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19*.

Apabila resesi tidak mendapatkan penanganan yang serius dan responsif dari pemerintah, tentunya akan berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi serta multiplier effect pada semua aktivitas ekonomi dalam jangka panjang. Resesi yang tidak diantisipasi melalui skenario kebijakan pemerintah, dapat menyebabkan perekonomian negara masuk kedalam fase depresi, yang membutuhkan waktu lama dan anggaran besar untuk memulihkan kondisi perekonomian negara yang kolaps. Tujuan penulisan paper ini untuk memberikan *overview* skenario kebijakan pemulihan ekonomi nasional, baik di masa pandemi *Covid-19* maupun masa *new normal*. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang berasal dari sumber informasi resmi maupun publikasi ilmiah. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang bersumber dari berbagai referensi dan literatur yang sesuai dengan tema paper. Teknik analisis menggunakan pendekatan *deskriptif kuantitatif*, yaitu mendeskripsikan atau menarasikan data berupa angka-angka sesuai dengan dasar teori yang relevan (Yulianto, 2016).

## **Kebijakan Pemerintah**

Penyebaran penyakit *Covid-19* ke berbagai belahan penjuru dunia telah meluluhlantakkan sendi perekonomian semua negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan *Covid-19* (2020) yang update pada tanggal 20/9/2020 menunjukkan bahwa jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 244.676 kasus (bertambah 3.989 kasus), jumlah kasus aktif sebanyak 57.796 kasus (23,6% dari terkonfirmasi), jumlah yang sembuh sebanyak 177.327 kasus (72,5% dari terkonfirmasi), dan jumlah meninggal sebanyak 9.553 kasus (3,9% dari terkonfirmasi). Data WHO yang update pada 2/9/2020 menunjukkan bahwa *Covid-19* sudah menyebar ke 216 negara, dimana jumlah yang terkonfirmasi sebanyak 17.660.523 kasus, dan jumlah meninggal sebanyak 680.894 kasus.

Kasus penyebaran pandemi *Covid-19* yang belum menunjukkan penurunan secara signifikan, sehingga membuat sejumlah negara menerapkan kebijakan lockdown. Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan *Covid-19* (*social distancing*, *physical distancing*, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat/PHBS). Sejumlah kebijakan pembatasan yang dikeluarkan oleh berbagai negara tersebut dikarenakan belum ditemukannya obat serta vaksin untuk penyakit *Covid-19*, sebab masih dalam fase penelitian serta fase pengujian klinis yang membutuhkan waktu lama dan harus melalui berbagai tahapan ilmiah.

Kebijakan PSBB dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait *Covid-19*, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*, serta peraturan pelaksana melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. PSBB merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang sedang terjadi antar-orang di suatu wilayah tertentu (Hairi, 2020). Kebijakan PSBB merupakan salah satu skenario tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Skenario lainnya berupa karantina rumah, karantina wilayah, ataupun karantina Rumah Sakit.

Pemerintah menetapkan PSBB berupa “peliburan sekolah dan tempat kerja serta pembatasan kegiatan keagamaan” namun harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan (*Study From Home*), produktivitas kerja (*Work From Home*), dan ibadah penduduk (*Pray From Home*). Sedangkan, untuk PSBB berupa “pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum” harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Implikasi penerapan kebijakan PSBB yaitu pemerintah sangat selektif menetapkan PSBB di wilayah tertentu, khususnya untuk kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan PSBB berdampak pada kondisi ‘hampir’ menghentikan seluruh aspek kehidupan sehari-hari, perdagangan serta aktivitas ekonomi lainnya (Thorik, 2020). Kebijakan PSBB di satu sisi bertujuan mengurangi penyebaran *Covid-19*, namun di sisi lainnya berdampak terhadap kontraksi pertumbuhan ekonomi, baik regional maupun nasional. Perlambatan pertumbuhan ekonomi karena pembatasan mobilitas orang maupun barang/jasa, sehingga menyebabkan *multiplier effect* dari masalah kesehatan ke masalah sosial maupun ekonomi, termasuk pelaku usaha (Wuryandari, 2020).

### **Ketidakpastian Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q-1 mengalami pertumbuhan sebesar 3%, namun pada Q-2 mengalami kontraksi sebesar -5,3% (Kemenkeu, 2020). Pertumbuhan ekonomi pada Q-2 tahun 2020 terkontraksi sebagai akibat dampak kebijakan restriksi (PSBB) yang ketat dalam upaya mencegah penyebaran pandemi *Covid-19*. Pembatasan kegiatan yang dilakukan telah menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat dan menghambat aktivitas produksi serta distribusi

barang. Kegiatan ekonomi yang dibatasi, tidak hanya pada kegiatan di dalam negeri saja, namun juga kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan luar negeri (ekspor dan impor). Hal tersebut menyebabkan penurunan kinerja ekonomi yang diindikasikan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi atau bahkan terjadinya pelemahan (kontraksi) ekonomi. Penurunan kinerja ekonomi yang tidak direspon melalui kebijakan oleh pemerintah secara cepat dan cermat, maka akan mengakibatkan perekonomian negara mengalami resesi ekonomi, bahkan depresi ekonomi. Terminologi resesi dalam teori ekonomi konjungtur yakni penurunan aktivitas ekonomi yang terjadi di atas pertumbuhan yang normal (Alvin, 1951). Dari aspek makroekonomi, resesi berarti suatu periode dimana *Product Domestic Bruto* (PDB) menurun pada saat pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif.

Resesi dapat menyebabkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi, seperti: lapangan kerja, investasi, maupun keuntungan perusahaan (Sihono, 2008). Secara kualitatif hal tersebut sesuai dengan hukum permintaan (*demand side*) yang berkaitan dengan terhentinya permintaan dari sisi konsumen sebagai akibat pembatasan sosial (kebijakan *lockdown* maupun PSBB), sehingga mengurangi semua aktivitas ekonomi. Sedangkan, dari sisi penawaran (*supply side*) terjadi perlambatan produksi karena pasokan bahan baku terhambat akibat karantina wilayah. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan antara *supply and demand*, sehingga mengganggu *market equilibrium* untuk pertumbuhan ekonomi.

Konsep siklus ekonomi dalam model pertumbuhan dan resesi menurut Schumpeter (1934), ada dua fase pada model, yaitu: *above* dan *below*. Ketika implementasi sistem dan regulasi disesuaikan dengan kepercayaan konsumen yang tinggi, maka ekonomi akan mengalami pertumbuhan (*upswing phase*). Namun sebaliknya, ketika masa sulit, maka resesi ekonomi menjadi tidak dapat dihindari ketika garis mengarah turun menuju kebawah *inflection point*. Garis *equilibrium* menunjukkan periode awal dan berfungsi sebagai tolak ukur pertumbuhan dan penurunan (kontraksi) ekonomi. Pemerintah sebagai regulator akan mengalami kesulitan dalam menciptakan iklim positif untuk menstimulasi aktivitas pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Ketika kondisi semakin memburuk, maka depresi ekonomi semakin terbuka atau dapat dideskripsikan sebagai kegagalan ekonomi atau kebangkrutan ekonomi suatu negara.

Pandemi *Covid-19* menimbulkan ketidakpastian arah pertumbuhan ekonomi, baik global maupun domestik. Ketidakpastian tersebut memiliki risiko yang sangat tinggi. Namun, apabila tidak diambil kebijakan yang responsif dan cermat, maka akan berdampak pada resesi atau masuk ke fase depresi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang responsif dan upaya penanganan yang luar biasa untuk memitigasi dampak *distortif* pada aspek kesehatan, sosial, serta ekonomi. Menurut teori siklus bisnis, opsi kebijakan makroekonomi yang dapat dilakukan untuk mengatasi instabilitas ekonomi pada fase resesi yakni kebijakan *procyclical* dan kebijakan *countercyclical* (Karminsky et al., 2004). Kebijakan *procyclical* merupakan kebijakan yang mengikuti arus siklus bisnis, berarti pada saat resesi pemerintah menerapkan kebijakan

kontraksioner berupa pengetatan fiskal dan moneter. Sedangkan, kebijakan *countercyclical* merupakan kebijakan yang melawan arus siklus bisnis, yakni pada saat resesi pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter.

Pada kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami kontraksi di Q-2, kebijakan responsif yang tepat diambil oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan *countercyclical* dengan melakukan pelonggaran fiskal dan moneter untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang sudah berkontraksi sebagai akibat dampak pandemi *Covid-19*. Kebijakan *countercyclical* untuk pemulihan ekonomi nasional diterapkan melalui skenario pemulihan masa pandemi *Covid-19* dan skenario pemulihan masa new normal. Tujuan utama kebijakan tersebut yakni memacu pertumbuhan ekonomi yang mengalami stagnasi atau kontraksi.

### **Skenario Pemulihan Masa Pandemi *Covid-19***

Perekonomian Indonesia mengalami *high pressure* selama tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19*, yang diindikasikan melalui menurunnya penerimaan negara menjadi Rp 1.666,9 triliun; meningkatnya belanja negara sebesar Rp 2.739,2 triliun; meningkatnya defisit negara sebesar 6,34% (melebihi batas ketentuan 3% terhadap PDB); serta meningkatnya pembiayaan utang sebesar Rp 1.039,2 triliun. Berdasarkan data BPS (2020), hasil revisi Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,2% – 4,6% yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan perkiraan dari ADB (2,5%) dan IMF (0,5%). Hal tersebut karena adanya kebijakan pembatasan mobilitas kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan produksi dan kegiatan ekonomi lainnya yang menyebabkan terjadinya penurunan kinerja perekonomian. Skenario kebijakan *countercyclical* diambil pemerintah dalam upaya menjaga kestabilan ekonomi yang mengalami kontraksi untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi *Covid-19*. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona dalam melaksanakan program pemulihan ekonomi sebagai upaya melakukan penyelamatan ekonomi nasional. Skenario kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan PP 23/2020, yakni: Pertama, Penyertaan Modal Negara (PMN). PMN merupakan pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. PMN dilakukan untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi *Covid-19*; serta meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan

anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh Pemerintah dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat melakukan PMN kepada BUMN atau melalui BUMN yang ditunjuk. Kedua, Penempatan Dana yakni kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu. Penempatan dana ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas pada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit (pembiayaan), dan memberikan tambahan kredit (pembiaaaan) modal kerja. Penempatan dana dilakukan kepada Bank Peserta yang memiliki kriteria: a) merupakan bank umum yang berbadan hukum Indonesia, beroperasi di wilayah Indonesia, dan paling sedikit 51% saham dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia; b) merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK; serta c) termasuk dalam kategori 15 bank beraset terbesar. Ketiga, investasi pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Pelaksanaan Investasi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, penjaminan yaitu kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin pada penerima jaminan. Pemerintah dapat melakukan penjaminan secara langsung maupun melalui Badan Usaha yang ditunjuk. Badan Usaha yang ditunjuk tersebut yakni: PT. Jaminan Kredit Indonesia serta PT. Asuransi Kredit Indonesia.

Untuk melaksanakan skenario kebijakan tersebut, pemerintah dapat membiayai pelaksanaannya dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana. Hasil penerbitan SBN disimpan dalam suatu rekening khusus di Bank Indonesia. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara (fiskal) yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Covid-19* serta untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 3. Skenario kebijakan dalam melaksanakan pemulihan ekonomi nasional menggunakan pendekatan *countercyclical*. Kebijakan *countercyclical* cenderung untuk menstabilkan siklus bisnis, karena fiskal kontraktif pada saat ekspansi dan ekspansif ketika terjadinya kontraksi. Kebijakan yang berkarakter *countercyclical* sangat berpotensi memperpendek fase resesi dan mempercepat proses *recovery* (Francais et al., 2014).

### **Skenario Pemulihan Masa New Normal**

Belum adanya obat serta vaksin untuk menangani pandemi *Covid-19*, pemerintah harus melakukan upaya *extraordinary*, diantaranya berupa kebijakan pembatasan mobilitas orang dan barang. Upaya tersebut berdampak terhadap perekonomian Indonesia, sehingga mengalami kontraksi. Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat *uncertainty*, sehingga menjadi disinsentive bagi pelaku usaha untuk berinvestasi. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran dan berdampak bagi keberlanjutan usaha, khususnya pada sektor yang terdampak

langsung. Pandemi *Covid-19* menyebabkan *heavily pressured*, baik dari sisi permintaan dan penawaran. Hal tersebut menciptakan *vicious circle* yang berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebagai akibat konsekuensi pembatasan mobilitas manusia, maka sejumlah pelaku usaha harus mengurangi biaya operasional karena pendapatannya yang menurun secara signifikan, dimana salah satu opsi yang dilakukan dengan melakukan PHK. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran serta berkurangnya penghasilan masyarakat, sehingga menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan bertambahnya jumlah orang miskin, kemudian meningkatnya kesenjangan sosial. Perubahan tersebut berdampak pada kualitas hidup masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap menurunnya Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam upaya merespon pandemi *Covid-19*, pemerintah telah mengambil kebijakan melalui UU 2/2020 berupa pendekatan countercyclical untuk mempercepat penanganan *Covid-19*, serta akselerasi pemulihan sosial-ekonomi. Pemulihan ekonomi diprediksi akan mulai tahun 2021, dimana faktor ketersediaan obat serta vaksin menjadi langkah dan pola pemulihan. Kebijakan stimulus untuk pemulihan ekonomi nasional diharapkan menciptakan *rebound*, sehingga dapat memperbaiki indikator kesejahteraan pada masa new normal. Skenario kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional pada masa new normal dalam kerangka makroekonomi, sebagai berikut: Pertama, pemulihan ekonomi dampak pandemi *Covid-19*, kebijakan dilakukan dengan mempercepat *recovery* dunia usaha yang terdampak pandemi *Covid-19* serta melanjutkan penanganan pemulihan kesehatan dan perlindungan sosial dampak pandemi *Covid-19*. Kedua, peningkatan daya saing ekonomi, diambil dengan meningkatkan daya saing ekonomi dengan mendorong peningkatan kapasitas inovasi dan adaptasi teknologi. Ketiga, pemanfaatan kondisi demografi merupakan kebijakan untuk meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Keempat, melanjutkan reformasi yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang. Kelima, akselerasi transformasi ekonomi dimaksudkan mempercepat transformasi industri manufaktur, serta mendorong produk manufaktur Indonesia dengan produk berteknologi tinggi. Dan, kelima, keluar dari *middle income trap*. *Middle income trap* merupakan kegagalan suatu negara untuk naik kelas dari pendapatan menengah-bawah (*lower-middle income*) ke menengah-atas (*upper-middle income*). Indonesia secara bertahap akan keluar dari *middle income trap* dengan melakukan perbaikan produktivitas, peningkatan daya saing, dan peningkatan kualitas SDM (khususnya tenaga kerja).

Pada masa *new normal*, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan kembali melanjutkan fase *recovery*. Namun, risiko *uncertainty* ekonomi global diprediksi masih menahan kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan, sebagai akibat pandemi *Covid-19* yang masih melanda sejumlah negara di dunia. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi salah satu pemicu investasi dan mendorong peningkatan kualitas SDM. Selain itu, pemerintah memiliki kesempatan melakukan efisiensi dengan pemanfaatan TIK, sehingga dapat

mengalihkan sebagian belanja konsumsi untuk mendukung jenis belanja yang produktif. Hasil penelitian Aghion et al. (2007) menunjukkan bahwa sektor industri berkembang pesat (tingkat output dan produktivitasnya) pada perekonomian dengan fiskal *countercyclical*.

### **Kesimpulan**

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional bertujuan untuk meningkatkan penanggulangan penyebaran wabah, membantu masyarakat serta dunia usaha yang terdampak agar tidak kolaps, sehingga ketika pandemi *Covid-19* berlalu, agar dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi. Skenario kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dikategorikan menjadi dua fase pemulihan ekonomi dengan menggunakan pendekatan *countercyclical*, yakni: masa pandemi *Covid-19*, dan masa *new normal*. Pada masa pandemi *Covid-19*, skenario kebijakan dimaksudkan untuk menjaga kestabilan ekonomi yang mengalami stagnasi dan kontraksi. Sedangkan, pada masa *new normal*, skenario kebijakan ditujukan untuk akselerasi pemulihan sosial-ekonomi serta menciptakan *rebound* untuk memperbaiki indikator kesejahteraan.

Berbagai skenario kebijakan yang dilakukan pemerintah pada berbagai negara (termasuk Indonesia) bukan untuk menghindari resesi, karena resesi yang melanda di tengah pandemi *Covid-19* dengan periode yang *unpredictable* merupakan sebuah keniscayaan. Namun, perekonomian tetap berkontraksi selama dua kuartal berurutan. Pemerintah sudah banyak melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional, tetapi upaya tersebut seharusnya tidak diukur dengan resesi, karena apabila terjadi resesi bukan berarti upaya optimal yang sudah dilakukan oleh pemerintah disebut gagal dan tidak berguna, namun kondisi *extraordinary* yang *unpredictable* dan *uncertainty*. Dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi (untuk jangka pendek), ekonomi bukan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan. Namun pada kondisi saat ini, nyawa manusia dan kesehatan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi, karena jika tidak mendapatkan treatment secara tepat, maka dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang ketika pandemi *Covid-19* berakhir.

### **Daftar Pustaka**

- Aghion, P., & Kharroubi, E. 2007. Cyclical Macro Policy and Industry Growth: The Effect of Counter-Cyclical Fiscal Policy. Society for Economic Dynamics. November:1-27.
- Alvin, H.H. 1951. Business Cycles and National Income. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
- BPS. 2020. Laporan Perekonomian Indonesia 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Francais, N., Jackson, L.E., & Owyang, M.T. 2014. Countercyclical Policy and the Speed of Recovery after Recessions. Working Paper 2013-032E. Federal Reserve Bank of St. Louis.
- Hairi, P.J. 2020. Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19. Info Singkat Bidang Hukum: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. 12(7): 1-6.

- Karminsky, G.L., Reinhart, C., & Vegh, C.A. 2004. When It Rains, It Pours: Proccyclical Capitals Flows and Policies. NBER Macroeconomics Annual. 19: 11-53.
- Kemenkeu. 2020. Advertorial APBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Satgas Penanganan Covid-19. 2020. Perkembangan Kasus Covid-19 di Indonesia. Diakses melalui <https://covid19.go.id/peta-sebaran> pada tanggal 20 September 2020.
- Schumpeter, J.A. 1934. The Theory of Economic Development. US: Harvard University Press.
- Sihono, T. 2008. Krisis Finansial Amerika Serikat dan Pembangunan Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. 5(2): 171-192.
- Thorik, 2020. Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Adalah: Buletin Hukum & Keadilan. 4(1): 115-120.
- Wuryandari, D. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya. Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. 12(15): 19-24.
- Yulianto, H. 2016. Statistik 1. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.

# ***NEXT NORMAL EKONOMI INDONESIA***

**Sawidji Widoatmodjo**

## **Pendahuluan**

Sebagian besar calon vaksin *Covid-19* memasuki uji klinis tahap ketiga. Diperkirakan paling cepat vaksin bisa diproduksi awal tahun depan. Sementara itu, pola perdagangan dunia cenderung mengikuti irama gendang AS (Amerika Serikat) di bawah Presiden Trump, yaitu cenderung proteksionis. Jika Trump terpilih kembali, berarti kecenderungan proteksionis itu akan terus berlanjut. Kombinasi dua “pandemi”: pandemi *Covid-19* dan *pandemic proteksionisme*, tentu akan memperdalam resesi ekonomi dunia.

Bagaimana dengan wajah ekonomi Indonesia? Apakah momen krisis pandemi kali ini bisa dimanfaatkan untuk me-make up menjadi wajah baru? Sepertinya ada celah untuk itu. Data yang ada dan fakta yang terjadi, dapat dijadikan “alat” *make up* tersebut. Data BPS (Badan Pusat Statistik, 2020) mencatat kontribusi konsumsi rumah tangga menyumbang 56,62% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) di tahun 2019. Bahkan pada triwulan I 2020 BPS melaporkan, dengan pertumbuhan ekonomi 2,97% (*year on year*), yang merupakan pertumbuhan ekonomi terendah secara tahunan sejak 2001, konsumsi rumah tangga tetap tampil sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi tersebut, dengan membukukan pertumbuhan 1,56%. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama ekonomi Singapura yang mengandalkan perdagangan internasional justru berkontraksi 0,7% (Suratman, 2020).

Data lain, dari sektor perdagangan *Unctad (United Nations Conference on Trade and Development, 2020)* melaporkan, pada triwulan I 2020 hanya dua komoditi yang mencatat pertumbuhan, yaitu peternakan dan makanan yang tumbuh 2%, serta energi yang tumbuh 5%. Dari fakta, webinar maraton dan menghadirkan semua *stake holders* (mulai dari menteri, kepala dinas, organisasi bisnis seperti KADIN dan GAPMI, akademisi hingga pebisnis) bisnis yang digelar *Learn Business Anywhere (2020)*, menyajikan cerita menarik. Sebagian besar bisnis yang mampu bertahan dari gempuran krisis pandemi *Covid-19* adalah UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) yang bergerak dalam bidang pertanian (makanan segar/buah dan sayuran) dan makanan olahan, bahkan permintaan ekspor cukup banyak.

## **Ekonomi Domestik**

Dari data perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Singapura, diperoleh informasi bahwa dalam situasi krisis ekonomi, ekonomi yang didominasi permintaan domestik lebih tahan “menderita” dibanding yang mengandalkan permintaan internasional. Tentu ini bukan berarti mengharamkan perdagangan luar negeri. Pasar luar negeri tetap perlu, namun bukan yang terpenting. Prinsipnya, Indonesia harus tetap memasarkan produk-produknya ke mitra dagang di

seluruh dunia, namun jangan sampai dampak perdagangan internasional itu membuat ekonomi Indonesia menjadi *sensitive* terhadap guncangan ekonomi dunia, seperti yang dialami Singapura sekarang.

Struktur ekonomi yang didominasi peran konsumsi domestik sudah selayakanya dipertahankan, dan menjadi arsitektur ekonomi Indonesia di masa depan. Apalagi, pengalaman menunjukkan krisis ekonomi selalu terjadi, dan semakin sering. Baik dipicu spekulasi di pasar keuangan atau datangnya pandemi, seperti *Covid-19*, maupun pandemi dari ulah politisi semacam Trump. Jumlah penduduk Indonesia yang menempati posisi keempat terbanyak di dunia makin memperkuat relevansi mengutamakan ekonomi domestik. Jangan sampai pasar yang besar itu justru menjadi incaran negara lain.

### Strategi Industri

Setelah dari data melahirkan gagasan struktur ekonomi yang lebih melayani ekonomi domestik, pertanyaannya produk apa yang bisa melayani kebutuhan konsumen domestik tersebut? Kalau hanya dibatasi atas dasar fakta di atas, yaitu dalam kondisi krisis *pandemic Covid-19* bisnis yang masih mampu bertahan adalah makanan, maka *make up* terhadap ekonomi Indonesia selanjutnya adalah pemilihan industri, yaitu fokus pada makanan. Tentu ini tidak realistis. Masih cukup banyak industri lain yang dibutuhkan konsumen dalam negeri. Bahkan, kalau mau berpikir lebih serius lagi, ada persoalan yang lebih besar dari sekedar soal pemilihan industri ini. Untuk kepentingan ini perhatian harus dicurahkan pada permasalahan serius yang dihadapi sektor industri, paling tidak 10 tahun terakhir, yaitu terjadinya deindustrialisasi. Ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap ekspor komoditi “mentah” sejak krisis moneter 1997 ikut memberi andil terjadinya deindustrialisasi itu. Ini ditandai dengan makin menurunnya peran sektor industri terhadap PDB. Ketika ekonomi Indonesia mencapai puncak kemakmuran pada 1997, sehingga diakui sebagai salah satu keajaiban ekonomi di Asia Timur, peran sektor industri dalam PDB adalah 24,84%. Angka ini terus menurun (lihat tabel 1)

Tabel 1 Perkembangan Peran Sektor Industri Pada PDB

Tahun	Peran Sektor Industri Pada PDB (%)
1997	24,84
2011	21,76
2012	21,45
2013	21,02
2014	19,32
2015	20,97
2016	20,51
2017	20,15
2018	19,82
2019	19,63

Sumber: Diolah dari Berita Resmi BPS Berbagai Edisi

Secara umum, menurut analisis para peneliti Bank Dunia dan ADB (Larson et al, 2016; Pruchnik & Zowczak, 2017), pola pengembangan industri negara-negara yang mampu melepaskan diri dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) adalah memilih industri yang mengandalkan upah buruh murah dan industri yang mengadopsi teknologi yang mudah, seperti industri tekstil dan elektronik. Indonesia sebenarnya juga mengikuti pola ini, sayangnya tidak mampu meningkatkan skala ekonomi produksi dan menciptakan brand sendiri.

Namun, masih menurut para peneliti di kedua lembaga dunia itu, kedua factor penting itu -upah buruh murah dan adopsi teknologi mudah- tidak bisa diandalkan lagi untuk mengembangkan industri yang bisa mengeluarkan negara dari jebakan berpendapatan menengah. Larson et al (2016), misalnya menyarankan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru (di luar upah buruh murah) dan mengembangkan industri yang mengandalkan teknologi yang berbasis inovasi.

Masalahnya industri apa yang dipilih dan bagaimana strategi pengembangannya? Untuk strategi, temuan Wade (2017) sepertinya bisa membantu. Menurut peneliti *The London School of Economics and Political Science* yang meneliti kasus Korea Selatan itu, ada dua pilihan strategi industrialisasi: *following the market* atau *leading the market*.

*Following the market* adalah pemerintah mendukung penuh -dengan berbagai fasilitas dan proteksi- pihak yang bersedia berinvestasi untuk mengembangkan suatu industry yang dipilih. Pilihan dijatuhkan pada industri yang memiliki keunggulan komparatif, meskipun sangat minim. Sedangkan strategi *leading the market*, dukungan pemerintah diberikan kepada investasi di industri yang dipilih, tanpa memperhatikan keunggulan komparatif suatu negara.

Mana lebih baik? Justin Yifu Lin, Chief Economist Bank Dunia 2008-2012 menyarankan strategi *following the market* dengan memberi tekanan lebih pada keunggulan komparatif. Pemerintah harus memilih industri yang diberi dukungan proteksi dan investasi, yang didukung oleh keunggulan komparatif. Kasus perusahaan besi dan baja Korea Selatan (POSCO), memang sukses menjalankan strategi *leading the market*. Meski besi dan baja bukan keunggulan komparatif, negeri ginseng itu tetap membangunnya pada 1968. Bahkan, tentangan Bank Dunia dan Amerika Serikat yang menyarankan membangun industri radio -yang merupakan keunggulan komparatif- tak digubris. Setelah mendapat dukungan investasi dan proteksi, dalam waktu satu dekade POSCO menjadi perusahaan besi dan baja terbesar kelima di dunia. Tetapi, sepertinya Indonesia lebih baik mengikuti saran Lin (2009), memilih strategi *following the market* dengan pilihan industri yang memiliki keunggulan komparatif.

### **Pilihan Industri**

Jika saran Lin (2009) bisa disepakati, maka kini tiba saatnya menentukan pilihan industri. Industri apakah yang akan dijadikan primadona untuk penerapan strategi? Dari *supply*, Indonesia memiliki keunggulan komparatif di bidang sumber daya alam. Dari sisi *demand*, yang paling

mungkin diisi produk Indonesia adalah industri pangan. Ini didukung fakta dan data di atas. Dari fakta, Pandemi *Covid-19* tidak menyurutkan pertumbuhan konsumsi masyarakat Indonesia di kuartal I 2020. Kemudian dari data, Unctad memberikan bukti perdagangan komoditi pertanian tetap tumbuh di era Pandemi *Covid-19*. Sebagaimana kita ketahui, komoditi pertanian adalah merupakan bahan baku industri makanan. Jadi, dari kombinasi kuatnya konsumsi domestik dan bertahannya perdagangan komoditi pertanian, memberi peluang memilih industri pangan - terutama untuk melayani konsumsi domestik- sebagai industri unggulan.

Yang pasti, dengan memperhatikan kuatnya konsumsi, maka perlu diperhatikan pilihan produk-produk yang berkaitan dengan budaya lokal. Yang pertama tentu produk-produk makanan lokal pastilah sesuai dengan budaya lokal. Untuk ini Indonesia tidak akan pernah kekurangan ragam makanan. Kita mulai dari makanan segar produk-produk pertanian, mulai dari makanan pokok, seperti beras, rosella, cassava, jagung, dan lain sebagainya pastinya memiliki *captive market* pasar lokal. Kemudian lanjut ke produk pertanian dari sayuran dan buah-buahan. Berikutnya produk perkebunan, seperti kopi, coklat, kelapa sawit dan sebagainya. Jangan dilupakan juga produk-produk dari hasil laut, seperti ikan, udang dan rumput laut. Tentu produk makanan segar dari pertanian itu bisa langsung dikonsumsi. Ini menjadi pasar tersendiri. Lebih lanjut, produk makanan segar itu bisa diolah menjadi berbagai makanan olahan. Beras, misalnya, tentu tidak hanya dikonsumsi sebagai nasi, namun bisa diolah menjadi berbagai makanan olahan. Demikian pula kopi. Saat ini kopi domestik sudah mampu menjadi tuan rumah dengan mengisi menu minuman kopi di cafe-cafe dengan *brand local*. Padahal kopi masih bisa diolah lebih lanjut menjadi berbagai aneka makanan olahan.

Tren gaya hidup sehat yang sedang berkembang di berbagai dunia, terutama di negara maju (apalagi setelah Pandemi *Covid-19* melanda), dengan mengonsumsi produk makanan organik menjadi peluang Indonesia untuk mengembangkan industri pangan, mulai dari karbohidrat hingga kebutuhan nutrisi dari sayuran dan buah-buahan organik.

Indonesia bisa memilih industri makanan sehat yang didukung keunggulan komparatif pertanian ini. Yang harus diingat, pengembangan industri itu tidak boleh lagi mengandalkan murahnya upah buruh dan adopsi teknologi yang mudah. Tenaga kerja harus mendapatkan upah tinggi, terutama di sektor pertanian. Ini agar menarik tenaga kerja muda mau bekerja di sektor pertanian. Teknologi canggih juga harus masuk ke sektor pertanian. Mulai dari pengolahan lahan, hingga pemasarannya. Pemasaran dengan *marketplace*, seperti Bukalapak dan Tokopedia bisa menjadi model adopsi teknologi canggih ke sektor pertanian.

Berikutnya, industri yang bisa diandalkan adalah energi. Seperti diketahui dari data Unctad (2020), perdagangan energi tetap mencatat pertumbuhan positif di saat pandemi *Covid-19*. Ini menunjukkan energi tetap dibutuhkan, baik dalam kondisi normal maupun krisis. Tentu ini berlaku juga untuk pasar domestik Indonesia. Untuk keperluan BBM, Indonesia mengimpor

sekitar 50% dari kebutuhan yang mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari. BBM ini bersumber dari bahan fosil (minyak mentah). Sesuai dengan tren dunia yang mulai meninggalkan energi dari bahan fosil, baik atas alasan lingkungan maupun semakin terbatasnya ketersediaan, Indonesia memiliki peluang untuk masuk industry energi baru terbarukan. Cukup banyak sumber energi Indonesia, mulai dari angin, air, matahari, panas bumi, gelombang laut, hingga dari sumber tanaman. Selayaknya Indonesia melepaskan diri dari ketergantungan dari impor energi fosil dengan mengandalkan energi baru terbarukan.

Menyambung dengan fokus pada produk pertanian pangan, selain dikonsumsi dan diolah, produk pertanian juga bisa diolah menjadi sumber energi. Minyak sawit, misalnya, sekarang ini sudah menjadi campuran BBM fosil dengan porsi 30%. Porsi itu akan terus ditingkatkan. Dan bukan tidak mungkin akan menjadi 100%. Selain dari olahan minyak sawit, batok kelapa sawit juga masih bisa dimanfaatkan menjadi energi. Tentu masih banyak tanaman lain yang bisa menjadi sumber energi. Lebih jauh, energi yang sesuai dengan tren masa depan adalah energi listrik yang bersumber dari baterai. Energi ini berasal dari tanah jarang (*rare earth*).

Indonesia merupakan tiga negara yang memiliki tanah jarang ini. Penambangan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah dan Kolaka, Sulawesi Tenggara, merupakan andil Indonesia dalam energi. Namun energi dari sumber ini akan sama nasibnya dengan minyak bumi, yaitu akan habis. Karena itu meskipun penambangan nikel sesuai dengan tren masa depan, akan lebih bijak kalau Indonesia fokus pada energi baru terbarukan, yaitu dari tanaman.

Pilhan berikutnya adalah produk seni. Produk ini tidak memiliki batas. Karena imajinasi dan kreatifitas manusia tidak memiliki batas. Indonesia memiliki banyak potensi untuk menggarap produk ini menjadi komoditi ekonomis. Untuk saat ini yang sudah bisa diterima dunia adalah kain batik. Bukankah batik hanya satu dari sekian jenis kain kreasi Indonesia? Masih ada saudara kain batik, yaitu lurik. Dari kawasan Timur ada kain tais. Kemudian dari kawasan Barat ada ulos, tenun dan berbagai macam jenis kain lainnya. Dari musik, bagaimana musik dangdut dan campur sari mulai diterima masyarakat dan mampu menembus dunia.

Yang terakhir adalah industri pariwisata. Tentu yang menjadi andalan wisata Indonesia adalah wisata alam dan budaya. Kalau bersaing dalam wisata urban pastinya Indonesia akan kalah. Sangat banyak obyek wisata budaya dan alam di Indonesia. Bahkan belakangan cenderung muncul kreativitas di kalangan masyarakat setempat untuk mengeksplorasi kawasannya untuk dijadikan obyek wisata, sehingga tercipta obyek-obyek wisata baru.

### **Peluang Ekspor**

Meski berdasar struktur ekonomi-terutama dari sisi pengeluaran-pasar ekspor tidak menjadi yang utama, tentu jauh lebih baik jika bisa dimanfaatkan juga. Untuk masalah ekspor ini, sebenarnya bukan hal yang mustahil. Meskipun data dan faktanya memang menunjukkan Indonesia sulit

menembus pasar ekspor, yang ditandai dengan defisitnya neraca pembayaran. Ini disebabkan produk ekspor Indonesia terbatas, yaitu fokus pada bahan mentah. Sendainya, Indonesia bisa fokus pada produk makanan segar dan olahan, komoditi ekspor Indonesia bisa lebih beragam.

Dua hal yang menjadi kelemahan produk makanan Indonesia menurut Ketua GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia), Adhi S. Lukman dan Ketua Komite Tetap Hortikultura Kadin, Karen Tambayong, adalah kurang beragam dan kekurangan bahan baku. Untuk produk makanan olahan, Indonesia masih kalah jauh dibanding Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Karena itu Indonesia harus fokus menggarap keragaman ini. Data GAPMMI memperkirakan pangsa pasar Indonesia untuk produk makanan olahan ini hanya 5%.

Kelemahan berikutnya, kekurangan bahan baku. Ini terjadi karena memang industri pertanian Indonesia belum didesain untuk memasok industri makanan olahan untuk tujuan ekspor. Karena itu, jika produk makanan olahan Indonesia -termasuk produk makanan segar- ditujukan untuk pasar ekspor, harus didesain dari awal untuk memenuhi pasar tersebut. Dan itu bukan hal yang sulit. Semua ada panduannya, tinggal mengikuti. Memang disinilah satu simpul diperlukan juga, yaitu diplomasi untuk menembus pasar. Tapi ini bukan hal yang mutlak menghalangi masuknya produk ekspor.

Yang jauh lebih menentukan adalah selera pasar. Jika memang produk Indonesia bisa memenuhi selera pasar yang dituju, maka pasar terbuka lebar. Pengalaman Thomas Darmawan, yang juga pernah memimpin GAPMMI, menunjukkan ada kalanya selera konsumen tidak terlalu tinggi. Di daerah perbatasan AS dan Meksiko, misalnya, ikan asin cukup diminati.

Jadi harus ada desain yang nyambung mulai dari hulu, yaitu industri makanan segar sebagai bahan baku, hingga hilir berupa makanan jadi dalam industri makanan olahan. Jadi tidak bisa, kita berpikiran produk ekspor adalah produk kelebihan konsumsi dalam negeri yang tidak terserap pasar domestik. Produk ekspor harus benar-benar didesain dari awal. Kalau pun kualitas produk untuk kepentingan konsumsi domestik lebih baik, tetap tidak bisa produk ekspor diambil dari kelebihan konsumsi dalam negeri.

Untuk mengetahui selera pasar itu ada saran agar memanfaatkan diaspora Indonesia. Mereka bisa diminta informasi mengenai selera ditempat tinggalnya. Jika diaspora tersebut bisa menjadi tenaga lepas sebagai periset pasar, sangat bagus. Jika tidak, maka diperlukan lembaga riset yang bisa bekerjasama dengan para diaspora untuk mengadakan riset pasar.

Selain selera konsumen, yang tidak bisa dianggap enteng, menurut Thomas Darmawan, adalah mengetahui arena persaingan. Ini meliputi, siapa pesaing di masing-masing kategori produk, berapa volume masing-masing produk, siapa importir di negara tujuan dan lain sebagainya. Pekerjaan seperti ini hanya bisa dikerjakan oleh Lembaga riset.

Oleh karena itu, pekerjaan penting lainnya adalah riset. Riset ini dilakukan mulai dari riset produk, yaitu mulai dari kualitas yang dikehendaki konsumen, riset pasar, hingga riset kompetitor. Setelah dengan riset itu diketahui, produk yang dikehendaki dan pasar yang dituju dan arena persaingan, hal yang tidak boleh dilupakan adalah memasukkan teknologi. Teknologi sering kali diabaikan, terutama untuk produk pertanian, karena sering dipandang sebagai produk tradisional. Jangan lupa, teknologi bisa mengalahkan keunggulan komparatif yang sudah eksis. Ambil contoh untuk pertanian padi. Dari sisi kesuburan dan luasan tanah, tentu Indonesia lebih unggul dibanding China. Paling tidak dari sisi kuantitas produksi. Sehingga mestinya China mengimpor beras dari Indonesia. Namun, dengan teknologi China mampu membuat sawah bertingkat di lahan sempit, sehingga produktivitasnya dimungkinkan melampaui Indonesia, dan ada kemungkinan Indonesia yang harus mengimpor beras dari China. Begitu pula dengan komoditi ikan. Mestinya Indonesia mampu mengeksport ikan darat ke Singapura. Lagi-lagi, dengan teknologi di Singapura atap-atap apartemen bisa dijadikan tempat budidaya ikan darat. Bisa jadi Indonesia mengimpor ikan dari Singapura.

### **Kesimpulan**

Inilah wajah baru *next normal* ekonomi Indonesia. Visi besarnya adalah Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Sebelum visi itu tercapai, industri yang dipilih adalah agro bisnis dan agro industri, yang fokus pada pasar dalam negeri. Selanjutnya bergerak kepada menjadi lumbung pangan dunia. Pilihan industri lainnya yang memenuhi strategi yang disarankan Wade (2017) dan

Lin (2009), yaitu yang didukung oleh keunggulan komparatif adalah industri energi, pariwisata, dan seni budaya. Kini, strategi sudah ada. Pilihan industri juga tersedia. Tinggal keseriusan dan tekad baja untuk memajukan ekonomi dan menciptakan keserjahteraan bagi rakyat yang harus disediakan. Ini merupakan “barang” langka.

Jika *next normal* ekonomi Indonesia itu bisa diwujudkan, bukan tidak mungkin Indonesia bisa lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah. Sudah sejak 1985, Indonesia masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah. Sampai sekarang masih di posisi itu (meski sudah naik sedikit menjadi *upper-middle income country*/negara berpendapatan menengah atas). Memang tidak mudah mengubahnya. Studi Pruchnik & Zowczak (2017) menunjukkan, waktu yang diperlukan untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah adalah 42 tahun. Itupun, jika negara yang terjebak tersebut melakukan upaya keluar. Jika pola 42 tahun itu masih berlaku, berarti Indonesia baru akan masuk kelompok negara berpendapatan tinggi di tahun 2027. Masih ada waktu tujuh tahun lagi.

Berhasilkah? Menurut perhitungan Bank Indonesia (BI), dengan laju pertumbuhan ekonomi seperti saat ini (sekitar 5%) pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai 10.400 dollar AS pada tahun 2045 dengan pendapatan per kapita antara 1.006 dollar AS sampai 3.955 dollar AS

sebagai negara berpendapatan menengah bawah (*lower-middle income country*). Jika pendapatan per kapita itu naik menjadi diantara 3.956 dollar AS hingga 12.235 dollar AS, akan dikategorikan menjadi negara berpendapatan menengah atas (*upper-middle income country*).

Dengan demikian, sampai tahun emas kemerdekaan, Indonesia masih belum lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah. Tentu masih ada peluang untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah itu, jika Indonesia mampu menggejot laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Kalaupun tidak berhasil mengikuti pola konvensional, keluar dari jebakan setelah 42 tahun, paling tidak di tahun emas kemerdekaan nanti bisa memberikan kado itu. Peluang yang paling mungkin mengantarkan kado tersebut adalah menjadikan *next normal* ekonomi Indonesia, yaitu pertama, mempertahankan atau malah meningkatkan kontribusi konsumsi dalam PDB. Kedua, untuk melayani konsumsi domestik itu, strategi yang dianut adalah *following the market*, yaitu mengembangkan industri yang memiliki keunggulan komparatif. Ketiga, pilihan industrinya adalah industri pangan, energi, pariwisata, dan seni budaya. Visi besarnya adalah Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

#### **Daftar Pustaka**

- Badan Pusat Statistik (2020). Berita Resmi Statistik 5 Februari 2020
- Larson, G., Norman L., Michael W. (2016). *The Middle-Income Trap: Myth or Reality?* World Bank Research & Policy Briefs
- Learn Business Anywhere (2020). *Back to Normal*. Channel YouTube Learn Business Anywhere
- Pruchnik, K., Jakub Z. (2017). *Middle Income Trap: Review of The Conceptual Framework*. Asian Development Bank Intitute.
- Suratman, N (2020). Singapore's Q1 GDP Contracts by 0.7%; 2020 *Growth Forecast Lowered*. [www.icis.com](http://www.icis.com)
- UNCTAD (2020). Global trade continues nosedive, UNCTAD forecasts 20% drop in 2020. <https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2392>
- Wade, Robert H. (2017) *The developmental state: dead or alive? Development and Change*, 49 (2): 518-546.
- Lin, Justin Yifu (2009). *Economic Development and Transition: Thought, Strategy, and Viability*. New York: Cambradge University Press

# **KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL DAN DAERAH PADA MASA PANDEMI *COVID-19***

**Saor Silitonga**

## **Pendahuluan**

Setelah pandemi *Covid-19* melanda seluruh penjuru dunia, World Bank mengindikasikan bahwa 170 negara akan mengalami kontraksi Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020 yang bahkan dipandang sebagai situasi ekonomi terburuk dalam 150 tahun terakhir. Mencermati pertumbuhan ekonomi belakangan ini, maka proyeksi ekonomi 2020 bergantung kinerja seluruh sektor pada semester kedua 2020 (kuartal 3 s.d. kuartal 4). Inilah momentum yang tersedia bagi kita semua. Peristiwa ekonomi memang selalu demikian sebab ia bergerak bukan dalam ruang hampa, namun selalu dipengaruhi oleh berbagai variabel dalam suatu kurun waktu. Sebab sesungguhnya masih ada kemungkinan akan muncul ancaman *second wave* sebagai faktor risiko. Perhatikan saja pertumbuhan ekonomi dunia pada Januari 2020 sebesar 2,5% harus merosot menjadi -5,2% pada Juni 2020. Ini artinya, keadaan perekonomian sangat tidak pasti pada bulan-bulan pasca semester pertama sehingga memerlukan perhatian serius lebih dari biasanya. Tak terbayangkan dampak yang akan terjadi jika perekonomian tidak mendapat ruang yang lebih memadai untuk bergerak, bertumbuh, dan berkelanjutan. Resesi ekonomi yang selalu menyisakan luka-luka multi dimensional janganlah sampai terjadi lagi.

Dalam tinjauan ekonomi makro, keadaan resesi ekonomi atau kemerosotan adalah ketika produk domestik bruto (GDP) mengalami penurunan atau bernilai negatif dalam kurun waktu dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Resesi secara nyata terlihat pada penurunan seluruh aktivitas ekonomi yang meliputi lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Pasar menunjukkan harga-harga yang turun (deflasi) atau bisa pula harga-harga meningkat secara tajam (inflasi). Jika resesi ekonomi berlangsung dalam kurun waktu bertahun-tahun maka keadaan sedemikian disebut depresi ekonomi.

## **Kondisi Ekonomi pada Masa Pandemi *Covid-19***

Kondisi ekonomi pada masa pandemi ini sungguh tidak mudah. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian nasional triwulan II berkontraksi -5,32% *year to year (y-on-y)* dan menurun 1,26% *cumulative to cumulative (c-to-c)* dibandingkan triwulan I tahun 2020. Sisi permintaan dan penawaran yang membangun GDP tengah berkontraksi secara serius (Tabel 1).

Sesungguhnya masih ada optimisme yang menyeruak di tengah-tengah keadaan sulit ini jika momentum perekonomian dapat terjaga secara baik, maka diprediksi pada Januari 2021 pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 2,6% bahkan pada Juni 2021 bisa mencapai 4,2%. Pada 2021 memang diperkirakan terjadi pemulihan meski ketidakpastian masih tinggi. Pandangan sedemikian ini didasari oleh beberapa hal yakni *Purchasing Managers' Index (PMI)* Manufaktur

Dunia sebagai gambaran ekspansi industri, menurut Bloomberg, menunjukkan titik terendah pada level 39,6 (standar 50) kemudian aktivitas ekonomi global terus menunjukkan perbaikan, meski masih di level kontraksi. Data PMI beberapa negara menunjukkan aktivitas manufaktur telah kembali pada pertumbuhan positif pada Juni 2020. Meski masih pada level kontraksi, namun PMI Manufaktur Indonesia sudah meninggalkan titik terendahnya pada kisaran 30 menuju di atas 50.

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Proyeksi Q1 2020 dan Realiasi Q1 2019 (yoy)

Sektor Demand	Share to GDP	Q1-2020	Q1-2019	Sektor Supply	Share to GDP	Q1-2020	Q1-2019
Konsumsi	31.9%	2.7%	5.3%	Manufaktur	20.0%	2.1%	3.9%
PMTB/Investasi	6.5%	1.7%	5.0%	Perdagangan	13.2%	1.6%	5.2%
Belanja	17.4%	3.7%	5.2%	Transportasi	5.2%	1.3%	5.5%
Ekspor	17.4%	0.2%	-1.6%	Akomodasi dan Restaurant	2.8%	2.0%	5.9%
Impor	-17.6%	-2.2%	-7.5%	Perdagangan	12.8%	0.0%	1.8%
				Pertambangan	6.8%	0.4%	2.3%
				Konstruksi	10.7%	2.9%	5.9%

Sumber: Kemenkeu (2020)

Mencermati inflasi yang terkendali pada kisaran 2% (Mei 2020) adalah alasan lain optimisme perbaikan ekonomi sebab harga-harga yang terkendali turut mendukung stabilitas makro ekonomi di tengah pandemi. Keadaan sedemikian berdampak positif terhadap neraca perdagangan yang juga mulai menunjukkan perbaikan didorong oleh kinerja positif ekspor nonmigas.

Dampak sentimen negatif pandemi *Covid-19* di pasar saham pun sudah mulai mereda antara lain ditunjukkan oleh pergerakan nilai tukar dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bahkan tekanan arus modal keluar juga berkurang. Keadaan pasar sedemikian secara langsung mempengaruhi fiskal khususnya pada sisi penerimaan negara yang ditunjukkan oleh beberapa jenis pajak yang mengalami pertumbuhan realisasi yang positif di bulan Juni. Berbagai pola kebijakan transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah membuka keran-keran perekonomian sedemikian rupa sehingga turut berkontribusi pada meredanya tekanan di sisi penerimaan perpajakan (Tabel 2).

Dampak pandemi secara nyata ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan di negeri ini yang meningkat menjadi 7,38%. Angka Kemiskinan Desa (12,82%) atau 26,42 juta jiwa dan Angka Kemiskinan Kota (9,78%) atau sebanyak 25,14 juta jiwa. Kemiskinan meningkat terutama di Jawa yang meningkat 0,37 basis poin atau setara dengan 1,28 juta orang miskin baru (atau 1,63 juta orang dibandingkan angka September). Akibatnya, rasio GINI meningkat menjadi 0,317 yang menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan lebih rentan terhadap pengaruh pandemi *Covid-19* sebab pelebaran rasio GINI bergerak lebih luas di kalangan masyarakat desa. Untuk itu

pemerintah telah mengimplementasikan paket bantuan sebagai perluasan program jaring pengaman sosial. Program ini mencakup bantuan tunai untuk orang miskin, subsidi makanan, kartu pra-kerja, dan potongan tagihan listrik.

Tabel 2 Pertumbuhan Pajak 2020

Jenis Pajak	Juni	Mei	April	Q1
PPh 21	12,28%	-28,38%	1,65%	4,94%
PPh OP	36,04%	10,92%	402,6%	-52,23%
PPh Badan	-38,12%	-53,90%	-16,44%	-13,56%
PPh 26	17,61%	-19,69%	34,07%	24,59%
PPh Final	3,91%	-35,04%	0,86%	9,75%
PPN DN	-27,38%	-35,51%	9,72%	10,27%
PPh/PPN Impor	-13,90%	-45,12%	-13,82%	-8,08%

Sumber: Kemenkeu (2020)

### **Kebijakan Keuangan Negara dalam Gejolak Perekonomian**

Keuangan Negara mesti segera mengambil posisi untuk menjawab berbagai tantangan perekonomian yang tengah bergejolak di masyarakat. Itulah niat sesungguhnya program bertajuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kementerian Keuangan meletakkan anggaran Rp695,2 triliun untuk maksud ini. Perubahan postur APBN sebagai wujud rencana keuangan pemerintah (Tabel 3) menempatkan anggaran PEN tersebar dalam berbagai bentuk kegiatan khususnya bidang-bidang terkait dengan perekonomian dan dampak *Covid-19*, meliputi sektor kesehatan, perlindungan sosial, sektor pemerintah, sektor UMKM, dsb. Pada akhir Agustus 2020 tercatat realisasi anggaran ini sebesar Rp192,53 triliun atau 27,7 persen. Angka ini segera beranjak menjadi Rp318,4 atau 45,5 persen pada awal Oktober 2020. Dalam kurun waktu yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri serapan anggaran PEN mencapai Rp 4 triliun yang terus mengalami percepatan sampai dengan awal Oktober 2020. Hal yang menjadi perhatian adalah bahwa keadaan ralisasi anggaran sedemikian cepat tidak selalu terjadi di daerah lain sehingga memerlukan dorongan agar percepatan realisasi tersebut dapat berlangsung secara bersamaan menjadi suatu momentum dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.

Pada tingkat global, Kementerian Keuangan R.I. menyebutkan bahwa lebih dari 196 negara di dunia mengeluarkan stimulus fiskal dengan total lebih dari US\$8 triliun (10 persen PDB dunia). Stimulus fiskal Negara-Negara G-20 berada pada kisaran 1% terhadap PDB di Meksiko hingga 25% terhadap PDB di Jerman. Indonesia menggelontorkan dana sebesar 4,2% terhadap PDB untuk urusan ini. Postur APBN dirancang sedemikian rupa dalam bentuk Realokasi Anggaran sebesar Rp190 triliun yang berasal dari upaya penghematan dan sebesar Rp55 triliun sebagai Realokasi Belanja Prioritas anggaran untuk penanganan *Covid-19* melalui Pemda dan kementerian/lembaga.

Tabel 3 Perubahan Postur APBN (Perpres No. 72 Tahun 2020)

	APBN 2020 (Dalam Triliun Rupiah)	APBN (Awal)	Perpres 54/2020	Perpres 72/2020
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>		2.233,2	1.760,9	1.699,9
1. Perpajakan		1.865,7	1.462,6	1.404,5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		367,0	297,8	294,1
3. Penerimaan Hibah		0,5	0,5	1,3
<b>B. BELANJA NEGARA</b>		2.540,4	2.613,8	2.739,2
<b>I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>		1.683,5	1.851,1	1.975,2
1. Belanja K/L		909,6	836,5	836,4
2. Belanja Non-K/L		773,9	1.014,6	1.138,9
<b>II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)</b>		856,9	762,7	763,9
<b>C. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN</b>		(307,2)	(852,9)	(1.039,2)
<i>% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>		<i>(1,76)</i>	<i>(5,07)</i>	<i>(6,34)</i>
<b>D. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>		307,2	852,9	1.039,2

Sumber: Kemenkeu 2020

Pada tahap Stimulus I sebesar Rp8,5 triliun ditujukan untuk memperkuat ekonomi domestik melalui belanja pemerintah. Kemudian Stimulus II sebesar Rp22,5 triliun bermaksud untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberi kemudahan ekspor/impor. Akhirnya Stimulus III sebesar Rp405,1 triliun diharapkan dapat berperan sebagai bentuk dukungan untuk kesehatan, pemberian bantuan tunai bagi masyarakat kurang mampu, dukungan bagi perusahaan terdampak yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 (telah disahkan menjadi UU). Dengan tambahan untuk kesehatan Rp87,55 triliun dan Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 607,65 triliun maka telah dianggarkan dana sebesar Rp695,2 triliun. Dana tersebut disalurkan ke berbagai program yang meliputi Perlindungan Sosial sebesar Rp203,90 triliun, Insentif Usaha sebesar Rp 120,61 triliun, Pembiayaan Korporasi sebesar Rp53,57 triliun, Sektorial Kementerian/Lembaga dan Pemda sebesar Rp106,11 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, dan Kesehatan sebesar Rp87,55 triliun.

Kebijakan fiskal yang berusaha membuat postur APBN sedemikian rupa tidak mungkin mengabaikan kebijakan moneter karena hanya dengan demikian terjadi pembagian beban yang akan mendinginkan suhu ekonomi. Dengan kata lain, bauran kebijakan fiskal dan moneter diharapkan dapat mendorong keberlangsungan fiskal yang sehat dan kepastian pendanaan PEN dalam masa pandemi. Kebijakan moneter amat diperlukan dalam rangka memastikan agar tekanan di pasar keuangan mereda, khususnya di pasar surat berharga negara (SBN) *Yield* obligasi setidaknya dapat menurun ke posisi awal tahun meskipun ternyata kepemilikan asing belum pulih. Secara psikologis pasar keuangan selalu terbukti bahwa koordinasi moneter fiskal yang baik turut berkontribusi terhadap sentiment positif di pasar Surat Berharga Negara.

Sejak Juni 2020 hingga medio September 2020, realisasi anggaran PEN sudah mencapai Rp254,4 triliun atau 36,6 persen dari pagu terdiri dari anggaran kesehatan Rp18,45 triliun, perlindungan sosial Rp134,45 triliun, sektoral K/L dan Pemda Rp20,53 triliun, insentif usaha Rp22,23 triliun, dan dukungan UMKM Rp 58,74 triliun. Perlu upaya luar biasa untuk mencapai realisasi hampir 70 persen anggaran ini pada tiga bulan terakhir. Sesungguhnya angka-angka realisasi anggaran PEN ini masih memerlukan perhatian semua pihak pada beberapa titik penting yaitu yang benar-benar mampu mendorong realisasi anggaran menjadi lebih cepat.

Pertama, kesadaran momentum. Menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif pada masa pandemi *Covid-19* memang bukan perkara mudah kalau tidak dikatakan mustahil. Namun mengawal pertumbuhan ekonomi untuk menjadi tidak jatuh di bawah nol persen adalah simpulan keharusan pada dirinya sendiri. Artinya, pertumbuhan ekonomi dengan seluruh sumber daya harus diupayakan tetap di atas nol. Komponen pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II 2020 terhadap triwulan II 2019 (y-on-y) mengalami pertumbuhan negatif pada konsumsi rumah tangga -7,76%, investasi -8,61%, dan ekspor barang dan jasa -11,6%. Komponen impor dalam Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran mengalami kontraksi -16,96%. Satu-satunya komponen PDB yang tumbuh adalah komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sekitar 22,32%. Mengingat sektor swasta masih cenderung bersikap *wait and see*, maka menjadi jelas kalau kas negara diharuskan mengambil posisi sebagai pendorong pemulihan ekonomi nasional. Bahkan percepatan realisasi anggaran PEN pada hari-hari triwulan ketiga ini tengah berada pada momentum terpenting. Berharap masih tersedia kemewahan waktu pada triwulan keempat sesungguhnya adalah ibarat permainan dadu yang penuh resiko karena rentetan masalah sosial ekonomi dalam berbagai bentuk akibat pandemi *Covid-19* yang diprediksikan masih belum akan mereda. Lagi pula triwulan keempat adalah penghujung tahun 2020 yang selalu berisikan dengan tahun 2021 dengan masalah tersendiri. Oleh karena itu paparan data realisasi anggaran pada penghujung triwulan ketiga sebesar 60 persen pada tahun-tahun yang lalu menjadi tidak relevan untuk dimaklumi pada tahun ini. Setidaknya angka realisasi harus mencapai 70 persen atau 80 persen.

Kedua, penyederhanaan prosedur. Realisasi APBN di Provinsi Sulsel sampai penghujung Agustus 2020 sudah mencapai hampir 60 persen, artinya masih terdapat optimisme yang realistis untuk menorehkan angka realisasi 70 persen pada penghujung triwulan ketiga 2020. Realisasi APBD Provinsi Sulsel 62,55 persen di atas rata-rata nasional (48,86 persen), Kabupaten Gowa 61,78 persen, Kabupaten Bone 55,46 persen, Kabupaten Sidrap 55,38 persen, Kabupaten Jeneponto 49,15 persen. Penyederhanaan prosedur birokrasi pengadaan barang/jasa dan pencairan dana sudah saatnya ditempuh sehingga tidak menjadi penghambat realisasi sembari menjaga akuntabilitas sehingga realisasi anggaran tersebut menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai. Upaya percepatan realisasi anggaran selalu terkait langsung dengan karakter kegiatan pada Kementerian/Lembaga sebagai pengguna anggaran. Misalnya, pada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu terdapat tahapan-tahapan kegiatan yang sudah diatur

sedemikian rupa sehingga pencairan dana pada setiap kegiatan akan mengalami kesulitan jika hendak dipercepat mendahului tahapan yang sudah rigid. Atau berbagai kegiatan fisik yang memerlukan barang impor ternyata memerlukan waktu yang lebih panjang. Dalam semua kendala ini, atas nama pemulihan ekonomi, memerlukan pendekatan kreatif sehingga realisasi anggaran dapat didorong sebesar-besarnya dalam momentum yang tidak akan terulang ini.

Ketiga, *check and recheck* program. Perjalananan anggaran selalu bersifat adaptif. Diperlukan pengamatan cermat oleh para pengguna anggaran untuk secara segera merevisi anggaran jika secara nyata ditemukan hal-hal yang kontraproduktif dengan PEN, misalnya biaya-biaya rapat, perjalanan dinas, dsb yang bisa diarahkan ke arah kegiatan ekonomi secara nyata seumpama bantuan sosial kepada masyarakat terdampak *Covid-19*.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 2021 yang amat optimis dengan proyeksi 4,5% sampai dengan 5,5% amat dipengaruhi oleh faktor pandemi *Covid-19*, reformasi struktural, dan ekspansi fiskal. Namun masih sangat nyata ketidakpastian ekonomi global dan domestik yang dapat terlihat pada penurunan proyeksi pertumbuhan menurut berbagai lembaga internasional. Seiring dengan relaksasi/normalisasi, kasus *Covid-19* meningkat yang dapat memberikan hambatan pada pemulihan ekonomi.

Tidak bisa tidak langkah-langkah penanganan *Covid-19* harus tetap dilakukan oleh suatu kebijakan fiskal yang memadai. Secara politis bahkan dalam pembicaraan pendahuluan dengan DPR telah diterima rancangan awal defisit 2021 sebesar 3,21% s.d. 4,17% terhadap PDB, alias melewati batas 3% terhadap PDB dalam satu tahun fiskal. Dengan mempertimbangkan catatan kesimpulan DPR yang mengindikasikan defisit masih mungkin diperlebar menjadi 4,7% untuk pemulihan ekonomi, maka dalam Sidang Kabinet 29 Juli 2020, Presiden memutuskan untuk memperlebar defisit 2021 menjadi defisit 5,2%. Dengan defisit sedemikian maka terdapat cadangan belanja Rp179 triliun yang akan diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional 2021 meliputi ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, ICT, bidang pendidikan, bidang kesehatan khususnya untuk penanganan *Covid-19* dan penyediaan vaksin.

Postur APBN yang memadai untuk menjawab tantangan pandemi ditunjukkan oleh tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi, merefleksikan upaya Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi *Covid-19*, juga sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan reformasi di berbagai aspek kebijakan guna mempersiapkan fondasi yang kokoh, dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045. Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Momentum Reformasi Untuk Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Maju dengan memberi perhatian pada reformasi

kesehatan, reformasi program perlindungan sosial, reformasi pendidikan, dukungan industri, reformasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, reformasi Perpajakan, reformasi Penganggaran.

### **Penutup**

Akhirnya ujian sejarah pada masa pandemi ini menghantar kita pada pemahaman cara baru mengelola anggaran khususnya menjaga momentum untuk secara bergegas menempatkan keuangan negara sebagai sistem yang penting dalam menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. (SS-2020)

Catatan: Tulisan ini adalah pengembangan artikel opini karya penulis berjudul Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional yang dimuat di Harian Fajar Makassar (September 2020).

### **Daftar Pustaka**

Webinar Kementerian Keuangan R.I. pada Juli s.d. Septembe 2020

FGD Pejabat Administrator Kebijakan Defisit Anggaran Pemerintah 30 Juli 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/Resesi>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-2021>

<https://www.bps.go.id/>

# **SINERGITAS PUSAT-DAERAH UNTUK PENGUATAN EKONOMI DOMESTIK**

**Anas Iswanto Anwar**

## **Pendahuluan**

Virus *Covid-19* baru merebak sejak awal bulan maret ini di tanah air, namun dampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi. Indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan pelaku di sektor riil berteriak susah berusaha. Bank Indonesia (BI) pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi di bawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.

Kehidupan ekonomi akan sangat terganggu akibat kepanikan pasar / masyarakat yang berakar dari opini publik yang terbentuk melalui berbagai perangkat media informasi. Seperti sebuah lingkaran yang tidak putus. Makin banyak yang terkena *Covid-19*, maka opini di media informasi juga makin panik, masyarakat panik, maka terjadi kegiatan ekonomi yang tidak wajar (misalnya: tidak bekerja, menarik cash sebanyak mungkin, menimbun stok sembako, dan seterusnya). Ekonomi akan timpang yang berakibat pada masyarakat yang panik dan akan bertambah kacau secara psikologis.

Permasalahan ekonomi Indonesia saat ini di dalam jangka pendek adalah lemahnya permintaan. Dalam kondisi permintaan yang lemah, penurunan bunga tak akan berdampak banyak untuk mendorong produksi, karena untuk apa menambah investasi jika permintaan tak ada. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendorong permintaan. Peran dari APBN dan APBD relatif terbatas dan hanya bisa menjadi pemicu untuk mengembalikan kepercayaan dan harus diikuti oleh investasi swasta. Itu sebabnya, stimulus fiskal butuh prioritas, butuh kualitas belanja yang baik serta berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.

## ***Urcertainty***

Dalam jangka sangat pendek, belanja pemerintah harus mampu mendorong daya beli melalui konsumsi rumah tangga sesegera mungkin. Berikan stimulus kepada kelompok menengah bawah. Kelompok menengah bawah memiliki kecenderungan konsumsi yang relatif lebih tinggi. Perluas program seperti Bantuan Pangan Non Tunai. Untuk kelas menengah, program kartu Pra Kerja bisa dimanfaatkan untuk membantu daya beli sekaligus meningkatkan kemampuan. Dengan kebijakan ini, orang tetap bekerja dan daya beli terjaga. Lalu pemerintah bisa membantu untuk mendorong sektor pariwisata dengan, misalnya, memberikan subsidi berupa potongan harga bagi jasa angkutan pesawat, bus, atau kereta api, atau penginapan agar sektor pariwisata tetap berjalan untuk beberapa bulan. Pemerintah juga bisa mendorong agar aktivitas pemerintahan, seperti pertemuan, bisa dilakukan di daerah wisata di akhir pekan.

Ekonomi memang dalam kegamangan, kecemasan, kebingungan dan penantian dalam beberapa bulan kedepan. Antisipasi kebijakan ekonomi harus dilakukan. Ekonomi global dan sektor perdagangan terganggu, maka kita perlu fokus kepada ekonomi domestik. Pemerintah perlu melakukan kebijakan dan instrumen yang paling efektif untuk mendorong permintaan domestik. Pemerintah jangan mengulangi kesalahan pada masa-masa awal penanganan pandemi *Covid-19* ini yang terkesan serba terlambat dan meremehkan. Kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk ini memerlukan penyelesaian yang cepat dan menyeluruh.

### **Sinergitas**

Sinergisitas pemerintah pusat dengan daerah juga terlihat berantakan ketika pengambilan kebijakan *lockdown* maupun *social distancing* di masing-masing daerah. Pemerintah pusat mengatakan bahwa kewenangan penetapannya ada di pusat, sementara di daerah-daerah sudah banyak yang menjadikan peristiwa pandemi sebagai bagian dari Kejadian Luar Biasa (KLB) bahkan mengarah kepada bencana nasional (non alam), barulah kemudian pemerintah pusat beberapa waktu kemudian menetapkan pandemi *corona* yang melanda Indonesia sebagai bencana nasional (non alam). Belum jelasnya status siaga maupun status darurat di berbagai daerah juga turut mengaburkan validitas informasi sebaran virus *corona* di daerah-daerah yang berkorelasi terhadap upaya penanganannya.

Memang pada dasarnya menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Disebutkan bahwa urusan pemerintahan dibagi beberapa hal, di antaranya perihal pemerintahan absolut atau mutlak itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal itu meliputi bidang pertahanan, keamanan, agama, yustisi, politik luar negeri, dan moneter-fiskal. Maka oleh karenanya, sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tampaknya menjadi sangat penting dalam upaya melakukan tindakan-tindakan pemerintahan dalam penanggulangan pandemi *corona* di Indonesia, agar lebih teratur, terarah dan terukur.

### **Ekonomi Domestik**

Peningkatan perekonomian domestik, baik oleh nasional dan daerah akan menjadi modal utama untuk menjaga momentum pembangunan dan melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Peran daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya akan sangat bergantung kepada kemampuan daerah untuk melakukan identifikasi faktor penentu daya saing dan strategi untuk meningkatkan daya saing.

Sejatinya, potensi domestik Indonesia sangat kuat dan besar, tidak hanya dari sisi jumlah penduduk yang besar (240 juta jiwa), tapi juga dari segi pertumbuhan ekonomi yang stabil sebagaimana tergambar dalam peningkatan daya beli masyarakat selama ini. Dengan melihat potensi dan peluang yang kita miliki maka langkah paling tepat adalah penguatan ekonomi domestik. Ini dapat dilakukan pemerintah dengan mendorong sektor eksternal, memperkuat

investasi dan meningkatkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu, stabilitas moneter, nilai tukar, dan keberlanjutan fiskal juga harus tetap dijaga.

Penguatan ekonomi domestik memang menjadi menarik untuk didiskusikan dan sangat relevan dengan situasi *pandemic Covid-19* saat ini. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan menghadapi beberapa tantangan yang diperkirakan dapat memengaruhi proses pembangunan nasional. Beberapa tantangan yang paling nyata adalah ketidakpastian dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang terutama diakibatkan dari *pandemic* ini. Kondisi eksternal inilah yang mengharuskan kita untuk segera berbalik arah, memanfaatkan semua potensi dan peluang yang kita miliki sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan melihat potensi dan peluang yang kita miliki maka langkah paling tepat adalah penguatan ekonomi domestik. Ini dapat dilakukan pemerintah dengan mendorong sektor eksternal, memperkuat investasi dan meningkatkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Stabilitas moneter, nilai tukar, dan keberlanjutan fiskal juga harus tetap dijaga.

Persoalan logistik yang terjadi selama ini dianggap salah satu penghambat daya saing. Hal tersebut terkait dengan buruknya infrastruktur. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus fokus pada penguatan konektivitas domestik, terutama untuk kawasan Indonesia Timur. Peningkatan daya saing tidak hanya terkait dengan pembangunan infrastruktur, tapi juga pembangunan industri. Intinya bagaimana mengembangkan *economic capacity* melalui industrialisasi dalam berbagai *cluster industry*.

## **Penutup**

Sinergitas antara Pusat dan Daerah serta semua pihak terkait, harus sungguh-sungguh dan cerdas menangkap tantangan sekaligus peluang yang kita miliki. Dengan prioritas untuk kesejahteraan rakyat, maka semuanya harus difokuskan pada penajaman target dan sinergi antara pusat dan daerah di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan,

Tidak banyak pilihan yang dimiliki oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian saat ini. Kita tidak bisa lagi mengandalkan negara-negara besar sebagai tujuan utama pasar ekspor, terutama ke Amerika dan China. Yang harus segera dilakukan adalah mendorong perekonomian domestik. Perbaikan infrastruktur dan permasalahan ekonomi biaya tinggi yang masih menjadi momok bagi dunia usaha kita yang akan mengakibatkan daya saing rendah harus segera di selesaikan.

Pada akhirnya, semua pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus sungguh-sungguh dan cerdas menangkap tantangan sekaligus peluang yang kita miliki. Dengan prioritas untuk kesejahteraan rakyat, maka semuanya harus difokuskan pada penajaman target dan sinergi antara pusat dan daerah di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Yang

paling penting adalah bagaimana kerja sama antara pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang paling bawah. Dari yang paling atas sampai di kepala desa.

Semoga pandemi *Covid-19* ini dapat segera berakhir, agar segala sektor dapat berjalan kembali seperti semula.

### **Daftar Pustaka**

Anwar, Anas Iswanto (2020). Saatnya Fokus ke Ekonomi Domestik. *Harian Fajar*, 14 April 2020.

Farid, Muhammad (2020). Mengawal Sinergi Pusat dan Daerah. *Opini Media Indonesia E-Paper*, 7 Oktober 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/40246-mengawal-sinergi-pusat-dan-daerah>

Saleh, Kausar Ali (2017). Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 40, No. 55, Maret 2017.

Wijayanti, Septi Nur (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum* Vol 23, No 2 (2016)

<https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2012/10/Keuangan-Pusat-dan-Daerah.pdf>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/27/120000669/hubungan-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah?page=all>

## **PERGERSERAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA: ANALISA DAN ANTISIPASI PADA MASA PANDEMI**

**Nur Imam Saifuloh**

### **Pengantar**

Sejak virus corona dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020, penyakit ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan akan tetapi semua sektor kehidupan tidak terkecuali sektor ekonomi. Ancaman turunnya pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut atau biasa disebut resesi membayang-bayangi hampir semua negara di dunia. Angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal pertama (Q1) 2020 sebesar 2,97 persen dan mengalami kontraksi yang cukup dalam pada kuartal kedua (Q2) 2020 yakni sebesar 5,05 persen. Pada kuartal ketiga (Q3), pertumbuhan ekonomi diprediksi akan mengalami kontraksi kembali.

Pertumbuhan ekonomi yang menurun setidaknya menunjukkan bahwa produktivitas masyarakat menurun. Hal ini tidak lain disebabkan akibat pandemi virus corona yang melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berupa dibatasinya kegiatan masyarakat oleh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ditutupnya kegiatan usaha (perdagangan, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan sebagainya) hingga pengalihan sistem belajar dari tatap muka (luring) ke *online* (daring). Adanya kebijakan sebagaimana di atas ditujukan untuk mengerem penyebaran virus.

Alasan kesehatan merupakan alasan yang paling rasional atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, pemerintah juga telah menyiapkan jaring pengaman sosial atas kebijakan yang ditetapkan agar kegiatan ekonomi dapat tetap berjalan. Di antara yang sudah pemerintah lakukan ialah memberikan kelonggaran pada sektor lapangan usaha tertentu, pemberian bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 per 3 bulan, pemberian bantuan sembako dan kebutuhan pokok lainnya, pembebasan tarif listrik, menaikkan anggaran kartu prakerja, menganggang PPh 21 (pajak penghasilan kerja di sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta pertahun), membebaskan PPh impor untuk 19 sektor, dan keringanan angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Skenario kebijakan dan antisipasi dampaknya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan cukup baik. Sayangnya, dampak pandemi virus corona ini lebih terasa secara luas oleh masyarakat khususnya di sektor lapangan usaha dan ketenagakerjaan. Beberapa sektor lapangan usaha yang terkena dampak cukup parah adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa. Adapun dalam masalah ketenagakerjaan, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bahwa angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah mencapai 3,05 juta pekerja. Angka ini belum ditambah dengan jumlah

angkatan kerja yang telah menyelesaikan studinya di berbagai tingkat pendidikan sehingga ancaman pengangguran juga semakin nyata.

Makalah ini akan berusaha untuk mengkaji permasalahan di atas dengan melihat pada data yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Agar dapat dibahas secara lebih mendalam, maka permasalahan akan dikerucutkan pada sektor lapangan usaha dan ketenagakerjaan. Di bagian akhir akan diberikan kesimpulan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang perlu sekiranya keadaan ekonomi belum atau tidak menunjukkan pemulihan.

### **Kajian Teori**

Dalam konteks perekonomian, pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi sesungguhnya lebih sempit dari pada pembangunan ekonomi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat secara nasional. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dihitung dengan cara mengurangi Produk Domestik Bruto tahun berjalan (  $[PDB]_t$  ) dengan Produk Domestik Bruto tahun sebelumnya (  $[PDB]_{(t-1)}$  ) dibagi Produk Domestik Bruto tahun sebelumnya (  $[PDB]_{(t-1)}$  ) dikali 100 persen atau secara matematika dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Rate\ of\ Economic\ Growth,\ Rog = \frac{(PDB_t) - (PDB_{t-1})}{(PDB_{t-1})} \times 100\%$$

Terdapat beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi. Mengutip hasil pemikiran Kuznets pertumbuhan mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu kenaikan terus menerus dalam produk per kapita atau per pekerja dibarengi dengan kenaikan jumlah penduduk dan perubahan struktural. Ia juga menjelaskan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang antara lain adalah laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita, peningkatan produktivitas, laju perubahan struktural yang tinggi, urbanisasi, ekspansi negara maju, dan arus barang, modal dan orang antar bangsa.

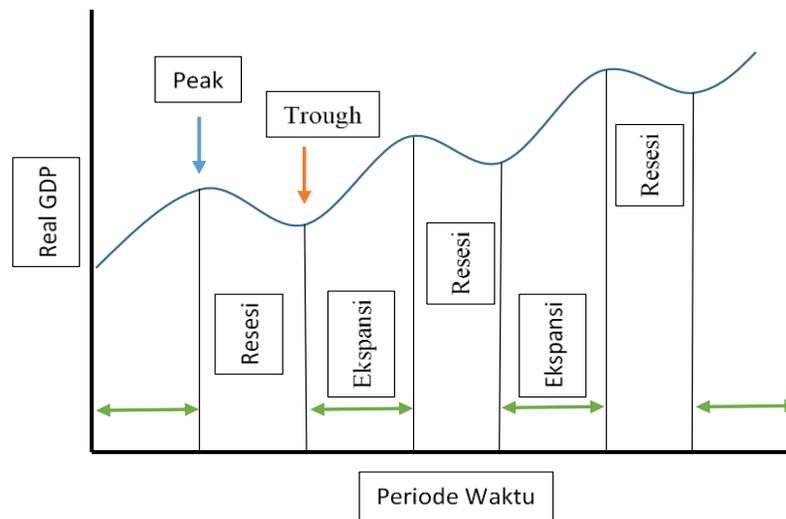
Adapun faktor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Yang termasuk dalam faktor ekonomi adalah sumber daya alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian kerja dan skala produksi. Sedangkan yang termasuk faktor non ekonomi adalah faktor sosial, faktor manusia, dan faktor politik administratif.

Pertumbuhan ekonomi secara nyata tidak selalu menunjukkan peningkatan (ekspansi). Ada kalanya pertumbuhan ekonomi mengalami trend penurunan (resesi). Oleh Shiskin, pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan selama dua kuartal berturut-turut disebut sebagai resesi. Sedangkan menurut *National Bureau of Economic Research (NBER)*, resesi dianggap sebagai

penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan dalam beberapa bulan yang berdampak pada PDB riil, pendapatan masyarakat, ketenagakerjaan, perindustrian, dan perdagangan.

Secara lebih jelas, Insukindro menyampaikan bahwasannya yang dinamakan resesi adalah (perkiraan) penurunan atau kemerosotan secara signifikan aktivitas ekonomi yang menyebar ke seluruh sektor perekonomian (produksi, kesempatan kerja, pendapatan riil, dan indikator lain) dan biasanya berakhir dalam jangka pendek (beberapa bulan).

Gambar 1 Resesi dan Ekspansi dalam Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Webinar series, 8 September, 2020

Besaran ekonomi ini umumnya terkait dengan siklus ekonomi dan siklus bisnis. Resesi dimulai saat aktivitas perekonomian mencapai titik puncak (*peak*) dan berakhir pada saat perekonomian berada pada titik palung (*trough*). Lawan dari pada resesi adalah ekspansi. Adapun yang disebut depresi adalah resesi yang berkepanjangan.

### Kajian Empirik

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa makalah ini akan membahas mengenai kemerosotan ekonomi (resesi) akibat pandemi dan kaitannya dengan perubahan struktur ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia. Berikut ini ditampilkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak kuartal pertama (Q1) 2018 hingga kuartal kedua (Q2) 2020.

Dari Gambar 2 di berikut ini, dapat diketahui bahwa sesungguhnya telah terjadi ekspansi sebanyak dua kali selama periode Q1 2018 hingga Q2 2020, yaitu pada Q1 2018 ke Q2 2018 dan Q3 2018 ke Q4 2018. Sedangkan sisanya adalah resesi. Namun pada kondisi tersebut masih dianggap stabil di atas 5 persen.

Gambar 2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q1 2018 hingga Q2 2020



Sumber: Webinar series, 8 September, 2020

Mulai ditemukan adanya virus corona di Wuhan, China, pada akhir 2019 barulah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun ke angka 4,97 persen. Selanjutnya pada Q1 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 2,97 persen dan berkontraksi secara tajam hingga minus 5,32 persen pada Q2 2020.

Berikut ini ditampilkan data struktur ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2015 – 2019 berikut proporsinya. Dari Tabel 1 dan Tabel 2 di atas dapat diketahui nilai masing-masing sektor lapangan usaha dan besaran proporsinya. Terdapat 4 lapangan usaha yang memiliki porsi besar terhadap PDB yaitu A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan), C (Industri Pengolahan), F (Konstruksi) dan G (Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Sedangkan yang memiliki porsi terbesar terhadap PDB selama 2015 – 2019 adalah C (Industri Pengolahan).

Hal yang perlu diwaspadai dari kenyataan ini adalah bahwa selama pandemi *Covid-19* telah terjadi gelombang PHK yang datanya sudah mencapai 3,05 juta pekerja. Belum lagi ditambah dengan jumlah peserta didik yang lulus pada tahun ajaran 2020, khususnya pelajar tingkat SMA/SMK/ sederajat dan mahasiswa. Surplus tenaga kerja apabila tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang luas akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.

Tabel 1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha  
Tahun 2015 – 2019

Kode	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A	1171445.8	1210955.5	1258375.7	1307373.9	1354957.3
B	767327.2	774593.1	779678.4	796505.0	806206.2
C	1934533.2	2016876.9	2103466.1	2193368.4	2276682.8
D	94894.8	100009.9	101551.3	107108.6	111436.7
E	7369.0	7634.6	7985.3	8429.5	9005.5
F	879163.9	925040.3	987924.9	1048082.8	1108425.0
G	1207164.5	1255760.8	1311746.5	1376882.9	1440523.2
H	348855.9	374843.4	406679.4	435381.9	463254.8
I	268922.4	282823.4	298129.7	315068.6	333358.2
J	421769.8	459208.1	503420.7	538762.7	589435.2
K	347269.0	378279.4	398.971.4	415620.6	443041.6
L	266979.6	279500.5	289568.5	299648.2	316837.1
MN	148395.5	159321.7	172763.8	187691.1	206936.2
O	310054.6	319965.0	326514.3	349374.8	365678.2
P	283020.1	293887.6	304810.8	321132.2	341328.5
Q	97465.8	102490.2	109497.5	117325.6	127506.6
RSTU	144904.2	156507.5	170174.8	185431.6	204998.5

Sumber: BPS, 2020

Keterangan

- A : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- B : Pertambangan dan Penggalian
- C : Industri Pengolahan
- D : Pengadaan Listrik dan Gas
- E : Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- F : Konstruksi
- G : Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- H : Transportasi dan Penggudangan
- I : Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum
- J : Informasi dan Komunikasi
- K : Jasa Keuangan dan Asuransi
- L : Real Estate
- MN : Jasa Perusahaan
- O : Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
- P : Jasa Pendidikan
- Q : Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- RSTU : Jasa Lainnya

Tabel 2 Proporsi Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019

Kode	2015	2016	2017	2018	2019
A	13.47	13.31	13.20	13.07	12.90
B	8.82	8.51	8.18	7.96	7.68
C	22.24	22.17	22.07	21.93	21.68
D	1.09	1.10	1.07	1.07	1.06
E	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
F	10.11	10.17	10.37	10.48	10.56
G	13.88	13.80	13.76	13.76	13.72
H	4.01	4.12	4.27	4.35	4.41
I	3.09	3.11	3.13	3.15	3.17
J	4.85	5.05	5.28	5.39	5.61
K	3.99	4.16	4.19	4.15	4.22
L	3.07	3.07	3.04	3.00	3.02
MN	1.71	1.75	1.81	1.88	1.97
O	3.56	3.52	3.43	3.49	3.48
P	3.25	3.23	3.20	3.21	3.25
Q	1.12	1.13	1.15	1.17	1.21
RSTU	1.67	1.72	1.79	1.85	1.95

Sumber: BPS, 2020.

Adapun sektor yang perlu diwaspadai adalah membengkaknya sektor lapangan usaha A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan), mengingat banyaknya PHK terjadi pada sektor lapangan usaha C (Industri Pengolahan). Mengapa A? Penduduk yang bekerja di perkotaan umumnya adalah pendatang dari berbagai daerah penyangga ataupun daerah lain, terdapat pula yang berasal dari desa (urbanisasi). Ketika mereka terkena PHK maka salah satu jalan untuk dapat bertahan hidup adalah kembali ke kampung halaman masing-masing dengan bekerja di sektor pertanian. Hal ini akan berdampak pada menurunnya tingkat produktivitas di sektor ini, sebab tenaga kerjanya bertambah sedangkan lahan/produksi tetap.

Peningkatan yang mungkin terjadi selain sektor A adalah sektor J (Informasi dan Komunikasi). Selama masa pandemi ini, ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat. Pada saat yang sama sejumlah provider (penyedia jasa internet) juga semakin memanjakan pelanggannya baik pelanggan baru atau pelanggan lama. Kenaikan produktivitas sektor ini akan memungkinkan untuk menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

Dengan kemungkinan meningkatnya jumlah tenaga kerja di kedua sektor tersebut (A dan J) maka pemerintah juga seharusnya bisa fokus untuk mengantisipasi pada sektor ini. Agar produktivitas di sektor pertanian dapat meningkat, subsidi dari pemerintah diperlukan baik dalam

bentuk subsidi pupuk, bibit, ataupun teknologi pertanian. Adapun di sektor teknologi dan informasi, pemerintah diharapkan mampu mendukung angkatan kerja untuk meningkatkan keahlian dan kemampuannya di bidang teknologi informasi.

Selanjutnya, meskipun kenaikan tenaga kerja akan diprediksi terjadi di sektor lapangan usaha A dan J tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi di sector lain. Saat ini perusahaan mungkin sedang menyiapkan sistem kerja yang baik bagi perusahaan. Misalnya dengan menggunakan sistem alih daya (*outsourcing*) dan pekerja kontrak. Bila keadaan ini akan nyata benar terjadi adanya maka pemerintah harus mempersiapkan skema perlindungan tenaga kerja yang baik sehingga tidak hanya menguntungkan bagi pihak perusahaan tetapi juga pihak pekerja sebagai buruh.

### **Penutup**

Adanya pandemi *Covid-19* ini berpengaruh terhadap seluruh sendi kehidupan tanpa terkecuali sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang menurun mengindikasikan bahwa akan terjadi fenomena baru dalam perekonomian, khususnya perubahan struktur ekonomi dan masalah ketenagakerjaan. Sektor lapangan usaha yang perlu diwaspadai peralihannya adalah sektor A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) dan sektor J (Informasi dan Komunikasi). Pemerintah diharapkan sigap dalam mengantisipasi masalah ini, dengan memberikan stimulus yang tepat agar arah pembangunan ekonomi tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

### **Daftar Pustaka**

Deliarnov. 2016. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.

Insukindro. Memahami konsep indikator ekonomi resesi: pernahkah indonesia mengalami resesi? (2010 Q1 – 2020 Q2). Bahan Ceramah. BI Institute Lecture Series. Webinar Series. 8 September 2020.

Jhingan, M. L. 2018. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Depok: Rajawali Pers.

Kuncoro, Mudrajad. 2015. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta,

<https://www.health.detik.com>

<https://www.nasional.kompas.com>

<https://www.nber.org/cycles.html>

# PERAN SEKTOR TELEKOMUNIKASI DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PADA MASA PANDEMI

**Syaiful**

## **Kondisi ekonomi masa pademi**

Pandemi corona belum berakhir dan saat ini masih menginfeksi ratusan negara di dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, perputaran ekonomi mengalami hambatan, bahkan perekonomian negara-negara di dunia terancam jatuh ke jurang resesi. Diketahui, negara Asia yang sudah mengumumkan resesi adalah Jepang, Singapura, Filipina, dan Korea Selatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 mengalami kontraksi 5,32 persen *year on year* (yoy). Angka ini lebih dalam dari ekspektasi sebelumnya. Meski begitu, pada kondisi ini industri makanan, minuman, dan farmasi tumbuh positif. Indeks manufaktur juga bergerak ke arah normal. Turbolensi ekonomi dialami banyak negara akibat pandemi *Covid-19*, tak terkecuali Indonesia. Laporan BPS Rabu (5/8/2020), menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2020 (Q2) mengalami kontraksi hingga 5,32 persen. Meski telah diperkirakan banyak pihak, karena tak sedikit negara lain juga mengalami hal yang sama, namun kedalaman kontraksinya menjadi perhatian lebih pemerintah. Hal ini karena situasinya lebih tinggi dari ekspektasi yang memperkirakan angka di sekitar minus 4,3 hingga 4,8 persen.

Kepala BPS menyatakan nilai -5,32 persen itu adalah kinerja Q2/2020 yang dihitung dengan harga konstan dibandingkan ke Q1/2019. Bila ditera ke Q1/2020, terjadi kontraksi 4,19 persen pada Q2. Namun begitu, jika dihitung dalam satuan kinerja per semester, gambarannya tidak terlalu murung. Dibanding semester 1/2019, misalnya, dalam hitungan harga konstan, angka di semester 1/2020 itu hanya turun tipis, yakni -1,26 persen. Pasalnya, pada Q1 Indonesia masih tumbuh positif 2,97 persen.

Pertengahan Juli lalu, pemerintah Singapura mengumumkan negaranya bahkan terkontraksi -12 persen (YoY) di Q2, setelah pada Q1 secara *year on year* (YoY) juga mencatatkan negatif 0,7 persen. Pada kuartal yang secara berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif, Singapura resmi masuk ke situasi resesi. Thailand juga diperkirakan sedang memasuki masa resesi. Para analis ekonomi dari lembaga keuangan Morgan Stanley yang merilis laporan bertajuk *Asia Economic Mid Year Outlook 2020*, pertengahan Juli lalu, menyebutkan bahwa ekonomi Thailand tercatat -1,8 persen di Q1 dan (diperkirakan) -10 persen di Q2/2020. Filipina juga diterjang mendung tebal dengan -0,2 persen di Q1 dan (diperkirakan) -14 persen di Q2. Awan badai itu juga menyelimuti Malaysia, di mana +0,7 persen di Q1 lalu diperkirakan -13 persen di Q2. Namun, Morgan Stanley yakin bahwa pada Q3 situasinya akan membaik, meski belum pulih. Ekonomi dikatakannya akan mulai bergerak lagi dengan menyesuaikan diri kepada ketentuan situasi

normal baru. Dengan demikian, kontraksi yang terjadi pada Q3 tak sedalam Q2, dan pada Q4 diharapkan kinerja ekonomi sudah menuju ke tingkat tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya.

Namun begitu, di tengah badai ekonomi akibat *pandemic Covid-19* ini, Kecuk Suharyanto melihat ada geliat ekonomi dari sektor industri. Tampak ada kenaikan pada *purchasing manager's index* (PMI). Setelah terpelanting ke level 26 pada Mei lalu, indeks manufaktur, yang mengindikasikan adanya kegairahan pembelian bahan baku dan bahan penolong industri, dikatakan Kecuk kembali menguat. Pada Juni, indeks manufaktur yang dirilis HIS Markit, sudah merambat ke angka 39,1 dan 46.9 di bulan Juli. "Sudah mendekati angka 50 yang berarti kembali normal," kata Kecuk.

Untuk mendorong pertumbuhan industri, tentu diperlukan daya beli masyarakat yang tinggi. Maka itu Presiden Joko Widodo terus mendorong belanja negara jajarannya melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejumlah paket Bansos maupun program padat karya kembali digulirkan untuk mengungkit daya beli. Beberapa kebijakan relaksasi juga telah diberlakukan untuk memberikan stimulasi ekonomi, baik untuk industri besar hingga pada Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Tujuannya agar pelaku ekonomi bisa tetap bertahan melewati situasi sulit pandemi *Covid-19*. Segala kebijakan ini akan diimplementasikan dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan dilaksanakan dengan mengikuti norma dan protokol adaptasi kebiasaan baru. Harapannya, ekonomi di kuartal 3 bisa terangkat.



Warga menerima bantuan sosial (Bansos) tahap dua Provinsi Jawa Barat, di Kelurahan Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/7/2020). Bansos dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

### **Tumbuhnya ekonomi digital**

"Proyeksi dari beberapa lembaga riset biasanya menyatakan ekonomi digital kita memiliki valuasi sebesar US\$ 40 miliar, yang berkontribusi sekitar 11% dari total PDB dengan pertumbuhan sekitar 49% per tahun. Ini adalah pertumbuhan yang luar biasa besar," Untuk itu dalam upaya mengoptimalkan ekonomi nasional di tengah pandemik corona virus, Staf Khusus

Menkominfo Dedy Permadi menyampaikan, setidaknya ada tiga hal terkait dengan transformasi digital Indonesia.

- Pertama adalah potret perkembangan dan potensi ekonomi digital dan sektor infokom dalam masa pandemi.
- Kedua, yaitu kebijakan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Indonesia yang tentunya bekerja sama dengan sektor swasta.
- Ketiga adalah ekosistem pembangunan digital yang nantinya akan terdiri dari beberapa teknologi yang ke depannya akan dikembangkan menjadi sumber daya manusia dan juga terkait dengan legislasi primer.

Pandemi *Covid-19* yang terjadi saat ini telah mengakibatkan pada dibatasinya pergerakan manusia karena potensi penyebaran *Covid-19* yang dibawa oleh perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Kondisi ini memaksa banyak orang untuk beradaptasi dan menjadikan teknologi informasi untuk sarana dalam menjalankan aktivitas keseharian. Pemanfaatan teknologi informasi juga sekaligus sebagai jalan keluar untuk mengatasi pembatasan pergerakan tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi diantaranya digunakan dalam urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah. Dengan diterapkannya teknologi informasi dapat memberikan efisiensi waktu dan biaya serta tenaga, dan tanpa disadari bahwa kehidupan manusia saat ini telah memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi ini. Pemanfaatan teknologi informasi di tengah pandemi *Covid-19* tersebut, diantaranya di bidang Pendidikan, yakni dengan mengadakan *Class On-line*, kemudian di bidang Pemerintahan dengan penyebarluasan informasi melalui website, sarana komunikasi melalui video conference. Selain itu di bidang Bisnis dengan sistem *e-commerce*, bidang Sosial melalui media hiburan dan komunikasi serta social media, serta di bidang Kesehatan, untuk tujuan mapping dan *tracking data* persebaran *Covid-19*.

Pandemi *Covid-19* telah menghasilkan terminologi baru “*New Normal*” bagi masyarakat Indonesia, sekaligus menciptakan paradigma baru dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dimulai dari aktivitas di rumah, kegiatan dikantor, di perbelanjaan pasar sampai aktivitas pembelajaran bidang pendidikan.

Pemerintah pusat maupun daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk menekan lajunya tingkat penyebaran kasus *Covid-19* ini yang terus bertambah sejalan waktu. Melalui pengaturan *work from home (WFH)* beberapa Lembaga, instansi-instansi perusahaan non esensial, dan melakukan pembatasan pergerakan beberapa kegiatan terutama untuk menghindari keramaian, seperti kerumunan orang di bandara, di terminal bus, dan di beberapa stasiun kereta api, serta beberapa tempat perbelanjaan, mall dan beberapa tempat hiburan dan pariwisata, yang sangat memberi dampak pada pergerakan ekonomi secara nasional.

Di bidang Pendidikan, sebagaimana besar lembaga, institusi pendidikan sudah lebih awal menjalankan kehidupan *new Normal* dengan menerapkan aktivitas pembelajaran jarak jauh dari rumah, melalui *distans learning* (non klasikan). dengan memanfaatkan akses internet secara daring, dimana tingkat keberhasilan dan keberlanjutan sangat tergantung pada infrastruktur yang tersedia, jaringan internet yang baik (kuat dan stabil) didukung ketersediaan device (peralatan) untuk terkoneksi pada jaringan internet seperti Komputer, Laptop atau *smartphone*, kesemua ini sangat mempengaruhi tatanan kehidupan baru, dan memberi dampak terhadap perekonomian secara Nasional. Memiliki infrastruktur yang tepat menjadi hal yang terpenting dalam periode kritis ini. Meskipun telah terjadi pertumbuhan masif dan adopsi dalam perangkat dan platform teknologi digital selama bertahun-tahun, memiliki konektivitas dan *bandwidth* yang andal akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan bekerja secara *remote* di tengah *Covid-19*. Untuk Perusahaan atau lembaga bisnis lainnya, dengan karyawan yang bekerja dari rumah, setiap perusahaan perlu memastikan tingkat produktivitas yang optimal guna mempertahankan operasi bisnis yang berkelanjutan di tengah krisis *Covid-19* saat ini. Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi (Kemkominfo) baru-baru ini mengumumkan sebuah aturan yang menyoroti peran perusahaan telekomunikasi dalam mengoptimalkan pengalaman jaringan saat *social distancing* menjadi pusat perhatian, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah menyadari betul peran penting yang dimainkan oleh perusahaan telekomunikasi dalam perekonomian.

Lonjakan lalu lintas data secara tiba-tiba membuat pemain industri telekomunikasi sendiri perlu memastikan pemantauan lalu lintas yang efisien, yang akan semakin penting untuk penyeimbangan sinyal seluler dan rencana peningkatan kapasitas jaringan. Lebih jauh lagi dari sekedar lalu lintas data, perusahaan telekomunikasi juga perlu membuat keputusan berbasis data terkait investasi dan memaksimalkan kinerja. Kemampuan untuk menganalisis data yang masif dengan cepat untuk menemukan wawasan akan menjadi kunci utama, Periode Pembatasan Sosial Berskala Besar ini mungkin tampak seperti masa perjuangan berat bagi perusahaan telekomunikasi dalam memenuhi peningkatan permintaan layanan mereka. Tetapi setiap krisis menghadirkan peluang, karena masa krisis ini menghadirkan peluang besar untuk meraih kepercayaan publik lewat penyediaan layanan jaringan yang stabil sekaligus menjaga bisnis pelanggan agar tetap berjalan sebaik mungkin.

Menurut, CNN Indonesia, dampak dari pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan aktivitas banyak dilakukan dirumah seperti *work from home* ataupun belajar dari rumah disatu sisi menjadikan penyedia jasa internet, IndiHome dan Biznet mencatat peningkatan lalu lintas (*traffic*) data dan pemkasi baru sejak dianjurkan aktivitas dirumahaja. *Traffic* meningkat 13 persen sampai 15 persen dibandingkan *traffic* rata-rata.

Peningkatan 3 Juta dari 8 Juta ke 11 juta orang juga terjadi lonjakan *traffic* pada penonton harian TV Interaktif Indihome. Himbauan pembatasan aktivitas di luar rumah oleh pemerintah membuat Indihome mengalami peningkatan tersebut. "Selama WFH, permintaan untuk pemasangan baru

paket Indihome meningkat. Jumlah pelanggan baru pada Maret meningkat 30 persen sampai dengan 40 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya," kata Arif.

### **Penutup**

Saat ini, sektor UMKM adalah pihak yang cukup terdampak akibat pandemi *Covid-19*. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), memberikan dampak terhadap menurunnya omset bisnis Unit Mikro Kecil Menengah. Melihat keadaan ini, maka pemberdayaan UMKM dilakukan dengan menyediakan berbagai kebutuhan kesehatan, seperti masker dan Alat Pelindung Diri (APD) lainnya.

Disamping itu, untuk memberikan motivasi kepada pelaku UMKM, diberikan program *Training of Trainer*, yang kemudian dilanjutkan dengan diselenggarakannya online training produk kepada para UMKM. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong para pelaku UMKM untuk lebih adaptif dan mampu berinovasi dalam situasi kondisi pandemi, sebagai upaya agar perekonomian tetap dapat berjalan dengan normal.

### **Daftar Pustaka**

- Afdal namakul, Fin Fajar indonesia (2020) "Peran Telkom Group Dalam Penanggulangan Covid-19"
- Herfini Haryono, Indo telko.com (2020) "Pandemi Covid-19 dan industri telekomunikasi". 2020 Kompas.com dengan judul "Menilik Potensi Resesi Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19.",
- Irfan Kamil, Kompas.com - 09/06/2020, Kompas.com dengan judul "Pembelajaran Positif dari Covid-19: Penyerapan Teknologi dalam Pendidikan",
- Buddy (2020) Medialampung.co.id "Teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting",
- Putut Trihusodo, (2020), Potal informasi Indonesia. Indonsia.go.id "Sinyal Positif di Tengah Pandemi"

# **PERAN AKUNTAN PEMERINTAH PASCA PANDEMI *COVID-19* MENUJU PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

**Arni Karina**

## **Kondisi Makro Ekonomi Indonesia Pada Saat *Covid-19***

Dampak *Covid-19* terhadap perekonomian dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan turun dari proyeksi 2,9% menjadi 2,4 %, pertumbuhan industri manufaktur melambat, aktivitas ekonomi global menurun mengakibatkan permintaan minyak juga turun, serta menurunnya pasar saham.

Proyeksi perekonomian global pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif atau mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan turun mendalam pada skenario berat menjadi 2,5 % yang artinya turun separuhnya dari tahun 2019 yakni 5 % (Anas Anwar,2020). Demand effect yang terjadi diakibatkan karena ketidakpastian perkembangan penyakit dan ketidakpastian kebijakan ekonomi dalam meringankan dampak *Covid-19*. Pekerja akan kehilangan penghasilan, tabungan rumah tangga untuk berjaga-jaga naik serta perusahaan akan berhati-hati dalam melakukan investasi. *Supply effect* yang terjadi adalah banyaknya perusahaan lebih bergantung kepada cash flow artinya bahwa likuiditas perusahaan banyak yang sangat terganggu, penurunan permintaan yang sangat tajam akibat melemahnya daya beli masyarakat sehingga terancam kebangkrutan. Ancaman *Covid-19* terhadap stabilitas sektor keuangan meliputi volatilitas pasar saham, surat berharga, depresiasi rupiah serta persoalan likuiditas.

Menurut Asian Development Outlook (ADO) 2020, pandemi *Covid-19* bersamaan dengan penurunan harga komoditas dan gejolak pasar keuangan, akan berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia pada tahun ini.

Menurut Menkeu Sri Mulyani memperkirakan deficit anggaran pada APBN 2020 diproyeksikan akan melebar hingga 2,5 % dari PDB yang akan menekan penerimaan negara.

## **Kebijakan Stimulus Ekonomi Pada Masa *Covid-19***

Kebijakan stimulus moneter dan keuangan yang dilakukan pemerintah adalah melalui penurunan suku bunga, penundaan dan pelonggaran pembayaran kredit serta pemberian fasilitas pembiayaan. Di bidang fiscal, pemerintah menaikkan anggaran kesehatan, bantuan rumah tangga dan program pemulihan ekonomi khususnya sektor yang terdampak *Covid-19*. Stimulus Fiskal yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara:

1. Pemerintah melakukan percepatan belanja dan kebijakan yang mendongkrak padat karya. Beberapa hal diantaranya yang dilakukan pemerintah yakni:

- a) Pemerintah melakukan percepatan pencairan belanja modal

- b) Teknis di lapangan yang dilakukan adalah pemerintah melakukan percepatan penetapan pejabat perbendaharaan negara yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendaharawan pemerintah.
- c) Pemerintah juga mendorong percepatan pelaksanaan tender yang sebelum terjadi covid terkesan sangat lama
- d) Percepatan dan revisi anggaran yang sifatnya strategis dilakukan secara komprehensif
- e) Ketersediaan uang kas sebagai *cash management* dan *fiscal buffer* juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya.
- f) Pada bidang percepatan pencairan bantuan sosial pemerintah mencairkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebelum masa jatuh temponya. Misalnya yang seharusnya dicairkan pada Februari, Maret dan April sudah dapat dicairkan pada bulan Februari.
- g) Pemerintah melakukan transfer ke daerah dan dana desa dengan mendorong dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dana desa, untuk kegiatan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja di desa.

2. Pemerintah melakukan stimulus belanja. Kebijakan yang dilakukan pemerintah yakni

- a) Perluasan kartu sembako dengan cara menambah manfaat kartu sembako
- b) Menambah insentif sektor pariwisata dengan memberikan insentif bagi travel agent dan tenaga pemasaran pariwisata

### **Fokus dan Refokusing Anggaran Covid-19**

Dalam mengatasi dampak Pandemi *Covid-19*, pemerintah mengeluarkan PERPU No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus *Covid-19*.

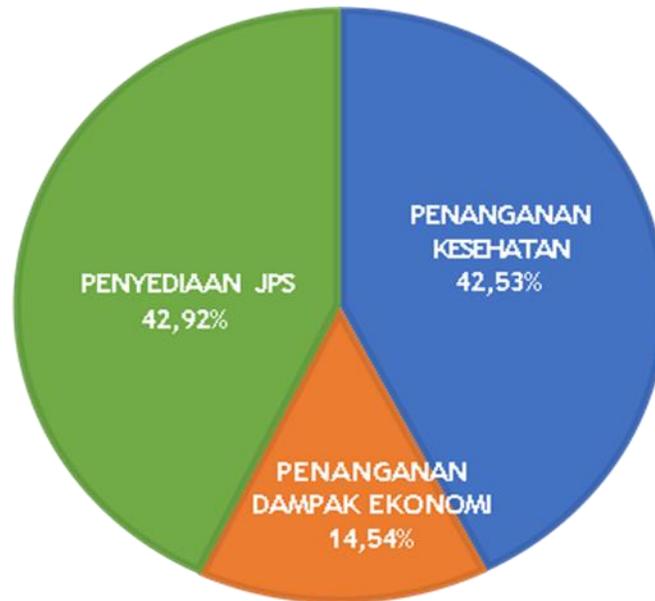
Tabel 1 Pengaruh Pandemi *Covid-19* pada APBN 2020  
(Perpres 54/2020)

Item	Sebelum Covid (Rp T) (UU 20 thn 2019)	Sesudah Covid (Rp T) (Perpres 54 thn 2020)	Situasi
Pendapatan	2.233,2	1.760,9	Turun
Belanja (Total)	2.540,4	2.613,8	Naik
TKDD	856,9	762,7	Turun
Defisit	307,2	852,9	Naik

Total Belanja pada APBN setelah adanya *Covid-19*, memang naik menjadi Rp 2.613,8 T tetapi alokasi untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) justru turun dari Rp 856,9 T

menjadi “hanya” Rp 762,7 T, yang nota bene merupakan pendapatan utama Daerah (Abdul Halim;2020).

Menurut pendapat (Abdul Halim;2020) yang disampaikan pada Webinar Forum Dosen Akuntansi Publik tentang “Refokusing Anggaran Di Masa *Covid-19*” adalah sebagai berikut:



#### Rasio Alokasi Anggaran dan Penanganan *Covid-19*

- Alokasi Anggaran Penanganan *Covid-19*, berjumlah Rp. 54.890.368.985.492.(54,89T)
- Alokasi tersebut terdiri atas alokasi dari belanja dalam bentuk kegiatan sebesar Rp. 13.893.365.583.867 (13,89T), dalam bentuk Hibah/Bansos sebesar Rp. 19.163.771.279.072 (19,16T) dan Alokasi pada Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 21.833.232.122.583 (21,83T).
- Alokasi tersebut terdiri dari 3 pos alokasi sebagai berikut:
  - a) Penanganan Kesehatan Berjumlah Rp. 23.347.466.570.764,40 (23,35T), yakni 42,53% dari total alokasi anggaran penanganan *Covid-19*;
  - b) Penanganan Dampak Ekonomi berjumlah Rp. 7.982.903.023.221,82 (7,98T), atau 14,54% dari total alokasi anggaran penanganan *Covid-19*; dan
  - c) Penyediaan Jaring Pengaman Sosial berjumlah Rp. 23.559.999.391.512,40 (23,55T) atau 42,92% dari total alokasi anggaran penanganan *Covid-19*

Kesimpulan dari Refokusing anggaran yang sudah dilaksanakan tersebut adalah adanya revisi anggaran yang sangat signifikan pada APBN 2020 yang mengharuskan akuntan sektor publik mengamankan pelaksanaan revisi anggaran tersebut.

## **Pelaporan Keuangan Pemerintah Pada Saat Pandemi *Covid-19***

Dalam menjawab tata laksana terjadinya revisi APBN 2020 tersebut. Menkeu pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020, bahwa program penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi adalah program yang luar biasa penting, didesain dalam suasana kegentingan yang memaksa. *Emergency* atau *Urgency* menjadi hal sangat penting. Presiden menekankan kecepatan menjadi sesuatu yang sangat penting namun pada saat yang sama ditekankan bahwa kecepatan tidak boleh mengompromikan akuntabilitas transparansi dan pengelolaan yang baik. Prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan transparansi mutlak tetap harus dijaga, sehingga setiap transaksi keuangan negara dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian, capaian opini atau kualitas laporan keuangan dapat dipertahankan dan terus dapat ditingkatkan.

Melalui rangkaian kegiatan Rakernas ini diharapkan dapat dicapai sebuah komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi sinergi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi *Covid-19* dan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan seluruh entitas Pemerintah dapat tetap terjaga, terus memperoleh opini WTP, dan berdampak nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, adil dan makmur, sebagaimana yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.

Kemenkeu selaku pemangku kebijakan terus menerus melakukan sosialisasi kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) mengenai pencatatan mengenai Akuntansi Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD), fokus terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pembekalan pengetahuan atas perimbangan keuangan negara

## **Peran Akuntan Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi *Covid-19***

Dalam mendanai prioritas anggaran *Covid-19*, akuntan pemerintah diharapkan dapat menghitung penggunaan anggaran yang sifatnya krusial seperti contoh hal-hal di bawah ini:

- a) Realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat dari adanya pandemi *Covid-19*;
- b) Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran;
- c) Penerapan pola padat karya tunai (*cash for work*) dalam pelaksanaan belanja modal untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan irigasi;
- d) Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengundang orang banyak dari semula dilakukan dengan pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap

muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain: 1. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana *video conference/teleconference*; dan 2. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*.

### **Kesimpulan**

Ini adalah wajah baru Revisi alokasi APBN 2020. Dengan adanya refocusing anggaran yang dibuat oleh Satuan Kerja (Satker), akuntan sebagai pelaku utama keuangan seharusnya dapat menjadi advisor dalam mengawal efektivitas anggaran *Covid-19*. Fungsi kontroling yang dilakukan akuntan pemerintah mejadi factor yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan membantu pemulihan ekonomi pada masa pandemi *Covid-19*.

Dengan adanya Pandemi *Covid-19* telah mengefektifkan dukungan teknologi dalam penyelesaian banyak sekali pekerjaan, sehingga anggaran belanja pendukung kinerja seperti konsumsi rapat, perjalanan dinas, dan pengeluaran sejenis, bisa diminimalkan. Contohnya anggaran konsumsi rapat di K/L seluruh Indonesia saja dapat dipangkas mencapai Rp 18 triliun per tahun. Selain hal tersebut, rekam jejak digital yang dahulu masih sangat lemah, pada masa *Covid-19*, mulai terdokumentasi dengan baik.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Halim. Webinar Forum Dosen Akuntansi Publik. Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Penganggaran Keuangan Publik. (2020)
- Anas Iswanto Anwar. Webinar Indonesia Economics Survival in The Middle of Global Pandemic Covid-19 (2020)
- Rustam Efendi. Webinar Refocusing Anggaran di Masa Covid-19. (2020)
- Solikin M Juhro. Koordinasi Kebijakan di Masa Pandemi. Bank Indonesia. Kuliah Umum FEB Unhas (2020)
- Warta Ekonomi. Berita Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke 23. (24 September 2020)
- Kementrian Keuangan RI. Siaran Pers. Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020. (22 September 2020)

# Bagian 2

## LEMBAGA KEUANGAN

# PERBANKAN DI TENGAH DISRUPSI TEKNOLOGI DAN PANDEMIC COVID-19

Dian Anggraeny Utina

## Pendahuluan

Dalam waktu beberapa tahun terakhir terjadi disrupsi teknologi yang secara perlahan dan pasti mulai menggerus sejumlah sektor, seperti transportasi, ritel, media cetak, logistik, tak terkecuali industri keuangan dan perbankan.

Ditandai dengan masifnya perkembangan industri *financial technology (fintech)* saat ini, dimana pada awal 2016 jumlah fintech kurang dari 10, dan tahun 2019 sudah mencapai 250 fintech. Dari jumlah tersebut, mayoritas bergerak di sektor *peer to peer lending* atau penyediaan pinjaman *online*. Porsi terbesar kedua yakni bidang pembayaran digital, *wealth management, aggregator*, perencanaan keuangan, *enabler, market support, equity crowd funding*, dan lain-lain. Sementara itu, jumlah *fintech lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus bertambah menjadi 127 perusahaan per 7 Agustus 2019. Adapun penyaluran kredit pembiayaan *online* mencatat pertumbuhan yang signifikan. Hingga Juni 2019 outstanding pinjaman yang disalurkan perusahaan P2P *lending* mencapai Rp8,5 triliun, tumbuh 68,53% secara year to date (YtD) dari posisi akhir tahun 2018 yang berjumlah Rp5,04 triliun. Di sisi lain, jumlah akumulasi pinjaman *online* (pinjol) oleh *startup fintech* mencapai Rp44,8 triliun, tumbuh 97,68% secara year to date (YtD) dari posisi akhir tahun 2018 yang berjumlah Rp22,66 triliun. Mayoritas atau sekitar 85,9% dari pinjaman tersebut atau sebesar Rp38,49 triliun (tumbuh 96,2% YtD) disalurkan kepada peminjam di Pulau Jawa dan sisanya di luar pulau Jawa yakni sebesar Rp6,32 triliun (tumbuh 107,19% YtD). Sejalan dengan itu, jumlah rekening yang bergabung dengan pinjaman *online* juga mengalami kenaikan, baik rekening peminjam (*borrower*) maupun rekening pemberi pinjaman (*lender*). Total akumulasi rekening *lender* tumbuh 140,39% (YtD) atau dari 207.507 rekening menjadi 498.824 rekening, sedangkan jumlah rekening *borrower* naik 123,51% (YtD) dari 4.359.448 rekening menjadi 9.743.679 rekening. Dalam rentang waktu yang sama, akumulasi transaksi *lender* mengalami kenaikan 172,86% menjadi 23,99 juta sedangkan transaksi peminjam naik 131,09% menjadi 33,12 juta. Rata-rata nilai pinjaman yang disalurkan naik tipis sebesar 9,11% dari Rp65,81 juta menjadi Rp71,81 juta dengan rata-rata nilai pinjaman terendah turun 8,77% menjadi Rp16,19 juta (FinancialBisnis.com, 22/8/2019).

Perkembangan teknologi digital semakin pesat dengan adanya wabah Pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh dunia dan memicu banyak perubahan, termasuk perilaku masyarakat, dimana dengan adanya wabah virus *Covid-19*, dilakukan pemberlakuan *Social Distancing* dan *Lock Down*, masyarakat dihimbau untuk tidak beraktifitas di luar rumah, kecuali untuk kondisi darurat. Riset menunjukkan bahwa sebanyak 79% responden memilih untuk lebih banyak berkegiatan di rumah. Perubahan perilaku konsumen ini juga terasa dalam transaksi perbankan. Lembaga

pemeringkat internasional, Fitch Ratings memprediksi pandemi *Covid-19* akan mendorong strategi transformasi digital bisnis perbankan di wilayah Asia Tenggara. Dalam publikasinya yang dikutip pada Minggu (24/5/20), lembaga ini memprediksi adanya peralihan preferensi nasabah perbankan untuk menggunakan *digital banking*. Fitch mengatakan bank dengan sistem digital yang telah mapan dan maju akan memperoleh keuntungan dari tren tersebut. Selain itu, perbankan akan memetik manfaat dari potensi peningkatan produktivitas dan penghematan biaya dari penutupan cabang dalam jangka menengah. Pengurangan jaringan kantor telah dilakukan oleh Bank BUMN antara lain Bank Mandiri yang akan menutup 65 cabangnya di seluruh Indonesia, dan sebanyak 44 kantor cabang merupakan cabang mikro. Nampak bahwa perubahan perilaku masyarakat menyebabkan preferensi kepada transaksi keuangan digital yang sebelum pandemi telah berlangsung dan menjadi lebih masif setelah pandemi, dan pada akhirnya akan berimbas pada tereduksinya peran kantor cabang.

Memerhatikan kondisi disrupsi teknologi, perkembangan fintech yang masif dan perubahan perilaku masyarakat, olehnya itu agar bank tetap mampu eksis dan memenangkan persaingan, maka industri perbankan perlu menyikapi dengan menyusun rencana strategis jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, untuk memenuhi dan menjembatani kebutuhan masyarakat dalam kemudahan layanan perbankan dan meningkatkan peran bank dalam perluasan layanan sampai ke pelosok daerah.

Adapun yang menjadi tantangan perbankan menuju *digital banking* antara lain adalah pertama, perubahan pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan layanan dari lembaga jasa keuangan. Kedua, menjamurnya teknologi finansial (fintech) baik untuk pembayaran maupun pendanaan atau *peer-to-peer* (P2P) *lending*. Fakta bahwa perusahaan rintisan bidang teknologi keuangan atau fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah perusahaan maupun kontribusi terhadap perekonomian. Yang mana nilai transaksinya untuk penyaluran kredit pembiayaan *online* hingga Juni 2019 mencapai Rp8,5 triliun, tumbuh 68,53% (YtD) dari tahun 2018 sejumlah Rp5,04 triliun. Di sisi lain, jumlah akumulasi pinjaman *online* (pinjol) oleh *startup fintech* mencapai Rp44,8 triliun, atau tumbuh 97,68% (YtD) dari tahun 2018 sebesar Rp22,66 triliun.

Data dan fakta ini menunjukkan bahwa bank urgent melakukan transformasi bisnis ke arah digital baik melalui bisnis model maupun kemampuan bank dalam memanfaatkan dan mengolah data. Bank perlu memanfaatkan data untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam operasional yang dijalani. Kebutuhan penguasaan dan pengolahan data semakin krusial sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen bank. Kebutuhan analisa data juga dibutuhkan untuk menganalisis selera nasabah dan masyarakat maupun untuk merencanakan ekspansi bisnis. Seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani bahwa "Data adalah tambang baru, dulu yang menjadi kaya adalah yang menguasai tambang emas, batubara,

minyak, maka pada era digital ini yang disebut sebagai tambang adalah tambang data,” (Kompas.com, Jumat 2/3/2018).

## **Pembahasan**

Menurut Arwin (2020), “tantangan utama yang dihadapi industri perbankan bukan hanya berasal dari *fintech* tetapi juga berasal dari Neobank atau The Challenger Bank. Neo bank adalah bank yang beroperasi secara digital penuh, tanpa kehadiran fisik kantor cabang. Neobank lahir dari aplikasi teknologi “*chatting*” atau aplikasi sosial media lainnya. Apabila dilihat perkembangan Neobank di negara-negara lain seperti kasus KakaoBank di Korea yang lahir dari KakaoTalk, KlarnaBank di Swedia yang lahir dari Shopping Apps-ShopNowPayLater, WeBank di China yang lahir dari WeChat. Perkembangan Neobank tanpa fisik kantor sangat pesat. Di Eropa Neobank telah berhasil menggaet 15 juta nasabah, sementara pada saat yang bersamaan bank dengan platform dan bisnis model konvensional justru secara ekstrim telah kehilangan 2 juta nasabah. Mencermati fenomena ini sangat menarik dimana NeoBank yang berasal dari aplikasi sosial media seperti KakaoBank (2016) di Korea dalam 2 hari beroperasi, berhasil menggaet 240 ribu nasabah. Selanjutnya dalam 13 hari, telah berhasil meraih 2 juta nasabah. Pada Juli 2019, meraih 10 juta nasabah,” jelasnya.

Kehadiran *fintech* dan Neobank, tak lepas dari kelanjutan perkembangan teknologi digital era 3G dan 4G (Rasyid, 2020). Perkembangan digital telah mengalami perkembangan luar biasa mulai dari teknologi 3G, 4 G dan sebentar lagi kita akan memasuki era 5G. Era 5G ditandai dengan berbagai kemajuan teknologi yang menakjubkan dan revolusioner. Kemajuan perkembangan teknologi dengan munculnya *Artificial Intelligence (AI)*, *Big Data*, *Cloud Computing*, *Robotics*, *Biometrics Recognition*, *Blockchains*, *Internet of Things*, *Virtual Reality*, *Augmented Reality*, dan sebagainya dapat menjadi ancaman bagi bisnis perbankan konvensional namun sekaligus dapat juga menjadi peluang bagi perbankan, tergantung bagaimana industri perbankan menyikapi fenomena ini. Pertanyaannya selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana respon perbankan dalam memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut yang di era 5G akan berkembang sangat pesat dan kembali akan mengubah model bisnis keuangan dan peta industri perbankan.

Saat ini, perbankan menghadapi dua tantangan utama perbankan (Rasyid, 2020), yaitu tantangan pertama dari *fintech* yang telah berkembang dengan pesat, dan kedua dari Neobank yang terbukti telah menunjukkan keperkasaan dengan perkembangan yang cukup masif di dunia yang lain. Kecenderungan ini perlu diantisipasi oleh perbankan Indonesia, dimana perkembangan *fintech* sudah menjadi ancaman yang nyata, sementara neobank praktis belum ada di Indonesia namun tidak menutup kemungkinan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan muncul NeoBank.

Menurut Rasyid (2020), untuk menghadapi dua tantangan utama perbankan dari *Fintech* dan Neobank, terdapat lima agenda yang perlu dilakukan oleh industri perbankan, antara lain

pertama, bank harus segera bersiap dan mengantisipasi kehadiran Era 5G dan mengadaptasi berbagai teknologi digital yang relevan bagi peningkatan layanan perbankan. Kedua, transformasi digital adalah keniscayaan dan harus dijalankan sepenuh hati, berdasarkan 4 pilar budaya yaitu antara lain Inovasi, *Customer and User Experience*, *Cross-Selling* yang efektif dan SDM yang qualified. Ketiga, perbankan harus mengantisipasi bisnis bank ke depan yang tak hanya berbasis pada pertumbuhan asset semata tetapi juga berbasis konten, dimana perubahan paradigma bisnis perbankan harus menyesuaikan dengan paradigma fintech dan neobank yang telah terbukti berhasil meraih kepercayaan masyarakat. Keempat, perbankan harus membangun paradigma baru dalam merumuskan inovasi dan budaya pelayanan. Kelima, pentingnya perbankan membangun integrasi platform salah satunya langsung menyasar *electronic commerce*.

Menurut Tigor M. Siahaan (CEO PT. CIMB Niaga Tbk), perbankan yang saat ini masih menjadi seperti dinosaurus dalam industri keuangan, besar dan lamban, harus menjadi *game changer* dan *clearing house*. Langkah ini bisa ditempuh secara produktif dengan kolaborasi dengan fintech dan jasa neobank (entrepreneur.bisnis.com,14/8/20). Pada dasarnya, baik fintech, neobank dan bank konvensional masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, olehnya itu peluang strategi kolaborasi akan jauh lebih baik. Dalam hal ini bank akan memanfaatkan sistem teknologi *fintech* untuk menjangkau nasabah, sedangkan *fintech* bisa mengakses pendanaan yang murah.

### **Kesimpulan**

Untuk mempertahankan pangsa pasar dan mengembangkan bisnisnya, Bank perlu mempelajari apa yang menjadi kebutuhan dan ekspektasi nasabah. Dalam kondisi kehidupan yang semakin sulit dan kompleks, bank perlu menyediakan *support* layanan keuangan yang mudah, murah, praktis, aman dan cepat.

Untuk itu industri perbankan, perlu menyusun rencana strategis jangka panjang dan jangka menengah terkait teknologi digital perbankan, dan hal ini dioperasionalkan dalam rencana kerja dan anggaran setiap tahunnya. Bank juga perlu menyiapkan *budget* untuk infrastruktur digital guna mendukung layanan bisnis perbankan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis, Bank perlu melakukan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal guna melihat sejauh mana kemampuan Bank untuk memanfaatkan kekuatan dan mengoptimalkan peluang serta meminimalisir kelemahan, dan secara bersamaan menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan perannya sebagai agen pembangunan.

Kebutuhan pengembangan teknologi digital perlu dilakukan di berbagai bidang, baik dari segi produk dan aktifitas perbankan, maupun dari sisi pemasarannya, termasuk dalam pencatatan dan

pengolahan datanya. Perkembangan teknologi digital dimaksudkan agar Bank bisa memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya. Peranan teknologi dalam layanan perbankan akan berdampak kepada pelayanan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini nasabah akan diuntungkan karena tarif relatif akan menjadi lebih murah dan jangkauan pelayanan juga jadi lebih luas. Dengan adanya digital banking, bank juga perlu memberikan nilai tambah kepada nasabah untuk membantu UMKM, menjadi penyedia layanan *one stop service* atau fasilitator *electronic commerce* bagi UMKM.

Di lain sisi, sisi positif perkembangan teknologi digital yang akan memudahkan dan memanjakan nasabah dalam bertransaksi, perlu diperkuat pula dengan aspek keamanan (*security*) dalam bertransaksi. Perlu diantisipasi kejahatan-kejahatan *cyber* yang semakin canggih dan berpotensi merugikan nasabah dan menyebabkan lembaga keuangan dan bank kehilangan kepercayaan. Dengan inovasi-inovasi digital dan strategi kolaborasi diharapkan akan membuat Bank tetap eksis dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi dan menggerakkan roda perekonomian.

#### **Daftar Pustaka**

- Financial Bisnis.com, 2019, Jumlah Fintech dan Penyaluran Pinjaman Online Tumbuh Signifikan, Jakarta (22/8/2019)
- Liputan6.com, 2020, Neobank Jadi Ancaman Bisnis Perbankan Konvensional di Era Digital, Jakarta (15/8/2020)
- Liputan6.com, 2020, Transformasi digital perbankan menjadi keniscayaan kala pandemi, Jakarta (24/5/2020)
- Rasyid, Arwin. 2020. “Digital Banking Revolution, PENERBIT RAYYANA KOMUNIKASINDO, Jakarta, Agustus 2020

## **GRADUASI PENANGANAN RISIKO PERBANKAN NASIONAL: IMPLIKASI KRISIS *COVID-19***

**N. Ikawidjaja**

### **Pendahuluan**

Tahun 2020, merupakan tahun tantangan bagi Indonesia dan negara lainnya dalam mengendalikan dua risiko bersamaan yaitu risiko *Covid-19* dan risiko ekonomi. Pengalaman Indonesia telah mengalami krisis ekonomi Asia 1998 dan krisis keuangan global 2008 memberikan fondasi yang cukup baik dalam menghadapi permasalahan ekonomi dari dampak *Covid-19*.

Salah satu struktur *governance* yang telah dibentuk dalam menghadapi risiko ekonomi yakni Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menangani guncangan (shock) perekonomian disebabkan pandemi *Covid-19* yang memicu hadirnya risiko sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan (SSK). Selain itu telah dipayungi pula dengan UU 2/2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020.

Dalam UU 9/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Pembentukan komite untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan bagi kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. SSK dinyatakan sebagai kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.

Komite beranggotakan Menteri Keuangan (koordinator), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, Ketua Dewan Komisiner LPS yang masing-masing memiliki hak suara untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya. Tugas dan kewenangan komite melakukan tindakan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan SSK, penanganan krisis sistem keuangan, dan penanganan permasalahan bank sistemik (tentunya termasuk juga bank non-sistemik) dalam kondisi normal maupun krisis sistem keuangan.

Secara garis besar strategi penanganan krisis sistem keuangan melalui jalur fiskal, makroprudensial serta jalur mikroprudensial. Ketiga jalur dimaksud berelasi kuat dalam menjamin sistem keuangan berjalan efektif dan efisien dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional. Salah satu jalur dalam ulasan berikut memberikan perhatian pada jalur mikroprudensial atau jasa keuangan khususnya keterkaitan dengan sektor perbankan. Dalam sejarah krisis sektor jasa keuangan tergambar secara graduasi tidak mudah jawaban memahami krisis perbankan dan keuangan (Reinhart & Rogoff, 2009).

Graduasi risiko perbankan merupakan konsep yang didefinisikan adanya peningkatan atau penurunan risiko dengan batas ambang tertentu secara bertahap/berangsur-angsur untuk mencapai pemulihan ekonomi. Graduasi bagian dari proses manajemen risiko industri keuangan bank *foreward looking* terhadap ketidakpastian, biaya, laba dan nilai tambah bank. Graduasi mengonfirmasi potensi risiko kebijakan terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko perbankan secara individual maupun dengan entitas anak.

Dalam jangka pendek dan menengah sedikitnya tiga potensi risiko kebijakan membutuhkan konfirmasi lanjutan dalam penanganan risiko industri keuangan bank dalam kerangka pemulihan ekonomi yaitu; a) risiko inheren bank keterkaitan pada risiko kredit terhadap risiko lainnya; b) implikasi penerapan PSAK 71 instrumen keuangan telah dimulai 2020, dan c) konsolidasi bank umum dalam pemenuhan modal inti minimum dengan jadwal pentahapan dimulai Desember 2020 hingga 2022 terkecuali BPD dengan kelonggaran hingga Desember 2024.

Dibutuhkan adanya konfirmasi, komunikasi dan konsultasi kepada regulator untuk graduasi risiko perbankan dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional dikarenakan adanya batasan waktu (tahun) dalam kebijakan terkait pemulihan ekonomi. Sementara, respon terhadap stabilitas sistem keuangan pada jalur mikroprudensial membutuhkan waktu lebih panjang dan kompleks.

### **Pembahasan**

Kebijakan penempatan dana pemerintah pada perbankan kelompok Himpunan Bank Negara (Himbara) dan BPD sebesar Rp 30 triliun dan Rp 11,5 triliun merupakan *standby loan* dalam kondisi krisis untuk menopang likuiditas perbankan bila dibutuhkan segera. Dana penempatan ini cukup membantu mendorong aliran kredit baru maupun penambahan fasilitas kredit lama. Hingga September 2020 kelompok Himbara menyalurkan Rp 119,8 triliun untuk 1,5 juta debitur dan Asbanda (BPD) sebesar Rp 7,4 triliun.

Peningkatan penyaluran kredit baru dan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK 11/2020 tanggal 13 Maret 2020 telah mencapai Rp837,64 triliun untuk 7,18 juta debitur (Agustus 2020). Stimulus kebijakan ini secara risiko inheren perbankan dari sisi bisnis mendorong peningkatan volume kredit dan sisi finansial memberikan cukup relaksasi *countercyclical* di tengah pandemi *Covid-19*. Potensi kebijakan pemulihan ekonomi ini memberikan konfirmasi graduasi risiko perbankan yang bersifat sementara sekurangnya sampai dengan Maret 2021 sementara respon restrukturisasi untuk menjamin tingkat kesehatan bank membutuhkan waktu lebih panjang. Graduasi penanganan risiko perbankan nasional membutuhkan konsultasi dan komunikasi kepada regulator meliputi:

### **Graduasi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.**

Total kualitas aktiva produktif perbankan implikasi dari krisis *Covid-19* dihadapkan pada sedikitnya tiga kategori risiko kredit diantaranya kredit sudah bermasalah sebelum periode Maret

2020, kredit bermasalah mulai terhitung setelah Maret 2020, dan kredit bermasalah bersumber dari dana penyertaan pemerintah.

Tekanan risiko inheren bank tahun ini dan dua tahun ke depan semakin besar atas keterkaitan risiko kredit dimulai arah internal risiko pasar, risiko operasional dan strategis ke depan. Ke arah eksternal tekanan risiko likuiditas, reputasi, kepatuhan dan hukum. Semakin banyak dan masifnya debitor yang mengalami hambatan kemampuan bayar, prospek usaha berkurang dan penurunan kinerja debitor mendorong peningkatan upaya penyelamatan kredit untuk penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan restrukturisasi.

Graduasi risiko mendorong peningkatan jumlah risiko kredit hapus buku dan hapus tagih yang sangat krusial. Permasalahan risiko hukum semakin meningkat yang dapat menjalar pada risiko reputasi. Penyelesaian non-litigasi dalam kondisi krisis *Covid-19* meminimalkan risiko reputasi dan hukum.

Peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menjadi konsekuensi yang diperhitungkan akibat berkurang modal bank sebagai bantalan risiko. Penyelamatan risiko kredit sebab krisis *Covid-19* melalui restrukturisasi membutuhkan waktu pemulihan yang panjang sehingga dimungkinkan adanya perpanjangan periode kedua pemberlakuan POJK 11/2020 untuk satu tahun.

Pengukuran risiko dengan perkiraan (*forecasting*) atas biaya risiko kredit untuk periode dua tahun ke depan akan mencegah potensi *illiquidity* dan *insolvency*. Konfirmasi dan komunikasi kepada regulator pada model pengukuran risiko yang memburuk untuk mencegah kegagalan likuiditas dan solvabilitas. Apalagi, bank yang telah menerbitkan banyak obligasi dengan suku bunga tinggi perlu konsultasi intensif. Untuk situasi krisis *Covid-19* saat ini perlu adanya stimulus penurunan suku bunga bagi bank dengan penerbitan obligasi besar. Melihat gambaran empirik, sejarah krisis yang lalu, kebijakan stimulus sebaiknya didukung dengan suku bunga rendah (Eichengreen, 2016).

### **Graduasi penerapan PSAK 71 instrumen keuangan**

Penerapan PSAK 71/IFRS 9 instrumen keuangan dimulai 1 Januari 2020 sebagai pengganti PSAK 55/IAS 39 dan pada periode tahun yang sama munculnya krisis *Covid-19*. Graduasi risiko perbankan pada instrumen baru dalam kondisi saat ini diperhitungkan dengan cermat untuk memprediksi terjadinya eksposur risiko pada fluktuasi instrumen keuangan yang tajam.

Eksposur risiko penerapan PSAK 71 diantaranya; a) mengecilkan (*discourage*) penyaluran kredit berlebihan (*excessive risk taking*): penyaluran kredit tinggi, diimbangi CKPN tinggi hingga konsekuensi laba turun; b) perkuat daya tahan bank (*resilience*) pada kondisi ekonomi memburuk (*bust*): CKPN tinggi sebagai penyangga/buffer akan digunakan pada saat ekonomi buruk seperti saat ini, c) memitigasi penurunan kredit (*credit crunch*) pada kondisi ekonomi memburuk, dan d) volatilitas laba lebih minimal atau stabil (*smooth*).

Implikasi penerapan instrumen keuangan ini meliputi penilaian instrumen *expected looking* (*forward looking*) dengan CKPN dibentuk berdasarkan probabilitas terjadinya penurunan nilai. Ekspektasi kerugian (*expected credit loss*) diperhitungkan pada saat pemberian kredit diawal/diperoleh. Pendekatan statistik untuk kerugian historis sedikitnya tiga tahun terakhir, saat ini dan memasukkan faktor makroprudensial dalam prediksi ke depan.

Pengukuran risiko dengan perkiraan (*forecasting*) eksposur risiko instrumen ini cukup efektif untuk untuk jangka pendek maupun panjang dalam kondisi ekonomi normal (*smooth*). Penurunan ekonomi disebabkan krisis untuk periode yang panjang atau tingkat ketidakpastian tinggi maka perhitungan ekspektasi kerugian parameter risiko akan menghasilkan fluktuasi instrumen keuangan yang tajam, misal dalam penghitungan CKPN dengan kondisi makro pertumbuhan ekonomi negatif atau resesi.

Graduasi risiko perbankan adanya fluktuasi instrumen keuangan yang tajam perlu komunikasi, konfirmasi dan konsultasi bersama KAP dan regulator dalam menjamin *governance* laporan keuangan publikasi tahun buku 2020.

### **Graduasi konsolidasi bank umum dalam pemenuhan modal inti minimum**

Bagian dari cetak biru industri keuangan yaitu penguatan struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan nasional melalui penguatan permodalan dan konsolidasi perbankan Indonesia diterbitkan POJK 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Pada pasal 8, bank umum wajib memenuhi modal inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Graduasi risiko perbankan akan dihadapkan risiko strategis dan kepatuhan di tengah krisis *Covid-19* yaitu kewajiban pemenuhan modal inti minimum Rp1 triliun, Rp2 triliun dan Rp3 triliun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020, 2021 dan 2022. Pengecualian bagi BPD modal inti minimum paling sedikit Rp3 triliun pada 31 Desember 2024.

Penanganan risiko perbankan dilakukan simultan di tengah krisis *Covid-19* yang membutuhkan upaya *extra-ordinary*. Graduasi penanganan risiko kredit membutuhkan modal untuk untuk buffer, selain itu penerapan PSAK 71 akan meningkatkan fluktuasi instrumen keuangan CKPN sebagai bantalan risiko dan berikutnya adalah setoran modal inti minimum yang wajib dijadwalkan.

Bank yang telah memiliki modal inti minimum mencukupi relatif sedikit lega namun bagi bank yang masih memiliki modal inti di bawah syarat minimum wajib bersegera untuk mengimplementasikan pemenuhan modal inti minimum agar terhindar risiko kepatuhan dari penurunan kelas (*down grading*) yang akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri. Antisipasi

lainnya bagi bank yaitu akan dilakukan tindakan pengawasan oleh OJK melalui pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan konversi seperti tertuang pada pasal 2 POJK 41/POJK.03/2019 tanggal 21 Desember 2019.

Bank dengan perencanaan modal terukur modal setor maupun modal inti namun belum memadai dikarenakan faktor penundaan jadwal modal dari para pemegang saham atau terdapat potensi internal berindikasikan pemenuhan ketentuan tersebut akan terhambat perlu untuk melakukan komunikasi dan konsultasi kepada regulator.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

- Graduasi risiko perbankan nasional implikasi dari krisis *Covid-19* bergerak simultan sedikitnya tiga risiko kebijakan, yaitu: a) risiko inheren bank keterkaitan pada risiko kredit terhadap risiko lainnya; b) ketentuan penerapan PSAK 71 instrumen keuangan dan c) ketentuan konsolidasi bank umum dalam pemenuhan modal inti minimum.
- Perbankan nasional memperkuat penguatan pengukuran risiko disebabkan implikasi krisis *Covid-19* dengan pendekatan *forecasting* untuk menjamin terhindar dari faktor *illiquidity* dan *insolvency*, fluktuasi instrumen keuangan yang tajam dan pemenuhan modal inti minimum.

### **Saran**

- Perbankan mengintensifkan komunikasi, konfirmasi dan konsultasi kepada regulator
- POJK 11/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 agar dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang satu tahun untuk periode kedua.

### **Daftar Pustaka**

- Eichengreen, Barry, 2016. *Hall of Mirrors: The Great Depression, The Great Recession, and The Uses-and Misuses-of History*, Oxford University Press, New York
- Reinhart, Carmen M. & Kenneth S. Rogoff, 2009. *This Time is Different: Eight Centurie of Financial Folly*, Princenton University Press, New Jersey
- Greuning, Hennie van & Sonja Brajovic Bratanovic, 2011. *Analizing Banking Risk*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta

# PANDEMI COVID-19 DAN FINANCIAL DISTRESS

**Muhani**

## **Pendahuluan**

Pandemi *Covid-19* membuat memaksa masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari dari rumah atau biasa dikenal *work from home* (WFH). Dengan demikian, permintaan produk yang biasanya digunakan di sektor pendidikan maupun perkantoran anjlok yang mengakibatkan pendapatan perusahaan menurun drastis. Penurunan pendapatan perusahaan tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Kesulitan keuangan (*financial distress*) merupakan tahap terjadinya penurunan kondisi keuangan perusahaan, yang berawal dari kesulitan likuiditas yang dialami perusahaan, dan apabila dibiarkan berlarut-larut maka akan menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Informasi mengenai kesulitan keuangan (*financial distress*) suatu perusahaan sangat penting untuk diketahui lebih awal agar *financial distress* dapat diminimalisir sehingga kebangkrutan perusahaan dapat dihindari.

## **Dampak pandemi pada *financial distress***

Dampak pandemi terhadap kinerja perusahaan cukup mendalam. Akan tetapi dampak tiap sektor berbeda-beda. Ada yang terdampak parah, bahkan justru ada yang menguntungkan. Untuk melihat bagaimana dampak tersebut, kita dapat melihat dari kondisi kinerja perusahaan yang tercermin dari laporan keuangannya.

Tingkat kesehatan perusahaan penting artinya bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usahanya, sehingga kemampuan untuk memperoleh keuntungan dapat ditingkatkan yang pada akhirnya dapat menghindari adanya kemungkinan kebangkrutan (terlikuidasi) pada perusahaan. Terjadinya likuidasi atau kebangkrutan pada sejumlah perusahaan tentu saja akan menimbulkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemilik maupun karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya.

Faktor penyebab kebangkrutan perusahaan yaitu faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Pada suatu perusahaan faktor-faktor tersebut akan saling memengaruhi dan akan berdampak pada keberlangsungan hidup perusahaan.

Selanjutnya untuk memprediksi bagaimana daya tahan tiap sektor perusahaan tersebut, kita dapat melihat bagaimana kondisi perusahaan terhadap tekanan finansial (*financial distress*). *Corporate financial distress* ditunjukkan sebagai proses tiga dimensi yang terdiri *time frame*, *financial distress*, dan *process stages*. *Financial distress cycle* dalam perusahaan mencakup periode awal penurunan kinerja hingga ke titik terendah kemudian tahap pemulihan apabila perusahaan bisa

memperbaiki kinerjanya. Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka perusahaan tersebut tidak berada di posisi yang sama melainkan terus bertransisi ke tahapan-tahapan selanjutnya. Apabila kinerja semakin buruk, maka kemungkinan besar perusahaan akan menghadapi kebangkrutan. Namun, jika kinerja perusahaan membaik maka perusahaan memiliki kesempatan untuk mengatasi kesulitan keuangan. *Zona financial distress* menggambarkan posisi kinerja perusahaan apakah semakin buruk dan semakin besar peluang untuk jatuh.

Riset pada industri pulp & kertas memperlihatkan beratnya dampak pandemi *Covid-19* terhadap kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan pada kuartal ke II tahun 2020, tidak ada satupun dari delapan perusahaan sub sektor ini yang berada pada posisi aman. Tiga perusahaan berada dalam posisi *grey area* sedangkan lima perusahaan masuk dalam posisi *distress*.

Melemahnya permintaan akibat *Covid-19* memaksa berbagai perusahaan mengurangi produksinya, sehingga mengakibatkan permintaan terhadap produk turunan pulp yang merupakan material dasar dari berbagai produk kertas yang banyak digunakan di pabrik-pabrik juga menurun.

Pandemi *Covid-19* yang memaksa semua orang untuk bekerja di rumah dan belajar di rumah juga berdampak menurunnya permintaan produk kertas dan turunannya. Selain itu, pandemi *Covid-19* yang juga melanda seluruh dunia mengakibatkan ekspor produk pulp dan kertas menurun drastis, dan mayoritas perusahaan sub sektor ini berorientasi ekspor.

Anjloknya penjualan tersebut dapat berakibat terhadap beberapa hal lainnya yaitu: penjualan yang rendah mengakibatkan menumpuknya persediaan yang telah diproduksi berdasarkan rencana sebelumnya, tingginya nilai persediaan yang diikuti dengan rendahnya nilai kas yang dimiliki, akan menghambat pembayaran operasional perusahaan. Ketika perusahaan sangat membutuhkan kas untuk operasional tersebut, perusahaan akan mengambil langkah dengan pinjaman. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka modal kerja perusahaan akan bernilai negatif yaitu hutang lancar perusahaan akan lebih tinggi daripada aktiva lancar yang dimilikinya. Kondisi perusahaan masa lampau yang *illikuid* juga akan memperburuk kondisi ini.

Rendahnya penjualan yang mengakibatkan rendahnya produktifitas, profitabilitas, likuiditas, modal kerja, akan berujung kepada *zona distress*. Perusahaan-perusahaan yang memiliki arus kas yang baik dan tidak mengandalkan hutang dalam operasional perusahaannya sebelum masa pandemi, perusahaan golongan ini seharusnya tidak akan terlalu terpuruk dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki arus kas buruk dan mengandalkan hutang. Jadi *financial distress* tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi saat ini tetapi juga bagaimana kinerja keuangan perusahaan sebelum masa pandemi.

Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam zona abu-abu, diharapkan dapat meningkatkan penjualannya dan mengkaji ulang mengenai komponen harga pokok penjualan dan biaya operasionalnya sehingga laba sebelum pajak dapat meningkat yang berdampak pada kinerja perusahaan yaitu profitabilitas perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang masuk kedalam zona *distress* lebih memperhatikan proporsi hutang, dan menyeimbangkan aktiva lancar dan hutang lancar karena merupakan faktor penting dalam menghasilkan modal kerja guna menciptakan dan meningkatkan laba yang akan berdampak pada kenaikan harga saham. Jika laba terus meningkat, maka akan banyak investor yang berminat untuk menanamkan modalnya sehingga akan meningkatkan nilai ekuitas pasar. *Financial distress* bisa merugikan perusahaan jika tidak segera dikenali. Kerjasama antara manajemen dan pemimpin perusahaan dibutuhkan untuk menghindari terjadinya *financial distress* pada perusahaan.

Smith dan Graves (2005) menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami dua siklus menahan penurunan (*decline stemming*) dan siklus perbaikan kinerja (*recovery*). Kecenderungan tingkat kinerja keuangan, ukuran perusahaan, ketersediaan *free assets* merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memprediksi apakah perusahaan mampu bertahan dalam kondisi kesulitan keuangan (*siklus decline stemming*).

Sedangkan pengurangan aset, pergantian CEO, dan pengurangan karyawan merupakan strategi yang mencerminkan upaya manajemen (*siklus recovery*) dalam mengatasi kesulitan keuangan. Sehingga faktor tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memprediksi *recovery* perusahaan. Pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau *takeover*. Maksudnya agar perusahaan mampu untuk membayar utang dan mengelola perusahaan dengan lebih baik. Serta dapat memberikan tanda peringatan dini adanya kebangkrutan pada masa yang akan datang.

## **Penutup**

Beratnya dampak *Covid-19* terhadap kondisi keuangan perusahaan yang berada pada posisi *grey area* dan *distress*, melakukan evaluasi dan analisis pada faktor-faktor yang memengaruhi kinerja perusahaan, sehingga dapat meminimalkan kesulitan keuangan yang akan dapat berdampak pada kebangkrutan perusahaan. Perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai pengelolaan keuangan untuk menjalankan usahanya perlu memperhatikan likuiditas perusahaan, proporsi hutang dan efisiensi penggunaan modal kerja.

Pandemi *Covid-19* yang masih jauh dari selesai telah berdampak terhadap menurunnya permintaan domestik serta turunnya penjualan ekspor membuat mayoritas perusahaan-perusahaan dalam negeri mengalami tekanan financial yang berat. Kondisi yang dialami oleh sub sektor industri pulp dan kertas yang tidak ada yang berada dlm posisi aman memberikan bukti beratnya tekanan financial akibat *Covid-19* tersebut.

Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan analisis pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga dapat meminimalkan kesulitan keuangan yang akan dapat berdampak pada kebangkrutan perusahaan. Dan perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai pengelolaan keuangan untuk menjalankan usahanya perlu memperhatikan likuiditas perusahaan, proporsi hutang dan efisiensi penggunaan modal kerja.

Selain itu, diharapkan pemerintah dapat mensinergikan industri yang terdampak *Covid-19* mendalam dengan industri-industri yang berada pada zona aman atau tidak terdampak pandemi *Covid-19*.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Rawi, K., Kiani, R., and Vedd, RR, 2008. The Use of Altman Equation for Bankruptcy Prediction in an Industrial Firm, *International Business and Economics Research Journal*, July.
- Altman, EI, 2001. Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA Model, *Distress Prediction Models and Some Application*.
- Auchterlonie, DL, 1997. A Paean to the Z-Score and Its Commercial Bankruptcy Prediction, *The Journal of Lending & Credit Risk Management*, September.
- Biggs, W.D., Levin, G.B., & Biggs, J.L, 1995. "A Preliminary Investigation of the Use of a Bankruptcy Indicator in a Simulation Environment". *Development in Business Simulation and Experiential Exercises*, 22: 78-82.
- Endri, 2009. Prediksi Kebangkrutan Bank Untuk Menghadapi dan Mengelola Perubahan Lingkungan Bisnis: Analisis Model Altman's Z-Score, *Perbanas Quarterly Review*, Vol. 2 No. 1 Maret.
- <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>
- Smith, M., and Graves, C. (2005). Corporate turnaround and financial distress. *Manag. Audit. J.* 20, 304–320.
- Supardi dan Sri Mastuti, 2003. "Validitas Penggunaan Z-Score Altman untuk Menilai Kebangkrutan pada Perusahaan Perbankan Go Public di Bursa Efek Jakarta", *Kompak*, Januari-April.

# PERAN BANK SYARIAH SEBAGAI PENOPANG EKONOMI DI MASA *NEW NORMAL*

**Mustakim Muchlis**

## **Pendahuluan**

*Covid-19* telah menjadi pandemi di Indonesia sejak awal Maret 2020. Hingga saat ini (September) belum ada kepastian kapan pandemi akan berakhir namun kepastian hari ini adalah fakta bahwa perekonomian Indonesia sedang di ambang resesi. Kondisi ini terjadi karena permintaan dan penawaran yang tidak berjalan normal dikarenakan pembatasan aktivitas untuk mengendalikan penyebaran *Covid-19*. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus dan bagaimana perekonomian tetap berputar di masa awal pandemi hingga ke era *new normal*. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah namun ternyata tidak cukup mampu mengendalikan pandemi *Covid-19* yang telah berlangsung dari Maret hingga bulan ini (September) dan entah sampai kapan, grafik jumlah kasus positif baru terus meningkat tanpa menunjukkan tanda-tanda akan segera melandai. Fakta bahwa Indonesia menuju ambang resesi tak dapat dipungkiri, dengan melihat kondisi yang terjadi dimana dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi tercatat negatif.

Di tengah ketidakpastian kondisi tidak berarti Indonesia berpasrah atas apa yang terjadi. Segala upaya tetap harus dilakukan secara bersama dan tidak boleh saling menyalahkan atas apa yang terjadi, sudah saatnya seluruh pihak bersatu tidak hanya mengandalkan pemerintah namun juga semu pihak diantaranya kalangan dunia usaha dan masyarakat agar Indonesia tak berlama-lama terjebak dalam situasi sulit ini. Pihak yang diharapkan dapat memainkan peran penting dalam menjalankan perekonomian dapat berputar dengan normal kembali adalah bank. Ibarat sebuah tubuh bank adalah jantung dalam perekonomian dan uang adalah darahnya. Dalam kondisi sulit seperti ini bank terutama bank syariah diharapkan dapat menjadi penopang ekonomi dalam masa *new normal*. Meskipun bank syariah juga terdampak pandemi *Covid-19* namun paling tidak kondisinya lebih baik dibanding bank konvensional dikarenakan keuntungan dan kerugian diberikan/dibagikan berdasarkan kondisi yang dialami (Republika.co.id, 2020a).

Bank syariah selain dikenal sebagai bank tanpa riba dan tanpa transaksi terlarang, bank syariah juga hadir guna memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan sosial dan ekonomi Umat Islam. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya perbankan syariah menginternalisasikan nilai sebagai langkah dalam mencapai hasil yang berkelanjutan, yakni capaian kinerja komersil yang terinternalisasi dengan prinsip Islam, yang diarahkan guna mencapai keadilan sosial yang diartikan dengan terjadi pendistribusian kekayaan yang berkeadilan dalam masyarakat (Franzoni & Allali, 2018). Menurut ekonomi Islam masalah dalam perekonomian bukanlah karena kelangkaan atau terbatasnya sumber daya namun ketidakadilan distribusi, olehnya itu bank syariah di era *new normal* saat ini diharapkan dapat berperan sebagai lembaga intermediasi yang

mempertemukan pihak berkelebihan dan pihak yang membutuhkan dana dengan menginternalisasikan nilai-nilai Islam didalam transaksinya.

Penduduk Muslim Indonesia adalah terbesar di dunia secara tidak langsung menjadikan negara ini menjadi negara dengan perkembangan industri keuangan syariah terbesar di dunia. Sampai Juni 2020 Indonesia menjadi negara yang terbanyak di dunia dalam hal perkembangan industri bank, yaitu 196 perbankan syariah, adapun total aset bank syariah sebesar sebesar 545,39 atau senilai 6,18 persen dari keseluruhan pangsa pasar keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020a).

Sementara itu sebaran bank syariah Indonesia telah menjangkau hampir seluruh provinsi di Indonesia. Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa bank syariah dapat memainkan perannya di setiap tempat dimana bank syariah tersebut berada sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mempertemukan pihak yang berkelebihan dan pihak yang membutuhkan dana, terlebih di masa sulit seperti ini.

Tabel 1 Indikator Utama Bank Syariah di Indonesia

<b>Industri Bank</b>	<b>Jumlah Bank</b>	<b>Jumlah Kantor</b>	<b>Aset (dalam triliun rupiah)</b>	<b>PYD dalam triliun rupiah)</b>	<b>DPK (dalam triliun rupiah)</b>
Bank Umum Syariah	14	1.942	356,33	232,86	293,37
Unit Usaha Syariah	20	390	175,45	134,16	127,95
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	162	626	13,61	10,50	8,89
<b>TOTAL</b>	<b>198</b>	<b>2.958</b>	<b>545,39</b>	<b>377,53</b>	<b>430,21</b>

Sumber: Ojk (2020a)

### **Covid-19 Menurunkan Suku Bunga Bank**

Pada masa pandemi dan *new normal* saat ini dapat kita lihat bagaimana dalam dunia bisnis pihak yang paling menderita adalah individu, perusahaan bahkan tingkat negara yang menjalankan aktivitasnya berbasiskan hutang. Terlebih ketika dalam hutang tersebut mengandung kewajiban pembayaran bunga, yang dalam Islam dianggap sebagai riba. Dapat kita lihat bersama bagaimana pihak tersebut ketika mengalami kesulitan keuangan tetap harus membayarkan kewajiban hutang dan bunganya. Dan itulah yang terjadi pada Indonesia saat ini, mulai dari tingkat individu hingga perusahaan. Banyak pihak yang mengalami kesulitan keuangan dikarenakan perekonomian tidak dapat berputar secara normal akibat pandemi *Covid-19*, sementara kewajiban hutang tetap harus dibayarkan. Dari kondisi tersebut pemerintah kemudian

mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit dengan menurunkan suku bunga sebagai bentuk meringankan beban masyarakat.

Berdasarkan data yang ada suku bunga telah diturunkan oleh Bank Indonesia sebesar 25 persen secara berturut-turut sejak Juli 2020 (Kompas.com, 2020). Dengan diturunkannya suku bunga maka akan menambah kapasitas bank dalam menyalurkan kredit dan juga meningkatkan permintaan kredit dan pembiayaan sehingga permintaan dan penawaran dapat berjalan dengan normal. Diturunkannya (suku bunga) juga diharapkan bank akan menurunkan suku bunga kredit dan depositonya. Keputusan penurunan suku bunga diambil sebagai upaya lanjutan dalam menstimulus terjadinya pemulihan ekonomi di masa pandemi *Covid-19* dan era *new normal*.

*Covid-19* sejatinya memberikan pelajaran bagi para pelaku ekonomi bahwa transaksi yang mengandung bunga yang dalam Islam dianggap sebagai riba memberikan ketidakadilan bagi pelakunya. Bank yang telah menetapkan bunga diawal dan mewajibkan pembayarannya secara tetap tanpa melihat kondisi penerima pinjaman untung atau rugi adalah bentuk ketidakadilan pemberi pinjaman. Hal ini memberi pelajaran bahwa dari sisi syariah bagi hasil adalah solusi yang tepat. Ketika ekonomi dalam kondisi sulit maka seluruh pihak akan turut merasakan dampaknya sementara ketika ekonomi lagi baik maka seluruh pihak pun merasakan dampaknya. Olehnya itu sudah saatnya seluruh pihak menjadikan musibah pandemi *Covid-19* sebagai momentum hijrah salah satunya dengan mengganti transaksi yang selama ini dilakukan bersama bank konvensional ke bank syariah yang menerapkan prinsip Islam dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia.

### **Bank Syariah di Masa *New Normal***

Toni EB Subari selaku Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah (Asbisindo) mengatakan bahwa bank syariah cenderung memikul resiko lebih kecil ketika pandemi *Covid-19* apabila dibandingkan dengan bank konvensional (Finansial.bisnis.com, 2020). Secara alami, konsep dasar bagi hasil dapat memitigasi dampak dari pandemi *Covid-19*. Terdapat beberapa produk bank syariah yang tidak sensitif terhadap *pricing* (penawaran harga) sehingga tidak begitu terdampak, misalnya simpanan dengan *akad wadiah akad dhamamah* yang tanpa bunga. Pada simpanan dengan jenis akad ini tidak memiliki konsekuensi pemberian bunga kepada pihak yang menaruh simpanan pada bank syariah karena sifatnya hanya menitip dan bank tidak terbebani pembayaran bunga kepada nasabah yang menyimpan dengan *akad wadiah* tersebut. Berbeda dengan bank konvensional yang wajib mengeluarkan biaya bunga kepada nasabah yang menaruh simpanannya pada bank konvensional, sehingga dimasa sulit seperti masa bank konvensional ini akan kesulitan dalam hal pembayaran beban bunga kepada seluruh nasabah.

Simpanan dengan *akad mudharabah*, yang merupakan simpanan dengan konsep bagi hasil tidak terlalu membebankan biaya yang dikerluarkan saat pendapatan bank mengalami penurunan. Sehingga ketika kondisi perekonomian secara mikro ataupun makro mengalami penurunan,

maka bagi hasil pada deposit juga mengalami penurunan. Sehingga secara natural terjadi mitigasi yang baik dan bank syariah tidak mengalami tekanan yang berarti. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang mengalami penurunan pendapatan saat pandemi *Covid-19* sementara biaya yang dikeluarkan tidak mengalami pengurangan karena bersifat tetapnya bunga simpanan dan harus tetap terbayarkan.

Prediksi awal yang mengatakan bahwa pandemi dapat memengaruhi daya saing bank syariah dan masyarakat akan memindahkan dananya ke bank konvensional tidak sepenuhnya terjadi (Republika.co.id, 2020b). Tantangan likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) dapat teratasi oleh perbankan syariah. Pada masa pandemi *Covid-19*, bank syariah terbukti dapat bertahan dengan pertumbuhan yang lebih baik dari bank konvensional. Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mencatat, hingga Juli 2020 pertumbuhan pembiayaan bank syariah berhasil mencapai angka 10,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Liptan6.com, 2020). Sementara itu bank konvensional hanya mampu mencatat pertumbuhan 1,04%. Dari sisi aset, bank syariah mengalami pertumbuhan diangka 9,8% atau jauh lebih unggul dibandingkan pertumbuhan aset bank konvensional yang masih berada diangka 5,37%. Adapun dana pihak ketiga (DPK), bank syariah mengalami pertumbuhan sebesar 8,7%, sedikit lebih tinggi dibanding dana pihak ketiga (DPK) bank konvensional yang sebesar 8,44% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020b). Secara keseluruhan bank syariah masih baik pada pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK), ataupun aset. Ini menggambarkan bahwa bank syariah semakin diminati oleh masyarakat dan dapat bertahan dan berkembang di masa pandemi *Covid-19*.

Kondisi ini membuktikan bahwa bank syariah dapat menjadi penopang ekonomi nasional. Bank syariah memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang dengan pesat, namun sejumlah tantangan harus mampu dijawab oleh para pelaku industri bank syariah saat ini. Diantaranya, perbankan syariah harus mampu mengencangkan upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah pada masyarakat. Dan di era *new normal* ini dapat dijadikan momentum bagi perbankan syariah untuk berinovasi sekaligus mengoptimalkan teknologi digital, apalagi masyarakat di era *new normal* ini sudah membiasakan diri menggunakan teknologi dalam beraktivitas sehari-hari.

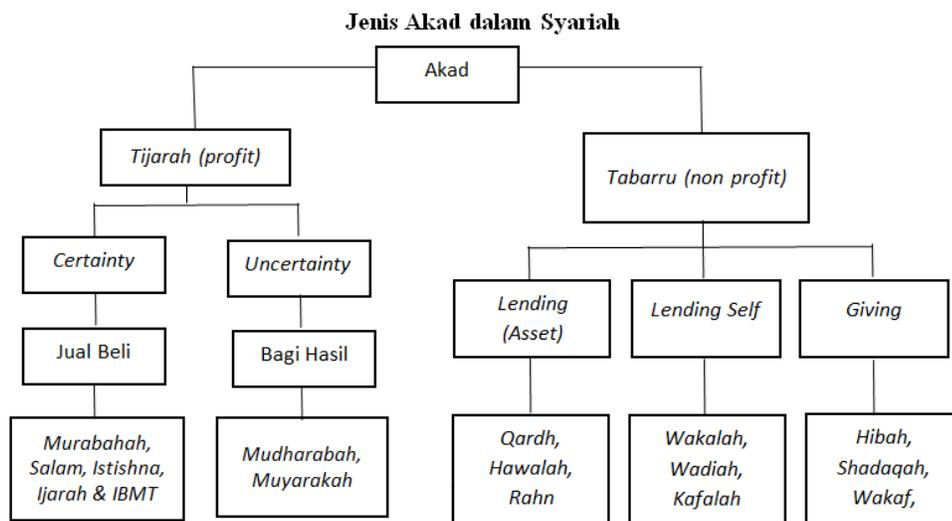
### **Peran bank syariah di masa *new normal***

Bank syariah sebagai organisasi bisnis komersial berbasis keyakinan Islam berkewajiban mewujudkan kemaslahatan manusia atau dalam Islam disebut *maqasid syariah* (Tujuan Syariah). *Maqashid syariah* dari segi bahasa berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan (*maslahah*) umat manusia. Sementara itu bank syariah hadir untuk pencapaian tersebut (*maqasid Syariah*). Bank syariah memastikan keadilan sosial dan keadilan dalam perlindungan Islam sebagai agama (*dien*), pemeliharaan jiwa (*nafs*), pemeliharaan akal (*aql*), pemeliharaan keturunan (*nasb*), dan pemeliharaan materi (*mal*) kepada seluruh pemangku

kepentingan. Mereka harus mendapatkan kebermanfaatannya dan pertanggungjawaban dari bank syariah. Sungguh ketika bank syariah dapat mengoptimalkan keseluruhannya maka kemaslahatan umat manusia akan tercipta.

Bank syariah hadir tidak semata-mata mencari keuntungan (tujuan komersil) guna memuaskan kepentingan pemegang saham tetapi juga untuk memastikan tanggung jawab sosial kepada berbagai pemangku kepentingan. Dalam menjalankan operasionalnya bank syariah bukannya tidak diperkenankan mencapai mencari laba yang tinggi namun dalam upaya pencapaian tersebut bank diharapkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam dan mensinergikan aktivitas dengan tanggung jawab sosial.

Menurut Nurhayati & Wasilah (2015) secara umum akad (perjanjian) yang terdapat dalam bank syariah dari segi ada atau tidaknya kompensasi dalam *fiqh muamalah* terbagi menjadi dua bagian yaitu: Pertama, *akad tabarru* yaitu akad untuk segala macam perjanjian yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan komersil. Transaksi ini esensinya bukan transaksi komersil dalam upaya mencari keuntungan namun dilakukan semata untuk berbuat kebaikan. Kedua, *akad tijarah (compensational contract)* yaitu segala macam perjanjian yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang nilainya tidak pasti (*Natural Uncertainty Contract*) melalui *akad mudharabah* dan *musyarakah* dengan mencampurkan aset menjadi satu kemudian menganggung resiko dan keuntungan bersama. Selain sifatnya tidak pasti pada *akad tijarah* juga terdapat akad yang nilainya pasti (*Natural Certainty Contract*) melalui *akad murabahah, istishna, salam* dan *ijarah* dimana kedua belah pihak antara nasabah dan bank dapat saling mempertukarkan aset yang mereka miliki, olehnya itu objek pertukarannya pun harus ditentukan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Dengan begitu keadaan demikian secara tidak langsung perjanjian jenis ini akan memberikan imbal hasil yang sifatnya tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika melakukan akad di awal.



Sumber: (Nurhayati & Wasilah, 2015)

Dimasa pandemi dan *new normal* bank syariah dapat berperan dari sisi komersil melalui *akad tijarah* dan sisi sosial dengan *akad tabarru*. Pada sisi komersil ditengah lesunya perekonomian bank syariah dan pelaku usaha dapat bersinergi melalui *akad tijarah certainty* atau *uncertainty*. Pada akad *uncertainty* dapat memilih apakah menggunakan *akad mudharabah* atau *musyarakah* dengan skema bagi hasil ketika ada keuntungan dan kerugian kemudian dibagi secara adil ataukah dengan *akad tijarah* lainnya (*certainty*) seperti *murabahah*. Nasabah meminta bank untuk mengadakan aset yang kemudian bank melakukan penjualan aset tersebut dengan menyampaikan biaya perolehan dan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank yang bertindak sebagai penjual dan nasabah yang bertindak sebagai pembeli, yang kemudian akan diangsur oleh pembeli sesuai kesepakatan. Transaksi demikian adalah transaksi hutang piutang namun transaksi ini bebas dari riba dan pembeli (nasabah) diberikan keringanan ketika tidak mampu mengangsur pada waktu tertentu. Skema transaksi demikian tentunya akan sangat membantu pelaku usaha dalam hal pengadaan aset baik berbentuk modal untuk kerjasama atau aset dengan skema pembiayaan yang tidak melanggar syariat.

Pada sisi sosial di era *new normal* ini bank syariah tentu diharapkan untuk berperan aktif dalam hal membantu pihak-pihak yang sangat terdampak akibat pandemi *Covid-19* melalui beberapa jenis *akad tabarru*. Seperti memberikan pinjaman tanpa bunga melalui akad (*qard*) atau bahkan dapat juga pemberian secara sukarela tanpa ada pengembalian dengan hibah, shadqah, wakaf dan zakat. Sumber *akad tabarru* ini dapat berasal dari keuntungan bank syariah, dana dari pihak ketiga, atau kedermawanan berbagai pihak yang menjadikan bank syariah sebagai lembaga terpercaya yang dapat menyalurkan bantuan kepada pihak yang terdampak *Covid-19*.

### **Kesimpulan**

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip Islam diharapkan dapat menjadi penopang ekonomi di masa *new normal* dengan memberikan kontribusi pada aspek ekonomi dan sosial melalui *akad tabarru* dan *tijarah* yang ditawarkan. Pemerintah dalam hal ini regulator memberikan payung hukum dalam aspek teknis pelaksanaan kegiatan bank yang sesuai Syariat Islam. Sementara umat muslim di Indonesia diharapkan dapat beralih menggunakan bank syariah dalam bertransaksi baik sebagai pemilik dana ataupun pihak yang membutuhkan dana. Dengan sinergisitas demikian maka diharapkan ancaman resesi dapat teratasi dan yang paling penting umat muslim di Indonesia diberkahi karena telah hijrah dari perbankan konvensional kepada perbankan syariah.

## Daftar Pustaka

- Finansial.bisnis.com. (2020). Beban Bank Syariah Tak Seberat Bank Konvensional Saat Covid-19. Apa Penyebabnya? Finansial.Bisnis.Com. [https://finansial.bisnis.com/read/20200514/231/1240912/beban-bank-syariah-tak-seberat-bank-konvensional-saat-covid-19-apa-penyebabnya?utm\\_source=Desktop&utm\\_medium=Artikel&utm\\_campaign=BacaJuga\\_2](https://finansial.bisnis.com/read/20200514/231/1240912/beban-bank-syariah-tak-seberat-bank-konvensional-saat-covid-19-apa-penyebabnya?utm_source=Desktop&utm_medium=Artikel&utm_campaign=BacaJuga_2)
- Franzoni, S., & Allali, A. A. (2018). Principles of Islamic Finance and Principles of Corporate Social Responsibility: What Convergence? 1–11. <https://doi.org/10.3390/su10030637>
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic Banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>
- Kompas.com. (2020). Pangkas Suku Bunga 3 Kali, BI Minta Bank Segera Turunkan Bunga Kredit. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2019/09/19/165300226/pangkas-suku-bunga-3-kali-bi-minta-bank-segera-turunkan-bunga-kredit>
- Liputan6.com. (2020). Raup Laba di Tengah Pandemi, Apa Rahasia Bank Syariah? Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4366621/raup-laba-di-tengah-pandemi-apa-rahasia-bank-syariah>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). Akuntansi syariah di Indonesia (E. S. Suharsih (ed.); 4th ed.). Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020a). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Juni 2020. In Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2020>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020b). Statistik Perbankan Syariah. In Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Republika.co.id. (2020a). Ekonom: Kondisi Perbankan Syariah Lebih Baik Saat Pandemi. Republika.Co.Id.view-source:<https://republika.co.id/berita/qhb6pz370/ekonom-kondisi-perbankan-syariah-lebih-baik-saat-pandemi>
- Republika.co.id. (2020b). Sejauh Mana Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah? Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/q9sq59383/sejauh-mana-dampak-covid-19-terhadap-bank-syariah>

# **PENGUATAN LAYANAN *E-BANKING* DI INDONESIA**

**Ronny**

## **Pendahuluan**

Tantangan dunia saat ini telah bergeser dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang memengaruhi di semua sektor kehidupan manusia, memengaruhi operasional dalam berbagai industri, memengaruhi bagaimana manusia menyelesaikan pekerjaannya, dan bagaimana manusia saling berinteraksi.

Saat dunia dilanda wabah virus Corona, orang takut untuk berinteraksi dalam jarak dekat, karena virus Corona menular dari orang ke orang, sehingga interaksi melalui teknologi informasi menjadi pilihan yang tepat melalui berbagai media elektronik. Kondisi ini mau tidak mau dunia untuk sementara waktu dalam ketidaknyamanan, perdagangan harus didukung dengan penggunaan teknologi informasi, dan semakin banyak orang belajar untuk menggunakan teknologi informasi.

Demikian juga, layanan sebuah institusi publik, layanan perbankan semakin dituntut untuk memberikan layanan yang cepat dan mudah diakses sebagaimana layanan bank yang dikenal sebutannya *e-banking* yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi, meskipun kemungkinan serangan gangguan keamanan dapat saja terjadi, namun manfaat yang diperoleh nasabah juga menjadi pertimbangan bank untuk menggunakan teknologi informasi dalam layanannya.

## **Penetrasi internet dan tantangan di industri perbankan**

Hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2018 menunjukkan bahwa lebih 64 persen penduduk Indonesia sudah mengenal dan menggunakan internet. Penggunaan internet memberikan kemudahan bagi Bank untuk memperkuat layanannya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi nasabah, nasabah mudah melakukan transaksi melalui bantuan gadget yang terhubung dengan internet dan mengakses aplikasi bank, tanpa harus ke kantor bank.

Penguatan layanan bank berbasis teknologi informasi dapat dilihat pada sejumlah saluran layanan bank seperti *mobile banking*, *internet banking*, *SMS banking*, *ATM*, dan lainnya. Nasabah mudah untuk melakukan transaksi melalui fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi bank seperti fitur transfer, fitur cek saldo. Nasabah semakin dimudahkan untuk bertransaksi, tapi di sisi lain ada ancaman gangguan keamanan yang dapat terjadi. Bank harus terus meningkatkan layanannya berbasis teknologi informasi dan terus meningkatkan keamanannya dan meyakinkan nasabahnya atas jaminan keamanan layanan *e-banking* yang diselenggarakan.

Penetrasi internet di Indonesia sebesar lebih 64 persen penduduk Indonesia di tahun 2018 menurut survey APJII menunjukkan bahwa peluang yang semakin besar bagi bank untuk terus meningkatkan layanannya berbasis teknologi informasi. Kelengkapan fitur pada aplikasi bank menjadi penting agar berbagai kebutuhan transaksi nasabah dapat terpenuhi.

### **Aspek penguatan layanan e-banking di Indonesia**

Ada beberapa aspek penting yang perlu diperkuat dalam layanan *e-banking* bank di Indonesia yang dijelaskan sebagai berikut.

a) Keamanan

Keamanan menjadi penting ditingkatkan karena nasabah tidak bertemu muka dengan petugas bank, nasabah hanya percaya pada transaksi bank melalui teknologi informasi seperti ATM, *mobile banking*, *internet banking*, SMS banking. Oleh karena itu, aspek keamanan ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh bank sebagai penyelenggara layanan berbasis teknologi informasi. Sosialisasi dan edukasi pada nasabah penting untuk meyakinkan dan memberikan perasaan aman bahwa layanan *e-banking* berjalan dengan benar. Di tengah ancaman atas serangan keamanan layanan bank oleh pelaku kejahatan, nasabah bisa menjadi cemas dan mungkin memutuskan untuk tidak melakukan transaksi bank melalui teknologi informasi bank, namun jika bank terus meyakinkan nasabahnya dan melakukan edukasi maka kekhawatiran yang berlebihan tentang aspek keamanan ini bisa menjadi berkurang.

b) Kecepatan

Selain aspek keamanan, yang tidak kalah pentingnya adalah tentang kecepatan layanan, penggunaan *e-banking* yang dapat diakses dengan cepat oleh nasabah, termasuk layanan *customer service* yang cepat sangat diharapkan nasabah, apalagi jika nasabah menghadapi persoalan atas penggunaan *e-banking* maka *customer service* harus segera mencari solusi atas gangguan layanan yang dirasakan nasabah. Nasabah menggunakan misalnya *mobile banking* jika aksesnya lambat dan sampai terputus koneksinya maka dapat mengecewakan nasabah yang mungkin ingin melakukan transaksi keuangan yang penting yang dapat berkaitan dengan hubungan pihak lain.

c) Kemudahan

Selain aspek kecepatan dan keamanan, kemudahan layanan juga penting. Nasabah berharap mudah mempelajari, mudah menggunakan atau mengoperasikan aplikasi *e-banking*. Nasabah mudah melakukan hubungan komunikasi dengan *customer service* bank untuk menyampaikan keluhan atau saran. Aspek kemudahan ini menjadi penting karena nasabah tidak selalu punya waktu yang cukup untuk mempelajari aplikasi *e-banking*.

d) Kualitas Informasi

Informasi yang disajikan melalui aplikasi bank kepada nasabah, mestinya mampu menjaga kualitas informasi seperti akurasi, kelengkapan, kecepatan akses informasi. Jika informasi yang ditampilkan pada aplikasi *e-banking* bank kepada nasabah tidak akurat

maka dapat membuat nasabah tidak percaya lagi pada layanan *e-banking* bank, Oleh karena itu, perlu sekali dijaga kualitas informasi dengan melibatkan penilaian atas beberapa faktor seperti akurasi, kelengkapan, dan kecepatan akses informasi.

e) Keterampilan dan kompetensi karyawan bank

Layanan bank yang berbasis teknologi informasi tidak berarti bahwa aspek Sumber Daya Manusia digantikan oleh teknologi informasi, tetap aspek manusia menjadi penting seperti kemampuan *call center* untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada nasabah, memberikan rasa nyaman kepada nasabah, dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi nasabah saat menghadapi kendala penggunaan *e-banking*. Pengetahuan karyawan bank yang ditempatkan untuk melayani nasabah harus ditingkatkan, termasuk cara melayani nasabah.

f) Keandalan

Layanan *e-banking* yang andal adalah layanan bank yang tersedia dengan baik dapat diakses oleh nasabah, sebagai contoh nasabah dapat mengakses internet banking bank untuk bertransaksi, Jika terjadi gangguan, maka bank dapat menginformasikan kepada nasabah dan dapat segera memulihkan gangguan layanan *e-banking* bank. Kegagalan akses *e-banking* bank berarti nasabah tidak dapat menggunakan *e-banking* bank untuk bertransaksi, dan hal ini dapat membuat nasabah menjadi kecewa.

Pada ke-enam aspek di atas yakni keamanan, kemudahan, kecepatan, keandalan, kualitas informasi, dan keterampilan serta kompetensi karyawan bank dalam layanan *e-banking* merupakan parameter penguatan layanan *e-banking* yang seharusnya terus menerus ditingkatkan dan selalu memperoleh input dari nasabah untuk perbaikan atau peningkatan layanan *e-banking* bank yang lebih baik lagi.

### Daftar Pustaka

- Ronny, Tatik Suryani, Iramani “Kualitas Layanan dan Tata Kelola Internet Banking dari Persepsi Nasabah”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan EKUITAS Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017, Vol. 20 No. 2 tahun 2016.
- Ronny, “Enam Kekuatan Layanan Jasa Internet Banking: Tinjauan dari Persepsi Nasabah”, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 13 No. 2 tahun 2017.
- Ronny, “Customer Loyalty Characteristic Obstacles of Internet banking Adoptions”, Russian Journal of Agriculture and Socio Economics Sciences, ISSUE 1(73), January 2018.
- Ronny, “Customer Participation in the creation and implementation of the service for internet banking”, Jurnal Ventura, ISSN 2088-785X, Vol. 20, No. 3 (2017)

## **“NEW NORMAL” INTERNAL AUDIT**

**Andry**

### **Pendahuluan**

Tahun 2020 menjadi tahun bersejarah bagi seluruh dunia dengan hadirnya pandemi virus corona (*Covid-19*) dan telah mengakibatkan dampak global yang signifikan, karena hampir seluruh aspek kehidupan berada dalam situasi ketidakpastian dan kekhawatiran. Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan pasien positif *Covid-19* untuk pertama kalinya dan pada akhirnya pandemi *Covid-19* ditetapkan sebagai bencana nasional. Tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan pandemi *Covid-19* sebagai bencana nasional. (<https://katadata.co.id>)

Pandemi *Covid-19* mengakibatkan situasi ketidakpastian dengan semakin meningkatnya jumlah penularannya dan belum ditemukan vaksinnnya. Dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*, Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan, diawali dengan *physical distancing* hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah di Indonesia yang dikenal dengan istilah “zona merah”.

Kebijakan tersebut mewajibkan hampir seluruh organisasi di Indonesia untuk menjaga jarak aman di lingkungannya, internal maupun eksternal, dengan memperbolehkan aktivitas jarak jauh untuk bekerja dari rumah masing-masing. Hal ini bukanlah keputusan yang mudah bagi organisasi karena operasional dan tata kelolanya harus tetap terjaga, sehingga seluruh aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Seiring berjalannya waktu, akan muncul berbagai permasalahan yang harus dihadapi antara lain kurangnya koordinasi baik internal maupun eksternal, keterbatasan fasilitas fisik, seperti laptop hingga akses internet, adaptasi kebiasaan baru dalam budaya kerja baru maupun keamanan siber yang menjadi ancaman.

Kondisi ini memberikan tuntutan berat kepada auditor internal untuk membantu organisasi untuk menangani banyak masalah yang muncul sebagai akibat dari krisis *Covid-19*, sehingga auditor internal harus mengikutinya. Auditor internal mungkin juga ditarik ke peran baru yang mungkin menguji independensi mereka dalam hal akuntabilitas dan pelaporan, serta mempertahankan pola pikir obyektif dengan tetap memberikan nilai tambah yang maksimal.

Auditor internal harus berpikir jauh ke depan agar tetap relevan, tetapi hanya sedikit yang siap menghadapi perlambatan operasi yang berkepanjangan seperti yang dialami dunia saat ini. Pandemi *Covid-19* menghadirkan ujian paling sulit dari kelangsungan bisnis yang bisa dibayangkan (resesi ekonomi). Auditor internal harus mempertimbangkan bagaimana pandemi memengaruhi organisasi mereka, bagaimana membantu, dan bagaimana tetap relevan dengan membawa nilai baru bagi organisasi.

Proses audit tradisional melalui metode tatap muka selama ini menjadi salah satu metode utama yang dilaksanakan. Situasi dan kondisi pandemi yang terjadi saat ini, disertai dengan kebutuhan untuk tetap melakukan audit berdasarkan peraturan/hukum atau adanya keperluan yang mendesak, maka hal ini memunculkan suatu wacana dan perhatian terhadap proses audit alternatif sebagai solusi terhadap keterbatasan proses audit tradisional. Perubahan ini menuntut fungsi audit internal untuk mengadopsi teknik dan pendekatan audit yang terukur dan fleksibel.

Meskipun aspek-aspek tertentu dari internal audit cenderung membutuhkan kedekatan fisik, gagasan bahwa auditor internal perlu hadir secara fisik untuk melakukan audit secara keseluruhan tidak berlaku lagi. Banyak tugas audit sekarang dapat dipimpin oleh tim audit virtual dan teknologi memfasilitasi rekayasa ulang tentang apa yang dilakukan auditor internal dan bagaimana mereka melakukannya. Audit jarak jauh (*remote audit*) mungkin merupakan solusi alternatif yang dapat diimplementasikan di masa pandemi *Covid-19*.

### ***Remote audit***

Teeter, et al. (2010) mendefinisikan *remote audit* sebagai proses dimana auditor memasang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan analitik data untuk menilai dan melaporkan keakuratan data keuangan dan pengendalian internal, mengumpulkan bukti elektronik, dan berinteraksi dengan auditi, terlepas dari lokasi fisik auditor. *Remote audit* adalah audit yang dilakukan sebagian atau seluruhnya di luar lokasi menggunakan aplikasi seluler atau komputer. Audit akan terdiri dari semua yang biasanya disertakan dalam audit di lokasi. Personil dengan tanggung jawab yang berkaitan dengan rencana audit harus tersedia untuk bagian audit yang relevan. Manajemen puncak juga perlu tersedia untuk bagian audit yang relevan, termasuk pertemuan pembukaan dan penutupan. (Riantono, 2020).

*Remote audit* memberikan kesempatan untuk berinovasi dalam proses audit internal. Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan "pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola" (Institute of Internal Auditors (IIA), 2010).

### ***Elemen remote audit***

Berdasarkan hasil studi IIA terhadap tiga perusahaan yang berkontribusi dalam penerapan *remote audit* sebagai respon *Covid-19*, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

#### ***a) Planning***

Dalam setiap audit, hal yang sangat penting adalah perencanaan dan penentuan lingkup. Rapat perencanaan dengan para pemangku kepentingan sangatlah penting tetapi akan menjadi lebih sulit ketika mereka berada di lokasi yang saling berjauhan.

#### ***b) Reviu dokumen***

Auditi memerlukan waktu yang lebih banyak untuk menyiapkan dan mengunggah dokumen, jika dibandingkan dengan saat auditor mengakses langsung ke tempat arsip di lokasi kerja.

c) Pemeriksaan fisik lapangan

Hal ini mungkin merupakan yang paling menantang bagi auditor, sehingga berbagai solusi teknologi dapat digunakan untuk mendapatkan bukti audit secara memadai.

d) Wawancara jarak jauh

*Video conference* dapat dilakukan terhadap personil-personil inti melalui berbagai aplikasi teknologi yang tersedia, seperti *Zoom*, *Skype*, *Microsoft Teams*, dan sebagainya.

e) *Closing meeting*

Penjadwalannya disarankan satu atau dua hari setelah wawancara, sehingga memungkinkan untuk reviu kembali oleh tim audit dan mengadakan rapat untuk penyusunan draft hasil audit yang akan dipresentasikan kepada stakeholders.

### **Keunggulan dan keterbatasan remote audit**

Penerapan remote audit oleh tiga perusahaan yang berkontribusi dalam studi IIA tentu saja menemukan berbagai keunggulan dan keterbatasan yang dapat disampaikan melalui ringkasan di bawah ini.

Beberapa hal positif yang dijumpai, antara lain:

- a) Audit tetap dapat dilaksanakan walaupun di masa pandemi;
- b) Penghematan biaya perjalanan audit yang signifikan;
- c) Kelompok auditor dapat tersedia dari berbagai wilayah;
- d) Cakupan yang luas dalam hal prioritas volume dan waktu;
- e) Spesialis dapat terhubung saat wawancara tertentu tanpa harus hadir;
- f) Hasil reviu dokumen yang meningkat, serta pendalaman dokumentasi;
- g) Pemahaman dan pemanfaatan teknologi yang meningkat, sehingga dokumentasi dan pelaporan dapat diperkuat;
- h) Mitigasi beban audit terhadap fasilitas operasional dapat dibagi waktunya;
- i) Meningkatkan organisasi dan konfirmasi terhadap dokumentasi yang diperlukan.

Beberapa keterbatasan yang dijumpai, antara lain:

- a) Proses audit yang tidak dapat digantikan khususnya dalam hal yang memerlukan pengamatan langsung;
- b) Hubungan dengan auditi yang sulit dijalin dan kesempatan yang hilang saat memberikan saran perbaikan;
- c) Peluang terjadinya *fraud* karena interaksi personal langsung yang berkurang.

## **Kesimpulan**

Organisasi dan program audit saat ini berfokus pada inovasi dan transformasi, sehingga merupakan saat yang tepat untuk remote audit. Hal ini menghadirkan peluang bagi auditor internal untuk memanfaatkan teknologi dan beradaptasi dengan lingkungan informasi yang berubah. Menerapkan remote audit dapat menyebabkan auditor memikirkan kembali secara mendasar cara pelaksanaan audit dan cara tim audit dibentuk dan dikelola.

Dalam beberapa kasus, remote audit juga bergantung pada rekayasa ulang proses bisnis itu sendiri. Tidak mungkin auditor sendirian akan mendorong perubahan, tetapi mereka harus bekerja sama dengan manajer untuk mencapainya.

Pandemi *Covid-19* memberikan kesempatan bagi audit internal untuk menampilkan keterampilan dan perspektif uniknya, serta membentuk kembali pandangan tentang nilainya kepada manajemen dan organisasi. Auditor internal dapat menjadi juara manajemen krisis dan harus menahan diri dari mengatakan mereka tidak dapat melakukan sesuatu karena dapat menimbulkan konflik kepentingan. Inilah saatnya *new normal* internal audit.

## **Daftar Pustaka**

- Deloitte, 2020. Deloitte untuk Nusantara: Organisasi dan Kepemimpinan: Tangguh Melewati Krisis Pandemi Covid-19  
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/public-sector/id-gps-deloitte-untuk-nusantara.pdf>  
<https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5e9a41c9b46bd/jokowi-tetapkan-pandemi-virus-corona-sebagai-bencana-nasional>. (diakses tanggal 1 Oktober 2020)
- Ignatius Edward Riantono, 2020. <https://accounting.binus.ac.id/2020/08/08/remote-auditing-solutions/> (diakses tanggal 1 Oktober 2020)
- Institute of Internal Auditors (IIA), 2010. What is internal auditing? Available at: [http://www.theiia.org/theiia/about-the-profession/internal-audit-faqs/?i\\_1077](http://www.theiia.org/theiia/about-the-profession/internal-audit-faqs/?i_1077). (diakses tanggal 1 Oktober 2020)
- Institute of Internal Auditors (IIA), 2020. Internal Audit in The Covid-19 Era. <https://na.theiia.org/periodicals/Public%20Documents/Internal-Audit-in-the-Covid-19-Era.pdf> (diakses tanggal 1 Oktober 2020)
- Institute of Internal Auditors (IIA), 2020. Proses Audit Jarak Jauh Selama dan Setelah Covid-19 : Implikasi Jangka Pendek dan Panjang. <https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/EHSKB-Remote-Auditing-for-Covid-19-and-Beyond-Indonesian.pdf> (diakses tanggal 1 Oktober 2020)
- Ryan A. Teeter, Michael G. Alles, and Miklos A. Vasarhelyi (2010) The Remote Audit. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*: December 2010, Vol. 7, No. 1, pp. 73-88. x.

# Bagian 3

## DUNIA USAHA / UMKM

# EFEK BAGI PELAKU UMKM DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

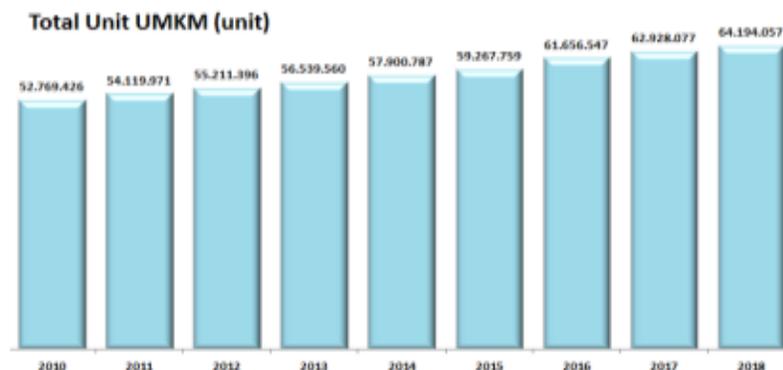
Indraswati Tri Abdi Reviane

## Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia

Usaha kecil, mikro dan menengah yang di Indonesia biasa dikenal dengan akronim UMKM, selama ini berperan cukup besar dalam memacu roda perekonomian Indonesia. Selama kurun waktu 2010 sampai 2018, jumlah wirausahawan di Indonesia melonjak tajam dari 0,24 persen menjadi 1,56 persen dari jumlah penduduk. (Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia, 2017). Peningkatan ini cukup menggembirakan meskipun sebenarnya yang ideal adalah sekitar 2 %, di mana negara tetangga umumnya sudah di atas 4 %. Namun demikian, secara keseluruhan Indonesia merupakan negara yang memiliki UKM/UMKM terbesar sejak tahun 2014 dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Di ASEAN sendiri, UKM juga memegang peranan penting bagi perekonomian ASEAN secara agregat, di mana hingga saat ini 96 persen dari perusahaan yang ada di ASEAN merupakan UKM. (Setyanto et al., 2015)

Dari total unit usaha yang ada di Indonesia, sekitar 99.99% merupakan unit usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM), sisanya yang hanya berkisar 0.01% merupakan unit usaha besar. Selanjutnya, dari keseluruhan UMKM yang ada tersebut, sekitar 98% di dominasi oleh perusahaan mikro. Hal ini sedikit banyak memberi gambaran kepada kita bahwa peran UMKM dalam perekonomian Indonesia cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut yang menunjukkan perkembangan UMKM di Indonesia dalam kurun waktu 2010-2018.

Gambar 1 Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2010-2018

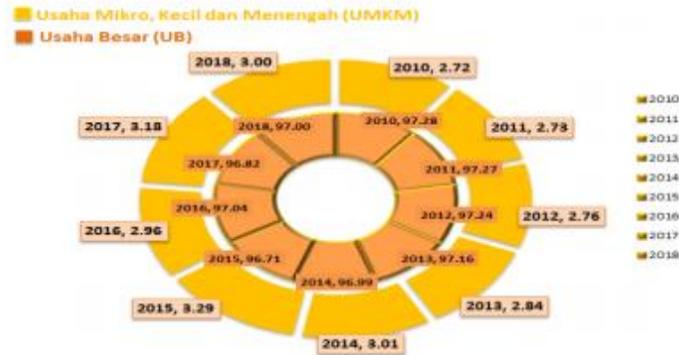


Sumber: data diolah (Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia, 2017)

Selanjutnya, dari total investasi dalam negeri juga menunjukkan peran UMKM di Indonesia lebih dari 50% dengan rata-rata sebesar 52.49% selama periode 2010 hingga 2018. Hal ini tentu saja membawa dampak pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia, di mana UMKM di Indonesia

mampu menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia dan UMKM juga menyumbang 99% dari total lapangan kerja di Indonesia, seperti yg ditunjukkan pada gambar 2 di bawah.

Gambar 2 Perbandingan Tenaga Kerja Usaha Besar dengan UMKM di Indonesia



Sumber: Data di olah (Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia, 2017)

Persentase tersebut tentu saja menunjukkan angka yang cukup fantastis untuk dipertimbangkan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Dari data BPS 2014 pun menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi besar dalam memberikan kesempatan kerja kurang lebih sekitar 96,99 persen. Oleh karena itu, keberlangsungan UMKM sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia, sehingga intervensi pemerintah sangat dibutuhkan agar UMKM tersebut tetap berlanjut dan mencegah tingkat pengangguran yang tinggi.

Lebih lanjut, pada gambar 3 berikut dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2010 sampai 2018 UMKM juga memiliki peran yang besar bagi total produksi nasional Indonesia, di mana sekitar 60.3% dari total PDB Indonesia disumbang dari hasil produksi UMKM. Dengan kata lain, lebih dari setengah produksi nasional Indonesia bersumber dari UMKM. (Mariana, 2012)

Gambar 3 Peran UMKM Terhadap Total Produksi Nasional Indonesia



Sumber: Data di olah (Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia, 2017)

Fakta ini menunjukkan bahwa peran UMKM tidak dapat dipandang sebelah mata. Fakta lainnya adalah UMKM telah terbukti mampu menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ketika krisis moneter di tahun 1997, di mana saat itu satu persatu perusahaan besar tumbang, namun bisnis UMKM justru tak goyah.

Pada umumnya, UMKM di Indonesia berdasarkan data yang ada, terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam. Dalam sektor perdagangan sendiri, UMKM diperkirakan menyumbang rata-rata sekitar 15.34% dari total ekspor non-migas Indonesia. Dengan kata lain, UMKM sedikit banyaknya memiliki kontribusi dalam penambahan devisa negara, khususnya dari penerimaan ekspor non-migas.

Dari beberapa fakta yang telah dipaparkan menunjukkan peran UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia dapat dikatakan cukup signifikan.

Namun demikian, perkembangan UMKM di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- Pemanfaatan Sarana Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Berdasarkan data dari Kemenkop RI melaporkan kalau sudah sekitar 8 juta UMKM yang memanfaatkan sarana teknologi informasi dengan berbasis GoDigital pada tahun 2017 lalu. Jumlah ini hanya sekitar 14% dari total 59.2 juta UMKM yang berdiri di Indonesia. (De Haes & Van Grembergen, 2009) (Chumaidiyah, 2012) (Larasati, 2017)
- Kemudahan Peminjaman Modal Usaha. Dukungan perbankan di dalam negeri dalam bentuk kemudahan mengakses pembiayaan perbankan serta kredit usaha rakyat sangat dibutuhkan untuk mendorong perkembangan UMKM di Indonesia. (Deakins et al., 2002)
- Tarif PPH Final. Pada Juli 2018, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang menetapkan tarif PPh Final UMKM diturunkan menjadi 0,5%.

Dampak pandemi *Covid-19* bagi pelaku UMKM *Covid-19* yang dinyatakan sebagai pandemic oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, telah memaksa sebagian besar negara melakukan lockdown, termasuk Indonesia meskipun dengan menggunakan istilah lain yaitu pembatasan social berskala besar yang disingkat PSBB. (Barro et al., 2020)

Kebijakan PSBB yang diambil pemerintah dengan tujuan memotong mata rantai penularan *Covid-19* di Indonesia, menyebabkan berkurangnya atau bahkan terhentinya sebagian kegiatan ekonomi. Penurunan tersebut terjadi akibat banyaknya kegiatan yang terpaksa dilakukan dari rumah yang dikenal dengan istilah *work from home* (WFH), dan adapula sebagian yang terpaksa

merumahkan karyawannya karena tidak adanya aktivitas. Hal ini sedikit banyaknya tentu berdampak pada penurunan produktivitas tenaga kerja. (Basuno et al., 2010)

UMKM yang umumnya mengandalkan produksinya pada sumber daya tenaga kerja tentu tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi *Covid-19* ini. Penurunan produktivitas tenaga kerja akibat kebijakan PSBB, berdampak pada penurunan produksi UMKM, yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara agregat. Didalam teori ekonomi, kondisi ini dikenal dengan *supply-shock unanticipated*. (Jingga & Limantara, 2015)

Penurunan produksi di satu sisi, diikuti dengan biaya produksi yang relatif tetap, berdampak kepada profit margin UMKM yang semakin menipis. Hal ini membuat para pelaku UMKM menghadapi dilema dalam memproduksi, apakah akan terus memproduksi dengan profit margin yang menipis atau berhenti memproduksi. Kedua-duanya adalah pilihan yang sulit bagi pelaku UMKM. Berhenti memproduksi tentu akan menyebabkan ruginya lebih banyak lagi, karena adanya *fixed cost*. Selain itu pula, *supply shock* ini diyakini hanya temporer sampai vaksin *Covid-19* ditemukan, yang diprediksi pada akhir tahun 2020.

Dari data-data yang ada, sektor-sektor yang paling berat terdampak *Covid-19* adalah sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa penerbangan, dan jasa pembiayaan kredit motor. Sementara sektor yang paling ringan terdampak adalah sektor jasa kesehatan, jasa Pendidikan, listrik dan gas, dan jasa lainnya.

UMKM yang bergerak di sektor perdagangan, merasakan dampak pandemic pada penurunan omzet penjualannya akibat kebijakan PSBB maupun kekhawatiran konsumen untuk keluar rumah berbelanja. Begitupun dengan UMKM yang bergerak di sektor transportasi dan warung makan/restoran.

Dampak negatif dari *Covid*, tentu saja akan semakin berat dirasakan oleh pelaku UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang terdampak paling berat. Meskipun ada juga pelaku UMKM yang dapat meminimalisir dampak negative dari *Covid-19* atas usahanya, dengan catatan bahwa pelaku UMKM tersebut bukan pada sektor yang terdampak sangat kuat. Selanjutnya, dampak negatif tersebut diprediksi perlahan-lahan akan berkurang seiring dengan adanya dukungan kebijakan stimulus dari pemerintah bagi para pelaku UMKM. Selain itu, beberapa UMKM yang adaptif terhadap kehidupan new-normal, nampak sudah mulai bangkit kembali meski masih terseok-seok. Adaptasi yang seyogyanya dilakukan oleh para pelaku UMKM adalah yang mampu menangkap perubahan perilaku konsumen di era *new normal* saat ini, salah satunya ditunjukkan dengan tetap memberikan pelayanan kepada konsumennya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Saat ini, konsumen tidak perlu lagi ke mal, supermarket, dan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena semua

pasar-pasar tersebut sudah ada dalam genggamannya konsumen, dalam bentuk smartphone. (Lu, 2017) (“Compet. Strateg. Small Mediu. Enterp.,” 2016) Lebih lanjut lagi, pandemic *Covid-19* ini ternyata juga memunculkan wirausaha-wirausaha baru yang meskipun terkesan dadakan, namun bisa merespon permintaan pasar dengan cepat. Kita harapkan setelah pandemi *covid* ini berlalu, jiwa kewirausahaan mereka tetap terjaga. (Syuhada & Gambett, 2013)

### **Kebijakan pemerintah di masa pandemi**

Dalam rangka mendorong perekonomian Indonesia yang melambat sebagai akibat dari penurunan aktivitas ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemic *Covid-19*, maka pemerintah mengambil beberapa langkah kebijakan stimulus yang terdiri atas stimulus fiskal dan stimulus moneter. Stimulus fiskal fokus pada peningkatan anggaran kesehatan, pemberian bantuan bagi rumah tangga yang terdampak dalam bentuk pemberian *cash transfer* dan jaminan sosial, dan bantuan kepada sektor yang terdampak dalam bentuk penundaan pembayaran pajak dan penjaminan pinjaman.

Selanjutnya, stimulus moneter dan sektor keuangan fokus pada penurunan suku bunga, *quantitative easing*, penundaan dan pelonggaran pembayaran kredit, dan pemberian fasilitas pinjaman. Selain itu, terdapat stimulus tambahan belanja pemerintah dan pembiayaan, yang salah satunya adalah fokus pada pemberian dukungan pada dunia usaha yang nominalnya sebesar Rp. 150 triliun. Tentu saja stimulus ini ditujukan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional termasuk ultra mikro.

Dampak dari semua kebijakan stimulus ini tentu saja pada peningkatan belanja pemerintah yang mencapai 102.9% dari pagu APBN. Kenaikan belanja pemerintah ini yang justru diikuti dengan penurunan pendapatan pemerintah sebesar -10.0% dari realisasi 2019 atau hanya mencapai 78.9% dari target APBN 2020, sudah dapat diduga berdampak pada defisit anggaran pemerintah yang meningkat menjadi 5.07% dari PDB, setelah sebelumnya hanya sebesar 1.76% di APBN 2020. Hal ini dimungkinkan dalam kondisi darurat yang bertujuan untuk mempercepat penanganan *Covid-19*.

Dukungan pemerintah kepada UMKM diharapkan dapat dilakukan melalui penempatan dana pemerintah di perbankan, sehingga sektor ini memiliki cukup likuiditas untuk:

- a. Membantu nasabah UMKM yang saat ini sedang mengalami kesulitan.
- b. Membantu kebutuhan likuiditas atau working capital pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan rutinnnya, seperti membayar gaji pegawai.

Namun demikian, bantuan tersebut perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa persyaratan bagi nasabah UMKM yang dibantu, seperti: bereputasi baik, taat membayar pajak, dan tidak/minimum PHK. Selain itu, prioritas dapat diberikan pada debitur yang bergerak di sektor yang terdampak *Covid-19* atau di wilayah terdampak.

## Daftar Pustaka

- Barro, R. J., Weng, J., & José, U. F. (2020). The Coronavirus and the Great Influenza Pandemic: Lessons from the “Spanish Flu” for the Coronavirus’s Potential Effects on Mortality and Economic Activity. CESifo Working Paper Series, No. 8166(March), 25. <http://www.nber.org/papers/w26866>
- Basuno, E., Yusdja, Y., & Ilham, N. (2010). Socio-economic impacts of avian influenza outbreaks on small-scale producers in Indonesia. *Transboundary and Emerging Diseases*. <https://doi.org/10.1111/j.1865-1682.2010.01121.x>
- Chumaidiyah, E. (2012). The Technology, Technical Skill, and R&D Capability in Increasing Profitability on Indonesia Telecommunication Services Companies. *Procedia Economics and Finance*. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00326-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00326-7)
- Competitive Strategies for Small and Medium Enterprises. (2016). In *Competitive Strategies for Small and Medium Enterprises*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-27303-7>
- De Haes, S., & Van Grembergen, W. (2009). Enterprise Governance of Information Technology. In *Enterprise Governance of Information Technology*. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-84882-2>
- Deakins, D., Morrison, A., & Galloway, L. (2002). Evolution, financial management and learning in the small firm. *Journal of Small Business and Enterprise Development*. <https://doi.org/10.1108/14626000210419446>
- Jingga, F., & Limantara, N. (2015). The development of Indonesia small medium enterprise (SME) rating and review portal. *International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering*. <https://doi.org/10.14257/ijmue.2015.10.3.20>
- Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia. (2017). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (umkm) dan usaha besar (ub) tahun 2016 - 2017*. Depkop.
- Larasati, N. (2017). Technology Readiness and Technology Acceptance Model in New Technology Implementation Process in Low Technology SMEs. *International Journal of Innovation, Management and Technology*. <https://doi.org/10.18178/ijimt.2017.8.2.713>
- Lu, Y. (2017). Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues. In *Journal of Industrial Information Integration*. <https://doi.org/10.1016/j.jii.2017.04.005>
- Mariana, K. (2012). Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Pembangunan Nasional. *Informatika*.
- Setyanto, A. R., Samodra, B. R., & Pratama, Y. P. (2015). Kajian Strategi Pemberdayaan UMKM Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN (Studi Kasus Kampung Batik Laweyan). *ETIKONOMI*. <https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2271>

Syuhada, A. A., & Gambett, W. (2013). Online Marketplace for Indonesian Micro Small and Medium Enterprises based on Social Media. *Procedia Technology*.  
<https://doi.org/10.1016/j.protcy.2013.12.214>

# **ISOMORFISMA: PERGERAKAN MILENIAL DALAM MEMUTUS RANTAI KRISIS DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Riza Praditha**

## **Pendahuluan**

*Covid-19* merupakan wabah yang mengguncang dunia Internasional, tidak hanya di kota Wuhan sebagai lokasi pertama ditemukannya kasus ini melainkan telah menjangkit hampir seluruh negara di dunia. Berdasarkan data dari WHO yang diakses melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, total kasus yang terkonfirmasi secara global per tanggal 8 September 2020 adalah sebesar 27.236.916 kasus yang mana 891.031 diantaranya adalah kasus kematian. Wabah internasional ini telah mengguncang perekonomian hampir disemua negara di dunia. Meski demikian, beberapa sektor ekonomi mengkonfirmasi dapat bertahan di masa pandemi. Sektor ekonomi kreatif dan investasi adalah dua di antaranya. Keduanya didominasi oleh pelaku ekonomi dari generasi milenial.

Artikel ini mengkaji peran generasi milenial dalam menggerakkan roda perekonomian dari sektor ekonomi kreatif dan investasi, serta bagaimana generasi milenial dijadikan sebagai *role model* bagi pelaku ekonomi lainnya dengan perspektif *Isomorfisma*.

## **Lockdown versus Krisis?**

Di Indonesia, kasus *Covid-19* masih terus meningkat setiap harinya. Sebaran data kasus *Covid-19* di 34 provinsi di Indonesia ditunjukkan pada gambar 1.

Gambar 1. Sebaran Kasus *Covid-19*



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 8 September 2020.

Berdasarkan data per tanggal 8 September 2020 dari 34 provinsi di Indonesia, kasus yang diperiksa sebanyak 1.434.294 spesimen di mana 1.234.259 telah diketahui negatif, sedangkan 200.035 terkonfirmasi positif di mana 8.230 di antaranya merupakan kasus kematian. Selain itu suspek yang masih dalam pantauan adalah sebesar 90.952 kasus (*Covid19.Kemkes.go.id*, 2020).

Pemerintah telah melakukan berbagai usaha dalam menekan angka penyebaran virus *Covid-19* diantaranya adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dianggap cukup efektif memutus rantai penularan virus. Namun, penerapan PSBB ini juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat sebab sebagian besar masyarakat terpaksa mengurangi mobilitasnya. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang terpaksa harus berhenti yang berdampak pada pendapatan masyarakat. Banyaknya karyawan usia produktif yang terpaksa dirumahkan, pengusaha kecil yang kehilangan pasar dan masalah ekonomi lainnya menyebabkan krisis bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia.

Dilansir dari media online BBC, menteri keuangan mengatakan bahwa perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga diperkirakan akan berada di angka -2,9% hingga -1%. Kondisi ini menunjukkan terjadinya kontraksi pada dua kuartal secara berturut-turut di mana pada kuartal kedua kontraksi sebesar 5,32%. Lebih lanjut, menteri keuangan juga menambahkan bahwa kondisi negatif ini terjadi karena tingkat konsumsi masyarakat masih lemah. Kunci utama dalam menekan tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif adalah dengan investasi dan konsumsi domestik (Yuniar, 2020).

### **Fenomena *Creativepreneur* dan Investor Muda di masa Pandemi**

Hampir semua sektor usaha terdampak di masa pandemi *Covid-19*, namun tidak semua sektor pada akhirnya harus gulung tikar. Sebagian sektor usaha terbukti dapat *survive* di masa yang penuh tekanan ekonomi ini, di sektor ekonomi kreatif salah satu contohnya. Menurut praktisi tata suara Aghi Narottama dalam webinar mengatakan bahwa industri kreatif justru hadir dengan berbagai inovasi barunya di masa pandemi sehingga sektor ini tetap dapat melejit ditengah krisis yang terjadi pada berbagai sektor lainnya (Indriani & Sukarelawati, 2020). Selain itu, fenomena digital yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang menguntungkan para pelaku industri kreatif yang selanjutnya disebut dengan *creativepreneur*.

Teknologi digital dan industri kreatif adalah bagian yang tak terpisahkan, teknologi informasi dianggap sebagai modal dalam menjalankan usaha di sektor kreatif (Rachman, 2019). Teknologi ini menyebabkan penggunaan media sosial menjadi meningkat. Media sosial merupakan salah satu jejaring sosial yang memungkinkan setiap orang saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai macam kebutuhan (Kaplan & Haenlein, 2019). Peran media sosial berpeluang dalam menghasilkan ‘pundi-pundi uang’ yang dimanfaatkan oleh para *creativepreneur*, salah satunya adalah *youtube* yang merupakan situs *web video sharing* yang populer di dunia. *Youtube* memiliki lebih dari 1 miliar pengguna dengan ratusan jam kali penayangan (Junawan & Laugu, 2020). Melalui *youtube*, para pengusaha dapat melakukan promosi atas karya baik berupa barang dagangan, jasa, maupun kreatifitas lainnya berupa film, musik dan sebagainya.

Selain menjadi *creativepreneur*, menjadi investor juga dapat menjadi salah satu alternatif profesi yang menguntungkan di masa pandemi. Kementerian perindustrian telah mempublikasi informasi

kenaikan sektor investasi sebesar 24% pada semester I tahun 2020 (Kemenprin, 2020). Selain itu, di akses dari investor daily Indonesia, Bursa Efek Indonesia juga mencatat peningkatan transaksi saham di sektor ritel menjadi 93-112 ribu transaksi (per 24 Juli 2020) di masa pandemi, sedangkan sebelum pandemi hanya berkisar 42-51 ribu investor (Mahardhika, 2020). PT Bursa Efek Indonesia juga telah mengklaim peningkatan jumlah investor sebanyak 13% dibandingkan tahun sebelumnya yang mana peningkatan ini di dominasi oleh investor muda. Lebih lanjut di katakan bahwa sekitar 70% investor yang tercatat di pasar modal Indonesia saat ini merupakan investor muda atau generasi *milenial* (Hartomo, 2020).

### ***Isomorfisma: Milenial Bergerak***

Istilah *Isomorfisma* bisa digunakan untuk melihat keputusan yang diambil seseorang terhadap suatu penyelenggaraan yang dianggap dapat memberikan keuntungan bagi dirinya. *Isomorfisma* adalah tindakan untuk mengikuti keputusan pihak lain karena adanya pengaruh eksternal seperti tekanan *koersif* (memaksa), tekanan *mimetik*, dan tekanan normatif (Perdana, 2011). Menurut DiMaggio & Powell (1983), perilaku *Isomorfisma* dapat menjadi pendorong minat seseorang untuk melakukan suatu hal yang dianggap menguntungkan. Seseorang yang dihadapkan pada tekanan *koersif* cenderung akan melaksanakan suatu kegiatan dikarenakan adanya paksaan yang mengharuskannya. Hal yang sama ketika seseorang berada dalam tekanan *mimetik* yang cenderung akan mengikuti *role model* yang ada. Begitupun dengan seseorang yang berada pada kondisi adanya tekanan normatif yang mengharuskannya untuk meningkatkan profesionalitas (Theo et al., 2003).

Generasi milenial dalam hal ini dapat menjadi alasan terjadinya perilaku *Isomorfisma* dalam diri seseorang untuk mencapai suatu keuntungan finansial. Sebagai contoh peran seorang youtuber yang merupakan *creativepreneur* melihat adanya peluang memasukkan konten *podcast* di situs youtube. *Podcast* sendiri merupakan proses distribusi file audio melalui internet dengan menggunakan RSS subscription yang umumnya dilakukan oleh media seperti radio (Rusdi, 2012). Namun, dengan inovasi, maka seorang *creativepreneur* dapat membawa konten tersebut pada media lainnya. Kemunculan konten *podcast* pada channel youtube pada akhirnya menjadi salah satu sebab munculnya perilaku *Isomorfisma* bagi orang lain. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya *contentcreator* baru bermunculan dengan konsep *podcast* karena dianggap menarik dan menguntungkan. Adanya tekanan *koersif* dari segi kebutuhan finansial mendorong seseorang untuk berpikir kreatif, adanya *role model* dari *creativepreneur* dapat mendorong seseorang secara *mimetik*, dan adanya tuntutan secara normatif akan menjadikan seseorang untuk melakukan tindakan yang profesional.

Dari sisi investasi, generasi milenial menjadi faktor utama semakin bertumbuhnya jumlah investor di Indonesia. Salah satu faktor yang membuat para generasi milenial tertarik berinvestasi saham adalah kehadiran teknologi online trading yang memudahkan investor dalam bertransaksi tanpa terhambat batas wilayah dan demografis (Tuhuteru, 2019). Di masa pandemi,

sektor investasi saham terkonfirmasi tetap mengalami peningkatan jika dibandingkan sektor lainnya. Penelitian Tambunan (2020) menunjukkan bahwa di masa pandemi, investor tetap dapat memperoleh keuntungan dari transaksi saham yang terjadi. Sehingga sektor investasi dapat menjadi salah satu pilihan untuk menghasilkan keuntungan baik dari capital gain maupun deviden secara longterm.

Kemampuan generasi milenial dalam memperoleh keuntungan di sektor investasi dapat menjadi faktor terjadinya *Isomorfisma* pada orang lain yang memiliki sumber daya serupa. Terlebih karakteristik investor yang memang cenderung mengalami bias *heuristik representativeness* dalam mengambil keputusan (Praditha et al., 2020). *Representativeness* menunjukkan adanya tindakan atau keputusan yang didasari oleh kesamaan atau kesesuaian (Tversky & Kahneman, 1973). Dengan demikian, kecenderungan untuk mengikuti tindakan yang didasari kesamaan lebih memiliki peluang yang besar. Sama halnya dengan minat menjadi *creativepreneur* karena kondisi koersif, menjadi investor juga dapat dipicu oleh adanya tekanan finansial untuk memperoleh pendapatan tambahan yang dapat diperoleh dari sektor investasi. Selain itu, banyaknya investor muda ‘sukses’ di sektor investasi menjadi alasan seseorang untuk meniru investor muda yang dianggap telah berhasil memperoleh keuntungan. Selain itu, fenomena menjamurnya pojok bursa di berbagai kampus di Indonesia yang dikelola oleh para investor milenial, juga dapat menjadi faktor normatif yang menggerakkan seseorang untuk bergabung menjadi investor milenial.

## **Kesimpulan**

Perilaku *Isomorfisma* yang secara implisit dapat dianggap sebagai suatu tindakan meniru, yang tindakan tidak selalu dikonotasikan negatif. Perilaku meniru tindakan ataupun kegiatan finansial generasi milenial yang menguntungkan merupakan suatu hal yang dapat berdampak positif baik bagi diri pribadi maupun negara dalam hal perbaikan perekonomian. Kesuksesan generasi milenial sebagai *creativepreneur* maupun sebagai investor muda dapat dijadikan *role model* guna memotivasi orang lain dalam bertindak kreatif dan inovatif dalam mencari sumber keuntungan. Perolehan keuntungan secara *finansial* masyarakat akan membantu perbaikan perekonomian negara khususnya di masa krisis akibat pandemi virus *Covid-19*.

## **Daftar Pustaka**

- Covid19.Kemkes.go.id. (2020, September 9). Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (Covid-19) 9 September 2020 » Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-Covid-19-9-september-2020/#.X2rq1WgzY2w>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>

- Hartomo, G. (2020, June 26). Top Markotop! 70% Investor Milenial Kuasai Pasar Modal Indonesia: Okezone Economy. IDX Channel.  
<https://idxchannel.okezone.com/read/2020/06/26/278/2237057/top-markotop-70-investor-milenial-kuasai-pasar-modal-indonesia?page=2>
- Indriani, & Sukarelawati, E. (2020, June 15). Praktisi: Industri kreatif melejit saat pandemi Covid-19 - ANTARA News. Antara News.  
<https://www.antaranews.com/berita/1555248/praktisi-industri-kreatif-melejit-saat-pandemi-Covid-19>
- Junawan, H., & Laugu, N. (2020). Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia. *Baitul Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 4(1), 41–57.
- Kaplan, A., & Haenlein, M. (2019). Rulers of the world, unite! The challenges and opportunities of artificial intelligence. *Business Horizons*, 63, 37–50.  
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.09.003>
- Kemenprin. (2020, August 3). Kabar Baik, Indeks Manufaktur Indonesia Terus Merangkak Naik. Kementrian Perindustrian Republik Indonesia.  
<https://kemenperin.go.id/artikel/21895/Kabar-Baik,-Indeks-Manufaktur-Indonesia-Terus-Merangkak-Naik>
- Mahardhika, J. (2020, August 14). Selama Pandemi, Transaksi Investor Ritel Melonjak. *Investor Daily Indonesia*. <https://investor.id/market-and-corporate/selama-pandemi-transaksi-investor-ritel-melonjak>
- Perdana, A. (2011). *Isomorfisma* Dalam Adopsi Teknologi Informasi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, A21-28.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1916479>
- Praditha, R., Haliah, H., Habbe, A. H., Rura, Y., & Anwar, A. I. (2020). Accounting Information Disclosure: Single versus Multiple Benchmark. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 4(1), 22–28. DOI: <http://dx.doi.org/10.26487/hebr.v4i1.2352>
- Rachman, R. F. (2019). Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Media Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam. *Komunitas: Journal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 157–176. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i2.1227>
- Rusdi, F. (2012). Podcast Sebagai Industri Kreatif. Seminar Nasional Inovasi Dan Teknologi, B91-94. <http://dewanpers.or.id/publikasi/buku/878-data->
- Tambunan, D. (2020). Investasi Saham di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 4(2), 117–123.
- Theo, H. Wei, K., & Benbasat, I. (2003). Prediction Interntion to Adobt Interorganizational Linkages: An Institutional Perspective. *MIS Quarterly*, 27(1), 19–49.
- Tuhuteru, J. (2019). Preferensi dan bias perilaku online investor di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Peluang*, 13(2), 152–169.

- Tversky, A., & Kahneman, D. (1973). Judgements under uncertainty: Heuristics and biases. *Oregon Research Institute Research Bulletin*, 13(1), 201–210. [https://doi.org/10.1016/0732-118x\(84\)90024-2](https://doi.org/10.1016/0732-118x(84)90024-2)
- Yuniar, R. W. (2020, September 22). Indonesia resmi resesi akibat Covid-19: “Teritori negatif akan terjadi di kuartal tiga dan mungkin kuartal empat”, perkiraan tergantung pada perkembangan pandemi’ - BBC News Indonesia. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53152994>

# STRATEGI UNTUK MENGHADAPI DAMPAK PANDEMI *COVID-19* TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA

**Dipa Teruna Awaloedin**  
**Tri Waluyo**

## **Pendahuluan**

Pandemi *Covid-19* memiliki dampak yang besar terutama terhadap keberlangsungan bisnis UMKM (Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, sebanyak 96% pelaku UMKM mengaku sudah mengalami dampak negatif *Covid-19* dalam proses bisnisnya. Didapati pula 75% diantaranya mengalami dampak penurunan penjualan dan mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat. Virus *Corona* atau yang dikenal juga sebagai *Covid-19* merupakan penyakit misterius yang melumpuhkan kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 yang akhirnya menyebar luas keseluruh dunia. Virus *Corona* atau *Covid-19* ini bermula dari *Pneumonia* atau radang paru-paru misterius. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak dikonsumsi seperti ular, kelelawar dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi *Pneumonia* banyak ditemukan di pasar hewan. Virus *corona* atau *Covid-19* diduga dibawa kelelawar dan hewan lainnya yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Virus *corona* sebenarnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu terinfeksi manusia hingga terjadi penyakit radang paru. Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai vektor virus *Corona* atau *Covid-19*.

Peningkatan Jumlah kasus yang terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya dan hingga kini belum ada vaksin atau obat spesifik untuk menangani virus *corona* ini. Ditengah perkembangan UMKM yang bisa dikatakan belum terlalu baik di awal tahun 2020 ini, UMKM di seluruh Indonesia kembali diuji dengan adanya wabah virus *Covid-19* ditengah masyarakat Indonesia. Penyebaran virus ini memberikan dampak bagi seluruh pelaku UMKM di Indonesia dan berimbas langsung terhadap penurunan secara drastis perekonomian UMKM, banyak sekali UMKM yang gulung tikar meskipun begitu masih ada beberapa UMKM yang masih bisa bertahan yaitu umumnya UMKM yang menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa UMKM yang ada saat ini yang sebagian besar usahanya dibidang kuliner yaitu menjual cemilan kue kering, ceriping, produk olahan dari ayam, ada juga yang menjual pakaian dan kerajinan tas. Kebanyakan mereka ibu-ibu rumah tangga tujuannya untuk menambah penghasilan keluarga, selama ini mereka mempunyai tempat untuk menjalankan usahanya. Tetapi sejak adanya wabah virus *Covid-19* menyerang Indonesia, mereka terkena dampak ekonomi, mengalami kerugian dan kesulitan dalam penyediaan permodalan dikarenakan terbatasnya modal yang mereka punya sehingga mereka memutuskan menjalankan usahanya di

rumah. Selama ini mereka menggunakan modal milik sendiri. Mereka belum pernah dan belum tahu bagaimana cara mengajukan pembiayaan atau pinjaman untuk modal usaha misalnya KUR di Bank Pemerintah.

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan diharapkan juga memberikan output yang dapat terjaga keberlanjutannya bagi mereka terutama dalam hal bagaimana mengelola UMKM di Tengah Pandemi *Covid-19*. Sehingga terjaga keberlangsungan usaha ditengah pandemi *Covid-19* sehingga umkm dapat berkelanjutan usahanya.

### **Pembahasan**

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) justru menjadi sektor paling rentan terhadap imbas dan hantaman pandemic virus corona ini. Para pakar ekonom ada yang untuk itu pemerintah harus memprioritaskan memprediksi bahwa sektor ini tidak bias lagi menjadi penyangga tidak bisa lagi menjadi penyangga perekonomian seperti saat krisis ekonomi dan keuangan 1998 dan 2008 Adapun strategi dalam mengatasi krisis keuangan ataupun dampak dari pandemic *Covid-19* ini agar para pelaku UMKM dapat survival, adalah:

#### **Perbaiki Kualitas Produk dan Layanan**

Pada masa krisis ini merupakan moment yang tepat bagi pelaku UMKM untuk memperbaiki kualitas produk maupun layanan kepada konsumen serta berhenti sejenak untuk mengembangkan strategi penawaran produk barang dan jasa yang menjadi basis bisnisnya. Seringkali para pelaku usaha tidak menyadari perbedaan produk dan pengembangan penawaran. Pada dasarnya produk adalah barang atau jasa yang dipasarkan dalam bisnis. Sedangkan penawaran adalah cara yang dilakukan pebisnis usaha untuk memasarkan produk tersebut. Oleh sebab itu pelaku usaha perlu membedakan antara produk dan penawaran berdasarkan prespektif konsumen. Strategi menawarkan produk bukan dengan cara mempromosikan keunggulan produk itu sendiri, tetapi membuat konten iklan yang menarik dengan komponen attention, interest, desire, dan action. (perhatian, minat, keinginan dan tindakan).

#### **Manfaatkan Teknologi dengan Optimal**

Dalam hal ini pelaku usaha juga disarankan melakukan proses automasi pada bisnisnya. Pada dasarnya terdapat tiga bahan bakar utama dalam berbisnis, yaitu waktu, energy, dan uang. Kebanyakan pelaku usaha memiliki uang, tetapi tidak memiliki waktu dan energy karena dihabiskan oleh pencatatan manual dan cara-cara tradisional, dalam hal ini bisa menghambat perkembangan bisnis. Oleh sebab itu pelaku usaha wajib memperbaiki proses bisnisnya, misalknya dengan mengubah pencatatan manual dengan software akuntansi online, mengubah proses pembayaran gaji karyawan yang tadinya dengan manual menjadi sistem payroll otomatis atau mengubah sistem pembayaran pajak secara tradisional menggunakan software “Klik Pajak”. Bagi para pedagang kaki lima dan pebisnis kuliner dapat memanfaatkan aplikasi grabfood atau gofood agar produknya dikenal masyarakat, karena dimasa-masa sekarang istilah stay home,

menjadikan masyarakat lebih memilih memesan makanan dari pada jalan keluar rumah untuk membeli makan.

Pemasaran digital atau dikenal dengan istilah *digital marketing* ini adalah salah satu cara pemasaran produk atau jasa yang menggunakan perangkat elektronik. Melalui pemasaran digital, pelaku bisnis UMKM masih dapat menghubungi pelanggan atau relasinya tanpa harus bertemu langsung dengan pelanggan maupun relasi.

Memasuki era milenial yang sarat ketergantungan pada sosial media seperti sekarang ini, *digital marketing* telah menjadi salah satu strategi promosi dan pemasaran yang sangat relevan sekaligus efisien bagi UMKM. Untuk melakukan pemasaran digital, ada 5 cara mudah yang dapat dilakukan para UMKM untuk melakukan pemasaran media sosialnya yaitu:

### **Pemasaran Media Sosial**

Dengan banyaknya pengguna media social sekarang ini, maka pemasaran media social juga merupakan salah satu strategi yang efektif untuk memperoleh kesuksesan bisnis. Pemasaran media social adalah metode promosi (pemasaran) produk atau jasa dengan menggunakan berbagai *platform* media social, seperti Instagram, Facebook, atau Youtube. Para UMKM dapat menggunakan salah satu *platform* media social yang banyak digunakan oleh kliennya. Jika target kliennya lebih tua, maka dapat digunakan Instagram, tetapi jika target klien lebih besar, maka Facebook merupakan media social lebih tepat digunakan.

### **Buat Situs Web**

Tidak dapat diprediksi kapan pandemi virus ini akan berakhir, maka dari itu tidak ada salahnya jika para pelaku UMKM membuat situs web sendiri. Situs web akan membantu mendukung bisnis kita selama 24 jam penuh, karena konsumen dapat mengakses kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun walaupun kita sedang bepergian. Untuk proses pembuatan situs web ini, pebisnis atau pelaku UMKM dapat menghubungi salah satu agensi yang menyediakan pembuatan situs web.

### **SEO (Optimasi Mesin Pencari)/Search Engine Optimization**

Dengan mesin pencari, tentu saja akan menjadi peluang meningkatkan jumlah pengunjung yang datang ke situs web kita, semakin banyak pula calon konsumen yang akan dapat kita peroleh, tidak terkecuali ditengah kasus *Covid-19* ini. Untuk mengoptimalkan mesin pencari (SEO) ini agar mendapatkan peringkat yang lebih baik pada hasil pencarian organik atau “gratis”.

### **Pemasaran Konten**

Pemasaran konten merupakan salah satu cara untuk meningkatkan trafik situs web (jumlah pengunjung) yang datang ke web. Pemasaran konten adalah pemasaran online yang mendukung dalam pembuatan, membuat dan mengkonversi konten yang relevan, konsisten, dan mampu menarik perhatian banyak orang (pembaca), sehingga membuat mereka tertarik menggunakan

produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan menyediakan berbagai informasi penting dan bermanfaat pada situs web, misalnya melalui artikel (blog), akan membuat mereka tertarik untuk datang ke situs web.

### **PCC (*pay per Click*)**

Iklan google adalah salah satu jenis iklan PPC (*Pay per Click*) yang disediakan oleh Google untuk mendapatkan berbagai bisnis melalui mesin pencari google. Ditengah masalah *Covid-19* saat ini, Iklan Google juga menjadi salah satu strategi pemasaran bisnis yang bisa diadalkan. Dari sisi penjualan, UMKM juga bisa memanfaatkan jasa *Online Delivery* yang saat ini sedang digandrungi masyarakat. Metode pengiriman pesanan makanan atau pesanan barang ini merupakan salah satu bentuk pengaturan jarak social atau *social distancing*, yaitu sebuah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian dengan metode pengiriman *online delivery* ini berarti kita telah menerapkan “jarak social”, mengingat virus corona ini memang sangat mudah menular dan menyebar. Tentu saja masyarakat akan mencari pesanan makanan atau pesanan barangnya yang menggunakan metode pengiriman *online delivery* ini, karena tidak perlu keluar rumah untuk mencari makan atau pesaan barangnya.

### **Persiapkan Bisnis Untuk Lebih Berkembang**

Pada masa pandemic *Covid-19* ini para pelaku usaha juga perlu memanfaatkan masa ini untuk meningkatkan keahlian yang dimiliki demi perkembangan bisnis kedepannya. Misal keahlian dalam melakukan pemasaran via digital atau mengembangkan platform *e-commerce* sendiri. Sehingga saat bisnis berjalan dengan normal, operasional bisnis bisa berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa faktor yang membuat UMKM masih bisa bertahan ditengah wabah *Covid-19*.

Pertama, umumnya UMKM yang menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang menurun drastis tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan. UMKM malah bisa bergerak dan menyerap tenaga kerja meski jumlahnya terbatas dan dalam situasi *Covid-19*.

Kedua, pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumberdaya lokal, baik sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor. Dan yang ketiga, umumnya bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri.

Peran pelaku UMKM ditengah wabah untuk tetap menjaga pertumbuhan UMKM menjadi sangat penting. Saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah menahan penyebaran *Covid-19*. Sebab, menahan laju penyebaran *Covid-19* akan berpengaruh terhadap perekonomian.

Anjuran *social distancing* demi menghindari penularan virus Corona yang lebih luas, sedikit banyak turut andil menurunkan aktivitas jual-beli di tengah masyarakat. Contohnya pelaku usaha warteg di Jakarta. Menurut ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni, virus Corona telah membuat omset pengusaha warteg di Indonesia, khususnya Jabodetabek mengalami penurunan hingga 50 persen. Namun beruntung, menurut penelitian yang dilakukan *Center for Economic and Social Studies* (CESS) dan *The Center for Micro and Small Enterprise Dynamic* (CEMSED), UMKM di Indonesia tergolong unik karena selalu punya kemampuan untuk berkembang dan bertahan selama krisis. Hal ini terbukti dengan inisiatif para pengusaha warteg yang lebih memilih untuk tetap beroperasi, namun mengubah cara berjualan dengan hanya melayani pembelian kemasan (untuk dibawa pulang), tidak melayani pembelian makan di tempat.

Kebijakan *social distancing* yang dipilih pemerintah Indonesia, telah membuat aktivitas produksi terganggu. Beberapa perusahaan mengambil kebijakan *Work From Home*, beberapa lagi memutuskan untuk merumahkan karyawannya, hingga terjadi PHK massal. Menurut data terbaru Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, sebanyak 30.137 pekerja dilaporkan harus kehilangan pekerjaan karena PHK massal, sedangkan 132.2799 pekerja lainnya kehilangan penghasilan karena dirumahkan tanpa upah. Efek domino dari badai PHK dan pekerja yang dirumahkan telah membuat penurunan kapasitas produksi mengalami penurunan ekstrim. Mau tidak mau kondisi ini telah menyebabkan bahan baku produksi industri rumah tangga mengalami kelangkaan, atau mengalami kenaikan harga yang ekstrem. Misalnya sektor UMKM pembuat kue dan roti yang dipusingkan dengan melambungnya harga telur dan gula pasir. Akibatnya, harga jual produk pun ikut dinaikkan. Pilihan ini tergolong beresiko, mengingat saat ini daya beli masyarakat sedang lesu.

Distribusi Terhambat, Pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan jalur distribusi ke seluruh Indonesia lewat pembangunan infrastruktur besar-besaran di Indonesia. Proyek tersebut bahkan sudah dimulai sejak Presiden Joko Widodo menjabat di periode pertama. Hasilnya cukup signifikan, jalur distribusi jadi lebih cepat, kesenjangan harga bisa dipangkas, dan laju perekonomian rakyat pun semakin kencang.

Namun kini, *Covid-19* telah ‘menghancurkan’ semua itu. Menurut data Asosiasi Tol Indonesia (ATI), lalu-lintas harian rata-rata (LHR) seluruh jalan tol di Indonesia mengalami penurunan antara 40-60 persen sejak awal Maret 2020. Penurunan ekstrim terjadi di wilayah Jabodetabek. Jika pada bulan Februari jumlah kendaraan yang melintas mencapai angka 3.19 juta kendaraan, di akhir Maret kemarin jumlah tersebut hanya tersisa 1.06 juta saja. Kondisi ini diperkirakan akan terus terjadi selama masa pandemi virus Corona. Terhentinya aktivitas distribusi tentu sangat merugikan pelaku bisnis UMKM. Mereka kini kebingungan mencari cara mendistribusikan produk, terlebih bagi UMKM yang sudah mulai memperluas jangkauan pasar hingga luar daerah, atau bahkan lintas pulau. Penyedia Jasa Ikut Terpapar Dampak *Covid-19*.

Tidak hanya UMKM yang bergerak di sektor produksi rumahan, mereka yang bergerak di bidang jasa pun dilaporkan mengalami penurunan omset yang signifikan. Misalnya tukang cukur yang terpaksa harus kehilangan penghasilan akibat kebijakan social distancing. Mereka yang bekerja sebagai buruh harian lepas, seperti pegawai bangunan, makeup artis, pekerja wedding organizer, fotografer pernikahan, dan lainnya dilaporkan kesulitan mendapatkan penghasilan karena sejumlah proyek terpaksa ditunda akibat pandemi virus Corona.

Beruntung, pemerintah saat ini cukup berani mengambil kebijakan dengan tidak memberlakukan *lockdown*, sehingga beberapa UMKM di daerah masih punya kesempatan untuk mencari cara agar tetap bisa ‘bertahan hidup’. Selain itu, ada beberapa kebijakan lainnya yang dinilai cukup membantu para pelaku UMKM, misalnya memberikan relaksasi kredit, menggratiskan dan diskon listrik hingga 50 persen, serta program kemudahan suntikan modal. Hal ini terlihat dari langkah Otoritas Jasa Keuangan yang menerbitkan kebijakan *counter cyclical* yang tertuang pada siaran pers No. HM.4.6/32/SET.M.EKON. 2.3/03/2020 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

### **Tips dan Strategi**

Untuk menjalankan bisnis saat ini bisa dilaksanakan 5 Tips dan Strategi yang dapat dijalankan Bisnis di Tengah Pandemi *Covid-19*, 5 Strategi Bertahan Selama Wabah *Covid-19* Berikut ini adalah tips dan strategi agar bisnis bisa tetap berjalan dengan baik di tengah pandemi *Covid-19*:

1. Periksa kondisi keuangan Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah *Covid-19* ini akan berakhir. Lakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis Anda. Hal yang perlu Anda pastikan terlebih dahulu adalah posisi likuiditas bisnis Anda. Likuiditas adalah sejumlah dana atau *asset likuid* yang dapat dengan cepat Anda gunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek termasuk untuk keperluan dalam keadaan darurat (*emergency fund*). Anda harus memastikan seberapa besar likuiditas yang Anda miliki dan seberapa lama likuiditas tersebut dapat menghidupi bisnis Anda.
2. Periksa status aset dan hutang Dalam kondisi seperti ini, pastikan dapat mengukur kemampuan usaha dan mampu bertahan dalam kondisi sulit. Buatlah rincian yang mencakup jumlah aset dan jumlah hutang. Kemudian, kurangi jumlah aset dengan jumlah hutang. Dengan begitu, dapat diproyeksikan keberlangsungan usaha. Perlu diingat bahwa salah satu dukungan pemerintah untuk UMKM saat ini adalah program restrukturisasi pinjaman untuk membantu meringankan dampak wabah *Covid-19* terhadap bisnis. Hal ini dapat menjadi solusi apabila kondisi keuangan bisnis mengalami gangguan signifikan.
3. Buatlah baru sebagai pelaku usaha, pelaku umkm harus selalu dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan atau risiko yang mungkin terjadi pada bisnis. Sehingga dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha. Buatlah *business plan* baru yang memuat strategi pemasaran, strategi distribusi, sistem pemodal dan pola pengeluaran. Dengan begitu, dapat meningkatkan kemampuan usaha untuk bertahan saat kondisi keuangan sulit.

4. Pelaku UMKM dapat mencoba menerapkan strategi digital marketing untuk menghemat *budget* promosi dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan bisnis. Kemudian catat pola pengeluaran Pengeluaran sendiri terbagi menjadi 4 pos yaitu primer berkaitan dengan biaya operasional, kewajiban berkaitan dengan upah atau gaji pekerja, sekunder, dan investasi. Tandai beberapa pengeluaran sekunder dan alihkan pengalokasian pengeluaran tersebut untuk modal tambahan atau investasi.
5. Lakukan manajemen resiko Guna merumuskan strategi untuk menghadapi potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko bisnis, pertama-tama harus menganalisa risiko apa saja yang mungkin terjadi pada bisnis. Adapun beberapa strategi manajemen risiko antara lain: menanggung sendiri kerugian yang mungkin disebabkan oleh sebuah risiko, menghindari risiko, mengurangi potensi risiko dan yang terakhir adalah mengalihkan pengelolaan risiko dan kerugian yang mungkin timbul kepada pihak ketiga. "Dalam kondisi tidak biasa seperti saat ini, lakukan reviu atas kondisi kegiatan bisnis dan apabila diperlukan lakukan perubahan untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan termasuk dengan meminimalisasi pengeluaran." "Selain itu, agar semakin aman dan tenang, periksa kembali perlindungan asuransi aset-aset. Untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih.

### **Kesimpulan**

Wabah virus corona memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Dampak itu bisa saja diminimalisir, namun hal itu tergantung dari kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasinya. Persoalannya, sebagian besar pelaku UMKM, khususnya mikro mengalami penurunan omzet yang signifikan sejak *Covid-19* teridentifikasi di Indonesia.

Pemerintah sendiri saat ini sudah menerbitkan sejumlah regulasi untuk mendorong perkembangan sektor UMKM, agar tak tergerus ganasnya virus yang pertama teridentifikasi di Wuhan-Tiongkok-ini. Di masa sekarang, penggunaan teknologi akan menjadi solusi terbaik untuk membantu roda perekonomian UMKM tetap berjalan. "Selain bantuan modal, pemasaran melalui media sosial dan automasi pembukuan akan memudahkan UMKM untuk menyusun strategi yang sekiranya tepat guna kelangsungan usaha saat ini dan ke depannya menghadirkan produk Jurnal software akuntansi online berbasis cloud yang menyajikan sejumlah tips yang dapat diterapkan pelaku UMKM dalam menghadapi tekanan ekonomi.

### **Daftar Pustaka**

- Baskoro, Suryo. Peranan sektor informal di Indonesia, retrivied March 11, 2013 from: <http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=32> 2
- Direktorat ketenagakerjaan dan analisis ekonomi, Studi profil pekerja di sektor informal dan arah kebijakan ke depan, retrivied March 11, 2013 from:

[http://old.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=85/Studi-Pekerja\\_Acc.pdf](http://old.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=85/Studi-Pekerja_Acc.pdf)

Hendro, Ir. MM, Dasar-dasar Kewirausahaan, Penerbit Erlangga, tahun 2011

Irham Fahmi, Kewirausahaan (teori, kasus dan solusi), Penerbit Alfabeta Bandung, Juli 2013.

Sufyati HS, Dipateruna Awaludin, Ummu Salamah, Mengelola Permodalan dan Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi Covid.19, Mei 2019 (proses terbit jurnal)

Tommy Prasetyo dan Dyah Harjanti; Modal Sosial Pengusaha Mikro dan Kecil Sektor Informal dan Hubungannya dengan Kinerja Bisnis di Wilayah Jawa Timur, Agora Vol. 1, No. 3(2013).

Tsai, Wenpin, Sumantra Ghoshal. (2007). Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks: The Academy of Management Journal, Vol.41, No.4, pp. 464-476.

Tim Dosen Asosiasi Dosen Indonesia, Pengabdian Kepada Masyarakat, On Line, April- Mei 2020 (Proses Terbit Buku)

Undang-undang no.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah retrieved march 10, 2013 from: <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2008/07/04/undang-undang.no-20-tahun-2008>

<https://www.galamedianews.com/nasional/256399/jumlah-pengangguran-di-indonesia-naik-per-februari-2020.html>

<http://pelakubisnis.com/2019/09/umkm-mampu-dorong-pertumbuhan-ekonomi/>

<https://news.detik.com/kolom/d-4974884/stimulus-umkm-di-tengah-badai-corona>

<https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/67200-Pengaruh-Covid-19-Terhadap-Pertumbuhan-UMKM-di-Indonesia>

[https://www.statistikian.com/2012/10/penelitiankualitatif.html#Pengertian\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Menurut\\_Ahli\\_Pakar](https://www.statistikian.com/2012/10/penelitiankualitatif.html#Pengertian_Penelitian_Kualitatif_Menurut_Ahli_Pakar)

<https://tirto.id/5-tips-dan-strategi-bisnis-di-tengah-pandemi-Covid-19-fdSF>

<https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01353470/di-tengah-pandemi-Covid-19-umkm-perlu-stabilisasi-arus-kas-dan-pembiayaan>

<https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini>

<https://maucash.id/dampak-covid19-terhadap-bisnis-usaha-kecil-menengah-ukm-di-indonesia-2>

[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-6-II-P3DI-Maret-2020-1982.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-6-II-P3DI-Maret-2020-1982.pdf)

<https://covid19.who.int/> Globally, as of 12:10pm CEST, 22 September 2020

# STRATEGI PEMASARAN BAGI UMKM TERDAMPAK *COVID-19*

**Hapsawati Taan**

## **Pendahuluan**

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus berkembang hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Perkembangan ini tentunya menuntut pelaku UKM untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif. UMKM telah mampu memberikan kontribusi penting dalam peningkatan perekonomian Indonesia untuk itu pemberdayaan UMKM perlu dilakukan dengan serius. Sebuah UMKM akan sulit untuk berkembang jika pelaku usahanya tidak mengetahui bagaimana cara memasarkan suatu produk dengan efektif.

Situasi merebaknya pandemi virus *Covid-19* mengharuskan masyarakat melakukan kegiatannya di rumah dan menjaga jarak sosial (*social distancing*) sesuai dengan anjuran pemerintah. Adanya wabah *Covid-19* yang melanda dunia, mengakibatkan beberapa sektor industri termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami dampak turunnya tingkat penjualan sehingga keuntungan yang diperoleh juga mengalami penurunan. Kondisi ini membutuhkan pemilihan strategi pemasaran, pemilihan strategi ini bertujuan meningkatkan keunggulan bersaing sehingga UMKM dapat tetap bertahan dalam kondisi yang tidak menentu seperti saat ini. Keunggulan bersaing diperoleh melalui pengembangan kondisi internal dan eksternal sehingga diperoleh strategi bersaing yang tepat (Hartanto & Kholil, 2018).

Strategi pemasaran merupakan faktor penting bagi keberhasilan bisnis di masa sekarang. Strategi pemasaran merupakan pendekatan pokok yang akan digunakan oleh unit bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan lebih dulu, di dalamnya tercantum keputusan-keputusan pokok mengenai target pasar, penempatan produk di pasar, bauran pemasaran dan tingkat biaya pemasaran yang diperlukan. strategi pemasaran merupakan taktik yang dapat digunakan oleh sektor usaha dalam mengembangkan kapasitas usahanya untuk menghadapi globalisasi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa strategi pemasaran dapat berimplikasi positif baik pada pengembangan usaha, maupun kinerja pemasaran secara keseluruhan.

## **Dampak *Covid-19* Terhadap Sektor UMKM di Indonesia**

Pandemi virus Corona bukan hanya sekedar bencana kesehatan, virus yang dikenal sebagai *Covid-19* ini telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Pandemi *Covid-19* memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyak pelaku UMKM yang mengalami dampak negatif *Covid-19* terhadap proses bisnisnya. Dengan adanya pandemi *Covid-19* pelaku UMKM mengalami: 1) penurunan penjualan yang signifikan, 2) Sulit mendapatkan bahan baku, 3) terhambatnya distribusi, 4) mengalami kesulitan permodalan, dan 5) terhambatnya produksi. (Gunardi dkk, 2020) Menunjukkan bahwa adanya

*Covid-19 profitabilitas* UMKM Fashion mengalami keterpurukan sehingga UMKM Fashion mengubah strategi pemasarannya dengan cara online dan memberikan keuntungan yang bagus karena jangkauan pemasaran lebih luas.

### **Apa itu Strategi Pemasaran?**

Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi (Kotler & Keller, 2018). Strategi pemasaran pada dasarnya merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana memberikan nilai konsumen superior kepada konsumen dari pasar sasaran (Supranto dan Limakrisna, 2011). Strategi pemasaran memerlukan keputusan-keputusan manajemen tentang elemen-elemen bauran pemasaran perusahaan (Dharmmesta, 2014).

Strategi adalah penetapan arah keseluruhan dari bisnis. Sedangkan taktik adalah merupakan implementasi dari strategi yang menekankan pada bagian-bagian tertentu dalam kegiatan bisnis (Alma, 2011). Strategi pemasaran merupakan rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan/UMKM dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Strategi merupakan suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan. Kotler (2018) Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.

Kunci prosedur pelaksanaan strategi terletak pada proses bisnis dalam kerangka sistem *e-commerce* jelas terlihat adanya aktivitas integrasi antara proses internal perusahaan dan proses organisasi lain yang menjadi mitra usahanya (Indrajit, 2001). Strategi pemasaran dapat diterapkan yakni: 1) penetrasi pasar baru terdiri masuk pasar/entry, ceruk, dimensi (vertical dan horizontal), dan posisi. 2) Ekspansi pangsa pasar terdiri dari diferensiasi produk versus segmentasi pasar, ekspansi terbatas versus ekspansi umum, dan reposisi. (Tumpal, 2018). Keputusan strategik mempunyai dampak besar atas suatu perusahaan dan menuntut komitmen besar atas sumber daya perusahaan, para manajer puncak harus memberikan persetujuan akhir bagi tindakan strategik (Pearche & Robinson, 2011).

### **Mengapa Strategi Pemasaran Produk penting bagi pelaku UMKM?**

UMKM memiliki peranan penting dalam suatu negara diantaranya, pendistribusian pendapatan masyarakat, mampu mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi. Dilihat dari manfaat dan peranannya, keberadaan UMKM perlu diperhatikan agar dapat menjadi wadah bekerja yang baik dan mampu bersaing dengan perkembangan zaman yang pesat serta dapat meningkatkan kualitas masyarakat menjadi lebih baik sehingga memberikan dampak baik pada perekonomian nasional (Padyanawati dan Hardjomidjojo, 2019). Bagi pelaku UMKM strategi pemasaran produk penting di lakukan hal ini disebabkan:

1. Pemasaran digunakan sebagai sarana untuk mengenalkan produk UMKM. Mulai dari bahan, fitur, fungsi dan aneka detail produk.
2. Mengidentifikasi/Mengetahui keinginan dan perilaku konsumen. Pelaku UMKM bisa dengan mudah memenuhi harapan para konsumen melalui produk yang dibuat.
3. Pemasaran pada UMKM sebagai urat nadi perusahaan. Tanpa strategi pemasaran produk UMKM yang baik, maka target penjualan akan sulit dicapai.
4. Membangun branding/Merek. Agar produk Anda diketahui banyak orang, maka coba perbaiki merek dan bangun merek mulai dari sekarang.
5. Ciptakan komunikasi atau Hubungan Baik dengan Konsumen. Memiliki hubungan baik dengan konsumen penting dilakukan. Agar konsumen menjadi loyal/setia dan tidak mudah berpaling ke pesaing.
6. Menjaga Pertumbuhan Usaha. Hal ini dilakukan untuk jangka waktu panjang. Usaha yang bisa bertahan lama, langgeng ditentukan oleh kekuatan merek, komunikasi pemasaran yang berkelanjutan dan juga kualitas produk.

Penentuan Strategi Pemasaran Dapat dilakukan oleh Pelaku UKM dengan tiga macam keputusan: 1) Konsumen manakah yang akan menjadi sasaran? 2) Kepuasan seperti apakah yang diinginkan oleh konsumen tersebut? 3) Bauran Pemasaran (Produk, Harga, Distribusi, Promosi) seperti apakah yang dipakai untuk memberikan kepuasan kepada konsumen tersebut?

### **Konsep Yang Mendasari Suatu Strategi Pemasaran**

Dalam strategi marketing banyak digunakan kebijakan bagaimana memelihara konsumen dengan jalan memberikan kepuasan maksimal (Alma, 2017) antara lain: 1) marketing mix, 2) Customer relationship management 3) customer value-nilai pelanggan dan 4) customer dependency.

1. Segmentasi pasar dan penargetan; Segmentasi/Pengelompokan Pasar merupakan dasar untuk mengetahui bahwa setiap pasar itu terdiri atas beberapa segmen yang berbeda-beda. Dalam Setiap Segmen terdapat pembeli-pembeli yang mempunyai: a) Kebutuhan yang berbeda-beda b) Pola Pembelian yang berbeda-beda c) Tanggapan yang berbeda-beda terhadap berbagai macam penawaran. Proses penentuan segmen pasar sasaran ini disebut penargetan, selanjutnya dapat melakukan pemosisian pasar.
2. Strategi Memasuki Pasar; Segmentasi/Pengelompokan Pasar merupakan dasar untuk mengetahui bahwa setiap pasar itu terdiri atas beberapa segmen yang berbeda-beda. Perusahaan dapat menempuh beberapa cara untuk menjangkau segmen pasar sasaran yaitu: a) Membeli perusahaan lain b) Berkembang sendiri: misalnya memperoleh hak paten. c) Kerjasama dengan perusahaan lain.
3. Strategi Bauran Pemasaran (*Marketing Mix*)
  - a. Produk; Keputusan tentang Produk mencakup: a) Penentuan bentuk penawaran secara fisik atau jasa b) Mereknya c) Kemasan d) Garansi e) Servis/layanan purna jual

- b. Harga; Setiap produk atau jasa yang ditawarkan ada penentuan harga pokoknya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga: a) Biaya b) Keuntungan c) Praktek saingan d) Perubahan selera pasar
  - c. Distribusi/Tempat; Ada Tiga Aspek Pokok yang berkaitan keputusan distribusi/tempat yaitu: 1) Sistem transportasi usaha: (alat transportasi, penentuan jadwal pengiriman, penentuan rute) 2) Sistem penyimpanan: (Letak Gudang dan peralatan di gudang) 3) Pemilihan saluran distribusi: (Pedagang besar, pengecer, agen).
  - d. Promosi; Kegiatan promosi meliputi: a) Periklanan b) Penjualan tatap muka (personal selling) c) Promosi penjualan d) Publisitas. Beberapa keputusan berkaitan dengan periklanan adalah pemilihan media: (majalah, televisi, Surat kabar, Media sosial, dll)
4. Strategi Penentuan Waktu; Apabila perusahaan/UMKM telah menemukan peluang yang baik kemudian menetapkan tujuan dan mengembangkan suatu strategi pemasaran. Tidak berarti bahwa perusahaan tersebut dapat segera beroperasi. Perusahaan /UMKM dapat mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan apabila bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Oleh karena itu, masalah waktu yang tepat sangat penting bagi perusahaan/UMKM untuk melaksanakan program pemasarannya.

### **Strategi Pemasaran Dan Perilaku Konsumen**

Strategi dan taktik pemasaran didasarkan pada keyakinan eksplisit atau implisit tentang perilaku konsumen. Keputusan berdasarkan asumsi eksplisit pada teori dan penelitian lebih mungkin untuk berhasil daripada keputusan berdasarkan firasat atau intuisi Malau, (2018). Dengan demikian, pengetahuan tentang perilaku konsumen dapat menjadi keuntungan kompetitif yang penting. Hal ini dapat sangat mengurangi kemungkinan membuat keputusan yang buruk dan menciptakan kegagalan pasar. Kebijakan regulasi berbagai badan pengawas dibuat untuk mengembangkan, menafsirkan atau melaksanakan kebijakan yang dirancang untuk melindungi konsumen dan bantuan. Pemasaran Sosial

Pemasaran sosial adalah penerapan strategi dan taktik pemasaran untuk mengubah atau membuat perilaku yang memiliki efek positif pada individu yang ditargetkan atau masyarakat secara keseluruhan. Individu yang diinformasikan, masyarakat paling berkembang dalam ekonomi disebut sebagai masyarakat konsumsi.

Pemahaman tentang perilaku konsumen adalah dasar untuk perumusan strategi pemasaran. Reaksi konsumen terhadap strategi pemasaran menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. Namun, reaksi juga menentukan keberhasilan konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan memiliki dampak signifikan pada masyarakat. Di era digital saat ini, arus komunikasi menjadi semakin cepat, mudah dan murah dengan teknologi internet. Jaringan internet untuk menjangkau konsumen lebih luas melalui media sosial. Menjangkau target pasar yang lebih luas, murah dan juga efisien. *E-commerce* mampu memperpendek jarak penyebaran penjualan produk sehingga konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih murah.

Pertumbuhan dan stabilitas strategi pemasaran membutuhkan penguatan internal melalui keunggulan bersaing sehingga pengembangan usaha dapat dilakukan. Hal ini membutuhkan segmentasi dan segmentasi pasar dengan peningkatan promosi melalui media online. Penguatan pemasaran juga harus didukung adanya inovasi dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen (Narto dan Basuki, 2020). Penelitian pemasaran, terutama penelitian perilaku konsumen sangat penting dalam pelaksanaan setiap langkah proses strategi pemasaran (Prasetijo dan Ihalauw, 2005). Komunikasi pemasaran membutuhkan pemuasan tujuan-tujuan promosi melalui kejelasan dan pemikiran pengembangan strategi komunikasi (Suryana, 2014).

### **Keuntungan Memanfaatkan Media Sosial & Pemasaran Elektronik (E-commerce)**

Mengapa layanan online menjadi begitu populer? Hal ini disebabkan layanan online memberikan tiga manfaat utama bagi pembeli potensial (Kotler, 1997) yakni: 1) Kemudahan: Pelanggan dapat memesan produk 24 jam sehari dimana mereka berada. 2) Informasi: Pelanggan dapat memperoleh informasi kompratif tentang perusahaan, produk, dan pesaing tanpa meninggalkan kantor atau rumah mereka. 3) Rongrongan yang lebih sedikit: dengan layanan online pelanggan tidak perlu menghadapi atau melayani bujukan dan faktor-faktor emosional.

Layanan online juga memberikan sejumlah manfaat bagi pemasar yakni: a) Penyesuaian yang cepat terhadap kondisi pasar. Perusahaan dapat dengan cepat menambahkan produk pada penawaran mereka serta mengubah harga dan deskripsi, b) biaya yang lebih rendah, pemasar online mencegah biaya pengelolaan toko dan biaya sewa, asuransi, dan prasarana yang menyertainya. c) Pemupukan hubungan, pemasar online dapat berbicara dengan pelanggan dan belajar lebih banyak dari mereka. d) Pengukuran besar pemirsa, pemasar dapat mengetahui berapa banyak orang yang mengunjungi situs online. Informasi ini dapat membantu pemasar meningkatkan penawaran dan iklan mereka. Tingginya frekuensi komunikasi melalui media internet menjadikan internet sebagai salah satu alat pemasaran yang efektif dan efisien (Sumarwan, 2017). Keberhasilan *e-commerce* akan membutuhkan sebuah kemitraan yang efektif antara sektor swasta dan sektor masyarakat, yang dipimpin oleh sektor swasta. Partisipasi pemerintah yang rasional sangat dibutuhkan untuk menghindari kontradiksi dan kekacauan yang sering muncul ketika agen pemerintah secara sendiri menyatakan kewenangannya dan melaksanakannya tanpa koordinasi (Ustadiyanto, 2001).

### **Strategi Bagi Pelaku UMKM Bertahan Saat Pandemi Covid-19**

Transaksi Jual dan Beli melalui secara online dan menggunakan jaringan internet merupakan satu fenomena bisnis baru dan berkembang saat ini. Untuk menanggapi persaingan bisnis aplikasi *e-commerce* yang semakin kompetitif, ditengan merebaknya virus *Covid-19* strategi komunikasi merupakan salah satu yang perlu diperhatikan. Untuk menghindari bisnis *e-commerce* dari kegagalan maka perusahaan sangat penting untuk mengetahui strategi komunikasi yang mereka gunakan.

Beberapa strategi bagi pelaku UMKM bertahan saat pandemi *Covid-19* sebagai berikut: 1) Lakukan inovasi produk berdasarkan kebutuhan 2) Perhatikan dan Perbaiki standar kualitas Produk dan Layanan 3) Manfaatkan Teknologi/Pemasaran Online dengan Optimal. 4) Persiapkan Bisnis untuk Lebih Berkembang 5) Evaluasi Harga dan perhatikan Pesaing 6) Berkomunikasi dengan Pelanggan di Berbagai Media dan targetkan Pelanggan Setia 7) Membuat produk dengan kelebihan yang tentu (unik) tidak dimiliki oleh pesaing atau produk serupa dipasaran.

Ketatnya persaingan diantara UMKM, maka buat pelaku usaha harus berfikir lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produknya. Jika produk tidak *up to date*, maka kemungkinan akan mudah ditinggalkan oleh konsumen. selanjutnya (Al Ikhsan, 2020) menjelaskan beberapa strategi online pemasaran yang dapat diterapkan di masa *Covid-19* ini, antara lain: 1. Manfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran. 2) Rencanakan ulang pendapatan dan Pemangkasan anggaran biaya. 3) Perhatikan kondisi stok barang. 4) *Community Marketing* 5) *Update* dan Menyelaraskan Kebijakan Pemerintah

### **Penutup**

Strategi pemasaran merupakan faktor penting bagi keberhasilan bisnis di masa sekarang. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus berkembang hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Namun, UMKM akan sulit untuk berkembang jika pelaku usahanya tidak mengetahui bagaimana cara memasarkan suatu produk dengan efektif. Strategi Pemasaran yang berhasil umumnya ditentukan dari satu atau beberapa variabel bauran pemasaran (produk, harga, distribusi, promosi). Di Masa pandemi *Covid-19* pelaku UMKM dapat memanfaatkan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran (marketing mix) yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi

Pandemi *Covid-19* memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyak pelaku UMKM yang mengalami dampak negatif *Covid-19* terhadap proses bisnisnya. Adanya wabah *Covid-19* yang melanda dunia, mengakibatkan beberapa sektor industri termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami dampak turunya tingkat penjualan sehingga keuntungan yang diperoleh juga mengalami penurunan. Kondisi ini membutuhkan pemilihan strategi pemasaran, pemilihan strategi ini bertujuan meningkatkan keunggulan bersaing sehingga UMKM dapat tetap bertahan dalam kondisi yang tidak menentu seperti saat ini.

Pentingnya pelaku UMKM memanfaatkan teknologi/pemasaran online dengan optimal serta media sosial sebagai saluran (channel) utama pemasaran. Selain itu memanfaatkan transaksi jual beli melalui pemasaran secara online. Untuk menanggapi persaingan bisnis aplikasi *e-commerce* yang semakin kompetitif, ditengah merebaknya virus *Covid-19* strategi komunikasi merupakan salah satu yang perlu diperhatikan. Untuk menghindari bisnis *e-commerce* dari kegagalan maka perusahaan sangat penting untuk mengetahui strategi komunikasi yang mereka gunakan.

## Daftar Pustaka

- Al Ikhsan, Mochammad, 2020. Dampak Covid-19, Online Marketing Strategy Sebagai Solusi, <https://www.researchgate.net/publication> diakses 23 Sept 2020
- Alma, Buchari, 2017, Pengantar Bisnis, Alfabeta, Bandung
- ....., Buchari, 2011, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Alfabeta, Bandung
- Dharmmesta. Basu Swastha, 2014, Manajemen Pemasaran, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka
- Hartanto, A. B., & Kholil, M. (2018). Analisis SWOT Sebagai Dasar Perumusan Strategi Pemasaran (Studi Kasus: Pada Perusahaan Trading PT. PTG). *Jurnal Rekayasa Teknologi Industri Hijau*, 1(2), 1–5. Retrieved from [tps://ejournal.unugha.ac.id/index.php/ratih/article/](https://ejournal.unugha.ac.id/index.php/ratih/article/)
- Indrajit, Richardus.Eko, 2001, E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Jakarta, Elex Media Komputindo Gramedia
- Gunardi, Agus Rahayu, Lili Adi Wibowo, 2020, Analisa Strategi Pemasaran Online Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Fashion di Kota Bandung, Fair Value, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol 3. No. 1:61-68, DOI: <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i1.134> diakses 24 Sept 2020
- Lestari, S. (2014). Analisis Usability Web (Studi Kasus Website Umkm Binaan Bppku Kadin Kota Bandung). *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*, 1(1), hal.46
- Malau, Harman, 2018, Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi Pemasaran Era Tradisional sampai Era Modernisasi Global, Cetakan kedua, Bandung Alfabeta
- Kotler, Philip, 1997. Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol, Jilid 2, Jakarta, Prenhallindo
- Kotler, Philip & Kevin, Lane, Keller. (2018). Manajemen Pemasaran. Edisi 12. Jilid I. PT. Indeks
- Narto, Gatot Basuki HM. 2020, Penguatan Strategi Pemasaran Puduk Di Tengah Pandemi Covid-19 Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Gresik, *Jurnal Intech*, Vol 6 No 1: 48-54, DOI: <http://dx.doi.org/10.30656/intech.v6i1.2195>, diakses 23 Sept 2020
- Padyanawati, Ayu Diah., Hartrisari Hardjomidjojo, 2019. Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Desa Tegalwaru, Kabupaten Bogor, *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri*, *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri*, Vol. 7, No.1, 153-168, [ojs.unud.ac.id > index.php > jtip > article](https://ojs.unud.ac.id/index.php/jtip/article)
- Pearche, John A., Richard B. Robinson, Jr, 2011. Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian, Jilid 1, Tangerang, Binarupa Aksara
- Prasetijo, Ristiyanti dan John J.O.I Ihalauw, 2005, Perilaku Konsumen, Yogyakarta, Andi
- Sumarwan, Ujang, 2017. Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran, Edisi kedua, Bogor, Ghalia Indonesia
- Suryana, Asep, 2014. Komunikasi Pemasaran, Edisi 3, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka

Supranto J. dan Nandan Limakrisna, 2011, Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran Untuk Memenangkan Persaingan Bisnis, Jakarta, Mitra Wacana Media

Suswanto, priyo., Sri Dewi Setiawati, 2020, Strategi Komunikasi Pemasaran Shopee Dalam Membangun Positioning di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia, Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.3, No.2: 16-29, DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/linimasa.v3i2.275>

Tumpal, Daniel, 2018, Perencanaan Pemasaran, Edisi 1, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka

Ustadiyanto, Riyekke, 2001. Framework E-Commerce, Yogyakarta.

# ***DIGITAL MARKETING: SEBUAH SOLUSI DI TENGAH PANDEMI?***

**Johannes Baptista Halik**

## **Pendahuluan**

Evolusi teknologi beberapa tahun terakhir telah memacu pergerakan pemasaran menuju era digitalisasi. Pemasaran telah mencapai titik dalam evolusinya di mana beradaptasi dengan tren digital merupakan suatu keharusan. Munculnya teknologi digital telah secara signifikan mengubah kehidupan manusia dan menambahkan dimensi baru pada perilaku konsumsi kita. Menanggapi perubahan konstan dalam dinamika sosial-budaya ini, komentar ini mendefinisikan dan berteori tentang budaya konsumen digital dan menjelaskan bagaimana budaya konsumen digital memfasilitasi akulturasi digital. Interaksi manusia dengan komunitas global dan lokal menemukan mode baru dengan munculnya teknologi Web 2.0 dan penggunaan media sosial berikutnya (Hajli, 2014). Dan saat ini, kita telah memasuki era *Marketing 4.0*. Kenyamanan dan keterhubungan yang disediakan oleh media sosial, teknologi seluler, dan bentuk lain dari teknologi dan aplikasi digital mempromosikan asimilasi, integrasi, atau akulturasi di luar komunitas pengguna sendiri (Yen dan Dey, 2019). Dikatakan bahwa konsumen postmodern di zaman neoliberal sering menunjukkan perilaku paradoks (Firat & Venkatesh, 1995) dan penggunaan teknologi digital mereka melanggengkan keterlibatan lebih lanjut dengan kelompok-kelompok yang berbagi pandangan dan keyakinan mereka sendiri, terlepas dari jarak geografis (Phillips, 2008).

Di tengah pandemi *Covid-19* yang tengah terjadi pada saat ini, baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia, semua insan turut merasakan dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini. Hal ini secara langsung juga berdampak bagi perubahan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus, bagaimana kita sebagai seorang konsumen juga turut merasakan perubahan perilaku dalam melakukan transaksi maupun pembelian sebuah produk maupun jasa.

10 Tren Konsumen Global Top 2019 menunjukkan bahwa pelanggan menggunakan saluran yang berbeda untuk membeli. Namun, toko fisik tetap menjadi preferensi pelanggan untuk melakukan pembelian, dibandingkan dengan pembelian melalui komputer, tablet atau smartphone (Angus dan Westbrook, 2019). Namun dapat kita lihat saat ini, dengan adanya perilaku yang lebih kita kenal sebagai *new normal*, perilaku konsumen dalam melakukan transaksi pembelian untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sedapat mungkin dilakukan dari rumah. Kita selaku konsumen pun mencari media dan alat transaksi yang paling praktis dalam melakukan transaksi pembelian untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita.

Dalam literatur manajemen strategis dan inovasi, dikatakan bahwa perusahaan bersaing dan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui model bisnis mereka (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010; Markides & Charitou, 2004). Untuk itu, dalam menghadapi pandemi yang sedang

terjadi pada masa sekarang ini, perusahaan yang ingin bersaing serta mempertahankan keunggulan kompetitifnya juga perlu memikirkan langkah-langkah serta strategi baru yang perlu diadopsi oleh perusahaannya. Model bisnis mewakili “bagaimana perusahaan menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan kemudian mengonversi pembayaran yang diterima menjadi laba” (Teece, 2010: 173). Menurut Dellarocas (2002) Pemasaran Digital telah memungkinkan individu untuk membuat pemikiran pribadi mereka dapat diakses oleh komunitas pengguna Internet lainnya.

### **Perubahan Struktur Model Bisnis: Marketing 1.0 hingga Marketing 4.0**

Perkembangan digital telah mengubah model bisnis. Penggunaan teknologi digital mengubah sistem, struktur, aktivitas, dan proses. Perubahan ini terjadi secara khusus ketika perusahaan mentransformasikan diri secara digital. Sebagai contoh, perusahaan mengadopsi saluran digital baru mengubah cara mereka menuju pasar, yang kemudian akan memengaruhi cara mereka menciptakan nilai bagi pelanggan mereka dan bagaimana mereka memberi nilai bagi diri mereka dan mitra mereka. Transformasi digital dapat merujuk pada produk dan informasi tentang produk, proses yang mengarah ke pengalaman pelanggan, dan platform bisnis yang digunakan untuk pengiriman produk, kesemuanya membutuhkan pengoptimalan agar berhasil (Weill & Woerner, 2013). Di samping teknologi baru dan persaingan digital baru, pengembangan ketiga dan pendorong transformasi digital adalah perubahan perilaku pelanggan.

Sebelum membahas pemasaran digital dengan pendekatan *marketing* 4.0, akan dijelaskan terlebih dahulu perbedaan di antara *marketing* 1.0 hingga 4.0. Buku *Marketing 4.0* oleh Philip Kotler, Hermawan Kartajaya dan Iwan Setiawan menjadi acuan untuk memahami pendekatan pemasaran terbaru ini. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa era pemasaran diawali dengan *marketing* 1.0 yang berorientasi pada produk. Pada era tersebut, fokus penjual adalah untuk menjual produk sebanyak mungkin tanpa memikirkan apa yang dibutuhkan konsumen. Sedangkan *marketing* 2.0 berorientasi pada konsumen. Di sini penjual sudah mulai berupaya untuk menyentuh hati konsumen, namun mereka hanya dianggap sebagai objek pasif. Kemudian berkembanglah *marketing* 3.0 yang berorientasi pada manusia. Pada era pemasaran ini penjual tidak hanya memasarkan produk, tetapi juga punya visi, misi, dan value yang sejalan dengan konsumen. Meskipun begitu, para penjual merasa bahwa model pemasaran tersebut masih perlu dikembangkan lagi. Sebab perkembangan teknologi yang pesat dianggap dapat mendorong pemasaran berjalan lebih efektif. Hal tersebutlah yang menjadi cikal bakal munculnya *marketing* 4.0. Pendekatan *marketing* 4.0, menggabungkan antara sentuhan kepada konsumen secara manusiawi melalui kecanggihan teknologi.

*Marketing* 4.0 adalah pendekatan pemasaran yang mengombinasikan interaksi online dan offline yang terjadi antara penjual dan konsumen. *Marketing* 4.0 merupakan pendekatan terbaru yang tujuan utamanya untuk memenangkan advokasi konsumen. Kombinasi interaksi secara online dan offline dibutuhkan untuk saling melengkapi. Kemajuan teknologi memang memungkinkan

kita melakukan pemasaran secara online sehingga lebih mudah dan dapat menjangkau pelanggan lebih luas. Namun interaksi secara online saja tidaklah cukup. Kenyataannya, interaksi secara offline masih dibutuhkan. Hal ini diperlukan untuk menyentuh konsumen agar mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Itulah mengapa dalam *marketing* 4.0, pasar online tidak berusaha untuk menjatuhkan pasar offline atau tradisional. Namun justru saling mengisi peran satu sama lain.

### **Pandemi *Covid-19* dan Gaya Hidup *New Normal***

Seperti yang telah kita ketahui bersama, dengan adanya pandemi yang tengah kita hadapi bersama saat ini, turut merubah gaya hidup dan pola perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakatnya. Pola hidup yang lebih dikenal dengan sebutan *New Normal* telah merubah pola interaksi dan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Semua orang saat ini harus membiasakan diri dan disiplin menjaga kebersihan dan kesehatan diri, serta tetap menjaga fisik saat berinteraksi dengan orang lain. Hal ini akan secara langsung mempengaruhi tingkah dan perilaku konsumen dalam proses transaksi dan pembelanjannya. Hal ini pula yang harus dilakukan oleh para pihak produsen dan seller dalam menetapkan strategi penjualan maupun penawaran barangnya kepada para buyer atau pihak pembeli.

Selama masa pandemi *Covid-19*, seperti dilansir oleh *Bisnis.com*, penjualan online di Indonesia melonjak 320% pada bulan Maret 2020 dan 480% pada April 2020 keduanya dibandingkan penjualan pada awal tahun, dengan produk makanan dan minuman serta produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan yang paling dicari.

Berdasarkan data internal *SIRCLO.COM*, jumlah pemesanan produk *food & beverage* (F&B) meningkat sebesar 143% di berbagai *platform marketplace* dari Februari hingga Maret. Produk minuman seperti jus buah kemasan, susu, dan minuman instan mengalami peningkatan paling besar. Sementara produk makanan khususnya makanan kemasan (*packaged food*) seperti biskuit, bumbu rempah, dan snack mengalami peningkatan kedua tertinggi.

Data ini pun sejalan dengan temuan sejumlah marketplace seperti *Blibli* dan *Tokopedia*. Menurut Senior Consumer Goods Key Account Manager *Blibli*, produk-produk seperti sayuran segar, buah-buahan, makanan frozen, minyak, dan peralatan rumah tangga lainnya mengalami lonjakan pesat. Begitu pula di *Tokopedia*, produk-produk makanan seperti daging sapi, jahe, dan kurma juga mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan *Tokopedia*, selama bulan Maret lebih dari 100 ton daging sapi terjual. Sementara jumlah jahe yang dijual mencapai 60 ton. Salah satu alasan penjualan jahe meningkat ini bisa disebabkan karena jahe dipercaya dapat meringankan gejala *Covid-19*.

Berdasarkan jenis-jenis makanan yang mengalami peningkatan dalam penjualannya secara online, dapat disimpulkan bahwa makanan yang banyak dicari orang adalah bahan-bahan

makanan untuk memasak serta makanan kemasan. Dari bahan-bahan makanan sendiri, data Nielsen di bulan Maret menunjukkan jumlah penjualan telur dan daging unggas meningkat masing-masing 26% dan 25%. Jumlah penjualan daging sapi meningkat 19% sementara sayuran dan buah-buahan meningkat 8%. Tidak sampai di Maret saja, tren pelonjakan penjualan online produk F&B ini pun terus berlanjut hingga 2 minggu pertama bulan April. Bahkan, jumlah pesannya telah mencapai 1,5 kali lebih banyak dibandingkan penjualan di bulan Februari.

Selain produk kesehatan, kategori produk lainnya yang juga mengalami peningkatan adalah gadget dan alat elektronik. Hal ini terjadi karena sejak pandemi orang lebih banyak beraktivitas di rumah baik bekerja maupun mengisi waktu luang sehingga membutuhkan gadget untuk tetap terhubung dengan orang lain. Berdasarkan data penjualan Blibli, produk-produk seperti laptop, printer, dan peralatan gaming merupakan salah satu produk dengan pertumbuhan tertinggi. Tak hanya itu, peralatan elektronik rumah tangga seperti kompor dan oven juga banyak diburu. Menurut data Nielsen, 49% konsumen jadi lebih sering memasak dibandingkan sebelum pandemi. Bersamaan dengan munculnya kebiasaan memasak, jumlah penjualan online produk F&B pun meningkat. Produsen perlu memperhatikan meski masyarakat dihadapkan pada keterbatasan mobilitas dengan adanya adaptasi New Normal, produk-produknya harus tetap mudah diperoleh agar pelanggan dapat terus menyediakan kebutuhan bagi diri dan keluarganya.

### **Strategi Perusahaan di Masa Pandemi**

Untuk tetap mempertahankan pangsa pasarnya dan melakukan penjualan di tengah pandemi ini, maka perusahaan perlu memperhatikan langkah-langkah apa serta strategi yang perlu dilakukan dalam melakukan penjualan kepada para konsumen. Memperhatikan perilaku konsumen di masa new normal, dimana konsumen cenderung membatasi kegiatan fisik dan interaksi dengan orang lain, maka perusahaan perlu mencari alternatif baru dalam memasarkan produknya dibandingkan hanya mengandalkan toko tradisional maupun outlet yang telah ada saat ini.

Saat ini semakin banyak orang memilih untuk membeli kebutuhannya secara online. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini dimana orang-orang membatasi aktivitas di luar rumah, penjualan online pun meningkat pesat. *Platform* penjualan online seperti *marketplace* merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan di masa pandemi ini. *Marketplace* merupakan salah satu platform yang bisa digunakan oleh pebisnis ritel untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Namun, pebisnis ritel juga perlu mengetahui cara-cara yang tepat untuk berjualan di *marketplace* untuk bisa menghadapi persaingan yang ketat.

Pemasaran didasarkan pada filosofi dan ideologi konsep pemasaran di mana perusahaan berusaha untuk mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran lebih baik daripada pesaing (Kotler, Armstrong, Harris, & He, 2019). Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam pemilihan sebuah produk konsumen senantiasa membandingkan antara merek yang satu dengan yang lain. Namun, konsumen midpandemic tidak didorong oleh evaluasi

yang dipertimbangkan dari berbagai merek atau oleh nilai jangka panjang atau oleh refleksi loyalitas di masa depan tetapi dengan frustrasi dibatasi oleh pilihan yang terbatas, aksesibilitas produk, dan permintaan langsung. Beberapa ahli teori berpandangan jauh sejak lama berpendapat bahwa lanskap pemasaran bergerak dari evolusi ke revolusi (Potts, 2018), krisis *Covid-19* tampaknya telah mempercepat perubahan tersebut secara eksponensial. Dominasi interaksi dan pertukaran tatap muka (secara langsung) perlahan terkikis oleh pertukaran secara online.

### **Konteks Pemasaran di Era Pandemi**

Lingkungan mikro pemasaran organisasi telah dilanda tsunami perubahan yang melebihi fluktuasi dan yang pernah dialami sebelumnya. Cara perusahaan beroperasi juga turut berubah sehubungan dengan kebijakan social distancing dan lockdown yang memerlukan perubahan radikal pada operasi dan pengaturan perusahaan di masa pandemi ini. Di seluruh dunia, restoran beralih dari santapan mewah ke pembuat makanan dibawa pulang; pengirim makanan cepat saji memperluas peran mereka untuk menjadi pembeli dan pengantar supermarket (Whitbread, 2020). Konteks persaingan juga turut berubah. Selama pandemi, konsumen, publik, dan pemerintah butuh dan, dalam beberapa kasus, dipaksa untuk saling berkolaborasi demi kebaikan semua.

Dalam lingkungan makro pemasaran, perubahan mendasar terjadi yang akibatnya akan dirasakan selama beberapa dekade. Langkah-langkah dalam penanggulangan *Covid-19* yang hampir menutup seluruh sektor, memaksa industri untuk bergerak, hampir secara eksklusif, online, dan secara radikal mengubah sifat belanja konsumen. Setelah kebijakan lockdown, pengecer bahan makanan khususnya memiliki penjualan yang belum pernah terjadi sebelumnya sementara hiburan online dan organisasi konektivitas berkembang pesat karena permintaan yang mengalami peningkatan secara besar-besaran. Sektor lain seperti industri perumahan dan otomotif terpukul sangat keras dan rebound serta gelombang permintaan dan pasokan yang berfluktuasi dimana ada kemungkinan akan berlangsung selama bertahun-tahun. Secara teknologi, banyak pihak memuji Internet sebagai media penyelamat kehidupan, adopsi teknologi untuk menggantikan interaksi secara langsung tersebar luas dan dilaksanakan hampir di semua negara di dunia saat ini.

Apa yang akan berubah dalam dunia strategi pemasaran pasca-*Covid-19*?

Pertama, tampaknya tujuan organisasi yang dianut akan berubah. Pernyataan visi seharusnya bersifat jangka panjang dan tidak tunduk pada gangguan lingkungan yang berubah-ubah. Namun, *Covid-19* terasa lebih dari sekadar guncangan kecil. Organisasi yang merefleksikan dunia pasca pandemi perlu mengevaluasi kembali visi, misi, dan tujuan mereka untuk memperhitungkan perubahan pada pelanggan, pesaing, di antara perubahan lainnya. Sasaran yang menggabungkan kelangsungan hidup jangka panjang, kebijakan strategis, tanggung jawab sosial perusahaan yang berpusat pada orientasi pemasaran masyarakat tampaknya mungkin terjadi.

Pemerintah dan lembaga pandemi menengah dengan cepat mengadopsi strategi penggerak pasar untuk mendidik, mengontrol, dan mengelola layanan penting, penawaran-permintaan, dan

perilaku publik. Penelitian pascapandemi pasti akan berfokus pada bagaimana orientasi strategis yang berbeda menguntungkan atau membatasi respons perusahaan (terutama dalam hal ketepatan waktu responsif). Selama periode permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, orientasi produksi dan fleksibilitas strategis diperlukan sementara keunggulan bersaing pasca pandemi kemungkinan besar akan bertambah kepada perusahaan yang mampu paling responsif untuk menjadi pionir di bidangnya. Apa pun orientasi strategis yang paling tepat, pasar pasca-*Covid-19* akan sangat berbeda. Fase utama dari hal ini adalah perpindahan yang meningkat secara eksponensial ke komunikasi dan perubahan online. Industri yang sebelumnya berporos pada interaksi tatap muka menemukan cara dan sarana untuk terlibat (dan bertahan) melalui sarana online dan tampaknya sebagian besar perubahan ini akan terwujud (Butler, 2020a, b).

### **Kesimpulan**

Di era pandemi ini, perusahaan yang ingin bertahan sebaiknya dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk menyusun kebijakan-kebijakan strategisnya, maka perusahaan memerlukan fleksibilitas dan mampu untuk menjadi responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan dari konsumennya pada saat ini.

Sarana-sarana digital yang telah ada saat ini sebisa mungkin harus mampu dimanfaatkan oleh perusahaan dalam mendukung kinerja mereka. Terlebih dari segi marketing serta distribusi produk mereka kepada para konsumen. Kebijakan social distancing dan lockdown yang turut mengubah kebiasaan konsumen yang lama, seharusnya menjadi perhatian khusus bagi perusahaan yang ingin memasarkan serta mendistribusikan produknya kepada para konsumennya.

Untuk media dan sarana digital apa yang sebaiknya digunakan, hal tersebut dapat diteliti lebih jauh oleh perusahaan masing-masing. Mana yang paling sesuai dengan visi, misi, tujuan serta kebijakan dari perusahaan yang menjalankannya, serta dapat menjangkau pasar sasaran dari perusahaan tersebut.

Sebagai penutup bagi perusahaan, pandemi ini dapat dilihat sebagai sebuah kerugian. Namun, dapat juga kita lihat sebagai *opportunity* dalam menciptakan keunggulan bersaing yang baru. Tergantung dari segi mana kita melihatnya.

### **Daftar Pustaka**

- Angus, A., Westbrook, G., 2019. "Top 10 Global Consumer Trends 2019". Euromonitor International available at: <https://blog.euromonitor.com/>. (Accessed 20 Sept 2020).
- Casadesus-Masanell, R., & Ricart, J. E. (2010). From strategy to business models and onto tactics. *Long Range Planning*, 43(2–3), 195–215. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.01.004>.
- Dellarocas, Ch. (2002). The Digitalization of Word-of-Mouth: Promise and Challenges of Online Reputation Mechanisms. *Management Science*, 49(10).

- Firat, A. F., & Venkatesh, A. (1995). Liberatory postmodernism and reenchantment of consumption. *The Journal of Consumer Research*, 22(3), 239–267. <https://doi.org/10.1086/209448>.
- Hajli, M. N. (2014). The role of social support on relationship quality and social commerce. *Technological Forecasting and Social Change*, 87, 17–27. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.05.012>.
- Kotler, P., Armstrong, G., Harris, L. C., & He, H. (2019). *Principles of Marketing (European Edition)*. London: Prentice Hall
- Kotler, P., Kertajaya, H & Setiawan, I (2019). *Marketing 4.0 Bergerak dari Tradisional ke Digital*. Jakarta: PT. Gramedia
- Markides, C., & Charitou, C. D. (2004). Competing with dual business models: A contingency approach. *Academy of Management Executive*, 18(3), 22–36. <https://doi.org/10.5465/AME.2004.14776164>.
- Phillips, F. (2008). Change in socio-technical systems: Researching the multis, the biggers and the more connecteds. *Technological Forecasting and Social Change*, 75(3), 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2008.03.005>
- Potts, John (2018). *Futurism, Futurology, Future Shock, Climate Change: Visions of the Future from 1909 to the Present*. PORTAL Journal of Multidisciplinary International Studies. 15. <https://doi.org/10.5130/portal.v15i1-2.5810>.
- Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. *Long Range Planning*, 43(2–3), 172–194. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003>.
- Weill, P., & Woerner, S. L. (2013). Optimizing your digital business model. *MIT Sloan Management Review*, 54(3), 71–78.
- Whitbread, L. (2020). ‘Which supermarkets let you order your groceries through Deliveroo? The food app is helping to get essentials to people who can’t make it to the shops’, *The Independent*, available at: [www.independent.co.uk/extras/indybest/food-drink/deliveroo-supermarket-delivery-grocery-morrisons-coop-a9457006.html](http://www.independent.co.uk/extras/indybest/food-drink/deliveroo-supermarket-delivery-grocery-morrisons-coop-a9457006.html), accessed 19th Sept 2020.
- Yen, D., & Dey, B. (2019). Acculturation in the Social Media: myth or reality? Analysing social-media-led integration and polarisation. *Technological Forecasting and Social Change*, 145, 426–427 ISSN: 0040-1625.
- <https://www.sirclo.com/ini-alasan-brand-ritel-perlu-official-store-di-marketplace/> (Diakses tgl 20 September 2020)
- <https://www.sirclo.com/permintaan-produk-di-marketplace-alami-lonjakan-selama-pandemi-Covid-19/> (Diakses tgl 20 September 2020)
- <https://sulawesi.bisnis.com/read/20200831/539/1285317/penjualan-online-meningkat-selama-pandemi-produk-kesehatan-paling-dicari> (Diakses tgl 20 September 2020)

# STRATEGI UMKM DAERAH DALAM MENGHADAPI *COVID-19*

**Murtiadi Awaluddin**

## **Pendahuluan**

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak virus corona atau *Covid-19* ini masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020, hampir semua sektor usaha terdampak pandemi. Tidak terkecuali sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah menguasai 97 % dari lapangan kerja yang tercipta di Indonesia. Padahal menyusuri track recordnya saat krisis-krisis sebelumnya, baik krisis 1998 maupun 2008 sektor ini cenderung relative lebih kuat. Akan tetapi saat ini sektor UMKM begitu kelimpungan menghadapi aktivitas bisnisnya yang terhambat bahkan mungkin tidak akan selamat melalui masa sulit ini. Memang kalau dibandingkan dengan krisis sebelumnya tahun 1998 dan 2008 yang ada adalah krisis financial semata, sedangkan saat pandemi ini yang terjadi bukan hanya krisis financial saja akan tetapi yang terjadi adalah krisis kesehatan dan krisis sosial dan terjadi secara bersamaan.

Tercatat jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia sampai saat ini Agustus 2020 sekitar 63 juta, yang sebagian besar adalah usaha mikro (hampir 98%), usaha kecil 1,2% dan menengah 0,09%. UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB sekitar 60,34% dan serapan tenaga kerja sekitar 97% atau lebih dari 115 juta tenaga kerja. Dapat dibayangkan apa yang terjadi dengan perekonomian kita ketika sektor UMKM ini mengalami masalah di masa pandemi ini.

Sampai saat ini pada bulan September 2020, Pandemi *Covid-19* di Indonesia telah berjalan selama enam bulan, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama yang terinfeksi virus corona pada 2 Maret 2020. Dan Salah satu upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menekan penularan virus corona adalah dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan PSBB tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. PP ini mengatur pelaksanaan PSBB serta syarat-syarat penerapan. Pada Pasal 2 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa PSBB berhak membatasi pergerakan orang dan barang yang hendak masuk atau keluar provinsi, kabupaten, atau kota tertentu. Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan berbagai bentuk PSBB, yakni peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum. "Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum," demikian bunyi Pasal 4 Ayat 1 PP Nomor 21 Tahun 2020.

Sebagai dampak pelaksanaan PSBB di berbagai Daerah menyebabkan 39,9 persen usaha kecil menengah (UKM) memutuskan untuk mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat *Covid-19*. Sementara itu, 16,1 persen UKM memilih mengurangi

karyawan akibat toko fisik ditutup. Hasil ini diperkuat Survey Poxel Buy & Send Insight II (2020) menunjukkan bahwa 37,3 persen pembeli tetap berbelanja dengan jumlah yang normal atau lebih sedikit. Namun frekuensi belanja menjadi lebih sering. Di sisi lain 28,3 persen dari customer membeli produk dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Akan tetapi mengurangi frekuensi berbelanja menjadi lebih jarang dari sebelum masa PSBB. Untuk akhir bulan Maret 2020 ada 1332 pelaku usaha UMKM yang menyampaikan permasalahannya pada Kementerian Koperasi dan UMKM. Adapun permasalahannya meliputi 68% penurunan penjualan, 12% pemodal, 10% distribusi yang terhambat, 6% kesulitan bahan baku dan 4% produksinya melambat. Untuk ICSB Internal Council for Small Business (ICSB) Indonesia juga telah memetakan permasalahan UMKM: pada aspek Pemasaran terdapat Penurunan permintaan sebanyak 78.2% UMKM, Kesulitan berjualan Daring ada 17% UMKM, pada aspek Operasional: terjadi kenaikan harga bahan baku sebanyak 51.8% UMKM, Kesulitan mendapatkan bahan baku ada 32.9% UMKM. Aspek SDM terdapat Penurunan Motivasi Kerja sebanyak 53.3% UMKM, Penurunan Produktivitas sebanyak 29.7% UMKM. Pada Aspek Keuangan terdapat Kekurangan uang kas sebanyak 58.2% UMKM dan Hutang atau kredit yang jatuh tempo sebanyak 38.8% UMKM.

Tentunya untuk merumuskan strategi yang tepat UMKM dalam menghadapi dampak pandemi *Covid-19* perlu dilakukan screening mendalam, dikarenakan UMKM secara karakteristik adalah heterogen. Jika ditinjau dari aspek *scope* bisnisnya dapat dibagi menjadi pebisnis lokal, nasional, internasional, regional dan global. Dari skala bisnis dibagi menjadi mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan jika ditinjau dari aspek industri usahanya dibagi menjadi *extractive /upstream*, *manufacturing (midstream)* dan *service (downstream)*. Dan untuk UMKM sendiri lebih mayoritas berkumpul di *business downstream*.

Pembagian lain yang juga bisa memudahkan dalam perumusan strategi UMKM adalah dengan membagi UMK ke kapabilitas produksi terhadap market oriented. Kondisi dimana kapabilitas produksi rendah dengan *low market oriented* akan masuk dalam kategori perintis (beginner) untuk kategori ini ketika diplot ke focus strategi maka belum menemukan focus yang sebenarnya dikarenakan *track record* perusahaan masih belum lama dan umumnya perusahaan ini masih coba coba serta skala ekonomi yang masih kecil.

Perusahaan dengan kondisi *market oriented* tinggi sedangkan kapabilitas produksi rendah memberikan kondisi perusahaan berada pada kategori pedagang (*trader*). Perusahaan pada kuadran ini memiliki ciri-ciri unggul dalam manajemen pelanggan, fokus pada kebutuhan (*market based view*) dan mengandalkan lingkup ekonomis (*economic of scope*). Pada kondisi ini *focus strategi* yang bisa dilakukan adalah manajemen pelanggan.

Perusahaan dengan *market oriented* rendah dengan kapabilitas produksi tinggi memberikan kategori perusahaan dengan kondisi produsen. Perusahaan pada kelompok ini memiliki ciri:

unggul dalam manajemen produk, focus pada sumber daya yang dimiliki dan mengandalkan skala ekonomis. Perusahaan pada kuadran ini sebaiknya fokus strategi yang dilakukan adalah Manajemen produk.

Gambar 1 Market oriented



Sumber: International Council for Small Business (2020)

Perusahaan pada kondisi *market oriented* tinggi dengan kapabilitas produksi tinggi memberikan kategori perusahaan dengan kondisi produsen. Perusahaan pada kelompok ini memiliki ciri: unggul dalam manajemen produk, focus pada sumber daya yang dimiliki dan mengandalkan skala ekonomis. Perusahaan pada kuadran ini sebaiknya *focus strategy* yang dilakukan adalah Manajemen produk

Gambar 2 Focus Strategy

Opsi Strategi	FOKUS STRATEGI		
	Manajemen Pelanggan	Manajemen Produk	Manajemen Merek
Perintis	-	-	-
Produsen	-	✓	-
Pedagang	✓	-	-
Pebisnis	✓	✓	✓

Sumber: International Council for Small Business (2020)

Dengan diketahuinya kondisi perusahaan akan dengan mudah pelaksanaan strateginya seperti apa sehingga strategi yang disusun akan lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahannya. Bentuk upaya yang bisa dilakukan untuk bisa bertahan di masa pandemi ini adalah:

- 1) *Cash Management*: Jaga likuiditas, efisiensi, prediksi kebutuhan.  
Para pebisnis UKM, sedapat mungkin mengkalkulasikan dan mengevaluasi kembali biaya produksi produknya. Biaya produksi sendiri merupakan akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya yang dimaksud seperti pembelian bahan baku, biaya membayar karyawan produksi, biaya operasional barang dan biaya-biaya lainnya. Setelah mengetahui alokasi biaya produksi saat ini, kemudian mencoba untuk melakukan penghematan biaya produksi dengan tetap memastikan kualitas produk UKM. Anda dapat memulainya dengan hanya membeli kebutuhan bahan baku sesuai kebutuhan, menekan biaya overhead yang berhubungan dengan proses produksi. Selain itu dapat juga melakukan penundaan dalam membeli peralatan yang baru.
- 2) *Adapt to the new normal*: protokol kesehatan, temukan peluang baru, optimalkan digitalisasi (marketing, payment, fulfillment).  
Memang kemampuan UMKM untuk peka terhadap perubahan sangat dibutuhkan untuk bisa bertahan di masa pandemi ini. Dengan diberlakukannya protokol kesehatan bukan berarti usaha yang dilakukan tidak bisa berjalan. Hanya saja memang perlu kerja keras untuk mengadopsi berbagai protokol ke usaha yang sedang digeluti. Selain itu kemampuan para pelaku UMKM untuk menemukan peluang baru juga perlu sebagai diversifikasi produk lama yang ada sehingga ketika produk lama terjadi perlambatan penjualan ada produk baru yang bisa menopang. Terakhir adalah mengoptimalkan digitalisasi dimana memaksimalkan marketing, pembayaran berbasis online.
- 3) *Survive through ecosystem* (Bangun mental, perbanyak konsultasi dengan mentor, bangun jejaring, berikan yang terbaik masyarakat ekonomi), *Increase the skill, Wait and see (survive)*.

## **Penutup**

Demikianlah tulisan ini dibuat untuk memberikan pencerahan kepada para pelaku UMKM dalam merumuskan strategi di masa pandemi ini, sehingga ada alternatif strategi yang dapat dilakukan sehingga bisa tetap bertahan di masa sulit ini.

## **Daftar Pustaka**

- Bank Dunia: "UMKM Paling Terkena Dampak", Kompas, 2 September 2020, hal. 14
- Daftar Intensif UMKM di Masa dan Usulan Pasca Pandemi, 22 Juni 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/daftarintensif-untuk-umkm-di-masadan-usulan-pasca-pandemi/>, diakses 3 September 2020
- Indonesia, B. (2015). Profil bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

- International Council for Small Business (2020) *Menyerah Bukan Pilihan: Untuk Mendukung UMKM Unggul Indonesia Maju*, Unitomo press Surabaya Jawa Timur
- Kebijakan Perlindungan dan Pemulihan UMKM di tengah Pandemi Covid-19”, 31 Agustus 2020, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-perlindungan-danpemulihan-umkm-di-tengahpandemi-Covid-19>, diakses 2 September 2020
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020, July). Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 7, No. 2, pp. 98-103).
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76-86.

# Bagian 4

KEPENDUDUKAN, KETENAGAKERJAAN,  
KETAHANAN PANGAN, DAN SOSIAL EKONOMI

# **COVID-19 DAN BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA**

**Muh. Akil Rahman**

## **Pendahuluan**

Perekonomian secara sederhana mencakup dua jenis pembuat keputusan yakni rumah tangga dan perusahaan. Interaksi keduanya dipertemukan melalui pasar barang dan jasa yang menggunakan faktor-faktor produksi antara lain tenaga kerja, tanah, dan modal (gedung dan mesin). Aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan begitu pula sebaliknya dapat divisualisasikan dalam bentuk dalam diagram aliran sirkuler (*circular-flow diagram*).

Hubungan antara produsen dan konsumen dalam menggunakan ketiga faktor produksi tersebut senantiasa dalam garis yang dinamis. Terjadi tarik menarik diantara keduanya yang terkadang tarikannya bergerak pada salah satu sudut ekstrim. Tarikannya terkadang menguntungkan sudut konsumen dan terkadang menguntungkan sudut produsen, sehingga secara teori dalam ilmu ekonomi tarik menarik ini selalu didorong dengan berbagai instrumennya untuk tetap berada pada titik keseimbangan.

## **Tenaga kerja**

Salah satu faktor produksi yang sangat dinamis adalah tenaga kerja. Tenaga kerja dipandang sebagai sebuah entitas dalam menggerakkan perekonomian yang sangat strategis (tentunya tanpa mengabaikan kedua faktor produksi lainnya). Pada beberapa negara maju pada abad 19 s.d. 20, dengan jumlah penduduk yang besar itu dianggap sebagai keberkahan, karena dengan jumlah penduduk yang besar maka ketersediaan tenaga kerja untuk diserap masuk ke dalam industri semakin mudah. Tenaga kerja melimpah, tentu biaya produksi dapat ditekan dan hasil produksi dapat dioptimalkan.

Hal ini bisa dilihat pada negara-negara maju dalam kurun waktu tersebut misalnya Amerika Serikat dan negara-negara di Benua Eropa. Apalagi jika ditilik ke belakang, negara-negara maju tersebut selain memiliki jumlah penduduk yang besar juga memiliki akses terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan cenderung terjadi hegemoni ilmu pengetahuan. Ini juga berefek pada penguasaan faktor-faktor produksi baik antar negara dalam satu benua maupun lintas benua.

Bahkan *trend* yang terjadi pada organisasi bisnis terutama yang berkategori *multinational corporate (MNC)* adalah persoalan relokasi pabrik antara negara ternyata bukanlah sesuatu yang menjadi persoalan, selama itu bisa mendekati pada ketersediaan bahan baku, tenaga kerja yang melimpah, dan tentunya potensi pasar yang besar.

## **Bonus Demografi di Indonesia**

Bonus demografi menjadi perbincangan hangat di Indonesia sejak tahun 2017. Hal ini terungkap dalam siaran pers Kementerian PPN/Bappenas tanggal 22 Mei 2017. Dalam dokumen tersebut yang merupakan hasil dari lokakarya yang diadakan dalam kerangka kerja inisiatif *Reverse Linkage*, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) dan the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) melaksanakan *Peer Learning and Knowledge-Sharing Workshop on Skills Development Strategy Formulation* di Hotel Pullman, Jakarta, pada 22-24 Mei 2017. Seperti yang dikemukakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, yang menyatakan bahwa lokakarya ini bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman baik dari OECD, IsDB, maupun antar negara peserta dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi pengembangan keterampilan, khususnya terkait sumber daya manusia sebagai aset atau *human capital*, hingga kebijakan keterampilan dan ketenagakerjaan.

Pada lokakarya tersebut mengemuka bahwa Indonesia menghadapi dua tantangan utama terkait ketenagakerjaan. Pertama, sekitar 63 persen tenaga kerja di Indonesia adalah lulusan sekolah menengah pertama atau lebih rendah. Kondisi tersebut berdampak terhadap produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang relatif rendah. Kedua, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas.

Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan itu, pemerintah Indonesia telah memasukkan ke dalam dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan fokus pada isu tenaga kerja dan pendidikan. Terkait tenaga kerja, salah satu arah kebijakan adalah memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui lima strategi utama. Pertama, harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar. Kedua, pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Ketiga, peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja. Keempat, perluasan skala ekonomi ke arah sektor/sub-sektor dengan produktivitas tinggi.

Untungnya bahwa di Indonesia diprediksi tahun 2030 s.d. 2040, Indonesia akan memasuki masa bonus demografi, yakni sebuah era yang ditandai dengan ledakan penduduk usia kerja. Ketika kualitas pekerja bagus, produktif dan berdaya saing maka bonus demografi membantu memicu pertumbuhan. Bonus demografi sendiri menurut Sri Moertiningsih Adiotomo, seorang ekonom, mendefinisikannya sebagai perubahan struktur umur penduduk karena penurunan kelahiran terus menerus.

Diprediksi tahun 2030 s.d. 2040, Indonesia mendapat limpahan tenaga usia produktif yang berusia 15 s.d. 64 tahun sebagai komposisi yang lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif yakni di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Pada periode ini, jumlah penduduk produktif diperkirakan berjumlah 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Bahkan bonus demografi pada beberapa daerah di Indonesia mengalami momentum yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta yang telah mulai memasuki periode bonus demografi pada periode 2000 hingga 2010 dan diprediksi akan berakhir pada sekitar 2030-an.

### **Covid-19 dan ekonomi**

Pada penghujung tahun 2019 tidak ada yang menyangka bahwa manusia di muka bumi ini akan berhadapan dengan sebuah virus yang mematikan dan nyaris melumpuhkan aktivitas manusia. Virus Corona atau yang dikenal dengan *Covid-19* telah menjadi pandemi yang dimulai dari Wuhan, China sejak bulan 12 tahun 2019. Sampai per tanggal 03 Oktober 2020, pandemi *Covid-19* telah menyerang negara-negara di dunia dan menyebabkan ada 1.023.817 jiwa yang meninggal dunia dengan total kasus di seluruh dunia sebesar 34.345.342 kasus. Bahkan ada beberapa negara yang nyaris *collapse* karena sudah kehabisan akal, daya dan upaya menghadapi pandemi *Covid-19*.

Tabel 1  
Sebaran *Covid-19* di berbagai Negara

Lokasi	Total kasus ↓	Kasus baru (1 hari*)	Kasus baru (60 hari terakhir)	Kasus per 1 jt orang	Meninggal
 Seluruh dunia	34.345.342	<i>Tidak ada data</i>		4.417	1.023.817
 Amerika Serikat	7.309.089	46.459		22.179	207.699
 India	6.394.068	81.484		4.700	99.773
 Brasil	4.847.092	36.157		22.935	144.680
 Rusia	1.194.643	9.412		8.141	21.077
 Kolombia	835.339	5.660		16.911	26.196
 Peru	818.297	3.468		25.467	32.535
 Spanyol	778.607	9.419		16.531	31.973
 Argentina	750.988	14.392		16.711	16.937
 Meksiko	748.315	5.099		5.912	78.078

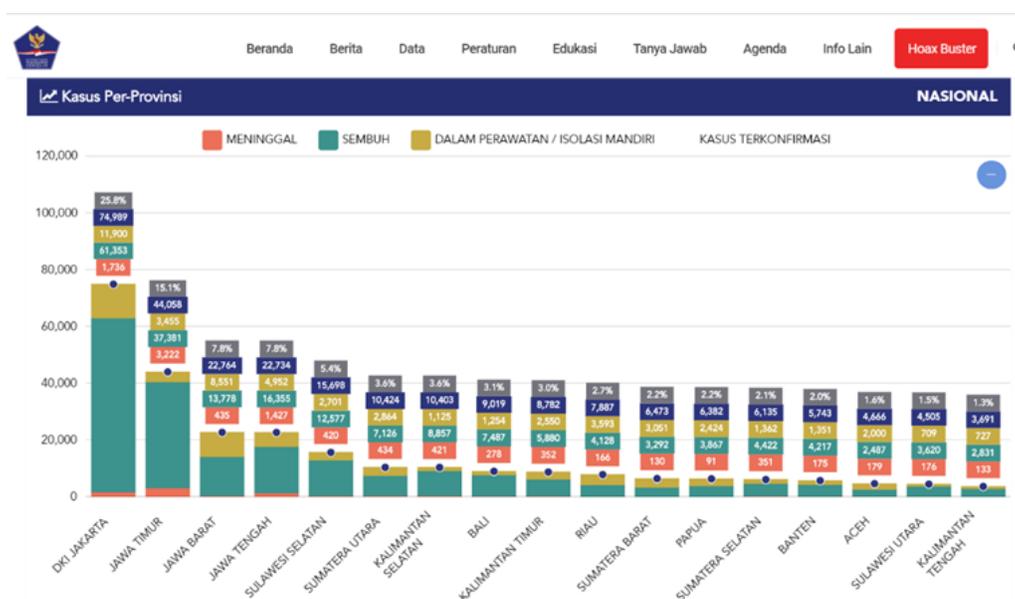
\*Jumlah kasus baru yang dilaporkan untuk hari terakhir yang memiliki data lengkap, dalam 3 hari terakhir

Sumber: [Wikipedia](#), [The New York Times](#), [Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa](#)

Sumber: <https://news.google.com/covid19/map?hl=id&gl=ID&ceid=ID%3Aid>, diakses 03-10-2020, 00.06 AM

Pandemi *Covid-19* juga menyerang Indonesia yang memaksa beberapa daerah/kota di Indonesia mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya menahan laju penyebaran pandemi *Covid-19*. Kebijakan ini tentunya berdampak pada beberapa resiko pada beberapa sektor kehidupan. Sektor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan demografi terkena imbas dari pandemi *Covid-19*. Pada sektor ekonomi khususnya, pandemi *Covid-19* hampir melumpuhkan aktivitas perekonomian. Hal ini dilihat pada grafik tingkat pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2020 yang mengalami kontraksi -5,32 persen.

Grafik 1  
Sebaran *Covid-19* di Indonesia



Selain itu juga dapat dilihat banyaknya perusahaan yang tutup, berhenti beroperasi dalam jangka waktu pendek atau seterusnya Dampak dari penutupan perusahaan tersebut adalah banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan-perusahaan. Jumlah tenaga kerja yang kena PHK berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencapai 3,06 juta orang per 27 Mei 2020 (CNN Indonesia, 20 Juli 2020).

Grafik 2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II (2020)



Sumber: <https://www.bps.go.id/website/images/Pertumbuhan-Ekonomi-TW-II-2020-ind.jpg>. Diakses pada tanggal 03-10-2020, pukul 00.40 AM

### Bonus demografi di tengah Covid-19

Dengan jumlah angkatan kerja sebesar 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia tentunya ini menjadi berkah tersendiri bagi Indonesia jika sekiranya modal sosial ini dapat dioptimalkan. Namun, betulkah itu bahwa bonus demografi ini menjadi keberkahan bagi Indonesia atau malah menjadi kerugian bagi bangsa? Apalagi jika dipersentuh dengan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih menghantui kita semua.

Melihat paparan sebelumnya akibat dampak dari pandemi Covid-19 pada semua sektor khususnya sektor ekonomi, maka ini dapat menjadi kendala bagi bangsa Indonesia untuk menyambut bonus demografi ini dengan menyiapkan secara maksimal tenaga usia produktif tersebut. Pemerintah pusat dan daerah mencurahkan perhatian, *resources*, bahkan anggaran dialokasikan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dari sisi anggaran saja pemerintah pada bulan Juni 2020 sudah menganggarkan 695,2 T untuk pandemi Covid-19.

Tentunya dengan anggaran sebesar itu yang diambil dari beberapa sumber penerimaan dan yang sebelumnya sudah terlanjur dialokasikan pada beberapa sektor pembangunan akan menghambat program penyiapan usia produktif ini. Apalagi masa akhir pandemic Covid-19 sampai sekarang belum bisa dipastikan. Hal ini tentunya akan memecah perhatian pemerintah membenahi penyiapan usia produktif. Ini juga akan berdampak pada melambatnya pemenuhan target capaian

tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) pada *Goal No. 8* yaitu “*to promote sustain and inclusive economic growth, full and productive employment and decent work for all*”.

Oleh karena itu, maka dengan adanya bonus demografi menjadi jembatan bagi Indonesia untuk bisa lebih memaksimalkan pengelolaan sumber daya manusia dan alamnya menuju masyarakat yang lebih makmur. Banyak keuntungan yang dapat diraih khususnya keuntungan ekonomi. Namun keuntungan ini harus diupayakan dengan cara adanya intervensi dari pemerintah yang menggerakkan potensi usia produktif ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya lewat investasi sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas kerja.

Kemudian dari beberapa kendala di atas diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah yang sifatnya strategis dan taktis untuk bisa keluar dari kemelut pandemi *Covid-19*. Ini juga untuk menjawab apakah bonus demografi ini adalah keberkahan atau kutukan. Tapi kita berharap bahwa meskipun pandemi *Covid-19* masih belum teratasi, bonus demografi tetap perlu dipersiapkan secara matang. Apalagi sudah ada pengalaman beberapa negara yang gagal memanfaatkan momentum bonus demografinya dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di negaranya.

Cara-cara yang dapat ditempuh antara lain dengan menjaga tingkat kesehatan bagi seluruh warga agar senantiasa prima. Pemerintah didesak agar semakin gencar mendorong munculnya minat wirausaha kalangan usia produktif dan lanjut usia dengan dukungan dana stimulus serta regulasi yang memudahkan. Di tengah terbatasnya masyarakat untuk beraktifitas di luar rumah apalagi alasan kerumunan orang yang banyak, maka penggunaan teknologi informasi menjadi alternatif dalam menggerakkan usia produktif agar tetap bisa optimal. Masyarakat perlu diedukasi untuk menjadikan sarana teknologi informasi dapat menjadi daya ungkit meningkatkan perekonomian terutama pada usia produktif. Sementara itu pada saat yang bersamaan, dana penanganan pandemi *Covid-19* yang ditujukan untuk jaring pengaman sosial dipastikan dapat menjangkau seluruh warga yang terdampak, tersalurkan secara baik, transparan dan akuntabel.

### **Daftar Pustaka**

- Afandi, Tohir. 2017. Siaran Pers, Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan. Kementerian BPN/Bappenas. Jakarta  
<https://www.bps.go.id/website/images/Pertumbuhan-Ekonomi-TW-II-2020-ind.jpg>. Diakses pada tanggal 03-10-2020, pukul 00.40 AM  
<https://news.google.com/covid19/map?hl=id&gl=ID&ceid=ID%3Aid>, diakses 03-10-2020, 00.06 AM
- Mankiw, N. Gregory. 2019. Pengantar Ekonomi Mikro. Salemba Empat. Jakarta
- Satiti, Sonyaruri. 2020. Memetik dan Memperpanjang Bonus Demografi PAsca Covid-19 . PSKB-UGM. Yogyakarta

# ***CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): SANG PENYELAMAT PHK DI MASA COVID-19***

**Mukhtar Galib**

## **Pendahuluan**

Penyebaran *Covid-19* yang merebak sejak awal bulan Maret 2020 lalu di tanah air berdampak memukul berbagai sudut ekonomi. Indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan pelaku di sektor riil susah berusaha. Lembaga keuangan dunia, ekonom, dan otoritas pemerintah membuat sejumlah prediksi. Ekonomi Indonesia bisa masuk dalam skenario terburuk jika tidak mengatasi dengan benar pandemi ini. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan di tanah air mengalami kemunduran produksi, bahkan ada yang tidak dapat melanjutkan operasi sama sekali. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan bahkan terjadi pemutusan hubungan kerja.

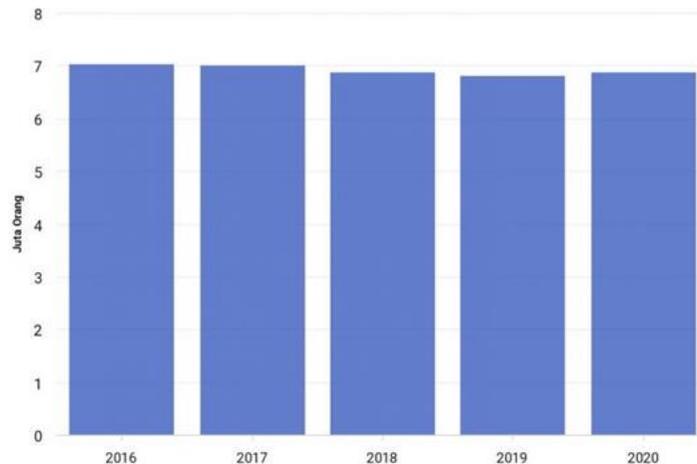
Riset ekonom Australian National University, Warwick McKibbin dan Roshen Fernando bertajuk "*The Global Macroeconomic Impacts of Covid-19*" meramalkan kegawatan luar biasa. Keduanya menyebutkan dampak virus corona jauh lebih buruk ketimbang Flu Spanyol yang pada 1918 s.d. 1919 menjadi pandemi paling mematikan sepanjang sejarah dengan menelan 40 juta korban jiwa. Dampak ekonomi *Covid-19* diperkirakan bisa mencapai US\$2,4 triliun atau sekitar Rp39.304 triliun. Jauh lebih besar ketimbang penyakit pernapasan akut SARS yang pada 2003 memangkas ekonomi dunia sebesar US\$40 miliar atau Rp656,72 triliun.

Dampak terjadinya wabah penyakit terhadap pasokan tenaga kerja tak sebatas kematian. Sebab, selain penderita menjadi tak produktif, kinerja anggota keluarga yang merawat mereka akan terdampak. Apalagi, sekitar 70 % pekerja perempuan juga bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga, termasuk kesehatan anggota keluarganya, demikian McKibbin dan Fernando menyebutkan. Sementara itu, Lembaga Pemeringkat Global S&P memproyeksikan pandemi virus corona yang menyebar cepat di seluruh dunia menimbulkan kerugian ekonomi mencapai US\$211 miliar atau sekitar Rp3.463 triliun. Ekonomi Jepang, Hong Kong, Singapura, dan Australia disebut paling terdampak akibat pandemi.

Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada kuartal ke-3 tahun ini dalam tiga skenario. Seperti yang diungkapkan oleh Center of Reform on Economics (Core). *Pertama*, potensi tambahan jumlah pengangguran terbuka secara nasional mencapai 4,25 juta orang dengan skenario ringan. *Kedua*, tambahan sebanyak 6,68 juta orang dengan skenario sedang. *Ketiga*, tambahan hingga 9,35 juta orang dengan skenario berat. Pemerintah menghitung, sepanjang tahun 2019 jumlah pengangguran akan bertambah 2,9 juta orang dalam skenario berat. Dan akan bertambah hingga 5,2 juta orang dalam skenario sangat berat. Selain itu, banyaknya lulusan baru perguruan tinggi yang tidak tertampung dalam pasar

tenaga kerja dan sulitnya membangun usaha ikut pula menyumbang bertambahnya pengangguran yang makin membesar.

Gambar 1  
Jumlah Pengangguran (Februari 2016-2020)



Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS) Mei 2020

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, maka berbagai cara harus dilakukan. Semua pihak harus bersinergi dalam menanggulangi permasalahan ini. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan kebijakan yang cepat dan *prudent* untuk mengurangi dampak ekonomi yang timbul. Perusahaan harus melakukan efisiensi dengan memaksimalkan segala sumber daya perusahaan dengan kebijakan kebijakan yang tetap harus memperhatikan kelangsungan hidup para tenaga kerja dan karyawan. Sedapat mungkin mengurangi pemutusan hubungan kerja. Masyarakat harus disiplin dalam melakukan pembatasan sosial, agar virus ini dapat di atasi dengan cepat dan mengurangi semakin bertambah nya penularan yang terjadi.

Di suatu sisi dalam kondisi keprihatinan seperti itu banyak kalangan yang berlebih terketuk hatinya untuk saling berbagi dengan berbagi kegiatan amal baik secara terang terangan maupun tersembunyi. Banyak dermawan yang berlomba-lomba untuk menyumbangkan bantuan lewat kegiatan filantropis.

Di sisi lain perusahaan juga ikut serta berpartisipasi dengan melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* baik di lakukan secara internal maupun eksternal perusahaan. Pada masa pandemi, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pasti akan berdampak luas kepada seluruh masyarakat khususnya buruh harian dan pekerja informal. Mereka kehilangan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perusahaan dapat melaksanakan program CSR sebagai bentuk komitmen untuk turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang kelanjutan dan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Masa krisis seperti ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalisasi program CSR perusahaan dengan

memberikan dukungan dan bantuan. Bantuan yang diberikan dapat berupa bahan pokok untuk masyarakat ataupun peralatan pencegahan penyebaran *Covid-19* seperti alat pelindung diri, *hand sanitizer*, disinfektan, dan alat uji tes.

### **Corporate Social Responsibility**

*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu kegiatan perusahaan yang punya mekanisme tersendiri dalam mengintegrasikan secara sadar dalam sebuah perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan *stakeholder*, yang melampaui tanggung jawab sosial di bidang hukum.

Secara simpel *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu konsep dan tindakan yang dilaksanakan oleh suatu bisnis atau usaha sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan itu berdiri. Seperti melaksanakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, membangun fasilitas umum, memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu, dan memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat banyak pada umumnya dan masyarakat sekitar perusahaan pada khususnya, demikian Dewi, W.A.F. (2020).

Pada intinya CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Para ahli menyatakan bahwa CSR memiliki 3 definisi yaitu:

1. Melaksanakan aksi sosial, yang didalamnya adalah kepedulian kepada lingkungan hidup yang lebih dari batas-batas yang dituntut atau diharuskan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Komitmen usaha yang dilakukan secara etis, beroperasi secara legal, serta berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidup karyawan termasuk keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat banyak.
3. Komitmen bisnis untuk turut serta ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga pekerja, komunitas wilayah tertentu, serta masyarakat umum secara keseluruhan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Mapisangka, A. (2009)

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa CSR juga dapat diarahkan kepada keluarga pekerja dalam mendukung kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. Hal ini berarti CSR dapat di pergunakan baik dari sisi eksternal maupun dari sisi internal perusahaan yang pada akhirnya akan bermuara kepada kelangsungan perusahaan untuk tetap memproduksi dan menghasilkan laba agar tetap memberi manfaat bagi lingkungan eksternal dan internal perusahaan.

### **Kebijakan Perusahaan terkait Tenaga Kerja Dalam Masa *Covid-19***

Dalam menyikapi kondisi pandemi *Covid-19* dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sejumlah perusahaan pun melakukan penyesuaian dari sisi operasional untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya agar tetap bisa berjalan dengan baik. Beberapa langkah langkah di lakukan dalam menyikapi kondisi tersebut, terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Kebijakan tersebut sedapat mungkin menghindari adanya pemutusan hubungan kerja. Banyak celah kebijakan yang dapat disikapi agar perusahaan tetap berjalan di satu sisi, namun tidak mengorbankan karyawan di sisi lain.

Dengan menurunnya volume kegiatan perusahaan serta kegiatan bekerja dari rumah, maka ada beberapa keberapa kebijakan manajemen dalam masa *Covid-19* antara lain:

1. Menghilangkan atau mengurangi untuk sementara beberapa tunjangan.
2. Pembayaran setengah gaji dengan pembagian kerja *shift* akibat pengurangan jam kerja.
3. Merumahkan karyawan
4. Pemutusan Hubungan Kerja

Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa beberapa kebijakan yang dilaksanakan perusahaan terhadap tenaga kerja selama PSBB berlangsung. Berbagai upaya dilakukan untuk tetap mempertahankan tenaga kerja. Pengurangan jam kerja menjadi kebijakan yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan yang masih beroperasi seperti biasa. Kebijakan yang terbanyak dilakukan selanjutnya adalah tenaga kerja dirumahkan atau tidak dibayar, dan memberhentikan pekerja dalam waktu singkat. "Sebanyak 14 dari setiap 100 perusahaan yang beroperasi dengan menerapkan bekerja dari rumah (work from home/WFH mengambil kebijakan tenaga kerja dirumahkan atau tidak dibayar," ungkap BPS dalam laporan Analisis Hasil Survei Dampak *Covid-19* terhadap Pelaku Usaha yang dikutip Bisnis, Selasa (22/9/2020). Pihak BPS menyebut optimisme bahwa pandemi akan segera berakhir cenderung membuat perusahaan tidak mengambil keputusan PHK permanen.

Alhasil, memberhentikan pekerja dalam waktu singkat adalah pilihan yang relatif lebih baik. Keputusan untuk melakukan PHK cenderung adalah langkah terakhir yang diambil terhadap tenaga kerja. BPS mencatat, sebanyak 76 dari 100 perusahaan yang masih beroperasi seperti biasa, jumlah tenaga kerjanya cenderung tetap. Sementara tercatat 21 perusahaan yang tenaga kerjanya berkurang.

### **Penggunaan CSR terhadap Tenaga Kerja Internal dalam Masa *Covid-19***

Pepatah "*selamatkan dirimu baru kamu selamatkan orang lain*" sangat tepat dilakukan dalam masa pandemi saat ini. Segala daya upaya dan sumber daya yang masih bisa dilakukan untuk penyelamatan internal perusahaan harus dilakukan. Dana CSR yang tersedia diharapkan bisa memberikan manfaat sosial maupun bagi internal perusahaan sehingga programnya bisa melibatkan karyawan dan konsumen yang pada akhirnya mampu menciptakan keberlangsungan usaha di era new normal. Setyaningrum, D. A. (2011)

Untuk mendapatkan manfaat optimal dari program CSR di tengah kondisi *new normal*, perusahaan harus merumuskan inisiatif CSR strategis dengan memerhatikan dampak *Covid-19* terhadap masyarakat dan aktivitas bisnis. Pertimbangan tersebut akan menciptakan dana CSR

yang juga dapat membantu perusahaan dalam mengurangi dampak pandemi *Covid-19*. Penyesuaian inisiatif CSR mesti dibarengi dengan penyesuaian sistem kerja perusahaan dalam seluruh *value chain* perusahaan. Kebijakan dan strategi CSR terkait erat dengan bisnis berkelanjutan, lantaran memiliki kerangka investasi jangka panjang dalam bentuk kepercayaan publik dan citra positif perusahaan.

Selain itu dalam program CSR, perusahaan diupayakan bersinergi dengan pemerintah sehingga dengan demikian diyakini mampu mengurangi problem ekonomi nasional akibat *Covid-19*. Kolaborasi program CSR antar perusahaan dan pemerintah akan mampu merealisasikan sejumlah program percepatan pembangunan ekonomi. Mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Mas Achmad Daniri berharap agar para pelaku usaha bisa mengoptimalkan manfaat dana dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk membantu keberlanjutan bisnis di internal perusahaan di tengah pengetatan keuangan saat era *new normal*. Daniri menilai jika pandemi *Covid-19* telah mengubah cara berbisnis bagi perusahaan, sehingga manajemen perusahaan dituntut untuk mengoptimalkan ketersediaan sumber daya untuk menjaga kelangsungan bisnis di tengah kondisi pandemi *Covid-19*. "Pada masa pandemi ini, CSR harus dimulai dari 'rumah' atau internal perusahaan. *Covid-19* telah mengubah cara berbisnis perusahaan," kata Daniri dalam acara TOP CSR Awards 2020: Peran Strategis CSR dalam Pemulihan.

### **Kesimpulan.**

Keterlibatan semua pihak harus bersinergi dalam mengatasi masalah pandemi *Covid-19*. Kerjasama pemerintah dan swasta harus terus ditingkatkan. Kebijakan dari pemerintah harus saling melengkapi baik di pusat maupun di daerah. Koordinasi antar lini masih harus didorong dengan maksimal. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama akan keberhasilan dalam mengatasi Pandemi *Covid-19*. Kedisiplinan yang ketat di harapkan akan membawa pengaruh yang signifikan untuk mengurangi potensi penularan yang lebih besar dan masif.

Dari sisi perusahaan pun tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap melaksanakan tanggung jawab sosial mereka ditengah situasi pandemi *Covid-19* seperti ini. Karena tentu akan banyak hambatan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta pun harus beradaptasi untuk menemukan solusi dari hambatan yang datang akibat adanya pandemi *Covid-19* ini. Dibutuhkan juga kerjasama yang kooperatif para perusahaan tersebut untuk membantu usaha pemerintah dalam upaya untuk menanggulangi mengatasi pandemi *Covid-19* di Indonesia, seperti kebijakan pelaksanaan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan dan juga penerapan regulasi yang mengikuti regulasi pemerintah.

Dana CSR perusahaan bisa menjadi pemecah kebuntuan dalam mengatasi problematika kebijakan terkait dengan kebijakan ketenaga kerjaan dalam perusahaan. Usaha untuk

menghindari Pemutusan Hubungan Kerja minimal dapat dihindari dengan saling melakukan efisiensi, baik dari sisi perusahaan maupun dari tenaga kerja itu sendiri.

### **Daftar Pustaka**

- Dewi, W. A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 55–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89>
- Karunia, A. M. (2020). Dampak Covid-19, Menaker: Lebih dari 2 Juta Pekerja DiPHK dan Dirumahkan. *Money.Kompas.Com*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2020/04/23/174607026/dampak-Covid-19-menaker-lebih-dari-2-juta-pekerja-diphk-dan-dirumahkan>
- Mapisangka, A. (2009). Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat. *Jesp*, 1(1), 39–47
- Setyaningrum, D. A. (2011). Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat (Studi Kasus Pada PT. Apac Inti Corpora, Bawen). <https://www.msn.com/id-id/news/nasional/pengangguran-akibat-Covid-19-bisa-melebihi-hitungan-pemerintah/ar-BB12ERxO>
- <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/ekonomi-indonesia-dalam-skenario-terburuk-akibat-virus-corona/ar-BB11Ic3u>
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read297266/program-csr-bisa-jaga-kelangsungan-bisnis-saat-pandemi>

# KESIAPAN DAERAH TERHADAP KETAHANAN PANGAN LOKAL

**D. William G. M. Louhenapessy**

## **Pendahuluan**

Saat ini dunia dihadapkan pada dua krisis besar, yaitu krisis pangan dan krisis energi. Krisis pangan dipicu oleh fenomena pemanasan global dan tidak meratanya distribusi pangan. Sedangkan krisis energi dipicu oleh kian menipisnya cadangan energi yang berasal dari bahan bakar fosil (Louhenapessy, 2010). Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi sehingga merupakan hak asasi bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pangan. Peningkatan jumlah penduduk dan kualitas hidup masyarakat menyebabkan permintaan akan pangan akan terus meningkat. Robert Maltus (dalam Abdurachim, 1973 dan Hafisah, 2006) menjelaskan bahwa pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan pangan dunia, dimana bahan makanan akan bertambah sesuai deret hitung dan penduduk akan bertambah sesuai deret ukur, menyebabkan langkanya bahan makanan dunia. Oleh karena itu, kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional.

Tersedianya pangan yang cukup secara makro dan mikro merupakan persyaratan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan (*food security*) merupakan sebuah konsep kebijakan yang muncul pada tahun 1971 saat konferensi pangan dunia (Sage, 2002). Definisi tentang ketahanan pangan sejak konferensi pangan dunia tahun 1971 hingga dekade 90an terus mengalami perubahan mulai dari level global, nasional, skala rumah tangga dan individu yang dilihat dari perspektif pangan sebagai kebutuhan dasar (*food first perspective*) hingga pada perspektif penghidupan (*livelihood perspective*) dan indikator-indikator objektif ke persepsi subjektif (Maxwell dan Frankenberger, 1992).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan sesuai amanat UUD 1945 pasal 27. Pertimbangan terhadap komitmen tersebut mendasari lahirnya UU Nomor 7 tahun 1996 yang mengamanatkan agar pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk keseriusan Indonesia terkait dengan ketahanan pangan juga terlihat dengan diterbitkannya PP Nomor 68 tahun 2002. Menurut UU dan PP tersebut, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Di Indonesia, pangan sangat identik dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Berdasarkan penelusuran penulis, data menunjukkan bahwa beras telah menjadi bahan pangan pokok bagi lebih dari 95 persen penduduk di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan pola konsumsi mereka sangat didominasi oleh komoditas beras. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan terutama untuk komoditi

beras. Hal tersebut terlihat dari kebijakan pemerintah yang terkait dengan pangan masih terfokus pada komoditas beras. Selain itu, pemerintah juga selalu melakukan pengawasan ketat terhadap ketersediaan komoditas beras dan bahkan tidak segan untuk melakukan impor beras.

Ketergantungan konsumsi masyarakat Indonesia pada beras harus segera diatasi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Oleh karena itu, sumber pangan alternatif, dalam hal ini pangan lokal dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan pangan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman jenis pangan seperti sagu, jagung dan berbagai jenis umbi-umbian lainnya yang dapat menjadi sumber bahan makanan bagi masyarakat. Pangan selain beras tersebut memiliki akar historis dan budaya lokal sehingga mayoritas penduduk Indonesia, khususnya wilayah Indonesia Timur, telah terbiasa mengkonsumsi pangan lokal berupa umbi-umbian, jagung dan sagu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya sumber pangan alternatif menjadi alternatif konsumsi bagi masyarakat di wilayah Indonesia timur dan beras dapat difokuskan untuk wilayah Jawa.

Nainggolan (2004) menjelaskan bahwa kebijakan pelaksanaan ketahanan pangan dengan memanfaatkan pangan lokal merupakan suatu langkah yang tepat, karena ketersediaan pangan lokal disetiap daerah dan sangat mudah untuk dikembangkan. Sebagai contoh, masyarakat Papua dan Maluku dapat mengkonsumsi ubi jalar sebagai makanan pokok pengganti beras. Di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara sebagai penghasil utama tanaman jagung dapat mengkonsumsi jagung sebagai bahan makanan pokok pengganti beras. Komoditas lain yang berpeluang sangat besar sebagai pengganti beras sebagai bahan makanan pokok adalah sagu yang banyak tersedia di wilayah Indonesia Timur dan Pulau Sumatera.

Provinsi Maluku memiliki 9 kabupaten dan 2 kota, dengan ibu kota provinsi di Kota Ambon. Luas wilayah Provinsi Maluku sebesar 209.235,59 Km<sup>2</sup>, dengan Kabupaten terluas adalah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan luas 72.423,61 Km<sup>2</sup> atau 34,61% dari total luas wilayah Provinsi Maluku sedangkan Kabupaten/Kota dengan luas terkecil adalah Kota Tual dengan luas 254,39 Km<sup>2</sup> atau 0,12% dari luas Provinsi Maluku. Laut Seram merupakan perbatasan Maluku di sebelah utara, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia dan Laut Arafura. Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi dan sebelah timur berbatasan dengan Pulau Papua.

Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh sebagian besar petani di Maluku bertujuan untuk konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, dan hanya sebagian kecil dari hasil kegiatan pertanian yang dijual guna memenuhi kebutuhan lainnya. Komoditas pangan yang terdapat di Provinsi Maluku adalah padi, sagu, ubi jalar, ubi kayu, jagung, aneka kacang, sayuran dan hasil ternak serta ikan. Bustaman dan Susanto (2007) menjelaskan bahwa pertanian sagu di Provinsi Maluku dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan telah terbukti dapat menjadi solusi atas permasalahan pangan lokal di wilayah ini. Masyarakat setempat di Provinsi Maluku

pada umumnya telah mengkonsumsi sagu dan makanan lokal lainnya sebagai sumber makanan pokok sejak tempo dulu. Menurut Louhenapessy (2007), pada tahun 1980-an, sebanyak 33% masyarakat di Provinsi Maluku masih menjadikan sagu sebagai bahan makanan pokok, 50% menggunakan sagu dan umbi-umbian dan hanya 17% menggunakan beras sebagai bahan makanan pokok. Namun, Girsang (2014) menyebutkan bahwa konsumsi sagu dan makanan lokal lainnya di Provinsi Maluku mulai berkurang sementara konsumsi beras telah meningkat secara signifikan dalam dekade terakhir. Data Susenas (2009) menunjukkan bahwa terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat di Provinsi Maluku yang tadinya mengkonsumsi pangan lokal beralih ke kearah beras, dimana pada Tahun 2005 jumlah konsumsi beras sebesar 68,52 kg/kap/tahun dan terus meningkat pada Tahun 2009 menjadi 85% kg/kap/tahun.

Perubahan pola konsumsi masyarakat Maluku dari yang tadinya mengonsumsi pangan lokal beralih ke beras juga merupakan salah satu dampak dari program pemerintah yang berprioritas bagi ketersediaan komoditas beras bagi masyarakat miskin (raskin). Walaupun itu bukanlah tujuan dari program tersebut namun itulah kenyataan yang terjadi saat ini. Sebenarnya perhatian pemerintah terhadap sagu sudah muncul pada akhir dekade 70-an dan selama dekade 80-an, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 004/DATRANS/1980 tentang Penelitian dan Pendayagunaan Sagu Sebagai Bahan Pangan dan Energi, yang diikuti dengan proyek pengembangan sagu selama dekade 80-an dan akhirnya terhenti pada akhir tahun 80-an. Terhentinya proyek ini tidak terlepas dari tercapainya swasembada beras di Indonesia pada tahun 1984, dimana harapan pemerintah terfokus pada beras dan pangan non beras makin tersingkirkan. Pada akhir dekade 2000-an, dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2009 yang menyatakan antara lain bahwa sagu termasuk salah satu komoditi potensial untuk dikembangkan, tetapi kenyataannya bahwa tidak muncul program maupun implementasi pelaksanaannya.

Pada tahun-tahun terakhir ini kelihatannya beras sudah tidak mampu menjawab kebutuhan pangan nasional karena banyak kegagalan panen akibat banjir, dan kekeringan yang terus mengancam persawahan di Pulau Jawa. Polemik antara impor beras dan ekspor beras telah berlangsung lama. Sebagai contoh, pada satu sisi dinyatakan bahwa produksi pada tahun 2004 telah mencapai 54 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) sehingga terjadi surplus beras. Kondisi ini menunjukkan bahwa seakan-akan Indonesia kembali lagi ke swasembada beras seperti pada tahun 1984. Tetapi disisi lain timbul pertanyaan mengapa kita mengimpor beras rata-rata 1.3 juta ton pada tahun 2000-2003 dan tahun 2004 sebesar 247.000 ton (Iskandar, 2006).

Usaha tani padi di Provinsi Maluku terdiri dari usaha tani padi sawah dan padi ladang. Pada umumnya usaha tani padi sawah dilakukan oleh petani transmigran, sedangkan untuk padi ladang umumnya dilakukan oleh petani lokal. Perkembangan produksi padi secara keseluruhan di Provinsi Maluku disajikan pada tabel berikut. Pada tabel-1.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 produksi padi di Maluku sebesar 83.109 ton dan mengalami kenaikan tertinggi pada

tahun 2019 sebesar 117.791 ton. Kenaikan jumlah produksi ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan produksi padi sebagai salah satu komoditi pangan strategis di Maluku untuk mendukung ketersediaan pangan di Maluku. Karena itu pembukaan lahan sawah di Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) merupakan salah satu target pemerintah Provinsi Maluku untuk mendukung penyediaan padi sebagai salah satu produk pangan di Maluku.

Tabel 1  
Produksi Padi, Jagung dan Ubi-Ubian di Maluku Tahun 2014 – 2019 (Ton)

Tahun	Padi	(%)	Jagung	(%)	Ubi-Ubian	(%)
2014	83.109		15.273		156.141	
2015	87.468	87.47	13.875	13.87	143.676	143.67
2016	84.271	84.27	18.281	18.28	138.956	138.95
2017	101.835	101.83	11.940	11.94	117.415	117.41
2018	102.761	102.76	10.568	10.57	120.506	120.50
2019	117.791	117.79	13.947	13.95	168.300	168.30

Sumber: BPS data diolah

## Penutup

Adapun saran-saran dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga di Provinsi Maluku maka Pemerintah Provinsi Maluku dapat melakukan kebijakan terkait dengan Harga Non Beras, Harga Beras, Pendapatan Rumah Tangga dan Jumlah Anggota Rumah Tangga yang ditemukan dapat mempengaruhi ketersediaan pangan rumah tangga.
2. Untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi pangan non beras rumah tangga di Provinsi Maluku maka Pemerintah Provinsi Maluku dapat mengembangkan kebijakan terkait dengan Harga Non Beras, Harga Beras, Pendapatan Rumah Tangga dan Jumlah Anggota Rumah Tangga yang ditemukan dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi pangan non beras rumah tangga.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika harga beras naik maka dapat di subsidi dengan pangan non beras dan telah terbukti bahwa masyarakat di Provinsi Maluku telah terbiasa mengkonsumsi pangan non beras.

## Daftar Pustaka

- Abdurachim I, 1973. Pengantar Masalah Penduduk. Penerbit Alumni Bandung.
- Bustaman, S. dan Susanto, N. A., 2007. Prospek dan Strategi Pengembangan Sagu Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal di Propinsi Maluku. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. XV. No. 2. 2007.
- Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Maluku. 2015. Laporan Kegiatan Pengendalian Harga Pangan Pokok di Propinsi Maluku.

- Girsang, Wardis., 2014. Socio-Economic Faktors That Have Influenced the Decline of Sago Consumption in Small Island: A Case in Rural Maluku, Indonesia. Reaserch Center for The Pacific Islands. Kagoshima University, Japan.
- Iskandar, Andi Nuhung, 2006. Bedah Terapi Pertanian Nasional. Peran Strategi dan Revitalisasi. PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia – Jakarta.
- Jutomo, Lewi. 1998. Pola Konsumsi Pangan dan Susunan Menu Harian Etnik Timor di Kecamatan Amarasi. Media Gizi dan Keluarga. Tahun XXII. No. 1.
- Louhenapessy, J. E., (2007). Potensi dan Pengelolaan Sagu di Maluku. Prosiding Sagu dalam Revitalisasi Pertanian Maluku. Ambon, 29-31 Mei. Hal. 10-16.
- , (2010). Sagu. Harapan dan Tantangan. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta. 2010.
- Maxwell, S., and Frankenberger, T. (1992). Household Food Security Concepts, Indicators and Measurements. New York, ny. USA: Unicef and Ifad.
- Nainggolan, K. 2004. Strategi dan Kebijakan Pangan Tradisional dalam Rangka Ketahanan Pangan. Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Pangan Tradisional. Balai Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Bogor.
- Sage, C. (2002). Food Security and Environment. In Page and Redclift, ed. (2002) Human Security and The Environment: International Comparisons. Cheltenham: Edward Elgar, pp 128-153.

# **PERAN KEPALA DAERAH DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN**

**Andi Heny Mulawati Nurdin**

## **Pendahuluan**

Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat menjadi kewajiban pemerintah daerah, setiap daerah telah memiliki komitmen (*good will*) yang kuat dan berupaya untuk mewujudkan hal tersebut berdasarkan Pasal 65 UU RI Nomor 9 Tahun 2015, perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala daerah mempunyai tugas; memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Kepala daerah memegang posisi sentral dalam memajukan daerah pada era otonomi daerah yang mana diikuti dengan pemilihan langsung kepala daerah, membuat kewenangan lebih besar bagi kepala daerah terutama bupati dan walikota dalam mengambil keputusan pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Kepala daerah terpilih mendapat legitimasi lebih kuat, dibandingkan saat dipilih oleh anggota DPRD. Dalam menjalankan tugasnya kepala daerah memiliki beberapa kewenangan; kewenangan otoritas untuk mengambil kebijakan dalam memajukan daerahnya sesuai ketentuan; kewenangan mengelola anggaran; kewenangan mengelola SDM untuk melaksanakan pembangunan daerah; kewenangan kerjasama dalam membangun daerah. Dengan kewenangan tersebut kepala daerah memiliki peluang untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan antara lain: penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan derajat kesehatan, kualitas pendidikan, pengurangan angka kemiskinan, rasa aman dan terlindungi, serta berbagai program lainnya.

Pada masa pandemi *Covid-19* saat ini pemerintah daerah menghadapi tantangan yang sangat berat dalam upaya menjaga dan mempertahankan kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakat, dan ketahanan pangan di daerah.

## **Tantangan Perekonomian Daerah di Masa Pandemi *Covid-19***

Pandemi Covid -19 yang melanda Indonesia berimbas pada melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional demikian pula halnya dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan II tahun 2020, bisa mencapai -5,1% sampai -3,5%, dengan titik tengah mencapai -4,3%. Kondisi tersebut terjadi akibat dari penurunan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, dari mulai perdagangan, manufaktur, pertambangan hingga transportasi. Akan halnya pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami pelambatan namun tidak sedalam pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional, beberapa daerah tetap berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerahnya. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2020 melanjutkan

deselerasi, tercatat tumbuh -3,9% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,1% (yoy). Penyebaran pandemi *Covid-19* merupakan faktor utama yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan. Pelaksanaan PSBB dan penutupan penerbangan sebagai upaya menekan laju penyebaran pandemi menurunkan aktivitas konsumsi domestik serta berdampak pada pendapatan dan konsumsi pemerintah yang menurun akibat terbatasnya ruang belanja sejalan dengan eksekusi belanja yang belum optimal.

Masalah kedua yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah kemiskinan, dalam situasi yang sangat berat terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan. Masyarakat sedang mengalami masa-masa sulit. Pandemi ini perlahan-lahan membuat banyak orang harus berusaha keras untuk tetap bertahan hidup.

Hasil simulasi yang dilakukan *SMERU research* mengungkapkan bahwa dampak pandemi *Covid-19* pada tingkat kemiskinan di Indonesia dibagi menjadi tiga skenario berdasarkan tingkat keparahan, yaitu paling ringan, moderat, dan paling berat. Dalam skenario paling ringan, ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4,2% dan tingkat kemiskinan akan naik dari 9,2% (angka pada September 2019) menjadi 9,7% pada akhir 2020, atau sekitar 1,3 juta lebih orang akan menjadi miskin. Dalam skenario moderat, ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 2,1% dan tingkat kemiskinan akan mencapai 11,4%, atau akan ada 6 juta orang miskin baru. Dalam skenario paling berat, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 1% dan tingkat kemiskinan akan naik menjadi 12,4%, atau sebanyak 8,5 juta lebih orang akan jatuh miskin, (Suryahadi, Al Izzati, dan Suryadarma, 2020). Kenaikan tingkat kemiskinan akibat pandemi *Covid-19* menjadi perhatian serius dari pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah melalui program perlindungan sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama mereka yang menjadi miskin atau makin miskin akibat pandemi.

### **Respon Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Pandemi *Covid-19***

Dalam menghadapi krisis yang disebabkan pandemi *Covid-19* para pemimpin daerah harus mengambil tindakan cepat dan tegas berdasarkan data yang tersedia dan akurat. Dalam merespon kondisi tersebut para pemimpin harus berkomunikasi dengan jelas, konsisten, dan terus-menerus, karena masyarakat akan lebih kooperatif ketika mengerti dan memahami mengapa mereka diminta untuk mengambil langkah-langkah tertentu. Beberapa hal yang seharusnya dilakukan kepala daerah dalam merespon krisis pandemi *Covid-19*:

1. Pedoman yang jelas untuk kegiatan ekonomi
2. Pendataan untuk mengidentifikasi area yang paling terdampak. Setiap orang telah mengalami dampak negatif dari krisis ini, tetapi beberapa industri dan beberapa daerah sangat terpengaruh sehingga sangat penting untuk membuat formula bantuan yang adil dan transparan yang didukung oleh data.
3. Melakukan penilaian industri, dengan menganalisis berbagai sektor ekonomi terhadap tingkat kerentanan *Covid-19*, pemerintah dapat memberikan panduan yang lebih tepat. Penilaian

secara luas, kemampuan sektor untuk mengurangi penularan semacam itu, dan sebagainya semacam itu dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemungkinan penularan penyakit. Ini dapat menginformasikan keputusan tentang bisnis mana yang dapat dibuka kembali dan di bawah parameter apa, dan memberikan pedoman keselamatan kepada pemilik bisnis dan warga negara.

4. Pelibatan partisipasi swasta untuk menghidupkan kembali sektor-sektor tertentu
5. Mengevaluasi kerentanan rantai pasokan makanan, pasokan, obat-obatan, dan peralatan
6. Penguatan jaringan pemerintah. Pemulihan akan membutuhkan upaya kolaboratif, dengan integrasi dan data yang lebih akurat pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
7. Transparansi data. Lembaga harus menyediakan data tentang pengadaan dan dukungan keuangan untuk evaluasi oleh para peneliti dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Data terbuka juga dapat meningkatkan integritas program dan membantu mengungkap penipuan dan penyalahgunaan.
8. Kepala daerah juga harus memainkan peran komunikasi penting dalam media sosial, tingkat pemulihan yang berbeda, dan kemunduran.

### **Pentingnya Ketahanan Pangan Daerah di Masa Pandemi *Covid-19***

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Pangan merupakan hak asasi bagi setiap individu di Indonesia UU RI nomor 7 tahun 1999 tentang pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan hak asasi bagi setiap individu di Indonesia. Oleh karena itu terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Selain itu pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis di Indonesia berdasar pada pengaruh yang dimilikinya secara sosial, ekonomi, dan politik.

Pada masa pandemi salah satu dampak yang harus diantisipasi adalah ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat. Gerakan Ketahanan Pangan (GKP) yang diperkenalkan Kementerian Pertanian di tengah ancaman virus corona saat ini harus didukung oleh semua pihak, khususnya petani dan penyuluh sebagai ujung tombak dan penggerak sektor pertanian. Pemerintah harus mendorong masyarakat untuk semakin memahami dan memaknai pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan ekonomi, ada lima masalah mendasar yang menjadi alasan penting menentukan arah pembangunan ketahanan pangan, yaitu: Pertama, pangan adalah bagian dari *basic human need* yang tidak ada substitusinya. Kedua, pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, disadari atau tidak, mendorong terjadinya peningkatan kebutuhan terhadap pangan (*growing demand*). Selain itu, peningkatan jumlah *the middle class* yang berhilir pada peningkatan konsumsi pangan yang lebih banyak. Ketiga, kerusakan lingkungan yang diakibatkan antara lain oleh *climate change* yang sudah mengganggu produksi dan produktivitas pangan nasional. Keempat, kompetisi antara sumber energi (*biofuel*) dan sumber pangan yang dapat mengganggu suplai pangan. Kelima, pentingnya kemandirian pangan berkelanjutan serta masih adanya kerentanan dan kerawanan (baca krisis) pangan di berbagai daerah. Kelima hal mendasar itu

mengindikasikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha untuk peningkatan produksi komoditas pangan.

Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah merumuskan Metode 4 Cara Bertindak untuk mencapai ketahanan pangan. Pertama, peningkatan kapasitas produksi. Kedua, diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal yang berfokus pada satu komoditas utama. Ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan dengan cara penguatan cadangan beras pemerintah provinsi (CBPP), kemudian penguatan cadangan beras pemerintah kabupaten/kota (CBPK). Keempat, pengembangan pertanian modern, caranya melalui pengembangan *smart farming*, pengembangan dan pemanfaatan *screen house* untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam, pengembangan korporasi petani, dan pengembangan *food estate* untuk peningkatan produksi pangan utama (beras/jagung).

Untuk jangka pendek agenda SOS atau *emergency*, di antaranya dengan menjaga stabilitas harga pangan dan membangun *buffer stock*. Agenda jangka menengah diwujudkan dengan melanjutkan padat karya pasca *Covid-19*, diversifikasi pangan lokal, membantu ketersediaan pangan di daerah defisit,antisipasi kekeringan, menjaga semangat kerja pertanian melalui bantuan *sarana produksi (saprodi)* dan alat mesin pertanian (*alsintan*), mendorong *family farming*, membantu kelancaran distribusi pangan, meningkatkan ekspor pertanian, memperkuat Komando Strategi Pembangunan Pertanian (*Kostratani*). Sementara agenda jangka panjang (permanen) dilakukan, antara lain dengan mendorong peningkatan produksi 7% per tahun dan menurunkan kehilangan hasil (*losses*) menjadi 5%. (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4277499/mentan-all-out-gerakan-ketahanan-pangannasional>)

Demikian pula halnya dengan kepala daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan di daerah melalui kebijakan dan program yang diprioritaskan pada Pilar Ketahanan Pangan yaitu:

#### 1. Ketersediaan

Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran. Produksi pangan ditentukan oleh berbagai jenis faktor, termasuk kepemilikan lahan dan penggunaannya; jenis dan manajemen tanah; pemilihan, pemuliaan, dan manajemen tanaman pertanian; pemuliaan dan manajemen hewan ternak; dan panen. Distribusi pangan melibatkan penyimpanan, pemrosesan, transportasi, pengemasan, dan pemasaran bahan pangan. Infrastruktur rantai pasokan dan teknologi penyimpanan pangan juga dapat mempengaruhi jumlah bahan pangan yang hilang selama distribusi. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai dapat menyebabkan peningkatan harga pangan.

#### 2. Akses

Akses terhadap bahan pangan mengacu kepada kemampuan membeli dan besarnya alokasi bahan pangan, juga faktor selera pada suatu individu dan rumah tangga. Kemiskinan membatasi akses terhadap bahan pangan dan juga meningkatkan kerentanan suatu individu

atau rumah tangga terhadap peningkatan harga bahan pangan. Kemampuan akses bergantung pada besarnya pendapatan suatu rumah tangga untuk membeli bahan pangan, atau kepemilikan lahan untuk menumbuhkan makanan untuk dirinya sendiri. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa akses kepada bahan pangan harus tersedia dengan cara yang dibenarkan oleh masyarakat sehingga makanan tidak didapatkan dengan cara memungut, mencuri, atau bahkan mengambil dari cadangan makanan darurat ketika tidak sedang dalam kondisi darurat.

### 3. Pemanfaatan

Keamanan pangan mempengaruhi pemanfaatan pangan dan dapat dipengaruhi oleh cara penyiapan, pemrosesan, dan kemampuan memasak di suatu komunitas atau rumah tangga. Akses kepada fasilitas kesehatan juga mempengaruhi pemanfaatan pangan karena kesehatan suatu individu mempengaruhi bagaimana suatu makanan dicerna. Misal keberadaan parasit di dalam usus dapat mengurangi kemampuan tubuh mendapatkan nutrisi tertentu sehingga mengurangi kualitas pemanfaatan pangan oleh individu. Kualitas sanitasi juga mempengaruhi keberadaan dan persebaran penyakit yang dapat mempengaruhi pemanfaatan pangan sehingga edukasi mengenai nutrisi dan penyiapan bahan pangan dapat mempengaruhi kualitas pemanfaatan pangan

### 4. Stabilitas

Stabilitas pangan mengacu pada kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Kerawanan pangan dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis (permanen). Pada ketahanan pangan transisi, pangan kemungkinan tidak tersedia pada suatu periode waktu tertentu. Bencana alam dan kekeringan mampu menyebabkan kegagalan panen dan mempengaruhi ketersediaan pangan pada tingkat produksi. Konflik sipil juga dapat mempengaruhi akses kepada bahan pangan. Ketidakstabilan di pasar menyebabkan peningkatan harga pangan sehingga juga menyebabkan kerawanan pangan. Faktor lain misalnya hilangnya tenaga kerja atau produktivitas yang disebabkan oleh wabah penyakit. Musim tanam mempengaruhi stabilitas secara musiman karena bahan pangan hanya ada pada musim tertentu saja.

### **Kerawanan pangan permanen atau kronis bersifat jangka panjang dan persisten**

Dengan memperhatikan beberapa azas kebijakan ketahanan pangan di daerah, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut diantaranya meliputi:

1. Pemerintah daerah perlu menyadari akan pentingnya memperhatikan masalah ketahanan pangan di wilayahnya. Perlunya apresiasi tentang biaya, manfaat, dan dampak terhadap pembangunan wilayah dan nasional program peningkatan ketahanan pangan di daerah kepada para penentu kebijakan di daerah.
2. Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan dan strategi untuk menangani masalah ketahanan pangan di daerah.
3. Perlu dikembangkan suatu wahana untuk saling tukar menukar informasi dan pengalaman dalam menangani masalah ketahanan pangan antar pemerintah daerah.

## **Penutup**

Pembangunan ekonomi merupakan perubahan aktivitas yang tadinya tidak ada menjadi ada, atau yang tadinya ada menjadi bertambah besar, bertambah luas, bertambah maju dalam konteks kegiatan ekonomi. Perubahan-perubahan tersebut bukan saja merupakan keuntungan bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat luas dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Keberlanjutan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, sekaligus peningkatan kesejahteraan petani diperlukan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek masih diperlukan kebijakan perlindungan petani dengan pembatasan impor produk pertanian didukung pula dengan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi domestik melalui upaya peningkatan produktivitas produk pertanian nasional. Selain itu, daerah penghasil pertanian lainnya perlu dilakukan peningkatan produktivitas dan luas panen, baik dengan perluasan lahan maupun peningkatan intensitas tanam per tahun dengan jaminan ketersediaan irigasi dan input pertanian.

Diversifikasi Produksi Pangan dengan cara penganekaragaman konsumsi atau pangan dapat mengurangi tekanan pada ketersediaan satu macam produk pangan, terutama beras. Konsekuensinya, keanekaragaman ketersediaan bahan pangan perlu ditingkatkan pula dengan didukung agroindustri pengolahan pangan non-beras yang berbasis produk dalam negeri agar dapat tersedia dan mudah diperoleh dimana saja dan ditunjang dengan pola konsumsi masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4277499/mentan-all-out-gerakan-ketahanan-pangannasional>

file:///D:/Materi%20NARSUM%20IDEI%2026%20juni/Arah%20&%20Kebijakan%20Pemerintah%20Daerah%20Dalam%20Pembangunan%20Pertanian%20Di%20Kalbar%20Tahun%202017.html

<http://puspensos.kemsos.go.id/potret-kemiskinan-di-tengah-pandemi-Covid-19>

Rossi Prabowo, Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia, Jurnal Ilmu ilmu Pertanian.

The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia, SMERU Working Paper

# **PANDEMI *COVID-19* DAN KERENTANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT**

**Irawan Itta**

## **Pendahuluan**

Kasus *Covid-19* awal mulanya diketahui pada tanggal 31 Desember 2019, ketika WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru corona virus. Untuk konteks dunia, pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian di kota Wuhan-China sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan pada akhirnya sejak tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan *Covid-19* sebagai pandemi.

Sementara itu kasus *Covid-19* di Indonesia, terdeteksi pada tanggal 14 Februari 2020, dimana salah satu warga Indonesia di wilayah Depok yang melakukan kontak langsung dengan WNA Jepang melalui kegiatan olahraga Dansa, yang belakangan diketahui WNA tersebut terinfeksi *Covid-19*. Pasien berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa dan WNA asal Jepang ini juga merupakan teman dekatnya. Kronologis kasus *Covid-19* pertama di Indonesia dimulai tanggal 16 Februari 2020 pasien terkena sakit batuk, dan selanjutnya pasien tersebut melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat dengan pola rawat jalan. Karena sakitnya tak kunjung sembuh, maka pada tanggal 26 Februari 2020, pasien tersebut dirujuk lagi ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap karena batuk yang diderita pasien mulai disertai sesak napas (Terawan, 2020)

Pada 28 Februari 2020, pasien mendapatkan telepon dari temannya di Malaysia, yang menyebutkan bahwa jika WNA Jepang yang adalah temannya sendiri itu positif terinfeksi virus corona. Selanjutnya pasien tersebut memberi tahu perawat rumah sakit tentang kejadian dan status WNA Jepang yang menjadi kontak terakhir dengannya. Jadi singkatnya bahwa kasus *Covid-19* yang pertama di Indonesia diketahui dari seorang guru dansa warga negara Indonesia yang tertular dari kontak langsung melalui olahraga dansa dengan WNA Jepang yang memiliki suspek *Covid-19*. Atas konfirmasi kasus *Covid-19* pertama tersebut, pemerintah merespon dengan cepat untuk melakukan sejumlah proses penanganan pasien *Covid-19* sesuai protokol kesehatan dengan melakukan proses mengisolasi rumah pasien, menjaga rumahnya hingga merawat pasien. Proses penanganan kasus pertama *Covid-19* (2 orang wanita) dilakukan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta Utara.

Gambar 1  
Perawatan Pasien *Covid-19*



Sumber: China Daily via REUTERS ©2020

Wabah *Covid-19* telah mengguncang dunia telah menjadi momok yang menakutkan bagi setiap manusia karena efeknya begitu dahsyat dan dapat merenggut nyawa manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa wabah penyakit SARS yang pernah melanda dunia pada dasarnya distimulus oleh jenis virus corona hasil mutasi (Utama, 2003). Dengan demikian bahwa virus corona yang menjelma menjadi *Covid-19* (singkatan) adalah sebuah wabah penyakit yang tingkat penularannya cukup cepat melalui interkasi atau kontak yang memiliki gejala *Covid-19*. Selanjutnya Kementerian Kesehatan RI (2020) menyebutkan bahwa Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang merupakan virus corona jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis virus corona yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

The Straits Times menyebutkan bahwa faktor utama yang berkontribusi terhadap angka kematian *Covid-19* adalah faktor usia yakni mereka yang tergolong lansia (85 tahun ke atas) yang terinfeksi *Covid-19* termasuk kategori berisiko lebih tinggi meninggal dunia dibanding kelompok usia muda (18-29 tahun); penyakit bawaan yakni penyakit bawaan seperti kanker, ginjal kronis, jantung serta pasien yang menerima transplantasi membuat orang rentan dan lebih berisiko meninggal; sistem perawatan kesehatan tak memadai yakni faktor minimnya fasilitas dan infrastruktur layanan kesehatan.

Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Kemenkes RI, 2020).

Guna mendukung pelaksanaan penanggulangan pandemi *Covid-19*, pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang memberikan kewenangan pemerintah secara fleksibel untuk mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN yang bertujuan untuk (1) penanganan masalah kesehatan, (2) menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan, dan (3) dukungan usaha bagi UMKM (Kemenkeu RI, 2020).

### **Perkembangan Kasus *Covid-19***

Sejak ditemukannya kasus *Covid-19* pertama di wilayah Depok pada bulan Peruari 2020, dan munculnya kasus *Covid-19* baru di wilayah Bogor dan beberapa wilayah di Indonesia mulai memakan korban dengan adanya pasien yang meninggal. Dilihat dari situasi penyebaran *Covid-19* yang sudah hampir menjangkau seluru wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Keputusan Presiden tersebut menetapkan *Covid-19* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkan KKM *Covid-19* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, atas pertimbangan penyebaran *Covid-19* berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional.

Seiring dengan upaya dan komitmen pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan pandemi *Covid-19* melalui berbagai regulasi, baik regulasi tingkat pemerintah pusat (kemeterian) maupun regulasi pada level pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) mempunyai satu tujuan yang sama yaitu memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*. Dukungan pemerintah untuk penanggulangan pandemi *Covid-19* dikonkritkan dalam bentuk dukungan finansial melalui revisi

lebih awal APBN 2020, dimana fokus dan targetnya tertuju pada penanganan *Covid-19*. Dalam APBN-Perubahan disebutkan bahwa alokasi anggaran untuk mengoptimalkan penanganan *Covid-19* melalui pendekatan aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Kebijakan fiskal dimaksud tertuang dalam paket Stimulus III sebesar 405,1 triliun rupiah dengan alokasi penggunaan untuk Kesehatan, Bantuan Tunai Mandiri bagi masyarakat yang tidak mampu dan dukungan kepada perusahaan yang usahanya terdampak *Covid-19*. Selanjutnya untuk akselerasi penanganan *Covid-19*, kebijakan anggaran dimaksud ditingkatkan menjadi 695,2 triliun rupiah sebagai tambahan untuk sektor kesehatan sebesar 87,55 triliun rupiah, dan anggaran untuk aspek ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 607,65 triliun rupiah (Kemenkeu RI, 2020).

Berbagai regulasi, aturan dan kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*, harus diakui belum sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, dimana salah satunya adalah masalah tingkat kepatuhan masyarakat untuk menerapkan dan mengikuti protokol kesehatan yang masih rendah. Akibatnya tren penambahan kasus *Covid-19* masih terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, yakni yang terkonfirmasi, dalam perawatan dan yang meninggal, walaupun disisi lain tingkat kesembuhan pasien juga mengalami peningkatan.

Kasus pandemi *Covid-19* di Indonesia masih menunjukkan tren yang meningkat. Data menunjukkan bahwa sampai tanggal 30 Maret 2020 status positif sebanyak 1.414 kasus, sembuh 75 kasus, dan meninggal 122 kasus. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat penyebaran *Covid-19* seperti pemberlakuan *Physical and Social Distancing*, *Work from Home* (WfH), *Learning from Home* (LfH), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kewajiban memakai masker dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan massa, namun nampaknya upaya-upaya tersebut belum mampu meredam laju peningkatan kasus *Covid-19*. Seperti data yang diperbaharui oleh Satgas *Covid-19* pada tanggal 26 September 2020, pukul 12.00 WIB, menunjukkan bahwa secara total kasus di 34 Provinsi dan 495 Kabupaten/Kota kasus terkonfirmasi sebanyak 271.339, pasien yang sembuh sebanyak 199.403 orang dan jumlah yang meninggal adalah sebanyak 10.308 orang.

Gambaran dan perkembangan kasus *Covid-19* pada gambar 2 di atas secara kualitas menunjukkan bahwa jumlah pasien sembuh sebesar 73 persen dan jumlah yang meninggal sebesar 3,8 persen. Cukup tingginya kasus pasien yang sembuh ini menunjukkan bahwa proses penanganan pasien di berbagai fasilitas layanan kesehatan di seluruh pusat pelayanan pasien *Covid-19* relatif baik, walaupun angka tingkat kematian sebesar 3,8 persen termasuk kategori tinggi, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.

Gambar 2  
Jumlah Terpapar *Covid-19* di Indonesia



Sumber: Satgas *Covid-19*

Pandemi *Covid-19* di Indonesia memiliki dampak multi sektor, dari kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga aktivitas beribadah di masyarakat. Dampak pada sektor-sektor tersebut kian hari mulai dirasakan masyarakat. Pada akhirnya dampak *Covid-19* menjadi persoalan kesejahteraan sosial masyarakat, yang pada gilirannya berkaitan dengan kesehatan, kondisi ekonomi domestik rumah tangga, rasa aman-nyaman, dan kualitas hidup yang baik.

### **Dampak Ekonomi *Covid-19***

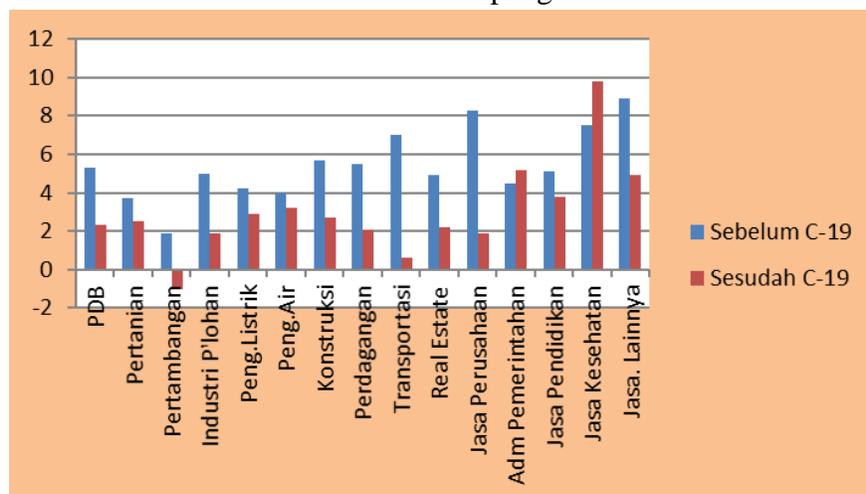
Kejadian luar biasa berupa wabah pandemi *Covid-19* yang melanda dunia sejak Desember 2019 dan juga mewabah di Indonesia sejak Maret 2020 telah menimbulkan masalah bagi aspek kesehatan masyarakat. Bahkan lebih jauh lagi dimana dampak kesehatan telah menimbulkan dampak lain, khususnya sektor ekonomi. Pola dan strategi penanganan *Covid-19* melalui aspek kesehatan, yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* dengan cara menghindari kontak dan interaksi secara langsung dengan orang lain, telah menyebabkan lesu dan matinya berbagai aktivitas ekonomi di berbagai sektor, seperti sektor jasa transportasi (darat, udara), sektor pariwisata dan turunannya seperti perhotelan, kuliner, aktivitas perusahaan dan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Berkurangnya atau bahkan berhentinya aktivitas sektor-sektor ekonomi telah berdampak pada rendahnya tingkat produksi di berbagai lapangan usaha, sehingga menyebabkan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II dan III tahun 2020, juga meningkatnya pengangguran, turunnya investasi asing serta meningkatnya angka kemiskinan. Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh wabah pandemi *Covid-19* adalah menurunnya kinerja hampir seluruh lapangan usaha yang membentuk Produk Domestik Bruto (PDB), seperti diuraikan pada gambar 3 berikut ini.

Gambar 3 menunjukkan bahwa sektor yang terkena dampak negatif terbesar dari *Covid-19* pada 2020 adalah sebagai berikut:

1. Sektor Pariwisata, terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, menurunnya omset penjualan restoran karena hanya bisa melayani konsumen secara *delivery (take away)* sebagai konsekuensi dari aturan yang membatasi pergerakan masyarakat.
2. Sektor Perdagangan, karena terjadi penurunan aktivitas konsumsi dan produksi domestik.
3. Sektor Transportasi dan pergudangan, dampak penurunan terbesar terjadi pada angkutan udara, sementara penurunan aktivitas pengiriman barang tertahan meningkatnya pengiriman *online* seiring dengan kebijakan *Work from Home (WfH)*.
4. Sektor Konstruksi, mengalami penurunan karena aktivitas terhenti seiring dengan penundaan atau penghentian berbagai proyek infrastruktur pemerintah.
5. Sektor Industri pengolahan, terkena dampak di antaranya industri yang tidak memproduksi kebutuhan dasar atau terkena dampak gangguan *supply chain* seperti otomotif. Di samping itu, terdapat juga industri yang berkembang seperti industri makan minum, alat kesehatan, farmasi sebagai akibat dari tingginya permintaan (*demand*) terhadap komoditi tersebut.
6. Sektor Pertambangan, kinerja sektor perdagangan mengalami penurunan karena harga komoditas di pasar global mengalami penurunan serta menurunnya permintaan industri-industri di luar negeri yang menggunakan batubara sebagai bahan pokok sebagai akibat dari PHK atau WfH.

Gambar 3  
PDB berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: Bappenas 2020

Walaupun dampak *Covid-19* telah menurunkan kinerja beberapa sektor/lapangan usaha, namun masih terdapat beberapa sektor/lapangan usaha yang mampu bertahan antara lain:

1. Sektor jasa kesehatan mampu bertahan karena meningkatnya kebutuhan terhadap layanan kesehatan akibat penyebaran *Covid-19*.

2. Sektor pengadaan listrik dapat bertahan karena meningkatnya permintaan rumah tangga seiring dengan pola kerja dari rumah (WFH) dan adanya relaksasi dan diskon tarif listrik. Walaupun disisi lain permintaan listrik untuk kegiatan industri dan bisnis mengalami penurunan.
3. Sektor infokom mampu bertahan dan bahkan meningkat karena tingginya permintaan dan penggunaan internet, penggunaan data sebagai akibat dari kebijakan WFH.
4. Sektor pertanian khususnya tanaman pangan dalam jangka pendek tidak mengalami gangguan pandemi *Covid-19*. Sementara sektor perkebunan seperti produksi kelapa sawit dan karet serta perikanan yang selama ini merupakan komoditi ekspor di sektor mengalami gangguan (Bappenas, 2020).

### **Dampak Sosial *Covid-19***

Merabaknya pandemi *Covid-19* yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah menimbulkan dampak terhadap berbagai sektor perekonomian dan sosial di Indonesia. Salah satu sektor yang mempunyai turunan sub sektor yang banyak adalah sektor pariwisata, dan manufaktur merupakan sektor-sektor bisnis yang paling terdampak. Berkurangnya aktivitas, bahkan ditutupnya beberapa tempat rekreasi telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Bermula mulai dari maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau merumahkan pekerja untuk sementara waktu, hingga meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak selama pandemi *Covid-19* adalah sebuah kenyataan betapa telah terjadi kerawanan sosial di masyarakat.

Berikut diuraikan beberapa dampak sosial yang muncul akibat dari merebaknya pandemi *Covid-19* adalah sebagai berikut (Katadata, 2020):

#### 1. Nasib buruh.

Data di Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sekitar 2,8 juta pekerja terkena dampak pandemi *Covid-19* terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di-PHK. Selain itu, terdapat 282 pekerja informal yang usahanya terganggu. Hal ini akibat terhentinya operasional perusahaan tempat mereka bekerja. Tingginya angka PHK akibat *Covid-19* telah menimbulkan dampak lainnya yaitu tingginya angka pengangguran, yang pada gilirannya akan berdampak pada psikologi seseorang, sehingga peluang terjadinya hal-hal negatif seperti tindak kriminal, kerusuhan dan lain sebagainya cukup signifikan.

#### 2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Dampak ekonomi berupa PHK sebagai akibat dari pandemi *Covid-19* peluangnya cukup besar untuk menimbulkan dampak sosial. Seseorang yang mengalami PHK yang menyebabkan dia kehilangan pekerjaan dan pegangan hidup, memungkinkan terjadinya peningkatan tekanan psikologi yang dihadapi oleh orang tersebut termasuk masyarakat secara keseluruhan. Tekanan psikologis yang cukup tinggi, dapat berujung pada tindak kekerasan yang dilampiasikan kepada anggota keluarga. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan, antara 2 Maret s.d. 25 April 2020, menunjukkan bahwa

terdapat 275 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa, dan 368 kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang merupakan dampak sosial dari wabah pandemi *Covid-19* jika berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama, pada saatnya akan menimbulkan masalah baru dalam masyarakat berupa kerawanan dan kerentanan sosial. Untuk mencegah terjadinya fenomena seperti ini, maka dibutuhkan cara pandang terhadap situasi *Covid-19*, yaitu harus ada *policy response* yang berfokus pada masalah kesehatan dan mencegah penyebarannya. Sementara itu untuk dampak sosial harus ada *social protection* dan jaring pengaman sosial untuk menghadapi tantangan ekonomi, bagi usaha kecil, menengah, besar, dan juga sektor keuangan.

### **Kerentanan dan *Social Safety Net***

#### **Kerentanan Sosial**

Seperti dilansir oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bahwa pandemi *Covid-19* merupakan bentuk bahaya (*hazard*) yang memiliki potensi mengancam segala aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis. Dampak yang dialami oleh masyarakat Indonesia tidak berbeda jauh dengan yang dialami oleh masyarakat di negara lain yang juga sama sedang menghadapi pandemi *Covid-19*. Kondisi kerentanan sosial (*social vulnerability*) menjadi realitas nyata yang terjadi pada masyarakat dalam menghadapi pandemi *Covid-19*. Kerentanan sosial menjadikan posisi ketahanan masyarakat (*community resilience*) mengalami guncangan (*shock*) akibat pandemi *Covid-19*.

Sebagai bangsa yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah sebagai sumber penghidupan masyarakat Indonesia, hal ketahanan masyarakat berkaitan dengan kemampuannya untuk dapat menggunakan sumber daya yang tersedia (seperti, teknologi, makanan, pekerjaan, dan rasa aman-nyaman) dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjalankan fungsi sosialnya. Wabah pandemi *Covid-19* yang belum redah, membuat kondisi saat ini justru menjadikan ketahanan masyarakat mengalami kerentanan sosial. Adanya kerentanan sosial di masyarakat, membuat produktivitas menurun, mata pencarian terganggu, dan munculnya gangguan kecemasan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Mengamati salah satu pendekatan dan instruksi pemerintah untuk mengurangi penyebaran *Covid-19* adalah melalui *Physical Distancing*, nampaknya tidak berjalan dengan efektif. Sebab instruksi *physical distancing* dianggap menciptakan kerentanan sosial pada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang berada pada sektor informal sebanyak 74.093.224 orang (BPS, 2019) seperti pedagang dan ojek *online* yang sumber pendapatan ekonominya didapat sehari-hari. Selain karena alasan pekerjaan, faktor lain yang membuat instruksi *physical distancing* tidak efektif karena faktor karakteristik kultural masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang tidak tegas bahkan cenderung mempertontonkan ego sektoral antar lembaga pemerintahan, baik pusat dan daerah. Dampak kerentanan sosial dapat membuat masyarakat

melakukan tiga tindakan yang saling terkait, yaitu tindakan apatis, tindakan irasional, dan tindakan kriminal.

Pertama, tindakan apatis. Situasi ini merujuk pada sikap dan tindakan masyarakat yang tidak peduli dengan instruksi pemerintah seperti *physical distancing*, menggunakan masker dan tidak pulang ke kampung halamannya (mudik). Dari tinjauan sosiologis, sikap apatis yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat disalahkan (non etis). Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk berupaya dan bisa membuat masyarakat tetap memiliki ketahanan sosial agar tidak melakukan tindakan apatis saat bangsa dan negara ini dihadapkan pandemi *Covid-19*.

Kedua, tindakan irasional. Beberapa tindakan irasional masyarakat diyakini sebagai obat dan metode pencegahan agar tidak terkena *Covid-19*. Adanya pemahaman ada masyarakat yang meyakini bahwa metode berbaring untuk berjemur di atas rel kereta api dapat membantu mencegah penularan *Covid-19*. Pemahaman yang termasuk kategori irasional, pada dasarnya merupakan keterikatan masyarakat atas cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*) yang berlaku pada lingkungan kehidupannya. Tindakan *panic buying*, merupakan sebuah tindakan irasional karena masyarakat akan meningkatkan konsumsinya melalui tingginya permintaan akan bahan kebutuhan sehari-hari (aksi memborong belanja), sehingga memicu naiknya harga-harga (inflasi).

Ketiga, tindakan kriminal. Akibat dari kerentanan sosial atas pandemi *Covid-19* adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum masyarakat, dan secara sosiologis, tindakan kriminal merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan dirinya dan orang lain (korban) yang mengganggu keseimbangan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Bentuk tindakan kriminal yang terjadi misalnya saja pencurian, penjambretan, pencopetan, pemalakan, penjarahan, bahkan pembunuhan.

### **Social Safety Net**

Strategi pemerintah berupa skala prioritas penanganan *Covid-19* adalah dengan mengutamakan 3 hal pokok, yaitu keselamatan kesehatan, *social safety net* (jaring pengaman sosial) dan dampak ekonomi. Jika pemerintah pada akhirnya mempertegas kebijakan *physical distancing* atau, karantina wilayah atau *lockdown*, atau yang sedikit longgar PSBB, maka pemerintah perlu menyiapkan instrumen yang dapat meminimalisir kerentanan sosial masyarakat, seperti misalnya kebijakan *social safety net* untuk menghindari ada potensi kerentanan sosial beserta dampaknya yang akan muncul pada masyarakat akibat kebijakan tersebut.

Dalam teknis pelaksanaan atau eksekusi kebijakan *social safety net*, diharapkan pemerintah tidak menggunakan pola seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena disinyalir pola BLT menyisahkan cerita kurang baik dalam hal: (1) distribusi yang tidak merata, (2) memicu adanya

praktek korupsi dan nepotisme, (3) lemahnya mekanisme koordinasi antar lembaga, dan (4) memicu terjadi konflik di masyarakat akibat kecemburuan yang terjadi di masyarakat.

Untuk itu sebagai dasar yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan *social safety net* adalah:

1. Sejauh mana masalah – masalah sosial ini dapat teratasi?
2. Sejauh mana kebutuhan – kebutuhan dasar pada masyarakat dapat dipenuhi?
3. Sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat disediakan?
4. Sejauh mana masyarakat tidak mengalami ketergantungan setelah kebijakan ini berakhir?

Agar seluruh bantuan menghasilkan manfaat, maka pola penerapan kebijakan *social safety net* dapat dilihat dalam bentuk program, aktor yang terlibat dan mekanisme distribusinya. Ketiga pola tersebut dapat menjadi dasar pemerintah untuk merumuskan kebijakan *social safety net* sebagai upaya antisipasi potensi kerentanan sosial beserta dampaknya akibat diberlakukan kebijakan *physical distancing* atau, karantina wilayah, atau PSBB.

Pelaksanaan kebijakan *social safety net* diharapkan untuk dapat meminimalisir potensi kerentanan sosial dan dampaknya yang terjadi di masyarakat. Strateginya adalah sebelum pemerintah menjalankan kebijakan *physical distancing*, dan khususnya karantina wilayah atau PSBB, terlebih dahulu menyiapkan strategi antisipasi dari potensi kerentanan sosial yang akan terjadi di masyarakat. Agar tidak melahirkan berbagai masalah baru. Agar kasus kerusakan dan penjarahan pada tahun 1998 tidak terulang kembali akibat tingkat frustrasi masyarakat yang mulai tinggi karena dihadapkan pada kerentanan sosial dan pola eksekusi program *social safety net* yang tidak tepat.

Komitmen dan kerja keras pemerintah untuk menangani dan menghentikan sebaran pandemi *Covid-19* dapat terwujud agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sosial-ekonomi seperti sedia kala. Masyarakat dapat kembali saling berjabat tangan, dapat saling duduk berdekatan, tidak saling curiga satu sama lain kalau ia adalah *carrier Covid-19*, dapat kembali mengadakan kegiatan ibadah bersama. Pada akhirnya kita semua dapat menjalankan fungsi sosial sebagai masyarakat dan individu pada umumnya, sebagai hakikat manusia makhluk sosial.

### **Daftar Pustaka**

- Andi Utama, 2003. Coronavirus dan Penyakit SARS. Pusat Penelitian Bioteknologi-LIPI
- Irawan, 2020. Ancaman Kerentanan Sosial Ekonomi Ditengah Pandemi Covid-19 Paper disajikan pada acara Diskusi HED#6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, tanggal 7 Juli 2020.
- Kemenkeu RI, 2020. Apa Peran Perpu nomor 1 Tahun 2020 untuk hadapi Covid-19
- Satgas Covid-19 2020. Laporan perkembangan Kasus Covid-19.

<https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-Covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-klh.html?page=4>

<https://covid19.go.id/p/berita/kesembuhan-harian-tembus-angka-4343-kasus>

<https://katadata.com/infografik/2020/04/18/wabah-phk-akibat-Covid-19>

## IMBAS SOSIAL *COVID-19*

**Syamsul Bakhtiar Ass**

### **Pendahuluan**

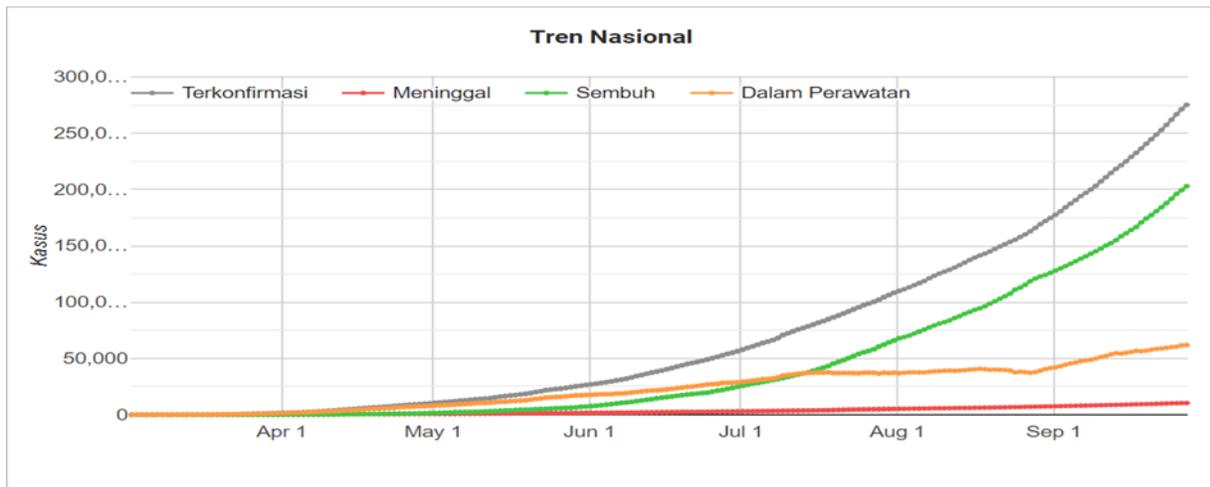
Seluruh dunia termasuk Indonesia telah dibuat panik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ukurannya yang mikrometer sehingga membutuhkan alat bantu mikroskop agar makhluk ini dapat terlihat. Jauh dari nalar manusia bahwa makhluk yang sedemikian kecilnya dapat membuat seluruh dunia menjadi tidak berdaya menghadapinya hingga sampai akhir September 2020 ini. Makhluk tersebut dikenal dengan nama *Covid-19*.

Penyebaran *Covid-19* sangat cepat. Kasus kematian pertama terjadi di Wuhan pada 10 Januari 2020 dengan penyebaran wabah pada bulan Desember 2019, setelah itu menyebar ke Eropa, Amerika, Rusia dan Asia (Tempo.co, 4/7/2020). Jumlah kasus virus corona di dunia pertanggal 25 September 2020 yaitu sebanyak 32.390.000 orang dengan jumlah kasus terbanyak yaitu Amerika Serikat, India, Brasil, Rusia, Kolombia, Peru, Meksiko, Spanyol, Argentina dan Afrika Selatan (Kompas.com, 25/9/2020).

Salah satu penyebab *Covid-19* menyebar dengan cepat ke negara lain yaitu populasi manusia yang sangat besar. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya dengan dukungan sarana prasarana membuat *Covid-19* dapat mewabah dengan cepat. Seperti yang diungkapkan Botkin and Keller (2011), "*Although outbreaks of the well-known traditional epidemic diseases have declined greatly during the past century in industrialized nations, there is now concern that the incidence of pandemics may increase due to several factors. One is that as the human population grows, people live in new habitats, where previously unknown diseases occur. Another is that strains of disease organisms have developed resistance to antibiotics and other modern methods of control*". Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa wabah penyakit epidemik salah satu penyebabnya adalah bertambahnya populasi manusia, orang-orang hidup di habitat baru yang penyakit sebelumnya tidak dikenal muncul.

Adapun data penyebaran *Covid-19* secara nasional mulai bulan April sampai September 2020 diperlihatkan pada grafik pada Gambar 1. Data yang ditampilkan tersebut memperlihatkan proses penyebaran *Covid-19* yang sangat cepat hingga ke pelosok tanah air. Data terakhir yang diperoleh yaitu jumlah yang terkonfirmasi 275.213 orang dengan penambahan 3.874 kasus, dirawat sebanyak 61.813 orang dengan peningkatan sebesar 22,46% dari jumlah terkonfirmasi, meninggal sebanyak 10.386 orang dengan dengan peningkatan sebesar 3,744% dari jumlah terkonfirmasi dan jumlah sembuh sebanyak 203.014 dengan peningkatan sebesar 73,766% dari jumlah terkonfirmasi.

Gambar 1  
Grafik Perkembangan *Covid-19* Nasional



Sumber: Kompas.com, 2020

### **Pencegahan *Covid-19***

Melihat akibat yang ditimbulkan oleh *Covid-19* menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah pencegahan dalam menekan laju penyebaran virus tersebut. Pemerintah Indonesia dalam melakukan penekanan penyebaran *Covid-19* selain mengikuti anjuran World Health Organization (WHO) juga melakukan tindakan khusus sesuai dengan situasi dan kondisi dalam negeri.

Langkah-langkah dalam mengurangi resiko terinfeksi *Covid-19* menurut WHO yaitu:

1. Seringlah mencuci tangan Anda dengan air bersih mengalir dan sabun, atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol.
2. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain.
3. Hindari pergi ke tempat-tempat ramai.
4. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut.
5. Pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda menjalankan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu saat batuk atau bersin, segera buang tisu bekas tersebut.
6. Tetaplah tinggal di rumah dan lakukan isolasi mandiri meskipun hanya memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit kepala, dan demam ringan sampai Anda sembuh.
7. Jika Anda demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segeralah cari pertolongan medis dan tetap memberitahukan kondisi Anda terlebih dahulu.
8. Tetap ikuti informasi terbaru dari sumber terpercaya, seperti WHO, dinas kesehatan daerah, dan kementerian kesehatan.

Selanjutnya langkah yang diambil pemerintah Indonesia sendiri dalam menangani penyebaran *Covid-19* yaitu dengan melakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Pemberlakuan PSBB tersebut berpengaruh besar pada situasi dan kondisi Indonesia bukan hanya pada bidang ekonomi dan politik tetapi juga sosial. Salah satu poin pada pemberlakuan PSBB yaitu adanya *physical distancing* yang memaksa setiap orang agar menjaga jarak sehingga berdampak pada hubungan sosial sesama manusia baik dalam kehidupan sehari-hari juga dalam peribadatan.

### **Imbas Sosial *Covid-19***

#### **1. Pelaku Usaha**

Wabah *Covid-19* berkembang begitu cepat berdampak negatif terhadap aktivitas sosial masyarakat. Warga yang paling terdampak *Covid-19* yaitu warga yang beraktivitas di sektor informal seperti ojek *online*, sopir angkot, pedang kaki lima, pekerja harian, nelayan, industri rumah tangga, catering dan sektor UMKM. Sedangkan pada sektor non UMKM seperti pusat perbelanjaan, supermarket, pusat jajanan makanan dan minuman, pemilik rumah aneka makanan modern, waralaba. Dampak negatif yang dirasakan yaitu pendapatan yang menurun secara drastis karena daya beli masyarakat menurun.

Pembatasan aktivitas warga menyebabkan perekonomian menjadi lesu yang berdampak kepada menurunnya produktivitas dan transaksi jual beli. Berdasarkan pendapat Doorn dalam Rahardjo (2010), pemerintah membuat hukum untuk menata kembali perilaku masyarakat dalam berintegrasi sosial dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*. Mencegah keramaian yang memobilisasi massa antara lain, melarang tradisi pulang kampung, kegiatan keagamaan, pendidikan, transportasi umum, pariwisata, pusat perbelanjaan dan lainnya. Penataan hukum bertujuan mendisiplinkan perilaku masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran wabah *Covid-19*. Dampak di bidang sosial terlihat dengan banyaknya kegiatan untuk sementara ditunda, dilarang, seperti pelaksanaan ibadah yang dilakukan di rumah saja, melarang mengadakan shalat Jum'at, kebaktian di gereja, kegiatan agama seperti majelis taklim, arisan, pesta perkawinan.

#### **2. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Pandemi *Covid-19* saat ini menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat termasuk dampak sosial. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya pencegahan penularan yang terjadi di masyarakat. Penularan *Covid-19* melalui kontak fisik membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan *social distancing* dan karantina menghimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah.

Adanya masa karantina membuat angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak meningkat secara global. Hal ini terjadi karena banyaknya perempuan yang terpaksa melakukan isolasi di rumah dengan pelaku tindak kekerasan. Kartikasari dalam Radhitya dkk (2019) menyatakan masa isolasi mandiri berpengaruh dalam menciptakan adanya konflik di

dalam rumah tangga. Kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan saat ini beragam mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Keadaan terisolasi juga berisiko dimana individu akan mengalami PTSD, depresi, kecemasan, kesehatan mental dan lainnya. Gottman & Declaire dalam Radhitya dkk (2019) menyatakan bahwa pelaku KDRT terbagi menjadi dua yaitu, characterlogical dan situational. Situasi ini dapat menjadi penyebab KDRT di tengah-tengah masa seperti sekarang dikarenakan mengalami stres yang diakibatkan tinggal di rumah terus menerus, stres dikarenakan kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang, dan isu lain.

Selain keadaan terisolasi, kondisi perekonomian dalam keluarga selama masa pandemi ini juga menjadi penyebab dari meningkatnya KDRT. Pandemi *Covid-19* ini membuat karyawan terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan banyaknya pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan saat berada di rumah seperti kegiatan produksi. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan memicu stres dan emosi karena memikirkan biaya hidup sehari-hari. Pria pencari nafkah dapat melampiaskan rasa stres dan emosi serta frustrasi mereka pada wanita dan anaknya dalam bentuk kekerasan. Menurut American Psychological Association dalam Radhitya dkk (2019), mengungkapkan bahwa peningkatan stres yang terjadi di kalangan orang tua berujung pada pelecehan fisik dan menelantarkan anaknya.

### 3. Kekerasan sebagai Reaksi Atas Krisis

Galtung (2007) berpendapat bahwa kekerasan hanya akan terjadi dalam konteks munculnya kebutuhan dasar yang tidak dapat bisa dihindari pemenuhannya. Pemenuhan kebutuhan pokok warga harus menjadi prioritas pemerintah agar terhindar dari protes masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan. Permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan pemantik utama yang mendorong orang untuk protes dan melakukan kekerasan. Gurr dalam Nara dan Satya (2020) menjelaskan melalui konsep *relative deprivation* bahwa masyarakat menganggap mereka memiliki hak-hak dasar yang melekat pada dirinya. Sedangkan secara *de facto*, mereka tidak bisa memenuhi keseluruhan hak-hak tersebut karena dihalangi oleh struktur sosial yang ada dalam dirinya. Kesenjangan yang terjadi antara keduanya, atau ketika “harapan” tidak sesuai dengan “kenyataan”, akan membuka kesempatan bagi munculnya ketidakpuasan serta protes (Gurr dalam Nara dan Satya, 2020).

Terkait kondisi tersebut, Galtung (2007) menawarkan konsep konflik struktural (*structural conflict*) dalam melihat hubungan antara kekerasan dengan kelas sosial dalam masyarakat. Konflik struktural diartikan sebagai situasi pertentangan antara kelas sosial atas yang ingin mempertahankan posisi mereka melawan kelas bawah yang menolak untuk selamanya berada dalam posisi tersebut. Kedua kelas bawah tersebut pada akhirnya akan melihat situasi yang mereka hadapi sebagai sebuah ketidakadilan (*injustice*) sehingga mereka harus berbuat sesuatu untuk mengatasinya.

Kondisi ketidaksetaraan tidak akan otomatis berujung kepada kekerasan. Satu faktor dominan yang berperan besar dalam mendorong ketidakadilan menjadi kekerasan adalah faktor eksklusi dari struktur kekuasaan negara (Galtung dalam Nara dan Satya, 2020). Jika negara tidak mampu memenuhi unsur kebutuhan pokok masyarakat maka akan memicu kekerasan fisik (*direct violence*) sebagai bentuk aktualisasi dari ketidakadilan negara. Dampak lebih buruk akan terjadi jika faktor eksklusi berpadu dengan budaya kekerasan (*cultural violence*) yaitu ketika masyarakat terbiasa memakai kekerasan sebagai solusi atas suatu permasalahan. Ketika pemerintah memperlihatkan gelagat untuk mengistimewakan satu unsur masyarakat dan pada saat yang sama meminggirkan unsur masyarakat yang lain, maka mereka akan dianggap sebagai ancaman. Pemerintah akan dianggap sebagai aktor yang menghalangi pemenuhan kebutuhan dari mereka yang dipinggirkan. Dalam situasi yang paling ekstrim, pemerintah bisa dituduh sebagai alat dari kelas atas untuk mengeksploitasi kelas bawah.

#### 4. Kelompok Anak-Anak

Data anak dalam perawatan *Covid-19* di Indonesia per 15 April 2020 ada sebesar 0,1% dari total pasien positif, meskipun kasus Covid -19 pada anak di Indonesia masih sedikit, namun secara aspek sosial hampir seluruh anak yang berada di Indonesia mengalami dampak langsung dari social distancing yang diterapkan pemerintah. *Covid-19* masih dianggap ringan menginfeksi anak, sejauh ini belum ada kasus yang menyatakan anak menularkan virus. Kasus *Covid-19* pada bayi telah dikonfirmasi terjadi pada bayi baru lahir, namun semua bayi tertular dari ibu yang semuanya juga dinyatakan positif *Covid-19*. Bayi termuda dinyatakan terinfeksi setelah 30 jam pasca kelahiran. Data tentang *Covid-19* pada *neonatus* masih sangat terbatas karena penularan pada *neonatus* masih jarang. Kasus *neonatus* dengan Covid-19 tidak memiliki gejala, gejala sangat ringan sampai sedang mungkin ditemui. Anak dengan fibrosis kistik atau asma berat meningkatkan keparahan jika sudah terpapar *Covid-19*, sehingga anak dengan komorbiditas masuk kedalam kelompok rentan yang perlu pemantauan khusus. Sehingga, dapat dikatakan sejauh ini gejala *Covid-19* pada anak sangat ringan bahkan hampir tidak ada gejala, anak juga bersifat tertular bukan menularkan.

Meskipun anak memiliki risiko lebih rendah dari paparan *Covid-19*, namun ketidakjelasan nasib pada keluarga, akan berdampak besar pada anak. Isolasi membuat anak gagal memahami, bingung dan ketakutan. Fokus tidak hanya pada cara orang tua memperhatikan anaknya lebih dari biasanya, namun anak harus berkompromi dengan ketidakjelasan di sekitar keluarganya. Untuk mengatasi hal tersebut, penting bagi orang tua memuaskan anak dan memberi rasa nyaman. Hal ini dapat dihubungkan dengan teori Sarwono dalam Pradana dkk (2020) yang menjelaskan teori Freud tentang tahap perkembangan psikoseksual anak yang memiliki 5 tahap yaitu oral, anal, phalik, latens, dan genital.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa bayi selama masa pandemi bahkan yang positif *Covid-19* harus tetap diberikan ASI untuk meningkatkan kekebalan tubuh, dimana sebelum menyusui ibu

harus mencuci tangan dan memakai masker saat menyusui. Hal ini sesuai karena pada fase oral, anak disebut juga bayi akan berfokus pada mulut, dengan cara menghisap meskipun tidak lapar, sehingga pada bayi hal terpenting adalah memberinya ASI. Fase phalik terjadi dimana balita berfokus pada ketertarikan orang tua lawan jenis, sedangkan pada fase latens anak akan berfokus pada kecakapan sosial dan intelektual. Fase genital sendiri, remaja mulai tertarik dengan lawan jenis. Pada ketiga fase ini sebaiknya orang tua mulai mengajarkan bagaimana etika batuk, memakai masker, dan mencuci tangan. Pengajaran mencuci tangan pada balita dapat dilakukan oleh orang tua lawan jenis, dengan modifikasi, misalnya mencuci tangan sambil bernyanyi.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengumumkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang salah satu bagiannya adalah tentang penutupan sekolah. Penutupan sekolah dilakukan di Indonesia sejak 3 April 2020 diganti dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sesuai amanat menteri pendidikan. Komunikasi sangat diperlukan sebelum sekolah ditutup menyangkut cara orang tua akan berkomunikasi dengan perwakilan yang berwenang dari sekolah. Efek negatif dari penutupan sekolah juga perlu dipikirkan, orang tua merasa bahwa anaknya memiliki potensi stres, depresi, merasa terisolasi, sekolah harus mampu mencari cara atau program untuk menjaga emosi anak, terutama anak dengan kebutuhan khusus.

Weaver & Wiene dalam Pradana (2020) menyatakan belajar dari rumah memungkinkan anak merasa kebingungan terhadap perubahan, atau cemas terhadap infeksi, bahkan takut apa yang akan terjadi jika anak atau keluarganya positif *Covid-19*. Hal penting yang perlu diperhatikan orang tua adalah mengedepankan kejujuran dan kebenaran. Anak akan selalu mengobservasi keadaan di sekeliling mereka, dan anak akan mulai banyak bertanya sementara mayoritas orang tua tidak yakin apa yang harus dikatakan kepada anaknya. Satu-satunya cara untuk menenangkan mereka dari kecemasan, kebingungan dan salah persepsi adalah dengan menjawab pertanyaannya dengan jujur dan benar. Anak yang terlalu lama tidak masuk sekolah juga dapat mengalami kebosanan, sehingga perlu adanya keseimbangan dalam hal mengerjakan tugas dan bersenang-senang. Memberikan internet salah satu hal yang dibutuhkan anak saat ini, namun perlu adanya pembatasan penggunaan.

Anak yang terpisah dari orangtua akibat terkarantina atau orangtuanya mengalami karantina membutuhkan perhatian khusus, masalah-masalah psikologis cenderung dialami lebih tinggi oleh mereka. China telah mengatur kebijakan bagi anak yang positif, dimana perawat tersedia 24 jam disamping anak, petugas gizi berkala berdiskusi dengan anak terkait pemenuhan gizi, anak juga dipersilahkan melakukan *video call* dengan orang tua kapan pun anak inginkan. Anak yang telah sembuh namun orang tua mereka masih dikarantina maupun anak yang dari awal terpisah dari orang tua, selain dipantau oleh dinas sosial setempat, relawan ibu-ibu sekita tempat tinggal anak juga membantu mengasuh anak.

## 5. Kelompok Ibu Hamil

Kondisi kehamilan menyebabkan penurunan kekebalan parsial karena perubahan fisiologi pada saat kehamilan, sehingga mengakibatkan ibu hamil lebih rentan terhadap infeksi virus. Oleh karena itu, pandemi *Covid-19* sangat mungkin menyebabkan konsekuensi yang serius bagi ibu hamil. Perubahan fisiologis dan imunologis yang terjadi sebagai komponen normal kehamilan dapat memiliki efek sistemik yang meningkatkan risiko komplikasi obstetrik dari infeksi pernapasan pada ibu hamil.

Dalam pandemi, langkah-langkah *social distancing* telah terbukti efektif dalam mengurangi penularan penyakit. Termasuk hal ini juga berlaku pada ibu hamil, agar membatasi diri untuk tidak banyak terpapar dengan lingkungan luar, apalagi melakukan perjalanan ke daerah pandemi. Risiko ibu hamil bisa tertular *Covid-19* salah satunya saat melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan di klinik kebidanan atau rumah sakit. Sehingga ibu hamil harus lebih meningkatkan kewaspadaan dengan terus disiplin dalam penggunaan APD. Ibu hamil bisa membatasi kunjungan ke klinik kebidanan atau rumah sakit dengan melakukan konsultasi via daring, aktif melakukan pengecekan sendiri tanda dan bahaya saat kehamilan, dan hanya melakukan kunjungan saat ditemukan hal-hal yang mengkhawatirkan.

## 6. Kelompok Lansia

Kerangka konseptual atau karakteristik rentan yang terjadi pada lansia terdiri atas 3 konsep, yaitu: ketersediaan sumber daya, faktor risiko, dan status kesehatan. Ketersediaan sumber daya mengacu kepada sumber daya sosial-ekonomi (meliputi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan tempat tinggal) dan lingkungan (akses kepada layanan kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah). Faktor risiko mengacu kepada aksesibilitas individu kepada faktor – faktor yang mempengaruhi diantaranya: gaya hidup dan perilaku sehari-hari (merokok, pola diet, dan sebagainya), penggunaan atau pemanfaatan layanan kesehatan, dan stresor yang muncul. Dalam perjalanan proses penuaan yang dialami oleh lanjut usia, setidaknya terdapat 3 faktor yang terpengaruhi, yaitu fisik, psikologis, dan sosial (Wallace, 2007). Perubahan tersebut akan menyebabkan terjadinya konsekuensi fungsional pada lansia. Konsekuensi fungsional adalah suatu efek yang muncul sebagai akibat dari perubahan fisik, faktor risiko, serta perilaku kesehatan individu atau lanjut usia yang dapat diobservasi serta mempengaruhi kehidupan sehari-hari lanjut usia. Proses penuaan yang dialami lansia menyebabkan kelompok ini menjadi salah satu kelompok yang mengalami efek paling parah akibat *Covid-19*.

Di Indonesia, persentase harian jumlah penderita lansia dalam perawatan mencapai rerata 1,7% dari kasus yang ditemukan, meninggal 0,2%, dan sembuh 0,08%. Angka yang ditemukan ini tentu bukan merupakan angka final mengingat fenomena gunung es yang terjadi di masyarakat (Pradana, 2020). *Social distancing* yang dilakukan saat ini diketahui memiliki efek negatif pada lansia dan dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius karena risiko tinggi

masalah kardiovaskular, autoimun, neurokognitif, dan kesehatan mental yang dapat muncul pada lansia (Gerst dan Jayawardhana, 2015).

Mengisolasi lansia mungkin dapat mengurangi penularan, dimana tujuan utamanya adalah untuk menunda memuncaknya kasus yang ada, dan meminimalkan penyebaran ke kelompok berisiko tinggi. Mengisolasi diri tidak cocok dilakukan lansia yang sangat bergantung pada kontak sosial di luar rumah, seperti layanan *homecare*, komunitas lansia, dan tempat ibadah. Mereka yang tidak memiliki keluarga atau teman dekat, dan bergantung pada dukungan layanan sukarela atau perawatan sosial, dapat mengalami rasa kesepian, terisolasi, atau terpencil. Banyak lansia memiliki kondisi mental dan fisik yang menyedihkan dan seringkali tidak memiliki akses ke pelayanan kesehatan, yang mana dapat mengarah pada masalah potensial. Lansia yang mengalami pemisahan dari dunia luar sering kali tidak diikutsertakan dan dilibatkan dalam pelayanan kesehatan yang dapat diakses maupun dalam memilih layanan kesehatan sesuai keinginannya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari pandemi *Covid-19* akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga merupakan suatu kondisi dinamis dimana terpenuhi semua kebutuhan yaitu fisik materil, mental spiritual serta sosial yang memungkinkan seorang anak untuk tumbuh berkembang dalam membentuk sikap mental serta kepribadian sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan realita yang terjadi dalam kehidupan keluarga yaitu diterapkannya *social distancing* sehingga kebutuhan sosial kurang terpenuhi karena tidak dapat berkomunikasi langsung dengan orang lain sedangkan komunikasi langsung dengan orang lain juga merupakan sebuah kebutuhan sosial terutama di dalam keluarga.

### **Daftar Pustaka**

- Botkin and Keller. 2011. *Environmental Science, Earth as a Living Planet*. Eight Edition. Printed in the United States of America.
- Galtung. 2007. Will frustration always lead to aggression, violence? In a deep conflict, with basic needs as irrepressible goals, aggression is likely.”
- Gottman, J., & Declaire, J. (1998). *Raising an Emotionally Intelligent Child The Heart of Parenting*. New York: Simon & Schuster Paperback.
- Gerst-Emerson K, Jayawardhana J. 2015. Loneliness as a public health issue: the impact of loneliness on health care utilization among older adults. *Am J Public Heal*. 2015;105(5) (1013):9.
- <https://tirto.id/eMXT>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/25/083400465/update-virus-corona-di-dunia-25-september-323-juta-kasus-google-maps-akan?page=all>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/02/073000465/perjalanan-kasus-virus-corona-di-indonesia-?page=all>.

<https://dunia.tempo.co/read/1361179/virus-corona-di-dunia-tembus-11-juta-kasus/full&view=ok>

<https://www.kompas.com/Covid-19>.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>

Nara, Putu Agung dan Satya, Indra Prima. 2020. Covid- 19 dan Potensi Konflik Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, naraindra.prima@unpar.ac.id

Pradana, Anung Ahadi., Casman., Nur'aini. 2020. Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah Covid-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI. Volume 09 No. 02 Juni 2020.

Radhitya, Theresia Vania., Nurwati, Nunung., Irfan, Maulana. 2019. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Volume 2 Nomor 2 ISSN 2656-1786

Rahardjo, Satjipto. 2010. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta. Kompas.

Wallace M. 2007. Essentials of Gerontological Nursing 1st Edition. 1st Editio. Springer Publishing Company.

# Tentang Penulis



**Harry Yulianto, SE, M.Si.**, lahir di Sumenep, 4 Juli 1977, Pendidikan: Jurusan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (1996-2001), Jurusan Manajemen, Program Magister Sains, Universitas Gadjah Mada (2002-2004), Mahasiswa Konsentrasi Manajemen, Program Doktor Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2020-sekarang). Pekerjaan sebagai: Tenaga Ahli Departemen Perhubungan (2010), Tenaga Ahli BAWASLU (2011-2012), Tenaga Ahli Kementerian KUKM (2013-2014), Tenaga Ahli DPR RI (2014-2017), Tenaga Ahli Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2018-2019), Dosen Tetap Yayasan STIE YPUP Makassar (2015-sekarang), Tenaga Ahli Kementerian Ketenagakerjaan (2018-sekarang), dan Dewan Riset Daerah Kabupaten Bojonegoro (2019-sekarang).



**Sawidji Widoatmodjo** adalah CEO dan founder ECBIS Rescons (Economic-Business Research & Consulting Service), sebuah perusahaan konsultan bisnis. Selama ini menggeluti profesi sebagai wartawan, periset dan dosen. Pengalaman risetnya diperoleh ketika menjadi Junior Researcher di Center for Policy Studies (CPS), lembaga kajian ekonomi pimpinan Prof. Sumitro Djojohadikusumo, setelah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada tahun 1987. Pengalaman wartawan dimulai dari reporter harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta. Kemudian menjadi Redaktur Bisnis Majalah Warta Ekonomi dari tahun 1989 hingga 1991. Karir wartawan diakhiri sebagai Pemimpin Redaksi Majalah Pilarbisnis tahun 2004. Profesi dosen dijalani dengan mengajar di Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara, dari tahun 1991 hingga sekarang. Saat ini dia sedang menempuh program doktor di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.



**Saor Silitonga**, lahir di Sipahutar pada tanggal 29 September 1969 menempuh pendidikan SD di Kecamatan Sipahutar (Tapanuli Utara, Sumatera Utara) dan melanjutkan pendidikana di SMP GKPI Padang Bulan Medan, SMA Negeri 1 Medan, dan Strata 1 Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sumatera Utara. Sejak 1997 bekerja di Kementerian Keuangan R.I. hingga saat ini menjabat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar. Pendidikan S1 Ilmu Hukum dan S2 Manajemen Keuangan Daerah di Universitas Khairun. Tulisan artikel opini di berbagai media cetak bertajuk Keuangan Negara kerap terbit sebagai bentuk tanggung jawab literasi kepada Kementerian Keuangan R.I. dan

upaya pencerahan kepada masyarakat. Upaya menempuh pendidikan Strata 3 di Sekolah Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sejak tahun 2018.



**Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA.**, lahir di Makassar pada tanggal 16 Mei 1963. Dosen pada FEB-UNHAS. Pendidikan S1 FE-UNHAS, S2 pada Griffith University, Queensland, Australia dan S3 pada Universitas Hasanuddin. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Studi Pembangunan FEB-UNHAS, Ketua Prodi S2 Ekonomi Sumber Daya FEB-UNHAS, dan sekarang sebagai Ketua Prodi S3 Doktor Ilmu Ekonomi FEB-UNHAS. Selain sebagai dosen, juga sebagai staf ahli pada beberapa pemda, Reviewer pada beberapa jurnal, dan konsultan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Mendirikan Lembaga AIA Manajemen & Training. Aktif diberbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan seperti: Pramuka, ISEI, APDMI, ISSI, dll. Menerima beberapa penghargaan, antara lain: Dosen Berdedikasi Terbaik Universitas Hasanuddin 1997, Penghargaan atas Kontribusi Dalam Pembangunan Sulsel Tahun 2008 – 2018, Celebes People Award 2018 atas dedikasi sebagai Tokoh Referensi, dan Penghargaan Bintang Dharma Bhakti Utama Gerakan Pramuka 2019.



**Nur Imam Saifuloh.** Lahir di Banjarnegara, 20 Juli 1994. Merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Ratono dan Ibu Sarimpen. Studi S1 ditempuh di IAIN Purwokerto dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah. Merasa belum cukup dengan ilmu yang didapatkan akhirnya memilih melanjutkan S2 di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan mengambil konsentrasi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Pada tahun 2020 mendapatkan beasiswa LPDP jalur afirmasi santri dan akhirnya melanjutkan doktoralnya di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini sedang fokus pada studinya.



**Dr. Syaiful, SE., M.Si.**, lahir di Sumatra Barat, Padang, 23 Desember 1965, Pendidikan S1 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (1993) Jakarta, melanjutkan program magister Pasca Sarjana (S2) jurusan Magister Perkotaan Universitas Hassanuddin (2002) dan menyelesaikan program S3 Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Hassanuddin (2013) di Makassar. Menjadi karyawan salah satu perusahaan Telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan penugasan banyak di daerah Kawasan Timur Indonesia. Saat ini bertugas di Jakarta pada Divisi Business Service, yang mengelola customer UMKM. Dibidang Pendidikan, saat ini diberi tanggung jawab saat ini sebagai KaProdi S2 MM STIE Swadaya Jakarta Timur.



**Arni Karina**, lahir di Jakarta, 18 April 1977, menyelesaikan Pendidikan Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Prodi Akuntansi pada tahun 2000. Pengalaman bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP),

kemudian pada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Setelah itu di PT Asuransi Tripakarta (anak perusahaan BNI). Kemudian bekerja sebagai dosen tetap di FEB Universitas Nasional Prodi Akuntansi, serta menjadi dosen tidak tetap di beberapa kampus di Jakarta. Pendidikan Magister Sains Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan tahun 2009 di Universitas Nasional. Penulis juga menjadi tim pengajar Sertifikasi Wakil Manajemen Investasi (WMI) yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, juga aktif sebagai Konsultan Manajemen Keuangan di beberapa Rumah Sakit Bhayangkara Polri di Indonesia. Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi di Universitas Hasanuddin, Makassar. Sekarang sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi FEB Universitas Nasional, Jakarta.



**Dr. Dian Anggriani Utina, SE., MM.**, Tempat dan tanggal lahir di Makassar, 21 Mei 1968. Pendidikan 2014: Universitas Hasanuddin, Doktor Ilmu Ekonomi, Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, 2001: Universitas Hasanuddin, Magister Manajemen, Konsentrasi Manajemen Keuangan, 1992: Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Bekerja di Bank Sulselbar sejak tahun 1995 sampai sekarang sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko. Riwayat Pelatihan antara lain: Kursus Business Plan, IBI, Makassar, 2002. Developing Effective Coaching & Counseling Skills, HRDI, Makassar, 2001. Penyusunan Corporate Plan, BPD Sulsel & BKS-BPDSI, Makassar, 1998. Riwayat Sertifikasi Manajemen Risiko: Sertifikasi Manajemen Risiko Level I, BSMR, Makassar, November, 2006. Tulisan antara lain: Urgensi Transformasi dan Strategi Bank Sulselbar Memenangkan Persaingan, Januari 2017. Transformasi BPD dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Digital, April 2018, dan Perbankan di Tengah Disrupsi Teknologi dan Pandemic Covid, September 2020.



**Dr. N. Ikawidjaja, MM.** Saat ini penulis aktif mengajar pada Institut Bisnis dan Keuangan (IBK) Nitro dan Program Pasca Sarjana IBK Nitro di Makassar. Memperoleh Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2016. Memperoleh Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, 2001. Memperoleh Sarjana Fakultas MIPA Universitas Pakuan Bogor, 1987. Menyelesaikan Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Utama (Certified Risk Professional, CRP) BNSP, 2016. Penulis pernah bekerja sebagai Konsultan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Bank Indonesia Makassar (1995-2008), Komisaris Independen Bank Sulselbar Makassar (2008-2016), dan Direktur Kepatuhan Bank Sulteng (2016-2019).



**Muhani**, lahir pada 06 Juni 1989 di Jakarta. Melanjutkan kuliah di Universitas Nasional, di Jakarta dengan mengambil program studi Akuntansi dan Lulus pada Februari 2011. Mulai bekerja pada Maret 2011 sebagai sekretaris Area Manager Falatehan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada Februari 2012 juga dinyatakan lulus sertifikasi pajak brevet AB. Kemudian pada Agustus 2012 bekerja di PT Istana Kebayoran Raya Motor sebagai Accountant, dan pada 2015 menjadi Auditor Internal sampai 2020. Pada 2016 juga telah menerima sertifikat sebagai internal Auditor ISO 9001:2015. S2 di universitas nasional pada 2013 dengan mengambil program studi Manajemen, dan lulus pada Februari 2015. Setelah lulus S2 mulai mengajar di Universitas Nasional. Sekarang ini sedang melanjutkan kuliah S3 di Universitas Hasanuddin, Makassar dengan mengambil program studi Ilmu Ekonomi dengan mendapat beasiswa dari Universitas Nasional. Pada tahun 2020 diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional.



**Mustakim, SE., M.Si.**, Lahir dan besar di Kota Makassar. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin, Mustakim kemudian melanjutkan pendidikan Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntan di Jurusan dan Universitas yang sama. Selain melanjutkan pendidikan, diwaktu yang sama juga sempat bekerja menjadi staff auditor di salah satu Kantor Akuntan Publik di Kota Makassar. Setelah menyelesaikan Pendidikan Mustakim di terima sebagai Staff Pengajar di Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selain menjadi pengajar, Mustakim pernah menjadi Sekretaris Satuan Pemeriksa Internal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada tahun 2018 Melanjutkan pendidikan Doktor di Universitas Hasanuddin Program Studi Ilmu Ekonomi.



**Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H.**, adalah Dosen STIE Perbanas Surabaya dengan Jabatan sekarang sebagai Sekretaris Program Studi Magister Manajemen STIE Perbanas Surabaya. Pendidikan: Sarjana S1 Jurusan Manajemen Informatika STMIK DIPANEGARA, lulus tahun 1999 Sarjana S2 Jurusan Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2003 Sarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus, lulus tahun 2007 Sarjana S3 Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, lulus tahun 2010 Organisasi: Ketua bidang Pengembangan Bisnis Organisasi Insan Doktor Ekonomi Indonesia dan Anggota Forum Manajemen Indonesia (FMI).



**Andry, SE., M.Si.**, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 25 Juli 1985. Menyelesaikan studi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin di tahun 2008, Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin di tahun 2014, dan Program Studi Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin di tahun 2015. Tahun 2018, melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.



**Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA.**, lahir di Bantaeng dan besar di Kota Makassar. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada School of Economics, University of The Philippines dan memperoleh gelar Master of Arts (M.A.). Setelah menyelesaikan pendidikan S2, Indraswati di terima sebagai Staff Pengajar di Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar. Pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan Doktoral di Universitas Hasanuddin Program Studi Ilmu Ekonomi. Selain menjadi pengajar, Indraswati pernah menjadi Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2011. Dan sejak tahun 2019 menjadi Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.



**Dr. Riza Praditha** lahir di Makassar tanggal 10 Januari 1990. Setelah menamatkan pendidikan S1 di jurusan Akuntansi STIE Tri Dharma Nusantara pada tahun 2011 dan menyelesaikan program magister pascasarjana Universitas Muslim Indonesia di tahun 2014, kemudian melanjutkan studi pada program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin dan berhasil meraih gelar doktor di tahun 2020 dengan bidang kajian Akuntansi Keuangan dan Keperilakuan, serta memiliki beberapa sertifikasi profesi akuntansi lingkungan dan sustainability. Saat ini bergabung pada Program Studi Akuntansi STIE Tri Dharma Nusantara sebagai dosen tetap yayasan. Selain mengajar, Aktif sebagai peneliti yang telah melakukan berbagai penelitian di bidang akuntansi yang telah terpublikasi pada beberapa jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang terindex scopus. Praditha juga menjadi editor pada jurnal Tangible dan jurnal Sentralisasi yang telah terakreditasi nasional SINTA.



**Dipa Teruna Awaloedin**, Putra Minang Kelahiran Bangko Propinsi Jambi, 15 Oktober 1957, Setelah Menamatkan SLTA di Padang Sumatera Barat tahun 1976, Bekerja di PT Sinkronika Jakarta, 1977-1979, Kemudian Kuliah Teknik UPN Veteran Jakarta 1979-1983, Lanjut Ke Sekolah Tinggi Manajemen Industri Departemen Perindustrian RI 1983-1989, kemudian mengambil MM Keuangan STIE IPWI 1996-1998, dan Lanjut ke FEB Akuntansi UMJ Jakarta 2005-2008 kemudian mengambil Magister Akuntansi Universitas Budi Luhur 2008-2009, dan lanjut mengambil Profesi Akuntan di Universitas Mercu Buana 2009-2010, Dengan Register Negara, dan saat ini mengikuti Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin. Pada saat terjadi KNOP 78 membuat pindah bekerja di Awal 1979 ke Penerbitan dan Percetakan sebagai admin dan editor, Penerbit Ikhwan Jakarta tahun 1979-1986, di Akhir 1986 pindah bekerja ke Industri Perkajuan Terpadu Kelompok Kiani/Kalimanis tahun 1986-2002 di Samarinda Kalimantan Timur, Batu Ampar, Batu Redi dan Muara Lawa. Kegiatan mengajar di mulai tahun 1997 dan bergabung di Universitas Nasional tahun 2003 sampai sekarang.



**Tri Waluyo**, kelahiran Ngawi, 31 Desember 1960. Pengalaman mengajar dari tahun 1986 sampai sekarang. Pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik (1987-1989. 1993-1998) dan sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nasional Jakarta tahun 1998 sampai 2011. Aktif sebagai peneliti terutama pada bidang Sosial Ekonomi Pertanian atau Agribisnis. Jabatan terakhir sebagai Kepala Biro Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nasional Jakarta 2011 sampai sekarang. Alumni Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta 1985 dan Program Studi Horticulture on Faculty of Agriculture University of The Ryukyus, Japan 1993.



**Dr. Hapsawati Taan, S.T., M.M.** Lahir Kabere, 1 Pebruari 1976. Dosen pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia Makassar, S2 pada Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan S3 pada Universitas Hasanuddin Makassar Bidang Ilmu Manajemen Pemasaran. Pengalaman Penelitian antara lain: Pengembangan Model Penguatan Etos Kewirausahaan Pemuda Untuk Mendorong Pertumbuhan Lapangan Kerja Di Provinsi Gorontalo. Pengalaman Penulisan Ilmiah Dalam Jurnal antar lain: A Conceptual Framework in the Formation of Young Entrepreneurs in Indonesia, Design and Manage Integrated Marketing Communication, and The Service Quality of Population Document to Improve Community Satisfaction Index.



**Johannes Baptista Halik, SE, MM.** Lahir di Makassar, 3 Desember 1984. Riwayat Pendidikan Penulis, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar Program Studi Magister Manajemen tahun 2015 sampai 2017. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen tahun 2002 sampai 2007. Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor (S3) di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin. Pekerjaan sekarang adalah Dosen Tetap di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Mata kuliah yang diampu, antara lain: Manajemen Pemasaran, Digital Commerce, Pengantar Ekonomi, Teori Ekonomi dan Perekonomian Indonesia.



**Dr. Murtiadi Awaluddin, S.E., M.Si.,** lahir di Ujungpandang, 27 Desember 1976. Pekerjaan sebagai dosen tetap pada Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Gelar sarjana Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin 1999 konsentrasi manajemen keuangan, kemudian memperoleh gelar Magister of Science konsentrasi Manajemen Keuangan pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 2003, pernah mengikuti kegiatan sandwich program pada University of The Philipina Diliman 2008 dan 2009. Gelar Doktor kemudian diperoleh pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini penulis dipercayakan sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Alauddin Makassar periode 2019 – 2023, setelah sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Satuan pengawasan internal dan sekretaris Dewan Pengawas BLU UIN Alauddin Makassar, juga berperan aktif sebagai pemateri pada seminar nasional dan internasional, aktif menulis buku ajar maupun buku referensi serta riset kerjasama baik pemerintah daerah maupun perguruan tinggi di Indonesia.



**Muh. Akil Rahman.** Kelahiran Polmas, 12 Maret 1977 menyelesaikan S1 di Fak. Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Hasanuddian tahun 2000. S2 di Program Studi Manajemen Keuangan konsentrasi Pemasaran di Universitas Hasanuddin tahun 2006, dan sekarang sementara melanjutkan studi S3 di Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Unhas. Aktivitas keseharian mengabdikan di Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Jurusan Manajemen sebagai dosen. Selain sebagai dosen, juga aktif di beberapa kerja-kerja sosial diantaranya sebagai Peneliti di LSM Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia. Buku dan tulisan di jurnal yang telah dihasilkan diantaranya, Hak Dasar yang Terabaikan, studi kasus pelayanan publik di Sulawesi, Mengapa Puas? (Studi Kualitas Pelayanan Publik di Kota Parepare Prov. Sulsel, Kota Kupang Prov. NTT dan Kab. Bantul Prov. DI Yogyakarta), Bauran Pemasaran Jasa di Industri Kesehatan, Anomali Keuangan Partai Politik, Modul Survei Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM), Modul ujian komprehensif-Dasar-Dasar Manajemen. Selain sebagai penulis, juga menjadi beberapa editor

pada beberapa buku baik yang berkaitan dengan pengembangan buku bahan ajar juga buku pengabdian pada masyarakat.



**Mukhtar Galib, S.Sos., MM.**, lahir di Mangempang Kabupaten Barru, 31 Desember 1968, Lulus Sekolah Dasar Islam Watansoppeng Tahun 1981, lalu SMP Islam Yasrib Watansoppeng tahun 1984. Serta menamatkan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN-1) Watansoppeng tahun 1987. Menyelesaikan pendidikan (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tahun 1994. Setamat S1, melanjutkan berkarir di Perusahaan swasta Bosowa Corporation selama 20 Tahun. Dalam rentang bekerja di Bosowa Corporation. Menyelesaikan Kuliah pada Magister Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin tahun 2006. Pada Tahun 2019 melanjutkan ke jenjang Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin sampai sekarang. Saat ini menjadi staf pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya Makassar.



**Dr. William Louhenapessy**, dilahirkan di Bogor 1974. Lulus Sekolah Dasar Negeri 2 Rumah Tiga, Ambon tahun 1987 dan Sekolah Menengah Pertama Katolik Kanisius, Yogyakarta tahun 1990 serta menamatkan Sekolah Menengah Atas Budya Wacana, Yogyakarta tahun 1994. Menamatkan kuliah pada Akademi Industri Pariwisata, Bandung pada tahun 1997. Pada tahun 2006, lulus pada Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado dan menamatkan Magister Sain pada tahun 2010 di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Pattimura, Ambon kemudian menyelesaikan Program Doktor pada tahun 2018 di Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Makassar. Saat ini, menjadi staf pengajar pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Ambon.



**Dr. Dra. Andi Heny Mulawati Nurdin, SE., M.Si.**, lahir di Surabaya pada tanggal 14 Mei 1964. RIWAYAT PEKERJAAN: 1. Pemandu Wisata (Guide) Tahun 1984-1986, 2. Penerjemah Free Lance Tahun 1990- 1992, 3. PNS Tahun 1995 – 2013, 4. Staf Pengajar di STIA Prima Tahun 2010-2013, 5. Staf Pengajar di IPDN Kampus Sulut Th. 2013 – 2015, 6. Staf Pengajar di IPDN 2015 sampai sekarang. Pengalaman jabatan: 1. Kaur Penyusunan Rencana Bappeda Kabupaten Bone, Tahun 1995, 2. Kasubid Koperasi, UKM & Pengembangan Dunia Usaha, Bappeda Bone, 2001, 3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Statistik Kab.Bone, 2008, 4. Camat Tanete Riattang Timur 2012 – 2013, 5. Dosen IPDN Kampus Sulut 2013, 6. Sekretaris Program Studi S1 Manajemen Pemerintahan, Kampus IPDN Jakarta Tahun 2015 – 2018, dan 7. Ketua Program Studi S1 Manajemen Pemerintahan IPDN Tahun 2019 sampai sekarang.



**Dr. Irawan, SE., M.Si.**, dosen pada Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB-Universitas Palangka R. Menempuh pendidikan S1, S2 dan S3 di Universitas Hasanuddin Makassar. Mengawali karier sebagai Dosen di FEB-UPR sejak tahun 1998, Pernah mengikuti Magang Dosen di PAU-EK-UI mata kuliah Ekonomi Regional pada periode Juli 1990 s/d Pebruari 1991, Pemegang sertifikat Kursus Amdal A, B, C dan Amdal Kawasan. Selain mengajar di FEB-UPR, juga mengajar di program Magister, juga pada Program S3 Ilmu Lingkungan (Valuasi Lingkungan dan Analisis Kebijakan. Jabatan tambahan yang pernah diemban: 1. Ketua program Studi Magister Ilmu Ekonomi PPs-UPR tahun 2015-2018, 2. Sekretaris LP3MP tahun 2018-2019. Jabatan profesi tambahan adalah: 1. Sebagai Regional Economic (FEKK) wilayah Kalimantan Tengah, 2. Ketua Komisi I (Bidang. Ekonomi) Dewan Riset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 3. Ketua Tim Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) Kalimantan Tengah mitra Bappenas. Pengalaman sebagai presenter pada Seminar/Lokakarya/Simposium.



**Syamsul Bakhtiar Ass, S.E., M.M.** Lahir di Maros, 8 Oktober 1985. Riwayat pendidikan penulis yaitu menempuh pendidikan jenjang Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Perguruan Islam Maros tahun 2006 s/d 2010. Menempuh pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 2013 s/d 2016. Penulis saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor (S3) pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin. Penulis merupakan Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran jenjang Diploma Tiga (D3) pada FEB UMMA. Tugas keseharian lain yang diemban yaitu sebagai pimpinan redaksi dari jurnal brand pada Program Studi Manajemen Pemasaran Diploma Tiga (D3) FEB UMMA. Penulis turut serta aktif dalam melakukan penelitian dan publikasi jurnal ilmiah baik skala nasional maupun internasional.